



2018

PENGUKURAN DAMPAK INOVASI



KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA





PENGUKURAN DAMPAK INOVASI

Pengarah : Dr. Adi Suryanto, M.Si

**Penanggungjawab : Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo,
S.H., M.A**

Editor: Suropto & Riyadi

ISBN: - - -

Cetakan Pertama, Desember 2018

Penulis:

Tim Penulis INTAN, Tim Penulis PIPEL, dan Tim
Penulis PIKSA

Hak Cipta @2018

Kedeputian Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara (DIAN – LAN)

Diterbitkan dan dipublikasikan oleh: DIAN – LAN

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax: 021 386

8201-05 ext 149-151 www.inovasi.lan.go.id

@ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

SAMBUTAN


KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Ditengah hiruk pikuk revolusi 4.0, tantangan terhadap perubahan terlihat menggejala diberbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Melakukan perubahan saat ini merupakan suatu kebutuhan utama di tengah pesatnya perkembangan arus teknologi dan informasi yang telah mengubah segmen perilaku dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga sejatinya, situasi yang berkembang tersebut harus dijawab dengan sejumlah langkah strategis bernama inovasi. Suatu langkah yang dapat memberikan akselerasi pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Inovasi merupakan suatu formula baru yang sangat tepat guna melakukan lompatan kedepan ditengah ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. Tidak melakukan inovasi sama saja membenamkan diri dalam keterpurukan yang dapat berdampak pada memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dari hasil pengamatan, tentu saat ini arus inovasi semakin kencang berhembus, layaknya arus sungai yang mengalir deras hingga memaksa semua orang terus bergerak, berkarya dan melakukan terobosan-terobosan kreatif. Produk inovasi pun semakin banyak terlihat, namun tentu itu semua harus diimbangi dengan proses evaluasi yang berkelanjutan. Sesuatu yang dapat digunakan untuk menilai apakah inovasi yang ada masih layak untuk diteruskan atau justru harus segera diperbaharui, dikembangkan ataupun ditingkatkan karena belum memberikan dampak dan kontribusi terhadap masyarakat.

Buku Pengukuran Dampak Inovasi yang merupakan produk ke deputian Inovasi Administrasi Negara layak dijadikan sebagai salah satu referensi bagi stakeholder yang berkecimpung dalam pengembangan inovasi. Terkhusus bagi mereka yang secara spesifik ingin melakukan kajian berupa pengukuran dampak inovasi yang telah ada. Kelayakan ini tentu bukan tanpa alasan, karena dalam buku mengulas secara detail bagaimana dampak dari suatu inovasi yang



di gagas di tujuh lokus pemerintah daerah, sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan cara pandang kita semua dalam melihat fenomena perkembangan inovasi di daerah.

Semoga dengan hadirnya buku Pengukuran Dampak Inovasi dapat membuka cakrawala berfikir kita semua untuk terus mengembangkan pokok-pokok kajian inovasi yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan inovasi kedepannya dan kelak inovasi dapat menjadi budaya dalam setiap elemen bangsa Indonesia. Terima Kasih, SALAM INOVASI

Jakarta, November 2018

Dr. Adi Suryanto, M.Si

SAMBUTAN


DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

Angin segar inovasi kian berhembus ke pelukan ibu pertiwi. Inovasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menjelma layaknya virus yang menjangkiti semangat para inovator baik di sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat. Ini tentu menjadi sinyal positif yang menandakan bahwa kemauan berinovasi (*willingness to innovate*) dan kemampuan berinovasi (*ability to innovate*) secara perlahan telah mengakar pada segenap insan pembaharu di birokrasi pemerintahan.

Semakin meningkatnya semangat berinovasi tentu tidak terlepas dari komitmen pemerintah di tengah arus perkembangan global yang penuh dengan ketidakpastian. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pemerintah meyakini bahwa inovasi dapat menjadi salah satu solusi melakukan lompatan-lompatan guna melakukan percepatan pembangunan yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, wujud semangat berinovasi juga terbukti dengan berbagai produk inovasi yang bertebaran di seluruh penjuru pelosok tanah air. Sebut saja inovasi yang lahir dari laboratorium inovasi, sinovik, proyek perubahan diklatpim yang keseleruhan jumlahnya telah mencapai 97.938 inovasi. Belum lagi inovasi yang lahir dari inisiatif inovasi daerah sendiri yang saat ini terus menerus bermunculan dan menambah capaian angka fantastis tersebut. Sebuah fenomena yang semakin menegaskan bahwa bangsa kita mempunyai segudang potensi para inovator yang dapat memainkan peran penting sebagai pengungkit daya saing nasional.

Pencapaian nan cemerlang tersebut tentu tidak berhenti begitu saja, namun harus dijawab dengan suatu langkah progresif yang dapat memastikan bahwa inovasi yang telah digagas telah benar-benar memberikan dampak pada stakeholder tertentu. Sehingga inovasi-inovasi yang ada nantinya dapat terus berkembang dan berkelanjutan guna memenuhi tuntutan kebutuhan



masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, buku Pengukuran Dampak Inovasi dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menemukan formula yang tepat dalam melakukan pengukuran dampak inovasi.

Buku Pengukuran Dampak Inovasi menarik untuk dibaca karena merupakan satu-satunya buku yang mengulas dan mengkaji pengukuran dampak Inovasi untuk konteks Indonesia melalui studi lapangan secara langsung, hingga menggambarkan situasi nyata dari keberadaan inovasi apakah telah memberikan dampak atau tidak.

Dalam buku ini pula secara perlahan telah membangun sebuah instrumen yang sifatnya mikro terhadap dampak suatu inovasi dalam 7 lokus pemerintah daerah, yakni Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Muara Enim. Setiap lokus punya kekhasan tersendiri, punya permasalahan dan solusi masing-masing yang dijawab dengan program inovasi.

Sebagai buku deskriptif – eksploratif tentunya masih banyak hal yang perlu disempurnakan di masa yang akan datang. “Tidak ada jalan yang tidak berlubang, begitu halnya dengan tulisan ini yang tentu masih banyak yang perlu ditutupi sehingga menjadi lebih baik. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk pengembangan inovasi kita bersama.

Terima kasih, SALAM INOVASI HARGA MATI!

Jakarta, November 2018

Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT INOVASI TATA PEMERINTAHAN


Segala puja dan puji bagi Allah SWT sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Buku Kajian Pengukuran Dampak Inovasi.

Buku Pengukuran Dampak Inovasi berbeda dengan seri buku inovasi sebelumnya karena dalam buku ini secara khusus menyajikan dengan rinci dampak dari pelaksanaan suatu inovasi. Dimana untuk setiap pengukuran yang dilakukan akan melahirkan instrumen pengukuran yang dapat digunakan oleh para stakeholder kebijakan untuk melakukan pengukuran dampak inovasi secara mandiri.

Dalam buku ini, pengukuran dampak inovasi dilakukan terhadap tujuh lokus pemerintah daerah yang memiliki sejumlah terobosan inovasi. Adapun pengukuran dilakukan untuk melihat sejauh mana inovasi telah berkontribusi pada peningkatan sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, buku ini tentunya sangat berguna bagi para pemerhati inovasi dan reformasi birokrasi seperti kementerian, lembaga pusat dan pemerintah daerah, akademisi, peneliti lepas, hingga LSM agar lebih mudah untuk memahami perkembangan kajian inovasi sektor publik.

Taka da gading yang tak retak. Begitu pula dengan buku Pengukuran Dampak Inovasi, dengan segala keterbatasannya, yang tentu masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Namun, kami yakin seribu kilometer tidak akan pernah ada tanpa dimulai dengan langkah pertama. Melalui buku ini, kami memulai untuk melakukan suatu langkah perubahan dan tentu kami sangat terbuka untuk segala kritikan dan masukan untuk penyempurnaan dikemudian hari.



Semoga apa yang telah kami selesaikan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan ekosistem inovasi di sektor publik hingga terwujudnya penyelenggaraan inovasi yang berkesinambungan, memberikan dampak terhadap masyarakat luas, dan meningkatkan daya saing bangsa. Amin ya Robbal Alamin.

Jakarta, November 2018

Drs. Riyadi, M.Si

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.....	i
SAMBUTAN DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA	iv
KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT INOVASI TATA PEMERINTAHAN...vi	
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BOX.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM.....	xvii
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	2
Tujuan Penelitian	3
Manfaat Penelitian	3
Ruang Lingkup Penelitian.....	3
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
Evaluasi Dampak	6
Pengukuran Dampak Inovasi Sektor Publik.....	11
Kerangka Pikir	16
Operasionalisasi Konsep	19
METODOLOGI	22
Pendekatan Penelitian	22
Teknik Pengumpulan Data	22
Instrumen Pengukuran.....	24

Kriteria Penentuan Sampling	24
Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	25
Pelaksanaan Kegiatan.....	28
ANALISA HASIL PENELITIAN	30
<i>Analisa Before After Comparison</i>	30
Inovasi Pelayanan Publik	30
1) Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis.....	30
2) Inovasi LASKAR (Layanan Satu Hari Kelar) Kota Samarinda	33
3) Inovasi Sjahrie Jaang Kota Samarinda	36
4) Inovasi <i>Sunday Service Morning</i> Kota Samarinda	39
5) SIKDA (Sistem Infomasi Kesehatan Daerah) Kota Samarinda	41
6) Layanan Perizinan Secara Online Dan Layanan Izin 3 Jam (SIPERI) Kabupaten Kebumen	44
7) <i>Home Care</i> Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohammad Rabain Kabupaten Muara Enim.....	48
8) Inovasi ALUR CERITA (Alat Ukur Cerdas Ibu, Bayi dan Balita) Kabupaten Ciamis.....	52
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	55
1) SICEPOY (Sidang Cepat Operasi Yustisi) Satpol PP Kota Pontianak..	55
2) Inovasi SP2D On Line (Surat Perintah Pencairan Dana On Line) Kabupaten Purbalingga	59
Inovasi Lainnya (Pemberdayaan)	62
1) 15 Menit Rindu Membaca Kabupaten Ciamis	62
2) Wisata Buku Sahabat Anak Kabupaten Ciamis.....	67
3) Kampung Sidat Kabupaten Kebumen.....	71
<i>Analisa Post Intervention Project Group</i>.....	76
Inovasi Pelayanan Publik	76
1) Layanan Kartu Kuning di Kecamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.....	76
2) BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar) Kota Pontianak	83
3) Inovasi SIDOMAS (Sistem Dokumentasi Masyarakat) Kabupaten Purbalingga.....	92

4) Inovasi Pendaftaran Online RSUD Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga.....	97
5) Inovasi 3C (Ciamis Child Complain) Kabupaten Ciamis.....	101
6) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Digital Visual Arus Lalu Lintas Persimpangan Kota Samarinda	106
7) Inovasi SISPATI (Sistem Pelayanan Pajak Terintegrasi) Kota Samarinda	109
8) Inovasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas (SIM HP) Kabupaten Purbalingga	111
9) Keluar Bersama, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta.....	113
10) Penerangan Jalan Umum Hemat Energi Di Tingkat RT-RW (PJU LINGKUNGAN) Kota Yogyakarta	122
11) Yogyakarta <i>Emergency Service</i> (YES 118), Kota Yogyakarta	130
12) Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta .	136
13) Klinik Layanan Perizinan (KLIPPER) Kota Yogyakarta	142
14) JAMILA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	146
15) Bank Buku Yogyakarta (BABY) Kota Yogyakarta	150
16) Taman Masyarakat Sambung Rasa (TAMARA) Kota Yogyakarta .	153
17) Inovasi Klik <i>E-Resep</i> RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.....	157
18) Inovasi Pankreasi (Parkir Aman, Nyaman Tempat Kreasi) PD. Owabong Kabupaten Purbalingga	162
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	167
1) Inovasi CHIPS (Cegah Kumuh Melalui Penertiban Subuh) Kota Pontianak.....	167
2) Kenaikan Pangkat Online Kota Samarinda.....	174
3) SIPATUH YANLIK (Sistem Kepatuhan Pelayanan Publik) Kota Samarinda	177
4) Sistem Penjaringan Aparatur Desa (SIMPAPDES) Kabupaten Muara Enim.....	179
5) Pengelolaan Dana CSR Dengan Pola Musrenbang Kabupaten Muara Enim.....	184
6) SIPPohon (Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan Pohon) Kota Pontianak.....	194

Inovasi Lainnya (Pemberdayaan)	197
1) Pengelolaan Sampah Berbasis Black Soldier Flying (BSF) dan Bank Sampah Kabupaten Ciamis.....	197
2) Rumah Susun Layak Huni (RUSULANI) Kota Samarinda.....	202
3) Kampung Inggris Kebumen (KIK) Kabupaten Kebumen	205
4) BANK SAMIUN (Bank Sampah Untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) Kabupaten Kebumen	208
5) Matahari Untuk Kaum Papa Kabupaten Purbalingga	212
6) Air Bersih Pedesaan Mandiri, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim	219
7) Saung Ilmu Desa Pelakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim	225
PENUTUP	233
Kesimpulan	233
Saran	233
DAFTAR PUSTAKA	235

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi	19
Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi	29
Tabel 3 Perubahan hasil Inovasi LTPKD.....	32
Tabel 4 Perubahan hasil Inovasi LASKAR.....	34
Tabel 5. Perubahan hasil Inovasi Sjahrie Jaang.....	37
Tabel 6 Perubahan hasil Sunday Morning Service.....	40
Tabel 7. Perubahan hasil Inovasi SIKDA	43
Tabel 8. Perbandingan Waktu Layanan 14 Jenis Perizinan DPMPSTSP Kebumen	45
Tabel 9. Perubahan hasil Inovasi SIPERI	46
Tabel 10 Perubahan hasil Inovasi Home Care	50
Tabel 11 Perubahan hasil Inovasi ALUR CERITA	53
Tabel 12 Perubahan hasil Inovasi SICEPOY	56
Tabel 13 Perubahan hasil Inovasi SP2D Online	60
Tabel 14. Perubahan hasil Inovasi 15 Menit Rindu Membaca	64
Tabel 15. Perubahan hasil Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak.....	68
Tabel 16. Perubahan hasil Inovasi Kampung Sidat	72
Tabel 17. Omzet 3 Pokdakan Pembudidaya Ikan Sidat	74
Tabel 18 Jumlah Pegawai 3 Pokdakan Pembudidaya Ikan Sidat	74
Tabel 19 Pendapatan Anggota 3 Pokdakan Pembudidaya Ikan Sidat	75
Tabel 20. Perubahan hasil Inovasi AK.1.....	78
Tabel 21 Perubahan hasil inovasi BCL	84
Tabel 22 Fasilitas Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.....	87
Tabel 23. Perubahan hasil inovasi SIDOMAS.....	94
Tabel 24. Analisa Perubahan Inovasi Pendaftaran Online RS.....	98
Tabel 25 Perubahan hasil Inovasi Pendaftaran Online RS	98
Tabel 26. Perubahan sebelum dan sesudah Inovasi Three C.....	103
Tabel 27. Perubahan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas.....	112

Tabel 28 Data Kependudukan Kecamatan Danurejan	114
Tabel 29. Perubahan hasil Inovasi Keluar Bersama	116
Tabel 30 Perubahan hasil Inovasi PJU Lingkungan	124
Tabel 31 Efisiensi PAD dari Inovasi PJU Lingkungan	128
Tabel 32 Perubahan hasil Inovasi Layanan YES 118	132
Tabel 33 Laporan Masyarakat di Layanan YES 118	135
Tabel 34 Perubahan hasil Inovasi Layanan UPIK	138
Tabel 35 Perubahan hasil Inovasi Klinik Pelayanan Perizinan (KLIPPER)	144
Tabel 36 Perubahan hasil Inovasi JAMILA.....	148
Tabel 37 Perubahan hasil Inovasi JAMILA.....	152
Tabel 38 Perubahan hasil Inovasi JAMILA.....	155
Tabel 39 Perubahan hasil Inovasi Klik E-Resep	158
Tabel 40 Perubahan hasil Inovasi PANKREASI	163
Tabel 41 Pendapatan Retribusi Parkir tahun 2017-2018.....	165
Tabel 42 Perubahan hasil Inovasi CHIPS	168
Tabel 43 Data Hasil Penertiban.....	172
Tabel 44 Perubahan hasil Inovasi SIMPAPDES	181
Tabel 45 Perubahan hasil Inovasi Forum CSR-PKBL	188
Tabel 46 Perubahan SIPPohon (Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan Pohon).....	194
Tabel 47 Perubahan hasil Inovasi Pengelolaan Sampah berbasis BSF	199
Tabel 48 Perubahan hasil Inovasi Kampung Inggris Kebumen	206
Tabel 49 Perubahan hasil Inovasi BANK Samiun	210
Tabel 50 Perubahan hasil inovasi Matahari Kaum Papa.....	213
Tabel 51 Perubahan hasil Inovasi Air Bersih Pedesaan	220
Tabel 52 Perubahan hasil Inovasi Saung Ilmu Desa Pelakat.....	228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kondisi hasil Penataan dan Pengaturan Lalu Lintas.....	91
Gambar 2 Leaflet Inovasi Keluar Bersama.....	115
Gambar 3 Teknis Pelaksanaan Inovasi.....	119
Gambar 4 Pemberitahuan SMS Gateway	120
Gambar 5 Sistem SIMAMI	121
Gambar 6 Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta	126
Gambar 7. Pemasangan KWH Meter.....	127
Gambar 8 Dokumen RKPD Non APBD Kab Muara Enim Tahun 2018..	190
Gambar 9 CSR-PKBL Award Tahun 2017 Untuk PT. Bukit Asam Tbk..	192
Gambar 10 Inovasi SIPPohon	194
Gambar 11 Infografis Pengelolaan Sampah BSF	202
Gambar 12 Sarana Air Minum Desa Fajar Indah Kabupaten Muara Enim	223
Gambar 13 Alur pelaksanaan program Saung Ilmu Desa Pelakat.....	227

DAFTAR BOX

Box 1 Testimoni Inovasi LASKAR.....	35
Box 2 Testimoni Inovasi Sjahrie Jaang	38
Box 3 Testimoni Inovasi 15 Menit	65
Box 4 Testimoni Inovasi	73
Box 5 Kutipan Keputusan Bupati	82
Box 6 Testimoni Inovasi BCL	88
Box 7 Penurunan Jumlah Pelanggaran.....	90
Box 9 Peningkatan Layanan SIDOMAS.....	95
Box 10 Efisiensi waktu layanan	99
Box 11 Kemanfaatan inovasi ATCS.....	108
Box 12 Testimoni Inovasi Keluar Bersama	117
Box 13 Peningkatan Layanan SIMAMI	122
Box 14 Efisiensi PJU terhadap PAD 2013-2017	130
Box 15 Testimoni Inovasi YES 188	134
Box 16 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Layanan UPIK	141
Box 17 Manfaat layanan KLIPPER	145
Box 18 Faktor Penghambat Inovasi JAMILA	150
Box 19 Dampak layanan BABY	153
Box 20 Kemanfaatan TAMARA	157
Box 21 Efisiensi layanan.....	159
Box 22 Indeks Kepuasan Masyarakat	161
Box 23 Hasil inovasi CHIPS.....	173
Box 24 Dampak Kenaikan Pangkat Online.....	176
Box 25 Dampak Sipatuh Yanlik	178
Box 26 Testimoni Inovasi Pengelolaan Sampah berbasis BSF dan Bank Sampah.....	201
Box 27 Testimoni Inovasi Kampung Inggris Kebumen.....	207
Box 28 Dampak Inovasi Bank SAMIUN	211
Box 29 Dampak Ekonomi dan Pendidikan	217
Box 30 Testimoni Inovasi Matahari Untuk Kaum Papa	218

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Ide Inovasi Berdadarkan Basis Kemitraan dan APBN Tahun 2015 - Okt. 2018	1
Grafik 2 Penurunan jumlah SDM Pelaksana Razia.....	57
Grafik 3 Efisiensi waktu layanan sidang TIPIRING	57
Grafik 4 Pelanggaran Lalu Lintas.....	89
Grafik 5 Efisiensi PAD dari Inovasi PJU Lingkungan	129
Grafik 6 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.....	161
Grafik 7 Omset 2017 vs 2018	166
Grafik 8 Hasil Penertiban PKL	172
Grafik 9 Jumlah Data Pohon (dalam ribu)	196



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kerangka Pikir Pengukuran Dampak Inovasi.....	18
Diagram 2 Status Berkas Kenaikan Pangkat.....	176
Diagram 3 Realisasi Pendapatan PBB Kelurahan Kebumen 2016-2017.....	211
Diagram 4 Lulusan SMKN 3 Purbalingga 2016-2018	216

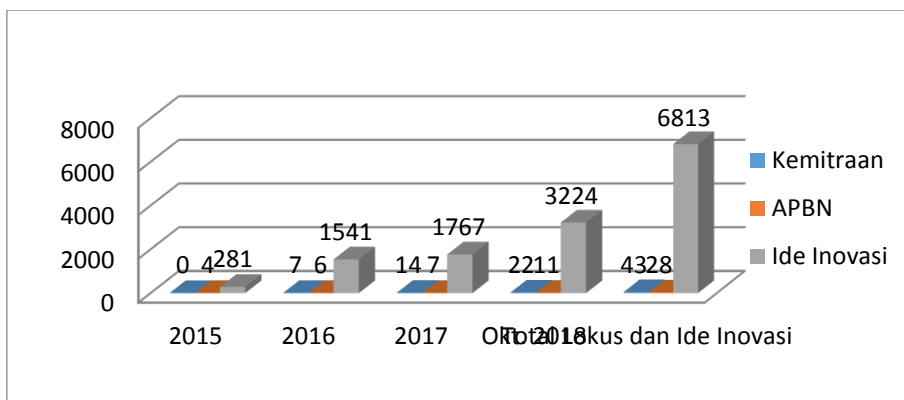
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Misi strategis Lembaga Administrasi Negara adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Misi ini tercermin dengan fungsi organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara, yaitu salah satunya melalui pengembangan inovasi administrasi negara.

Dalam kurun waktu tahun 2015 - Okt. 2018, Lembaga Administrasi Negara melalui Kedeputan Inovasi Administrasi Negara telah melakukan berbagai program peningkatan kapasitas dan kualitas inovasi. Salah satu diantaranya dengan memfasilitasi pengembangan inovasi di pemerintah daerah melalui program Laboratorium Inovasi. Jumlah daerah yang telah difasilitasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 71 daerah dengan jumlah ide inovasi sebanyak 6.813. Data dalam grafik adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Jumlah Ide Inovasi Berdasarkan Basis Kemitraan dan APBN Tahun 2015 - Okt. 2018



Sumber : Deputi Inovasi Administrasi Negara – LAN : 2017

Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana di atas, kegiatan laboratorium inovasi setidaknya telah menunjukkan bentuk komitmen yang tinggi serta langkah nyata yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), sebagai lembaga pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan, dan sumber daya aparatur. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap upaya akselerasi pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah, melalui program laboratorium inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi di lingkungan birokrasi pemerintah daerah dalam upaya mendorong daya saing nasional secara merata.

Seiring perjalanan waktu yang telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun dalam mendorong dan mengembangkan Inovasi di daerah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya yang dibangun melalui proses laboratorium inovasi. Keberhasilan suatu program inovasi akan ditentukan oleh sejauh mana inovasi yang telah diimplementasikan memiliki dampak terhadap lingkungannya. Untuk itulah maka LAN melakukan satu kegiatan pengukuran dampak inovasi yang telah dilaksanakan minimal 1 (tahun) berjalan, yakni sejak tahun 2015-2016.

Rumusan Masalah

Perkembangan inovasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir merupakan salah satu komitmen LAN terhadap pemerintah daerah untuk berinovasi. Mengingat upaya pengukuran tersebut dilakukan terhadap inovasi yang sudah diimplementasikan dalam waktu 1 – 2 tahun, maka dampak yang diukurpun masih bersifat mikro, yakni baru mengukur pada tataran output. Untuk itulah, maka rumusan masalah yang dikembangkan LAN adalah menyangkut

“Bagaimana dampak dari pelaksanaan inovasi yang telah dilakukan terhadap perubahan di lingkungan pemerintahan daerah?”

Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali informasi tentang dampak inovasi terhadap perubahan di lingkungan pemerintahan daerah melalui proses pengukuran dampak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi yang diperlukan dalam rangka pengembangan lebih lanjut. Sehingga hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan:

1. Perubahan yang terjadi sebagai salah satu dampak dari implementasi inovasi;
2. Hambatan dan kendala yang ditemukan dalam upaya implementasi inovasi;
3. Aspek-aspek apa saja yang mengalami perubahan sebagai dampak dari implelementasi inovasi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian pengukuran dampak inovasi adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk LAN dan pihak-pihak berkepentingan lainnya terkait dengan program pengembangan Inovasi di bidang sektor publik.
2. Mengetahui dan memberikan informasi mengenai area perbaikan inovasi di sektor publik.
3. Teridentifikasinya aspek-spek yang mempengaruhi capaian dampak inovasi.

Ruang Lingkup Penelitian

Lokus penyelenggaraan Pengukuran Dampak Inovasi adalah pemerintah daerah yang ikut dalam penyelenggaraan laboratorium inovasi pada tahun 2015 dan 2016. Adapun Pengukuran Dampak Inovasi dilakukan pada **Level Mikro**, yaitu *mengukur dampak inovasi pada tataran output yang dikorelasikan dengan*

ada/tidaknya perubahan yang terjadi pada setiap jenis layanan/fokus inovasi.

Kegiatan ini dilakukan terhadap 7 (tujuh) lokus kabupaten/kota yang menjadi mitra Laboratorium Inovasi LAN sejak tahun 2015-2016. Pemilihan lokus laboratorium inovasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Penyelenggara Laboratorium Inovasi tahun 2015-2106;
- b. Inovasi masih berjalan sekurang-kurangnya dalam 1 tahun hingga masa pengukuran dilakukan;
- c. Inovasi yang memiliki klasifikasi :
 - **Pelayanan Publik**, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
 - **Tata Kelola Pemerintahan** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
 - **Inovasi Daerah Lainnya** merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Inovasi Daerah). Dalam kegiatan ini LAN menetapkan Inovasi Daerah Lainnya ditetapkan sebagai **Inovasi dalam Pemberdayaan Masyarakat**.
- d. Pernah ikut/direkomendasikan dalam lomba inovasi seperti Inagara Award, IGA, Sinovik dan lain-lain.

Adapun pemerintah daerah yang menjadi lokus dari pengukuran dampak inovasi adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen,
2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga,
3. Pemerintah Kabupaten Ciamis,
4. Pemerintah Kabupaten Muara Enim,
5. Pemerintah Kota Yogyakarta,
6. Pemerintah Kota Pontianak, dan
7. Pemerintah Kota Samarinda.

TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi Sektor Publik

Secara umum, inovasi dapat dipahami sebagai proses perubahan perilaku. Inovasi bergerak dalam ruang yang dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut Everett M Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Begitu halnya dengan pandangan Albury (dalam suwarno, 2008 : 10) yang secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Pengertian ini menekankan bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru (invention) yang bermanfaat.

Mendefinisikan inovasi di sektor publik tidaklah sama dengan mendefinisikan inovasi di sektor privat. Inovasi tidak hanya menyangkut sesuatu yang baru, tetapi juga memberikan nilai tambah, baik dalam bentuk proses ataupun output dari suatu peoduk jasa/barang. Karena itulah, maka definisi sederhana dari inovasi sektor public adalah tentang bagaimana ide-ide baru itu bekerja untuk menciptakan nilai publik (OECD, 2014).

Adapun karakteristik inovasi di sektor publik (*OECD Observatory*) adalah sebagai berikut:

1. **Kebaruan:** inovasi memperkenalkan pendekatan baru, sesuai dengan konteks atau lingkungan di mana inovasi akan diterapkan
2. **Implementasi:** inovasi harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar ide
3. **Dampak:** inovasi bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih baik termasuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna atau karyawan.

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, dinyatakan bahwa "*Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang*

bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah”.

Selanjutnya dinyatakan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk :

1. **Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah**, yang merupakan pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
2. **Inovasi Pelayanan Publik**, yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
3. **Inovasi Daerah** lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Evaluasi Dampak

Dampak adalah hasil jangka panjang yang dihasilkan oleh suatu program, proyek atau kebijakan, termasuk hasil yang diharapkan dan tidak diinginkan terjadi, dampak positif dan negatif, serta dampak langsung dan tidak langsung (Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015). Identifikasi dampak ini bertujuan untuk melihat perbedaan utama dari suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan tujuan pelaksanaan. Hal ini pula, yang oleh *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) ikut mendefinisikan dampak sebagai cara untuk melihat pencapaian tujuan proyek atau program, atau lebih tepatnya terkait dengan kontribusi untuk pencapaian tujuan yang dilakukan yang keseluruhannya dapat ditempuh melalui satu instrumen pelaksanaan bernama *impact evaluation* atau evaluasi dampak.

Evaluasi dampak merupakan penyelidikan yang sistematis dan empiris terhadap dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi. Proses ini akan menentukan apakah suatu intervensi telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari program atau kegiatan atau tidak sama sekali. Selain itu, evaluasi dampak ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang berhasil atau tidak berhasil, bagaimana, untuk siapa, dan mengapa hal itu terjadi (*Impact Evaluation: A discussion paper for AusAID practitioners, 2012*).

Evaluasi dampak dapat memberikan bukti secara nyata tentang dampak yang telah diproduksi (dampak yang diharapkan). Selain bukti yang kredibel tersebut, evaluasi dampak juga dapat mengarahkan pada inferensi kausal bahwa terjadinya perubahan sebagai bagian dari hasil pelaksanaan proyek, program atau kebijakan. Maka dari itu, Evaluasi dampak dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sasaran, yang diakibatkan oleh program/proyek/kebijakan dan merupakan hasil dari kegiatan program/proyek/kebijakan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan (2003:28), menyebutkan ada empat jenis evaluasi dampak yaitu :

1. *Evaluasi single program after-only*. Jenis evaluasi ini merupakan yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya suatu program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.
2. *Evaluasi single program before-after*. Jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut
3. *Evaluasi comparative after-only*. Merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program terhadap kelompok sasaran tidak diketahui
4. *Evaluasi comparative before-after*. Merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada diketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini

Selain itu, ada pula jenis evaluasi dampak yang digunakan *sebelum dan sesudah dan selama program dilaksanakan* (Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015) yaitu :

1. *Ex post impact evaluation*, mengumpulkan data terkait actual impact
2. *Ex ante impact evaluation*, meramalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi
3. *During implementation*, mengumpulkan data tentang kesesuaian dampak program yang dihasilkan dengan dampak yang diinginkan.

Patton dan Sawicky menguraikan 6 (enam) bentuk pendekatan evaluasi dasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi program, yaitu :

1. *Before and after comparisons*

Pendekatan yang membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum dan sesudah program (*actual postprogram data*). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program dijalankan (*actual postprogram data*) dengan masyarakat yang tidak menjalankan program atau kebijakan tersebut.

2. *With and without comparisons*

Pendekatan untuk membandingkan antara grup target yang menerima program dan yang tidak. Adapun batasan-batasan antara pendekatan ini dan pendekatan pada nomor satu diatas adalah perlunya pemilihan kelompok yang akan dibandingkan dengan tepat, adanya asumsi bahwa perubahan-perubahan yang diamati di tempat kejadian perkara dapat dikenali.

3. *Actual-versus-planned performance comparisons*

Pendekatan ini membandingkan data pasca pelaksanaan program secara aktual pada sasaran program yang timbul pada periode waktu sebelumnya (biasanya sebelum implemementasi program). Analisis menentukan tujuan dan target yang spesifik untuk membuat kriteria evaluasi sebelum program dilaksanakan guna mengetahui periode waktu pelaksanaan program dan

menentukan data yang dibutuhkan dari performa program yang dilaksanakan analisis dalam hal ini membandingkan performa kebijakan secara actual terhadap kondisi masyarakat yang tidak menerima program.

4. *Experimental (controlled) models*

Pendekatan ini menggunakan konsep kontrol ekuivalen dan kelompok yang diuji cobakan serta ukuran-ukuran pra dan pasca pelaksanaan program. Unit analisis adalah individu dalam kelompok yang dipilih secara acak. Individu yang dimaksud adalah yang menerima atau melaksanakan program dan tidak atau melaksanakan program yang berbeda dengan kelompok yang dijadikan kelompok uji coba.

5. *Quasi-experimental models*

Pendekatan *Quasi-experimental models* mencoba mengukur hasil atau *outcome* dari program atau kebijakan melalui skor, angka atau indikator lainnya. Selain itu pendekatan ini juga mencoba untuk mempertahankan logika percobaan tanpa menggunakan suatu prosedur, teknik ataupun hal lainnya. Pendekatan ini memiliki 2 rancangan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan analisis hasil pelaksanaan program terhadap target grup, yaitu rancangan *non equivalent control group* dan rancangan *interrupted time-series design*.

Rancangan *non equivalent control group* melakukan perbandingan dari *treatment group* dan grup lainnya yang diujicobakan program, baik sebelum dan sesudah kebijakan atau program dilaksanakan. Adapun rancangan yang kedua melakukan perbandingan *treatment group* dari waktu ke waktu baik sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Misalnya kondisi kelompok masyarakat sebelum pelaksanaan program diamati beberapa kali.

6. *Cost-oriented approaches*

Pendekatan *Cost-oriented approaches* merupakan jawaban atas kondisi yang mengharuskan mengukur dampak kebijakan dalam satuan uang, estimasi biaya dan keuntungan bersih dari perubahan yang terdeteksi dari pelaksanaan program, mengukur keuntungan yang terlihat maupun tidak

serta biaya yang harus dikeluarkan baik secara langsung atau uang, maupun tidak langsung (dampak buruk yang akan dirasakan kedepannya).

Kajian The World Bank tahun 2006 tentang *Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time And Data Constraints* mengemukakan bahwa ada berbagai pilihan desain evaluasi dampak dimulai dari metode yang terkuat hingga lemah yaitu :

1. *Pre- and post intervention project and control group design with randomized or non-randomized assignment.*

Desain ini merupakan desain evaluasi paling kuat yang mengkombinasikan evaluasi *pre and post intervention* dengan menggunakan data awal/dasar dan melibatkan perbandingan antar kelompok.

2. *Delayed pre-test/post-test comparison group design.*

Desain ini bermanfaat ketika proses evaluasi dimulai dalam jangka menengah. Hal ini karena desain ini tidak menggunakan data awal/dasar (baseline), namun lebih pada penguatan evaluasi *mid-term* dan *post intervention*.

3. *Pre-and post-intervention project group and post-intervention comparison group.*

Meskipun desain ini lebih lemah dari sebelumnya, namun desain ini memungkinkan untuk melihat perbandingan dari waktu ke waktu dan analisis transversal pasca proyek. Dalam desain ini tidak menggunakan pre-intervention terkait perbandingan kelompok, tetapi hanya menggunakan *post-intervention*.

4. *Post-intervention project and comparison groups with no baseline data.*

Desain evaluasi ini hanya memfokuskan pada evaluasi dampak terhadap *post-intervention* data proyek dan perbandingan antar kelompok dan tanpa menggunakan *baseline data*.

5. *Pre- and post-implementation project group analysis with no comparison group.*

Desain ini menghilangkan analisis terhadap evaluasi dampak dengan kelompok pembandingan, namun tetap menggunakan *pre and post intervention* untuk proyek kelompok dan *baseline data*.

6. Post-intervention project group without baseline data or a comparison group.

Ini merupakan desain evaluasi yang paling lemah karena memfokuskan proses evaluasi *post intervention* tanpa *pre-intervention* dan berdasarkan *baseline data*.

Pengukuran Dampak Inovasi Sektor Publik

Pengukuran dampak inovasi sektor publik cenderung lebih sulit daripada sektor privat (NESTA, 2011). Hal ini karena pengukuran di sektor publik tidak hanya dilakukan dari output keuangan semata, namun juga pada nilai publik yang dihasilkan. Menurut kajian NESTA, indeks inovasi sektor publik setidaknya mencakup empat bidang, yaitu :

1. *Improvement in organisational key performance indicators*
2. *Improvement in service evaluation*
3. *Improvement in efficiency*
4. *Improvement context*

Salah satu pengukuran dampak inovasi yang dilakukan di sektor publik misalnya dalam *Innovation in Public Sector Organisations, A Pilot Survey in measuring innovation across the public sector* yang dilakukan oleh National Endowment for Science, technology, and the Arts (NESTA) of United Kingdom pada tahun 2011. Survey ini menjadi stimulus untuk membuat indeks pengukuran inovasi organisasi sektor publik yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan institusi lainnya yang berhubungan dengan sektor publik.

Jenis pengukuran inovasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah inovasi berupa jasa (dalam penelitian ini jasa dalam bidang kesehatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan

kuesioner, indikator yang digunakan dalam kuesioner ini adalah mengadopsi *Private Sector Index Survey*. Adapun indikator-iindikator tersebut berupa :

1. *Efficiency*, terkait dengan efisiensi biaya yang terjadi setelah adanya inovasi.
2. *Quality*, terkait dengan kualitas dari layanan inovasi.
3. *Access to service*, terkait dengan akses pelayanan yang semakin mudah atau malah justru semakin sulit.
4. *Costumer Feedback*, terkait dengan apakah terdapat ruang bagi konsumen untuk memberikan *feedback* dalam rangka peningkatan inovasi.
5. *Speed Of Delivery*, terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu layanan tertentu.
6. *Range Of Services*, terkait dengan seberapa jauh jangkauan pelayanan yang diberikan setelah inovasi.

Pengukuran dampak inovasi sektor publik lainnya juga dilakukan *SEAT (Socio-Economic Assesmet Toolbox)* yang merupakan sebuah perangkat penelitian yang digagas oleh *Government and Social Affairs*, Pemerintah Inggris pada tahun 2012 untuk menilai seberapa besar dampak dari sebuah inovasi kebijakan pemerintahan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang diafirmasikan ke dalam kebijakan ini. Penelitian tersebut menilai dengan cara yang holistik dengan asumsi bahwa kelima indikator bisa sesuai dengan tahapan implementasi inovasi.

Pada studi kasusnya, kebijakan pemerintah Inggris yaitu dengan mendorong terbentuknya kelompok pekerja yang berlatar belakang Anglo American, untuk bisa diakselerasi tingkat perekonomian di daerah dekat pertambangan, sekaligus mengubah sosial-kultural masyarakat yang pasif akan kondisi ekonomi. Metode yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah dengan metode kualitatif, dengan melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan kelompok pekerja tersebut. Tujuan FGD tersebut yaitu untuk menilai seberapa jauh indikator tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

1. *Inform*

Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan awareness.

2. *Consult*

Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan pemahaman.

3. *Involve*

Melibatkan secara langsung stakeholders dengan tujuan mendapatkan feedback dan alternative inovasi.

4. *Collaborate*

Merumuskan sebuah inovasi bersama stakeholders dengan menjamin berjalannya aspirasi, ide, dan gagasan.

5. *Empower*

Memberdayakan secara mandiri stakeholders untuk dapat menjalankan inovasi dengan tujuan *sustainability*.

Di berbagai negara, pengukuran dampak inovasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. TEKES (*The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation*) yang merupakan sebuah badan atau organisasi di Finlandia turut serta berkontribusi dalam melakukan berbagai pengukuran dampak inovasi yang bidangnya fokus pada *financing research, development and innovation*. TEKES saat ini telah mendukung berbagai kegiatan inovasi yang luas di bidang riset, industri dan sektor jasa. Tujuannya agar program bidang penelitian, pengembangan dan inovasi dapat menciptakan keuntungan jangka panjang bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu indikator pengukuran dampak inovasi yang dihasilkan bernama *Tekes Model*.

Tekes model ini pernah digunakan oleh beberapa organisasi yang juga bergerak disektor pengembangan inovasi khususnya pada sektor privat yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat, seperti GAP (Global Access Program) di University of California dan VINNOVA yang merupakan organisasi di Swedia yang berfokus pada pengukuran dampak pertumbuhan berkelanjutan di Swedia.

TEKES mengembangkan sebuah General logic model for innovation yang didalamnya mengukur dampak inovasi. Model ini membagi dampak inovasi kedalam tiga garis besar yaitu immediate Impacts, Intermediate Impacts dan Ultimate Impacts.

2.1 Immediate Impacts

Immediate impacts menekankan pada konteks *increased resources or capabilities*. Dari konteks ini dapat dijabarkan sejumlah indikator berdasarkan pada ide/gagasan inovasi yang dikembangkan. Berikut indikatornya :

- *Information and advice*
Dampak ini berfokus bagaimana kemampuan inovasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan suatu *feedback* terhadap penyelenggara inovasi yang dinamakan sebagai *advice* (saran).
- *Competence*
Indikator ini berfokus pada sejauh mana inovasi telah menghasilkan peningkatan kemampuan dan keahlian pada individu atau masyarakat.
- *On raising capital / Strengthened Resource*
Terkait dengan peningkatan modal dan penguatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah
- *Business linkages with service providers*
Jika dalam sector privat menekankan pada bagaimana hubungan bisnis dengan penyedia layanan, maka untuk sektor publik dapat menekankan pada hubungan penyedia layanan dan masyarakat terkait dengan program inovasi.
- *On selling in new markets*
Inovasi dapat berdampak pada terbukanya jaringan pasar / markets baru bagi masyarakat sebagai akibat dari program inovasi

2.2 Intermediate Impacts

Kunci utama dari Intermediate impacts menekankan pada *improved performance*. Indikator ini bertumpu pada konteks peningkatan kinerja sebagai

bagian dampak inovasi. Adapun indicator yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- *Increased revenues*
Terkait dengan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata baik individu atau masyarakat
- *Increased employment*
Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan bekerja bagi masyarakat yang lebih luas.
- *New products and service*
Dampak inovasi terkait dengan adanya produk baru yang dihasilkan yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Begitu halnya dengan kualitas pelayanan yang lebih mudah, murah, nyaman, tidak berbelit-belit, dapat diakses, dan sebagainya.
- *Productivity*
Dampak inovasi terkait dengan terjadinya peningkatan produktivitas kinerja dalam masyarakat
- *Reduced environmental impact*
Kemampuan inovasi terkait juga pada sejauh mana inovasi dapat mengurangi dampak lingkungan yang dapat mungkin menyebabkan produktivitas masyarakat berkurang.
- *Increased investment and collaboration*
Inovasi dapat menyebabkan peningkatan investasi atau penanaman modal dan juga pihak lain untuk turut terlibat berkolaborasi terhadap program inovasi
- *Renewal of Business/organizational structures*
Terkait dengan proses perubahan dan pembaharuan struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi yang sesuai dengan konteks program inovasi

2.3 Ultimate Impacts

Ultimate Impacts menekankan pada konteks *socio-economic benefit* yang dihasilkan oleh program inovasi. Adapun sejumlah indikator yang dapat dijabarkan berupa :

- *Sustainable wealth and job*
Terjadi peningkatan kekayaan dan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan
- *Environmental and health care improvement*
Terciptanya lingkungan yang nyaman dan perbaikan serta peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
- *Regional Viability/vitality*
Inovasi berdampak pada meningkatnya angka harapan/kesempatan hidup di suatu wilayah atau daerah
- *Safety and security*
Dampak inovasi terkait dengan rasa aman dan jaminan keamanan bagi masyarakat
- *Social well-being*
Inovasi memberikan dampak pada kemandirian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kerangka Pikir

Pengukuran dampak inovasi dilakukan untuk mengetahui dampak dari suatu program inovasi yang telah berjalan. Dalam pelaksanaan ini, pendekatan evaluasi yang digunakan menggunakan pendekatan *before after comparison* (Patton and Sawicky) yang dikombinasikan dengan pendekatan *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group* (World Bank). Pada pendekatan *before after comparison*, program inovasi akan diukur dengan membandingkan kondisi sebelum inovasi dan sesudah inovasi dilaksanakan. Pendekatan *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group*, pendekatan evaluasi yang langsung memfokuskan pada

ada/tidaknya perubahan yang ditimbulkan dari suatu proses tanpa melibatkan penggunaan *baseline data* ataupun *perbandingan* antar grup dalam proses pengukuran dampak inovasi.

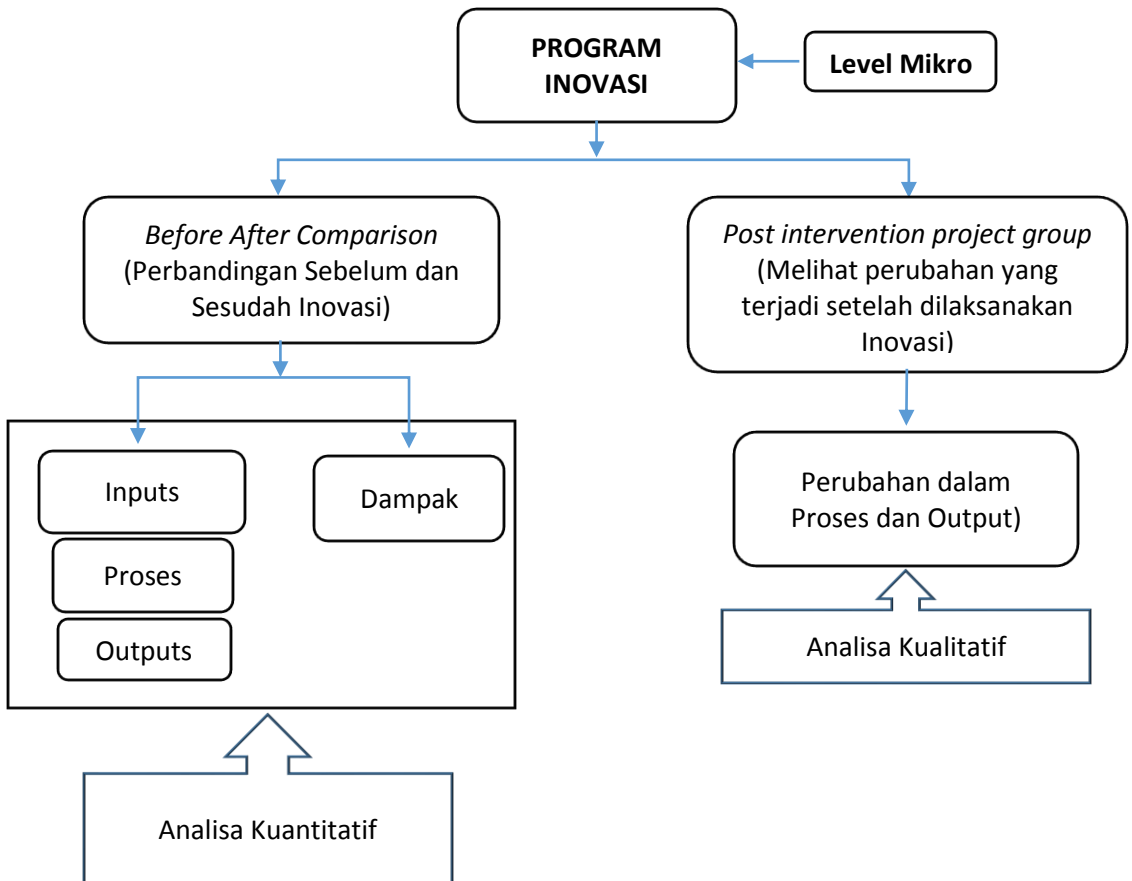
Pendekatan *before after comparison*, dioperasionalkan dengan menggunakan perbandingan kelompok indikator seperti: **input dengan input, proses dengan proses**, dan **output dengan output**. Indikator dalam masing-masing kelompok, adalah:

INPUT	PROSES	OUTPUT
1. Biaya/anggaran/dana; 2. Sumber Daya Manusia; 3. Kelengkapan yang menjadi pendukung proses.	1. Mekanisme/ prosedur yang dilakukan; 2. Waktu layanan	1. Produktivitas; 2. Kualitas hasil

Pendekatan *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group* diukur berdasarkan pada **dampak/perubahan yang terjadi** (*yang langsung bisa dilihat dari data atau wawancara/testimoni*). Pendekatan ini digunakan terhadap kondisi perubahan yang dirasakan oleh pelaku ataupun pihak lain, namun tidak memiliki data sebelumnya yang bisa dijadikan perbandingan secara kuantitatif. Oleh karena itu, hasil pengukuran dari pendekatan ini lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada deskripsi hasil wawancara atau testimoni.

Alur pikir untuk melakukan pengukuran dampak inovasi ini, digambarkan dalam skema alur sebagai berikut:

Diagram 1. Kerangka Pikir Pengukuran Dampak Inovasi



(Sumber : diolah oleh tim penulis, 2018)

Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka untuk mengoperasionalkan indikator-indikator pengukuran dampak inovasi ini, diuraikan lebih lanjut dalam bentuk operasionalisasi konsep pengukuran yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi. operasionalisasi variabel dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi

Variabel	Indikator	Definisi konseptual	
Input	Biaya/ Anggaran	Biaya langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan (biaya administrasi/ tarif layanan)
			Biaya modal yang dikeluarkan untuk usaha atau menghasilkan produk
	Biaya tidak langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan untuk memperoleh produk layanan seperti: biaya transport, akomodasi, dll.	
	SDM Pelaksana	Jumlah	Jumlah SDM yg terlibat dalam penyelenggaraan layanan (jumlah pegawai yang terlibat dalam alur 1 jenis layanan)
	Kelengkapan Kerja	Peralatan/fasilitas pendukung kinerja pelayanan	Peralatan & perlengkapan yg mendukung penyelenggaraan pelayanan (komputer, mobil, atk, meja, ketersediaan ruangan atau bangunan khusus, dll)
Proses	Mekanisme	Prosedur mendapatkan layanan	Persyaratan mendapatkan layanan dan unit layanan yg dilalui.

		Metode mendapatkan layanan	Cara yg dilakukan untuk mendapatkan pelayanan (<i>online/offline</i> , pendelegasian wewenang, jemput-bola, pesan antar, dll)
	Waktu Layanan	Waktu pelayanan	Seberapa lama waktu yg digunakan untuk menghasilkan pelayanan.
Output	Produktivitas	Jumlah layanan yang dihasilkan	Jumlah layanan yg dihasilkan dalam periode waktu tertentu (perjam/hari/bulan) atau, Jumlah penerima layanan publik yang dapat dilihat dari; jumlah pemohon, jumlah pengunjung, dsb.
		Jumlah produksi usaha	Omzet produksi usaha masyarakat.
	Kualitas	Kualitas mutu layanan	Mutu produk layanan. Bisa dilihat dari kualitas produk hasil layanan; Survey Kepuasan Masyarakat; atau analisa atas tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya, dan prosedur layanan
		Kualitas produk usaha masyarakat	Perubahan mutu produk usaha masyarakat (misal; kualitas rasa, pengemasan, metode pengiriman, dsb)
Dampak	Pendapatan Pemerintah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah yg diperoleh dari inovasi (pendapatan daerah; pajak, retribusi masyarakat)
	Tingkat	Jumlah	Jumlah pendapatan yg diperoleh

Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Masyarakat	masyarakat setelah mendapatkan program inovasi (penghasilan, laba usaha)
	Perubahan kondisi Kemiskinan	Perubahan indikator statistik kemiskinan di daerah tersebut.
Penyerapan Tenaga Kerja	Penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yg terserap setelah dilaksanakan inovasi
Tingkat Kesadaran/ Perubahan Pola Pikir	Perubahan Pola Pikir/Kesadaran/ Kedisiplinan pegawai Pemerintah	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan pegawai pemerintah atas suatu isu/ permasalahan di organisasi
	Perubahan Pola Pikir/Kesadaran/ Kedisiplinan Masyarakat	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan masyarakat atas suatu isu/ permasalahan di daerah.
Peningkatan pengetahuan atau Keterampilan	Peningkatan Pengetahuan atau Keterampilan Masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

(Sumber : diolah oleh tim PDI, 2018)

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi merupakan aktivitas evaluasi dampak program inovasi yang telah diimplementasikan oleh SKPD/ Unit Kerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan berbasis kuantitatif dan kualitatif (eksplorasi) dengan memilih metode *before after comparison* (kuantitatif) dan *Post Test Without Comparison Group and Baseline Data* (kualitatif). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori atau instrument yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Penelitian ini bersifat objektif karena aspek terpenting dalam paradigma penelitian post-positivistis adalah sikap objektif dimana peneliti harus menguji kembali metode-metode dan kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya mengandung bias (Creswell, 2010: 10)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain :

- a. **Studi Literatur**, merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal maupun bahan bacaan tertulis lainnya yang terkait dengan penentuan instrumen untuk pengukuran dampak inovasi. Dalam hal ini, studi literatur yang dilakukan adalah mengumpulkan teori-teori mengenai dimensi atau aspek pengukuran dampak inovasi terdahulu.

- b. **Focus Group Discussion (FGD)**, Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data primer dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Permasalahan yang dibahas dalam FGD sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas dan spesifik.

Dalam kegiatan ini FGD dilakukan dengan memberikan arahan mengenai pengisian instrumen pengukuran dampak inovasi dimulai dari Judul, deskripsi, kegiatan, tujuan dan manfaat, serta deskripsi *before-after* inovasi berdasarkan masing-masing instrumen.

- c. **Wawancara mendalam**, Wawancara-Mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, setelah dilakukan FGD, peneliti menentukan inovasi yang dipilih untuk dilakukan wawancara dan observasi lapangan serta memilih instrumen yang paling berdampak terhadap *stakeholders* serta menyusun pedoman wawancara.
- d. **Observasi lapangan**, Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non-participant*. Artinya, penulis melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian akan tetapi tidak ikut serta dalam proses kerja. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang diukur. Pengamatan dilakukan dalam rangka merekam keadaan, kegiatan, dan kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan dengan instrumen pengukuran dampak inovasi.

Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah:

a. Angket

Angket merupakan tehnik sekaligus instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu, angket juga digunakan sebagai **panduan untuk melakukan wawancara dan observasi.**

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Kriteria Penentuan Sampling

Sampling untuk pengukuran dampak inovasi ini, dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Sampling untuk lokus dan sampling untuk jenis inovasi yang akan diukur.

Penentuan sampling tersebut, didasarkan pada sejumlah kriteria seperti:

- a. Merupakan inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah yang sampai saat ini masih berjalan dan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun.
- b. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan Laboratorium Inovasi tahun 2015-2016.
- c. Inovasi yang memiliki klasifikasi :
 - Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
 - Tata Kelola Pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur

manajemen.

- Inovasi Daerah Lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Inovasi Daerah). Dalam kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi, Inovasi Daerah Lainnya yaitu Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam mengumpulkan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu *data primer* dan *data sekunder*. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu informan yang dipilih dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang diinginkan peneliti dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun kriteria informan dalam pengukuran dampak inovasi ini, adalah :

- a. *Pelaksana inovasi*, merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan baik sebelum maupun sesudah adanya inovasi, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat atau LSM.
- b. *Penggagas inovasi*, orang atau pihak yang pertamakali memunculkan ide/gagasan inovasinya sehingga dipanang sebagai salah satu yang paling memahami program inovasi tersebut.
- c. Jajaran pimpinan OPD yang terlibat secara langsung dalam proses inovasi di lingkungannya.
- d. Penerima atau sasaran inovasi, yaitu pihak yang terlibat sebagai pengguna atau yang terdampak dari proses inovasi. Pihak ini bisa dari unsur masyarakat ataupun unsur pemerintahan.

Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data adalah proses dan interpretasi data dari hasil pengolahan data agar memiliki makna dan informatif. Dalam penelitian ini, semua data dan informasi yang diperoleh dari pengumpulan data baik dari hasil wawancara

mendalam, observasi, serta studi literatur, diolah dan dianalisis untuk kemudian disajikan secara deskriptif.

Pengolahan data

Sebelum tim pengukuran melakukan proses pengumpulan data di lapangan, terlebih dahulu ditentukan lokus dan jenis inovasi yang akan dijadikan sampel. Berdasarkan hasil pengumpulan sampel yang terkait dengan jenis inovasi, Tim melakukan pengklasifikasian terhadap jenis inovasi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: *Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Selanjutnya, Proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui FGD dan wawancara mendalam (*depth interview*). Hasil wawancara diseleksi dan diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu pengukuran dampak inovasi, yang kemudian diikuti dengan pengklasifikasian data ke dalam tiga jenis inovasi yakni jenis *inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi pemberdayaan masyarakat*.

b. Display Data

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data untuk proses penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara setelah pereduksian data selesai. Kemudian dirangkum secara sistematis agar mudah difahami.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil tentunya dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber lainnya. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat

dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

Teknik Analisa Data

a. *Before After Comparison*

Pendekatan untuk mengukur dampak dengan cara membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum (*before*) dan sesudah (*after*) program inovasi (*actual postprogram data*). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program inovasi dijalankan (*actual postprogram data*).

Adapun cara untuk melihat dampak inovasi dilakukan dengan menghitung perbandingan dari indikator input, proses, dan output berdasarkan data-data sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan.

Rumus persentase perubahan :

1. $\left(\frac{X-Y}{X}\right) \times 100\%$ Untuk Perhitungan apabila kondisi pasca inovasi lebih kecil dibandingkan sebelum inovasi, namun menunjukkan **derajat nilai perubahan** Positif (efektif – efisien). *Misalnya: Waktu, Jumlah SDM, Biaya.*
2. $\left(\frac{Y-X}{X}\right) \times 100\%$ Untuk Perhitungan apabila nilai pasca inovasi lebih besar dibandingkan sebelum inovasi, dan menunjukkan **derajat nilai perubahan** Positif. *Misalnya: untuk nilai Output, produksi, dsb. Atau dengan rumus:*
 $\left(\frac{Y}{X}\right) \times 100\%$ Untuk penghitungan **nilai kinerja** atau **produktivitasnya**.
3. $\bar{X} \frac{I+P+O}{3} \times 100\%$ Perhitungan Dampak Program Inovasi dihitung dari rata-rata **nilai dampak Input, Proses,**

dan Output. Penghitungan ini dilakukan apabila data dampak yang ditimbulkan tidak diperoleh di dalam data lapangan.

Ket :

X = Keadaan sebelum inovasi

Y = Keadaan setelah Inovasi

I = Input

P = Proses

O = Output

\bar{X} = Rata - rata

2. *Post Intervention Project Group*

Post-Intervention merupakan desain evaluasi untuk mengukur dampak dengan cara menggali data setelah program dilaksanakan tanpa harus membandingkan data sebelum program dilaksanakan. Pengukuran dampak dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai data kualitatif seperti wawancara dengan *key informan*, FGD, data-data program, dan data statistik dari instansi inovator.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dampak Inovasi di mulai dari bulan Februari sampai dengan September 2018. Adapun rincian kegiatan seperti pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi

Tahap	Kegiatan	Bulan ke							
		2	3	4	5	6	7	8	9
I. Persiapan	Identifikasi Indikator	■	■	■					
II. Pelaksanaan	Pengumpulan Data			■	■	■			
	Analisis Data					■	■	■	
III.	Penyusunan Laporan							■	■

(Sumber : diolah oleh tim penulis, 2018)

ANALISA HASIL PENELITIAN

Analisa *Before After Comparison*

Inovasi Pelayanan Publik

1) Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis

a. Deskripsi Inovasi

LTPKD sebagai inovasi pelayanan publik di Kabupaten Ciamis diresmikan pada tanggal 29 Januari 2015 dan dibentuk oleh Peraturan Bupati Ciamis No. 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan LTPKD. LTPKD Kabupaten Ciamis memiliki visi yaitu Masyarakat Miskin Terlayani 100% di Tahun 2019. Sedangkan Misionya adalah : melayani informasi dan data kemiskinan *by name, by address, by picture* dan *by Geo-Tagging*; melayani pengaduan masyarakat secara optimal; melayani langsung sasaran masyarakat miskin secara cepat, tepat dan terpercaya. LTPKD bukan perangkat daerah, bersifat ad hoc (sementara) dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

LTPKD melakukan tugas dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan dan melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. LTPKD dibentuk untuk lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, LTPKD sebagai salah satu inovasi daerah maka diharapkan pelayanan data dan pengaduan masyarakat terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dapat terintegrasi dan tepat sasaran.

Tujuan dari pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) adalah :

- a) Tersedianya pusat data (database) kemiskinan yang terpadu;

- b) Terintegrasinya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c) Terkendalinya proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan
- d) Terbentuknya lembaga yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

Ruang lingkup dari LTPKD adalah pelayanan kepada masyarakat miskin, verifikasi dan pemetaan data kemiskinan dan penentuan kriteria kemiskinan daerah. Adapun tugas pokok LTPKD adalah untuk membantu Bupati dalam rangka percepatan dan penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan fungsi dari LTPKD adalah :

- a) Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi;
- b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- c) Pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan;
- d) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e) Pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (updating database) kemiskinan.

Lembaga Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis dinilai sebagai suatu terobosan atau inovasi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, memiliki cakupan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Data Perubahan

LTPKD dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat miskin. Adapun hasil wawancara dan observasi lapangan terkait

pengukuran inovasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 3 Perubahan hasil Inovasi LTPKD

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	Biaya tidak langsung	50.000,-	20.000,-	Rupiah	Efisiensi 60%
Proses	Jumlah SDM Pelaksana	15	10	personil	Efisiensi 33,3%
Output	Jumlah layanan yang dihasilkan	420	1.500	Kartu Calakan	257,1%
		12.207	28.000	Kartu Waluya	129,4%
		235	609	Kartu Walagri	159,1%
Dampak	Angka Putus Sekolah SD/MI	4.80	1.60	persen	3.20%
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	3.40	2.00	persen	1.40%

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Data diatas merupakan kondisi sebelum dan sesudah adanya inovasi dimana adanya perubahan yang baik dengan kehadiran LTPKD Kabupaten Ciamis. Dalam aspek biaya yang dikeluarkan oleh konsumen menjadi lebih efisien dengan akses yang awalnya 3 tempat berbeda menjadi hanya ke satu tempat saja yang terpadu. Selain itu, efisiensi biaya dari rata-rata 50.000 menjadi 20.000 juga disebabkan oleh metode pelayanan yang dibantu oleh kasie pelayanan di tiap-tiap desa dengan metode jemput bola. Metode jemput bola yang dilakukan LTPKD adalah mengunjungi rumah pemohon tersebut untuk dilayani sesuai dngan keperluan dan kebutuhannya. Dari aspek SDM pelaksana juga berdampak terhadap efisiensi pegawai yang mana sebelumnya total pegawai yang mengurus 3 pelayanan ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari PNS dan non PNS. Setelah status kepegawaian menginduk ke BAPPEDA dengan inovasi LTPKD ini meyebabkan adanya efisiensi pegawai dan anggaran menjadi 10 orang (non PNS dan PNS).

Perbaikan metode pelayanan sejak adanya LTPKD ini berdampak terhadap jumlah layanan atau kartu yang diberikan untuk keluarga miskin yang tidak mendapatkan manfaat program sosial dari APBN atau pusat. Menjawab hal itu, LTPKD mampu memberikan pelayanan dengan memberikan kartu miskin kepada masyarakat kurang mampu dengan rincian sebagai berikut : Kartu Calakan 420 kartu menjadi 1.000 kartu atau meningkat 138%, Kartu Waluya 12.207 kartu meningkat menjadi 21.626 kartu atau 78% dan Kartu Walagri 235 kartu menjadi 609 kartu atau 159%. Peningkatan jumlah pelayanan yang dihitung dalam satuan tahun ini merupakan bentuk pelayanan terpadu yang diberikan selama 3 tahun terakhir.

Hal yang paling berdampak dari inovasi LTPKD adalah menurunnya angka putus sekolah tingkat SD/MI dari 4.80% menjadi 1.60% atau turun sebesar 3.20% dan SMP/MTs dari 3.40% turun menjadi 2.00% atau sebesar 1.40%. Hal ini membuktikan dengan peningkatan pelayanan dan memastikan masyarakat yang tidak menerima bantuan pusat dapat dicover oleh pelayanan LTPKD dapat menanggulangi isu pendidikan seperti angka putus sekolah. Bantuan pendidikan ini berupa uang sejumlah 750.000/tahun/siswa.

Melihat dampak tersebut, inovasi LTPKD cukup memberikan dampak terhadap efektivitas, efisiensi dan peningkatan jumlah layanan dalam waktu tertentu. Hal ini juga berdampak terhadap banyaknya masyarakat miskin yang belum tercover program pusat menjadi sasaran LTPKD untuk diberikan bantuan penanggulangan kemiskinan. Aspek pendidikan juga memberikan pengaruh baik terhadap penurunan angka putus sekolah siswa.

2) Inovasi LASKAR (Layanan Satu Hari Kelar) Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi LASKAR yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah inovasi dalam rangka mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan. Inovasi ini masuk ke dalam kategori inovasi pelayanan publik. Proses pelayanan kependudukan dalam satu hari selesai dua, tiga bahkan empat atau lima dokumen kependudukan. Adapun tujuan dari inovasi ini adalah

Memaksimalkan Pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan dokumen Dukcapil, Menciptakan tertib Administrasi kependudukan yang berdaya guna, Memberikan kepastian identitas masyarakat. Memberikan pelayanan lebih cepat, tepat, efisien dan efektif.

b. Data Perubahan

Inovasi LASKAR ini sudah memberikan perubahan yang positif. Berikut adalah perubahan penyelenggaraan pelayanan sebelum dan sesudah adanya LASKAR.

Tabel 4 Perubahan hasil Inovasi LASKAR

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	Biaya Transportasi	50.000	25.000	Rupiah	Efisiensi biaya 50%
	Jumlah SDM	7	5	Orang	Efisiensi tenaga 28.5%
Proses	Waktu layanan	7	1	Hari	Efisiensi waktu 85.7%
Output	Kartu Keluarga	200	400	Buah	100%
	Surat pindah	55	75	Buah	Produktivitas 36.3%
	Akta	100	365	Buah	Produktivitas 265%
	legalisir	1000	2000	Buah	Produktivitas 100%
	pengunjung	300	500	Orang	Produktivitas 66.6%
Dampak	<i>Peningkatan Layanan</i>	Adapun rata-rata peningkatan layanan yang terjadi akibat inovasi ini sebesar 79,31 %			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat efisiensi dan peningkatan produktivitas. Efisiensi biaya sebesar 50 persen, efisiensi SDM yang menyelenggarakan pelayanan 28, 5 persen, dan efisiensi waktu pelayanan sebesar 85,7 persen. Jika diakumulasi total perubahan yang berkaitan dengan efisiensi adalah 54,7 persen. Efisiensi biaya transportasi bisa terwujud karena warga cukup satu kali datang ke kantor Dispendukcapil, sebelumnya perlu datang dua sampai tiga kali ke kantor Dispendukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Sedangkan untuk peningkatan produktivitas jika diakumulasi adalah sebesar 113,6 persen. Adapun rinciannya adalah 100 persen meningkat untuk Kartu Keluarga, 36,36

persen meningkat untuk surat pindah, untuk dokumen catatan sipil terjadi peningkatan sebesar 265 persen, untuk layanan legalisir meningkat 100 persen, dan jumlah pengunjung meningkat sebesar 66,6 persen.

Perubahan lainnya juga terjadi pada prosedur mendapatkan pelayanan, dimana warga tidak perlu mengurus berbagai dokumen ke RT, Kelurahan, Kecamatan terlebih dahulu tetapi bisa langsung datang ke Dispendukcapil. Meskipun banyak warga yang datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, panjangnya antrian bisa diatasi dengan penambahan fasilitas. Loker pelayanan saat ini ada lima loket yang siap melayani warga.

d. Analisis Dampak

Secara keseluruhan persentase perubahan sebelum dan setelah inovasi hasil inovasi LASKAR ini adalah sebesar 79,31% dari sisi input, proses dan output. Dengan efisiensi sebesar 54,73% mampu meningkatkan produktivitas berupa output pelayanan sebesar 113%. Meningkatnya output pelayanan yang diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil adalah dampak nyata dari inovasi LASKAR ini.

Dampak lainnya dari Inovasi LASKAR ini adalah mengajak para Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dispendukcapil untuk bekerja lebih keras. Sesuai nama

Box 1 Testimoni Inovasi LASKAR

"Saya tidak perlu lagi lama-lama kalau mengantri. Kalau ingin mengurus surat pindah, akta ataupun kartu keluarga tidak perlu datang berkali-kali. Sekali datang semua dokumen beres. Pelayanannya memuaskan."

Maria (pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil)

inovasi maka layanan Satu Hari Kelar harus dipenuhi dan direalisasikan. Sebelumnya para ASN cenderung tidak optimal dan santai karena waktu untuk menyiapkan dokumen selama 7 hari. Inovasi ini bisa berjalan dan berdampak pada masyarakat tidak bisa dilepaskan dari *mindset* ASN

sebagai pelayan masyarakat. Perubahan *mindset* ini yang mendorong para ASN untuk bekerja lebih giat dan berperan sebagai pelayan masyarakat

Image birokrasi yang memiliki prosedur yang berbelit-belit (*redtape*) dapat ditepis dengan adanya inovasi ini. Slogan kalau bisa diperlama mengapa

dipercepat bisa diubah menjadi kalau bisa dipercepat mengapa harus diperlama. Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya inovasi ini seperti testimoni salah satu pengguna layanan di samping. selain terjadi penghematan uang masyarakat juga menghemat energi dan waktu dengan adanya inovasi Laskar ini

3) Inovasi Sjahrie Jaang Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Syaharie Jaang atau satu hari jadi langsung bawa pulang adalah salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sjahrie Jaang merupakan inovasi dalam pelayanan pulik. Sjahrie Jaang adalah inovasi dari sistem pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Keunggulan inovasi ini adalah penggunaan Smart Card dalam perpanjangan perizinan. Masyarakat yang ingin memperpanjang perizinannya tidak perlu lagi membawa berkas yang dipersyaratkan, cukup menunjukkan smart card karena di dalam aplikasi smart card, data perusahaan dan pemohon ijin telah terekam di dalam *database*. Perpanjangan perijinan dapat diproses dan dalam satu hari jadi izin dapat langsung dibawa pulang. Inovasi ini bertujuan untuk Efisiensi biaya, efektifitas dan percepatan waktu penyelesaian proses perpanjangan perizinan dan Menghindari pengulangan berkas persyaratan perizinan sehingga dapat mengurangi penumpukan berkas yang sama.

Inovasi ini dimulai sejak tahun 2015 saat menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebelum ada inovasi ini, para pengguna layanan yang ingin memperpanjang perizinan harus membawa kembali berkas-berkas seperti saat pengajuan awal. Tetapi dengan adanya smart card ini, data para pengguna layanan sudah tersimpan dalam sistem sehingga tidak perlu untuk membawa kembali berkas-berkas, cukup dengan smart card akan diperpanjang secara otomatis.

b. Data Perubahan

Sjahrie Jaang sudah berjalan selama tiga tahun dan memberikan dampak kepada masyarakat. Berikut adalah perubahan sebelum dan sesudah adanya inovasi Sjahrie Jaang:

Tabel 5. Perubahan hasil Inovasi Sjahrie Jaang

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	Biaya Transportasi	25.000	10.000	Rupiah	Efisiensi Biaya 60%
	Jumlah SDM	4	4	Orang	Tidak ada perubahan yaitu 0%
Proses	Waktu Mendapatkan 1 produk layanan	7	1	Hari	Efisiensi Waktu 85.7%
Output	Kualitas Pelayanan	81.38	89.41	Persen	Peningkatan Kualitas 9.8%
Dampak	Persentase Pemenuhan retribusi Daerah	91.85	92.72	Persen	0.95%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah)

Biaya transportasi mengalami pengurangan karena dalam satu hari proses perpanjangan langsung selesai. Warga yang ingin memperpanjang izin cukup datang satu kali. Selain itu, biaya untuk fotocopy berkas juga tidak ada karena semua data sudah masuk dalam sistem. Dengan demikian tidak ada penambahan penumpukan berkas. Lama pelayanan untuk perpanjangan juga semakin singkat hanya 1 hari dari tujuh hari atau terjadi perubahan 85,7 persen. Pada hari yang sama pengguna layanan langsung mendapatkan perpanjangan izin, tidak perlu datang berkali-kali. Perubahan lainnya adalah skor IKM yang meningkat sebesar 9,8%. Sebelum adanya Sjahrie Jaang IKM

hanya 81,38 pada tahun 2018 semester kedua skor IKM meningkat menjadi 89,41.

Pada indikator biaya terjadi penambahan biaya dalam pembuatan smart card sebesar 950 Rupiah per kartu. Biaya ini termasuk murah karena pembuatan kartu yang manual, belum menggunakan printer yang khusus untuk mencetak kartu. Meskipun ada penambahan biaya untuk pencetakan kartu, tetapi masyarakat merasa puas dengan pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP ini. hal ini bisa diketahui dari skor IKM yang meningkat dan kepatuhan pelayanan publik DPMPTSP.

c. Analisis Dampak

Dinas Perizinan tidak ditujukan untuk menjadi OPD yang bertujuan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dinas perizinan ditujukan untuk sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Saat ini kota Samarinda masih berada di zona kuning untuk kepatuhan pelayanan public, tetapi DPMPTSP sudah berada di zona hijau. Indeks Kepatuhan pelayanan publik ini dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia. DPMPTSP ini banyak melakukan inovasi dan mendapatkan penghargaan, selain dari Ombudsman Republik Indonesia ada juga penghargaan Inagara dari Lembaga Administrasi Negara.

Box 2 Testimoni Inovasi Sjahrie Jaang

"Saat ini memperpanjang izin sangat mudah. Tidak rumit sama sekali. Saya tidak perlu repot-repot membawa banyak berkas karena data sudah tersimpan di sistem. Selain itu, loketnya sangat nyaman dan bersih." - **Ahmad (pengguna layanan perizinan)**

Dampak lainnya adalah pencapaian target pada retribusi daerah. Pada tahun 2015 pencapaian target hanya 91,85% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu 92,72%. Kemudahan yang diberikan oleh DPMPTSP untuk mengurus dan memperpanjang perizinan ini berkontribusi pada pencapaian target

tersebut. Seperti kesan di samping, seorang pengguna layanan mengatakan bahwa : proses yang tidak rumit, tidak membutuhkan waktu yang lama dan

biaya lebih murah menjadi daya dorong untuk lebih sadar kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengurus dan memperpanjang perizinan.

4) Inovasi *Sunday Service Morning* Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah *Sunday Morning Service*. Inovasi *Sunday Morning Service* masuk dalam kategori inovasi pelayanan publik. *Sunday Morning Service* (SMS) adalah suatu inovasi layanan perizinan kepada masyarakat yang dilakukan pada hari libur (Hari Minggu). Layanan perizinan ini mengambil lokasi di Stadion Madya Sempaja – Samarinda. Pada Hari Minggu stadion Madya Sempaja menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan kegiatan olah raga, wisata kuliner maupun berdagang. Melalui Inovasi SMS diharapkan masyarakat yang tidak sempat mengurus perizinannya dihari kerja dapat langsung ke stand SMS, sembari berolah raga, wisata kuliner atau berdagang. Tujuan dari *Sunday Morning Service* adalah Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang tidak sempat meluangkan waktunya di hari kerja guna memperoleh layanan perizinan serta sebagai sarana penyampaian promosi dan informasi layanan perizinan. Pelayanan perizinan ini dilakukan setiap hari Minggu pukul 08.00-12.00 di stadion Madya Sempaja.

b. Data Perubahan

Inovasi ini sudah memberikan perubahan sejak diberlakukan sejak tahun 2015. Berikut adalah perubahan sebelum dan sesudah adanya inovasi *Sunday Morning Service*.

Tabel 6 Perubahan hasil Sunday Morning Service

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	Biaya Transportasi	25000	0	Rupiah	Efisiensi biaya 100%
Proses	Akses pelayanan	5	6	Hari	Penambahan hari 20%
Output	Kualitas Pelayanan	81.38	89.41	Persen	Peningkatan Kualitas 9.8
Dampak	Persentase Capaian Retribusi	91,85	92,2	Persen	Peningkatan persentase 0,38%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah)

c. Analisa Dampak

Tidak ada biaya transportasi bisa dirasakan oleh warga karena datang ke stadion dalam rangka berkumpul bersama keluarga dan berolahraga sekaligus mengurus perizinan. Akses jam pelayanan juga bertambah dimana hari Minggu DPMPTSP tetap memberikan pelayanan kepada warga. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan para pegawai di DPMPTSP untuk bekerja di hari Minggu. Penjadwalan dilakukan setiap minggu dengan memperhatikan kesibukan para pegawai. Adapun yang bekerja setiap minggunya di Sunday Morning Service ada enam orang. Karena bekerja di luar jam kerja, maka ada biaya operasional tambahan yang diberikan kepada petugas yang bekerja pada hari Minggu. Perubahan lainnya adalah metode pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP ini adalah jemput bola. Tidak menunggu masyarakat terutama para pengusaha untuk datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus izin. Para aparaturnya mendatangi masyarakat di Stadion Sempaja. Dengan inovasi ini mendekatkan perizinan kepada masyarakat. Selain itu, informasi perizinan dapat diketahui oleh masyarakat luas karena stadion madya sempaja pusat warga Samarinda

berkumpul pada saat hari Minggu. Untuk stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi adalah Bank Kaltim. Bank Kaltim menyediakan fasilitas awal untuk penyelenggaraan perizinan melalui *Sunday Morning Service*.

Inovasi ini merupakan respon atas padatnya aktivitas masyarakat pada saat ini. Selain padat, aktivitas masyarakat juga sangat kompleks dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks. Para pengusaha yang sangat sibuk atau kelompok masyarakat lainnya yang tidak bisa datang pada saat jam kerja pada hari Senin-Jumat bisa mengurus perizinan pada hari Minggu saat santai berkumpul bersama keluarga ke stasiun Sempaja. Pemerintah tidak boleh hanya diam dan menunggu di kantor, pemerintah daerah sudah menunjukkan inisiatif yang sangat baik dengan mendatangi masyarakat ke stadion Sempaja dan rela memberikan waktu liburnya pada hari Minggu untuk melayani masyarakat.

5) SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Samarinda yaitu :“Pelayanan Prima demi terwujudnya masyarakat Samarinda yang mandiri untuk hidup sehat” Sebagai bentuk perwujudan visi, misi Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

- a) Penguatan pelayanan kesehatan primer
- b) Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan
- c) Intervensi berbasis resiko kesehatan

Sehubungan dengan visi dan misi Dinas kesehatan ini maka penting bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan inovasi dalam rangka mendukung mewujudkan visi misi tersebut. Salah satu inovasi yang paling bermanfaat dari Dinas Kesehatan adalah Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA.

SIKDA atau Sistem Informasi Kesehatan Daerah adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Inovasi ini masuk ke dalam pelayanan publik di bidang data dan informasi kesehatan dan jaringan komunikasi data di

OPD dan UPT Dinkes. Tujuan dari inovasi ini adalah penguatan pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah.

Pada umumnya SIKDA ini sudah dimiliki oleh setiap kabupaten dan kota namun yang berbeda SIKDA yang dipunyai oleh dinas kesehatan ini adalah SIKDA. Dinas Kesehatan sudah melakukan integrasi dengan BPJS Pusat dengan sistem Piker dimana sistem piker ini memberikan akses *software* yang dimiliki oleh BPJS Pusat. Dengan dengan piker ini semua dokter dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh BPJS dapat memasukan data setiap data kunjungan, rujukan pasien ke Piker dan semua data di rekapitulasi oleh dinas kesehatan.

Sebelum adanya penggabungan kedua sistem ini, setiap pukesmas mempunyai data data pasien terpisah dimana data data masing masing dimiliki oleh Puskesmas dan BPJS. Untuk mempermudah pendataan atau mencari data maka dinas kesehatan melakukan sebuah inovasi dengan melakukan penggabungan aplikasi SIKDA dengan aplikasi PIKER, dengan penggabungan ini semua data yang ada di sikda secara otomatis akan terbaca di aplikasi piker BPJS. Aplikasi ini sudah diakui dan mendapat penghargaan dari BPJS pusat. Tindak lanjut dari inovasi ini adalah dibuatkan satu system Yaitu PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) adalah program nasional (2016) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan merupakan sebuah aplikasi untuk melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan pendataan kesehatan keluarga, proram brizing ini berkerja sama dengan dinas komimfo sebagai penyedia jaringan internet, dengan berkerjasama ini diharapkan permasalahan jaringan internet akan teratasi.

Informasi yang didapatkan melalui SIKDA ini adalah data epidemiologi demam berdarah, data diare realtime, data Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) realtime, Data Kesehatan Ibu hamil *realtime*.

b. Data Perubahan

Perbedaan lainnya sebelum dan sesudah ada SIKDA adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perubahan hasil Inovasi SIKDA

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	Biaya transportasi	20.000	10.000	Rupiah	Efisiensi 50%
	Jumlah SDM	1	3	Orang	Penambahan SDM 200%
Proses	Waktu Pelayanan	37	17	Menit	Kecepatan waktu pelayanan 54.05%
Output	Jumlah pasien/ hari	3	14	Pasien	Produktivitas Puskesmas 366.6%
Dampak	Penguatan Layanan	Terjadinya rata-rata penguatan layanan sebesar 181,8 %			

Sumber: Dinas Kesehatan (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Dengan adanya SIKDA ini, masyarakat yang ingin berobat bisa mendaftar melalui aplikasi. Bahkan masyarakat bisa mengetahui kapan harus datang ke puskesmas setelah mendaftar. Dengan demikian tidak perlu ada antrian panjang di puskesmas maupun rumah sakit. Artinya dengan adanya SIKDA ini ada efisiensi waktu dalam pendaftaran. Begitu pula dalam waktu tunggu yang semakin berkurang karena sudah mendaftar terlebih dahulu melalui sistem. Bahkan jika ada masyarakat peserta BPJS dari luar Samarinda bisa berobat di Samarinda karena database peserta BPJS yang dimiliki SIKDA Samarinda sudah nasional. Hal ini terlihat dari pengunduh aplikasi SIKDA ini ada dari Makassar dan dari Balikpapan.

Jumlah pasien yang ditangani juga bertambah. Semula hanya 3 pasien menjadi 14 pasien. Ini karena masyarakat sangat dekat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kepastian dalam mendapatkan pelayanan. Pasien tidak perlu bolak-balik datang ke puskesmas atau rumah sakit karena sudah mendaftar melalui SIKDA.

Selain perbedaan di atas, perbedaan lainnya adalah sistem pelayanan yang *online* tidak lagi *offline* dan konvensional. Tetapi ini berlaku pada masyarakat yang memiliki *smartphone* dan mengunduh aplikasi SIKDA di *smartphone*, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki *smartphone* harus tetap mengikuti proses *offline*, dimana mendaftar secara manual dan menunggu giliran dipanggil untuk pemeriksaan. Tetapi proses pelayanan sudah sangat jelas dan dapat mencegah terjadi kecurangan terutama bagi pengguna BPJS. Bahkan dipastikan jika masyarakat ditangani dengan baik.

Puskesmas menjadi lebih taat dalam sistem pelaporan melalui SIKDA Samarinda. Sebelumnya petugas puskesmas tidak taat prosedur, Ketaatan pada prosedur ini dikarenakan adanya verifikasi berjenjang. Bahkan saat ini Stakeholders Puskesmas berkontribusi sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder. Stakeholder lainnya yang diajak bekerjasama adalah Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan data NIK pasien.

6) Layanan Perizinan Secara Online Dan Layanan Izin 3 Jam (SIPERI) Kabupaten Kebumen

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi SIPERI digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen. SIPERI merupakan salah satu inovasi Kabupaten Kebumen yang mampu masuk ke dalam TOP 99 SINOVIK Kemenpan RB 2017 dengan nama Layanan Perizinan Secara Online Dan Layanan Izin 3 Jam. Inovasi berjenis pelayanan publik ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan perizinan Kabupaten Kebumen yang masih bercirikan; (a) pelayanan masih manual, (b) proses perizinan yang masih membutuhkan waktu lama (2 hingga 15 hari), (c) formulir perizinan yang masih rumit dan sulit

diakses, dan (d) prosedur penerbitan perizinan yang seringkali panjang akibat bolak-baliknya pemohon memenuhi persyaratan.

Oleh karena itu inovasi SIPERI diciptakan dengan tujuan mempermudah dan mempercepat prosedur pelayanan perizinan dengan memangkas waktu pengurusan 14 jenis izin, dari yang semula paling cepat 3 hari hingga 15 hari selesai menjadi maksimal 3 jam. SIPERI juga bertujuan memberikan keterbukaan akses pelayanan perizinan dengan penggunaan portal online. Melalui laman <http://perizinan.kebumenkab.go.id>, masyarakat pemohon perizinan dapat mengetahui dan mengumpulkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan guna mendapatkan pelayanan perizinan dengan waktu maksimal 3 jam. Selain itu inovasi ini bertujuan untuk mengurangi pungutan liar, mengingat pemohon dapat mengumpulkan persyaratan perizinan secara online dan berkurangnya pertemuan antara petugas dan pemohon. Keempatbelas jenis layanan perizinan yang dipangkas hingga 3 jam tersebut antara lain;

Tabel 8. Perbandingan Waktu Layanan 14 Jenis Perizinan DPMPTSP Kebumen

No	Jenis Izin	Lama Waktu Pengurusan	
		Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1.	Izin Prinsip Non-Penanaman Modal	15 hari	3 jam
2.	Izin Usaha Pengangkutan	5 hari	3 jam
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	2 hari	3 jam
4.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2 hari	3 jam
5.	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari	3 jam
6.	Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	3 hari	3 jam
7.	Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari	3 jam
8.	Izin Penggunaan Gedung Juang	5 hari	3 jam
9.	Izin Penggunaan Stadion	5 hari	3 jam
10.	Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen	5 hari	3 jam
11.	Izin Penggunaan Gedung Pertemuan	5 hari	3 jam
12.	Izin Pemasangan Reklame	5 hari	3 jam
13.	Izin Menempati Kios/Los	3 hari	3 jam
14.	Izin Usaha Kepariwisataaan	5hari	3 jam

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Data diolah)

b. Data Perubahan

Inovasi SIPERI telah mendorong kemudahan bagi masyarakat Kebumen dalam mengurus perizinan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Berikut adalah analisis mengenai perubahan penyelenggaraan inovasi :

Tabel 9. Perubahan hasil Inovasi SIPERI

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	SDM Pelaksana	6	6	Layanan	perubahan pegawai 0%
Proses	Waktu Layanan	40	3	Jam	Efisiensi Waktu 93%
	Prosedur Layanan	7	4	Tahap	Efisiensi tahapan layanan 40%
Output	Kualitas Mutu Layanan	Tahun 2015 = 77	Tahun 2016 = 80	SKM	Peningkatan nilai SKM sebanyak 4%
Dampak	Jumlah Realisasi Investasi Daerah	324	407	Miliar	Peningkatan jumlah Realisasi Investasi Daerah sebesar 25%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Inovasi SIPERI, telah memberikan berbagai perubahan pelayanan perizinan pada kabupaten Kebumen. Dampak perubahan tersebut dapat dirasakan oleh baik masyarakat dan pemerintah kabupaten Kebumen antara lain:

- a) **Pengurangan waktu layanan.** Perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan penerbitan perizinan adalah pengurangan waktu pengurusan. Dengan penggunaan portal perizinan secara online, DPMPSTSP memotong prosedur layanan yang biasanya cukup memakan waktu apabila dilakukan secara manual. Proses penyerahan dan verifikasi kelengkapan syarat perizinan dilakukan melalui portal online SIPERI. Sehingga setelah berkas persyaratan tersebut telah dicek secara online, maka pemohon akan dipanggil DPMPSTSP Kebumen untuk membawa

berkas asli. Pemohon hanya perlu menunggu proses penandatanganan surat izin untuk disahkan. Hal ini yang membuat waktu pengurusan perizinan di kantor DPM PTSP bisa berkurang dari sebelumnya maksimal 5 hari menjadi maksimal 3 jam.

- b) **Pengurangan prosedur layanan.** Sebelum diterapkan SIPERI, pemohon perizinan harus melewati 7 tahap dan bisa bertambah apabila berkas persyaratan yang dibawa kurang atau diperlukan peninjauan lapangan. Setelah diterapkan inovasi SIPERI, maka pemohon hanya perlu melalui 4 tahap, karena proses input, analisis kebutuhan peninjauan lapangan dan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan perizinan dilakukan secara online. Masyarakat juga dipermudah dalam mengetahui info dan mengumpulkan syarat penerbitan perizinan dengan cara mengakses laman online SIPERI. Tidak perlu datang ke kantor DPMPSTSP untuk mengetahui info tersebut. SIPERI juga merubah proses validasi berkas yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara online. Sehingga proses validasi berkas persyaratan perizinan bersifat *paperless* karena pemohon telah mengisi formulir penerbitan perizinan secara online sebelumnya.
- c) **Peningkatan Kualitas Mutu Layanan.** Kemudahan layanan dengan keberadaan SIPERI juga tercermin dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 (sebelum inovasi) sebesar 77,65 dan Tahun 2016 (sesudah dilaksanakan inovasi) dengan nilai 80.
- d) **Peningkatan jumlah realisasi investasi daerah.** Berbagai kemudahan pelayanan tersebut berdampak pada realisasi investasi Kabupaten Kebumen. Dengan kecepatan layanan yang ditawarkan SIPERI, semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di kabupaten Kebumen. Tercatat terjadi peningkatan yang jumlah realisasi investasi daerah pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 324.436.112.069,00 menjadi Rp 406.971.636.524,00 di tahun 2016. Peningkatan ini cukup signifikan yakni 25% hanya dalam satu tahun.

Inovasi SIPERI telah memberikan manfaat yang nyata bagi pelayanan perizinan Kabupaten Kebumen. Manfaat inovasi tersebut dirasakan baik oleh masyarakat maupun petugas perizinan. Masyarakat yang mengajukan perizinan kini mendapat kepastian akan besarnya biaya, singkatnya waktu dan mudahnya prosedur pengurusan. Terutama bagi kalangan dunia usaha dengan tingkat kesibukan dan mobilitas yang relatif tinggi. Masyarakat pemohon juga diuntungkan secara ekonomi, karena tidak perlu membayar calo perizinan dikarenakan berkurangnya proses tatap-muka antara petugas dan pemohon. Sebaliknya, SIPERI juga mengurangi beban petugas pemroses dan menghemat biaya operasional perkantoran karena menghemat tenaga, waktu, dokumen, akibat berkurangnya tatap muka langsung dengan pemohon.

7) *Home Care* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohammad Rabain Kabupaten Muara Enim

a. Deskripsi Inovasi

Program home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Sasaran dari program ini adalah pasien pasca perawatan dengan resiko tinggi misalnya pasien dengan penyakit kardiovaskular, stroke, fraktur, penyakit degenerative, kasus resiko tinggi, dan pasien dengan pengobatan jangka panjang, bagi pasien dengan ekonomi rendah atau miskin.

Awal mula lahirnya program home care ini adalah karena berdasarkan pengamatan para tenaga kesehatan di RSUD dr. H.Mohammad Rabain diketahui bahwa banyak sekali pasien pasca perawatan beresiko tinggi yang tidak mematuhi jadwal kontrol yang telah ditentukan oleh dokter. Hal ini terjadi karena berbagai alasan misalnya jarak rumah-RSUD yang cukup jauh, tidak memiliki uang untuk ongkos ke rumah sakit, kurang peduli dengan penyakit,

dll. Akibatnya banyak pasien beresiko tinggi tersebut kembali ke RSUD ketika keadaan penyakitnya semakin parah bahkan sudah tidak tertolong.

Karena latar belakang tersebut, maka RSUD dr.H Mohammad Rabain memiliki ide untuk melakukan program Home Care. Program ini adalah sebagai bentuk pelayanan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tujuan terjalannya silaturahmi dan hubungan baik antara rumah sakit dengan pasien dalam meningkatkan derajat kesehatan dalam mewujudkan Muara Enim SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis, Sejahtera) sebagai cita-cita masyarakat kabupaten Muara Enim.

Terdapat lima tujuan dari inovasi ini yaitu :

- Meningkatkan kemandirian klien dalam mencegah komplikasi penyakit kronik.
- Meningkatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.
- Biaya kesehatan akan lebih terkendali.
- Mutu pelayanan keperawatan rumah sakit akan lebih meningkat.
- Memberikan variasi lingkungan kerja.

Kegiatan inovasi ini sudah dituangkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Nomor : 26/KPTS/RSUD-HMR/2015 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Home Care di RSUD Dr. H. Mohamad Rabain.

b. Data Perubahan

Tabel 10 Perubahan hasil Inovasi *Home Care*

Indikator	Variabel	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	Biaya Langsung	30.000	0	Rupiah	Efisiensi 100%
	Biaya Tidak Langsung	100.000	0	Rupiah	Efisiensi 100%
Proses	Waktu Layanan	60	30	Menit	Efisiensi waktu pelayanan 50%
Output	Kualitas mutu layanan	Tahun 2014 = 3,0 atau 60% (cukup puas)	Tahun 2017 = 4,15 atau 83% (memuaskan)	SKM	Meningkatnya SKM sebesar 23% dengan asumsi skala likert (1-5)
Dampak	Peningkatan Kualitas Layanan	Terjadinya rata-rata penguatan kualitas layanan sebesar 57,7 %			

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamads Rabain (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Biaya

Dampak dari inovasi ini sangat terlihat dari biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan ekonomi rendah seperti biaya administrasi, tebus obat, hingga transportasi, dan akomodasi. Biaya yang dikeluarkan untuk administrasi misalnya sebesar Rp.30.000, belum lagi ditambah dengan biaya tebus obat yang berkaitan dengan medis.

Dari kondisi geografis Kabupaten Muara Enim yang tiap kecamatannya berjauhan, sehingga menyulitkan masyarakat yang berada di luar daerah ke RSUD Dr. H. Mohammad Rabain. Rerata biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk transportasi berkisar diangka paling tinggi Rp. 50.000,- (pulang-pergi) ditambah akomodasi lainnya Rp. 30.000,- per hari. Sedangkan dari Kecamatan Semende Darat Ulu yang merupakan kecamatan paling jauh dari RSUD misalnya, bisa mencapai Rp. 100.000,- (pulang-pergi) yang bahkan tidak cukup satu hari untuk menginap di sana.

Hadirnya inovasi ini tentunya memangkas biaya-biaya tersebut. Kedatangan tim medis dan penyuluh dari RSUD memberikan dampak yang besar. Sasaran dari inovasi ini memang masyarakat ekonomi rendah, pasca perawatan di RSUD. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa menjadi 0 atau sama sekali gratis dalam hal ini. Selain itu, masyarakat yang menjadi target inovasi home care ini tidak perlu membayar uang apapun kepada petugas atau tim yang datang ke rumah mereka.

Waktu Layanan

Perubahan mekanisme ini yang awalnya masyarakat datang langsung ke RSUD dengan menunggu saja di rumah, berdampak kepada waktu layanan yang diterima oleh masyarakat. Waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menerima layanan kesehatan yang biasanya 60 menit mulai dari pendaftaran hingga penindakan dan selesai, kini bisa dipangkas hanya 30 menit saja.

Pengurangan waktu tunggu sebesar 30 menit ini dipangkas dari waktu tunggu di rumah sakit yang sudah tidak ada lagi dengan efisiensi sebesar 50%, karena mekanisme tim yang langsung melakukan penindakan apabila ada gejala kronis atau yang dirasa perlu dilakukan di rumah pasien. Dengan kata lain, inovasi ini menghilangkan sama sekali waktu tunggu ketika masyarakat datang ke rumah sakit.

Kualitas Mutu Layanan

Pada tahun 2014, sebelum adanya inovasi ini, tingkat kualitas mutu layanan ke masyarakat terhadap pelayanan publik RSUD berada diangka 3,0 atau cukup puas. Secara berturut turut hingga tahun 2017 angkanya mengalami peningkatan diantaranya 3,15 (2015), 3,4 (2016), hingga yang terakhir 4,15 (2017). Apabila diberikan presentase peningkatan dari tahun 2014 ke 2017 sebesar 23%. Dihitung dari perbandingan apabila skala 5 menunjukkan 100%. Maka ditahun 2016 tingkat kualitas sebesar 60% dan meningkat menjadi 83% di tahun 2017.

8) Inovasi ALUR CERITA (Alat Ukur Cerdas Ibu, Bayi dan Balita) Kabupaten Ciamis

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi ALUR CERITA merupakan jenis inovasi dalam bidang pelayanan publik, yang digagas oleh Ibu Elis Lismayani, S.ST., S.K.M. Inovasi ini dibuat sebagai Project Perubahan ketika beliau mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim IV) Kabupaten Ciamis tahun 2017. ALUR CERITA merupakan sebuah alat ukur berbentuk seperti pita untuk mengukur antropometri pada ibu hamil, bayi dan balita dengan menggunakan skala ukur cm (centimeter). Alat ini merupakan gabungan dan modifikasi beberapa jenis alat ukur dan beberapa parameter pengukuran menjadi satu alat, sehingga dalam penggunaannya lebih efektif, efisien, cepat dan akurat. Selain itu juga dapat langsung menganalisa hasil ukur karena indikator hasil pengukuran.

Ide awal dari ALUR CERITA ini bermula dari pengalaman di lapangan yang beliau temui yaitu banyaknya permasalahan kesehatan yang dialami oleh ibu hamil dan balita. Diantaranya ibu hamil yang mengalami KEK (Kurang Energi Kronis), ibu hamil anemia, BBLR (Bayi Berat Lahir Ringan), balita/bayi gizi buruk, dan sebagainya akibat dari pelayanan kesehatan yang belum optimal. Selain itu ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator kesehatan ibu dan anak yang penggunaannya cukup rumit dan harganya relatif mahal. Beliau yang berlatar belakang sebagai bidan dan sehari-hari masih praktek sebagai bidan pun merasakan sendiri kendala-kendala tersebut. Beliau pun kemudian berpikir, mungkin diluar sana tenaga kesehatan khususnya bidan juga merasakan hal yang sama seperti yang Beliau rasakan. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi beliau menciptakan inovasi ALUR CERITA ini.

Inovasi ini bertujuan agar tenaga kesehatan khususnya bidan dapat melakukan pemeriksaan untuk ibu hamil, bayi dan balita dengan satu alat ini saja sehingga dapat mempercepat pelayanan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui deteksi dini, resiko tinggi/komplikasi dan status gizi serta kesehatan ibu hamil, bayi dan balita.

b. Data Perubahan

Inovasi ALUR CERITA memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11 Perubahan hasil Inovasi ALUR CERITA

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	Biaya Langsung	450.000	50.000	Rupiah	Efisiensi biaya 88,9 %
Proses	Waktu Pelayanan	Ibu Hamil = 2,20	Ibu Hamil = 1,01	menit	Pelayanan Ibu Hamil = 56,42 %
		Bayi & Balita = 2,38	Bayi & Balita = 1,10	menit	Pelayanan Bayi & Balita = 55,7 %
Output	Jumlah Layanan yang Dihasilkan	Ibu Hamil : 7.854	Ibu Hamil : 9.805	layanan	Pelayanan Ibu Hamil : 24,84 %
		Bayi & Balita : 366.093	Bayi & Balita : 456.870	layanan	Pelayanan Bayi & Balita : 24,8 %
Dampak	Peningkatan kualitas Layanan	Peningkatan kualitas layanan yang terjadi akibat inovasi ini sebesar 56,48 %			

Sumber : Dinas Kesehatan (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Inovasi ALUR CERITA memberikan dampak pada efisiensi anggaran untuk pengadaan alat ukur untuk pelayanan ibu hamil, bayi dan balita. Sebelum ada inovasi ALUR CERITA, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan alat untuk memberikan pelayanan KIA sebesar 450.000. Dengan rincian 350.000 untuk alat stadiometri, 100.000 untuk pita lila dan metlin. Lalu setelah ada inovasi ALUR CERITA ini, anggaran yang dibutuhkan hanya 50.000 untuk pengadaan alat. Hal ini dikarenakan fungsi ketiga alat tersebut sudah dapat digantikan oleh

ALUR CERITA. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2015 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 12.950.000 untuk pengadaan 37 alat stadiometri. Sedangkan pada tahun 2018 ini (hingga bulan Juni 2018) anggaran untuk pengadaan 175 ALUR CERITA hanya Rp 8.750.000.

Dalam aspek waktu pelayanan, inovasi ALUR CERITA juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Sebelum adanya ALUR CERITA, pelayanan untuk ibu hamil membutuhkan waktu 2 menit 20 detik.

Setelah adanya ALUR CERITA pelayanan untuk ibu hamil hanya 1 menit 01 detik. Sedangkan untuk pelayanan bayi dan balita, sebelum ada inovasi ALUR CERITA dibutuhkan waktu 2 menit 38 detik. Setelah adanya inovasi ALUR CERITA, waktu pelayanan hanya 1 menit 10 detik.

“Sebelum adanya ALUR CERITA, pelayanan untuk ibu hamil membutuhkan waktu **2 menit 20 detik**. Setelah adanya ALUR CERITA pelayanan untuk ibu hamil hanya **1 menit 01 detik**.”

Hal tersebut berimbas terhadap produktivitas. Dengan berkurangnya waktu layanan (pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita), maka semakin banyak pula yang dapat dilayani. Sebelum adanya inovasi ALUR CERITA, untuk pelayanan ibu hamil 2.140 pada tahun 2017. Setelah adanya ALUR CERITA, pelayanan ibu hamil mengalami menjadi 3.655. Terjadi peningkatan sebesar 41%. Untuk pelayanan bayi dan balita sebelum adanya ALUR CERITA sejumlah 2.258 pada 2017. Sedangkan setelah adanya ALUR CERITA pelayanan menjadi 3.878. Terjadi peningkatan sebesar 41,8%.

Ditinjau dari segi kualitas mutu layanan, sebelum adanya inovasi ALUR CERITA alat yang digunakan untuk memberikan pelayanan yaitu stadiometri pita lila dan metlin. Stadiometri terbuat dari kayu dan membutuhkan perawatan karena setelah beberapa tahun dapat mengalami pemuaihan dan lapuk. Sedangkan pita lila & metlin terbuat dari kertas, yang mana itu mudah sobek. Sedangkan bahan untuk ALUR CERITA terbuat dari bahan untuk banner, yang terbukti awet dan tahan lama. ALUR CERITA yang pertama kali dibuat pada November 2017 bahkan masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan hingga saat ini.

Kemudian dari segi Pola Pikir / Kesadaran / Kedisiplinan, adanya inovasi ALUR CERITA memberikan dampak bagi tenaga kesehatan (bidan) dalam mendeteksi gangguan kesehatan pada ibu hamil, bayi dan balita. Dari yang sebelumnya lambat mendeteksi jika ada gangguan kesehatan karena banyak alat yang digunakan dan waktu yang lama untuk melakukan analisa, setelah ada inovasi ALUR CERITA semua parameter dapat cepat diukur dan diketahui hasilnya. Gangguan kesehatan dapat cepat dideteksi, sehingga jika ditemukan indikator yang di bawah batas normal ketika pemeriksaan, dapat segera diberikan tindakan lebih lanjut.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

1) SICEPOY (Sidang Cepat Operasi Yustisi) Satpol PP Kota

Pontianak

a. Deskripsi Inovasi

Program Sicepoy yang dilakukan untuk menanggulangi perbuatan asusila di kalangan muda-mudi. Menciptakan rasa aman, nyaman dan damai dalam melakukan berbagai aktivitas yang menjadi tujuan pokok bagi segenap masyarakat, khususnya bagi warga Kota Pontianak untuk lebih maju dan berdaya saing. Selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar ataupun pemilik kos/penginapan juga berusaha untuk membersihkan setiap laporan masyarakat tentang adanya dugaan sidang di bawah meja, sehingga setiap pelanggaran perbuatan asusila tidak disidang tipiringkan. Hal ini tidak kalah pentingnya untuk menghilangkan stigma negatif adanya oknum nakal Satpol PP Kota Pontianak yang diduga menerima pungli.

Sicepoy adalah suatu kegiatan penegakkan hukum (Perda No. 3 Tahun 2004 Jo. No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua) khusus pasal 44 ayat (1) dan (2). Bentuk kegiatan yaitu berupa razia kos/penginapan/hotel yang langsung disidang tipiring (tindak pidana ringan) di Pengadilan Negeri Pontianak. Program Sicepoy ini merupakan sebuah model yang terintegrasi, sistematis dan terukur dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan mendorong pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan setiap Rabu

dan Kamis dari pukul 05.00 - 08.00 WIB dan langsung disidang tipiringkan pada hari itu juga.

b. Data Perubahan

Tabel 12 Perubahan hasil Inovasi SICEPOY

Indikator	Variabel	Sebelum	Sesudah	Satuan	Perubahan
Input	SDM	60	25	Petugas	Efisiensi sebesar 58,3%
Proses	Waktu Layanan	7	1	hari	Efisiensi sebesar 85,71%
Ouput	Jumlah Pelanggaran	2 pelanggaran yang disidangkan dalam kurun 5 hari kerja (satu minggu)	8 pelanggaran yang disidangkan dalam kurun 5 hari kerja (satu minggu)		Terdapat peningkatan produktivitas sebesar 300%

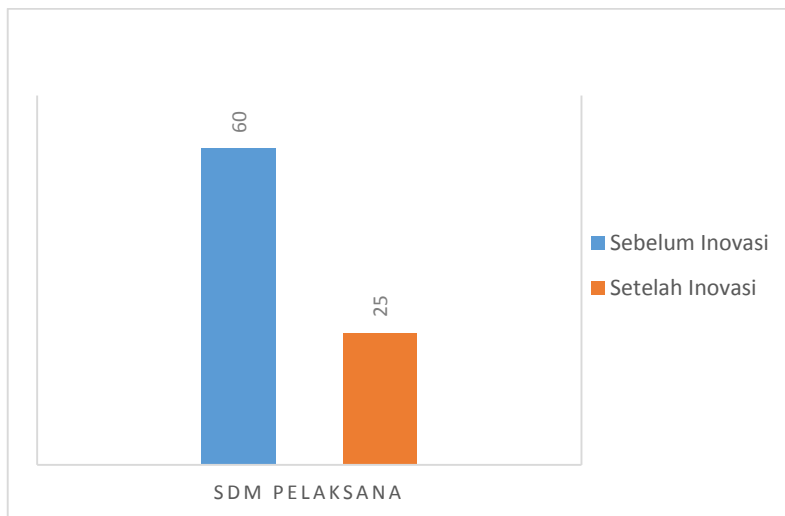
Sumber : Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Jumlah SDM Pelaksana

Terjadi penurunan jumlah SDM Pelaksana yang melakukan razia dalam inovasi ini. Artinya terdapat efisiensi sebesar 58.3% dalam pelibatan SDM Pelaksana yang awalnya 60 orang menjadi hanya 25 orang saja.

Grafik 2 Penurunan jumlah SDM Pelaksana Razia

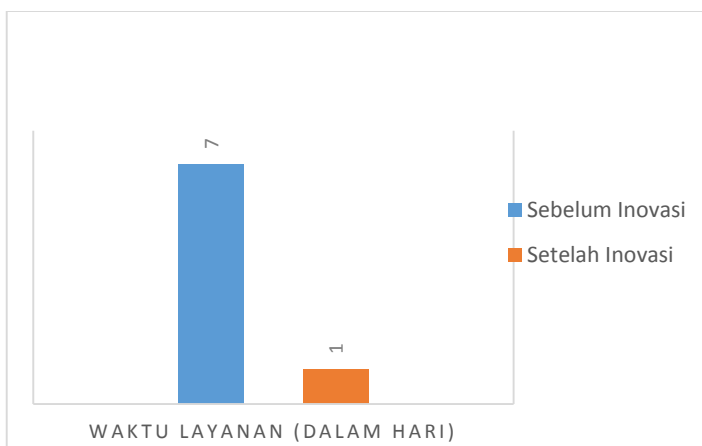


Sumber : Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Data diolah)

Mekanisme

Sebelum dilaksanakan penegakan Perda dan Perkada melalui sidang tipiring, kesadaran masyarakat untuk mentaati segala Perda dan Perkada di kota Pontianak dianggap masih rendah karena setiap pelanggaran sebagian besar hanya dilakukan pembinaan dan usaha penyadaran agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Grafik 3 Efisiensi waktu layanan sidang TIPIRING



Sumber : Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Data diolah)

Pada saat sebelum penerapan inovasi ini, sidang dilakukan bisa menunggu hingga 1 minggu, setelahnya sidang dilakukan antara jam 05.00-08.00 di hari yang sama. Artinya terdapat pemotongan waktu yang cukup signifikan dalam hal penyelesaian kasus tipiring. Apabila dikalkulasi, terjadi efisiensi waktu tunggu sidang tipiring sebesar 85.71%

Setelah adanya inovasi ini, sicepoy mempunyai mekanisme yang akan ditempuhlah melalui upaya penegakan hukum sidang tipiring yang akan lebih tegas. Hal ini punya kemampuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar atau masyarakat. Sanksi dari pengadilan yang sebagian besar berupa denda atau subsidi kurungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Pontianak.

Jumlah Pelanggaran

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pampon Praja, Syf. Adriana Farida, SE., M.Si., yang merupakan inovator dari inovasi ini, menyatakan bahwa penurunan tingkat perilaku asusila ketika mereka melakukan razia. Pada tahun ini, tiap kali melakukan razia paling banyak hanya ada dua pasangan muda-mudi saja, bahkan sering kali tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya dampak dari efek jera yang dihasilkan dari inovasi ini. Dari mekanisme kerjanya sendiri, berdasarkan pernyataan beliau, bahwa ada sebanyak dua intel yang berperan beberapa hari sebelumnya untuk bisa menyisir kos/penginapan mana yang berpotensi dijadikan tempat berbuat zina.

Perubahan Pola Pikir

Dampak untuk internal Satpol PP sendiri memperbaiki tata kelola SDM dalam segi pendisiplinan. Adanya inovasi ini berdampak kepada tidak ada lagi pungli ketika ada razia. Oknum Satpol PP kini tidak bisa lagi meminta uang "damai" kepada pelaku yang terjaring razia, karena memang proses yang singkat dan harus diselesaikan pada hari itu juga sebelum pukul 08.00 pagi dan diawasi langsung oleh atasan. Kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP Kota Pontianak semakin tinggi dapat dilihat dari laporan yang disampaikan baik

secara lisan, tulisan, media elektronik agar setiap masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diselesaikan melalui Satpol PP Kota Pontianak.

Tidak ada lagi laporan masyarakat terhadap adanya pungli yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kota Pontianak terhadap pelayanan masyarakat di bidang penegakan Perda dan Perkada dibuktikan dengan penilaian dari Ombudsman Perwakilan Kalbar dan penghargaan WOW SERVICE dari Markplus.

2) Inovasi SP2D On Line (Surat Perintah Pencairan Dana On Line) Kabupaten Purbalingga

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi SP2D Online termasuk jenis inovasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Badan Keuangan Daerah kepada OPD/pihak ketiga/masyarakat tanpa memangkas birokrasi dan kewenangan oleh OPD yang terkait.

Inovasi SP2D online merupakan terobosan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa tengah dan Bank Jateng Cabang Purbalingga dengan membangun sebuah sistem aplikasi berbasis teknologi. SP2D online dihadirkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, efektif, efisien, akurat, transparan dan akuntabel. SP2D online di Lingkungan Pemkab Purbalingga mulai diimplementasikan sejak 12 Juli 2017.

Untuk menjamin keberlanjutan dari inovasi ini dikuatkan dengan kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati Purbalingga nomor 98 tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

b. Data Perubahan

Tabel 13 Perubahan hasil Inovasi SP2D *Online*

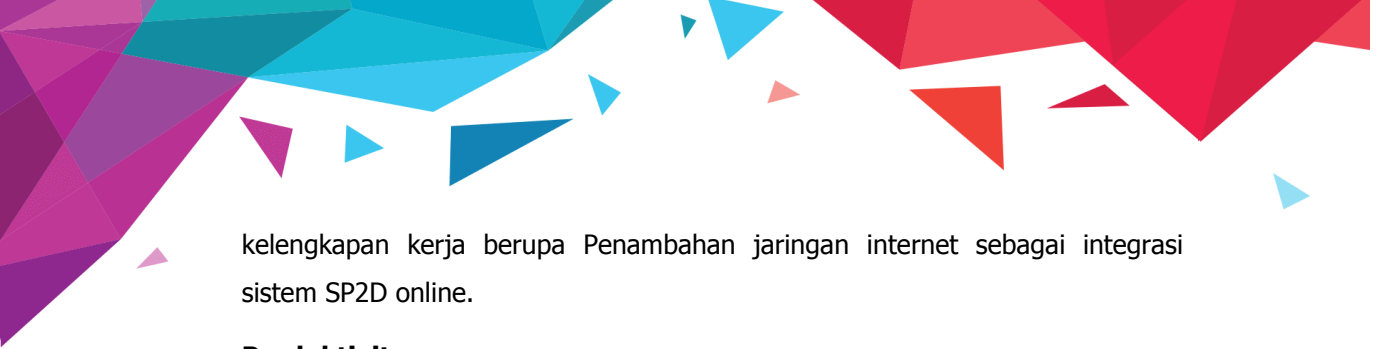
Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Sumber Daya Manusia	13 orang tenaga administrasi	7 orang tenaga administrasi	Efisiensi tenaga pengelola sebesar 46,2 %
Proses	Waktu Layanan	5 hari	2 hari	Efisiensi waktu pelayanan 60 %
Output	Produktivitas	Januari – Juni 2016 telah diproses sebanyak 6.490 dokumen	Januari - Juni 2018 telah diproses sebanyak 7.857 dokumen	Peningkatan produktivitas sebesar 21 %
Dampak	Efisiensi SDM dan Kecepatan layanan	Terjadi efisiensi pada SDM dan kecepatan layanan sebesar 35,7 %		

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Efisiensi Waktu

Penerapan inovasi SP2D online telah berdampak pada efisiensi waktu dalam proses pencairan dana. Mekanisme yang dilakukan tidak lagi secara manual namun telah berbasis daring dan terkoneksi antar institusi. Sebelum adanya inovasi proses pencairan dana bisa memakan waktu hingga 5 hari kerja. Hal ini disebabkan karena proses manual membutuhkan mobilitas untuk pengurusan kelengkapan SP2D. Namun setelah adanya inovasi OPD hanya dalam jangka waktu 1-2 hari telah dapat mengetahui SP2D yang tercetak. Selain itu, melalui inovasi ini OPD dapat mengirimkan SPM (Surat Perintah Membayar) tanpa harus menyertakan SPJ. Berbeda dengan sebelum adanya inovasi dimana OPD diwajibkan untuk menyertakan SPJ. Seluruh pemrosesan SPM tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan telah tersistem secara online yang terkoneksi dengan Bank Jateng. Oleh karenanya inovasi ini membutuhkan



kelengkapan kerja berupa Penambahan jaringan internet sebagai integrasi sistem SP2D online.

Produktivitas

SP2D online dalam perjalanannya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam hal outputnya. Adapun peningkatan proses dokumen melalui SP2D online hingga Juni 2018 mencapai 7.857 dokumen yang terproses secara online. Berbeda halnya dengan sebelum adanya inovasi, proses dokumen dari Januari s.d. Juni 2016 hanya ada 6.490 dokumen SP2D melalui proses secara manual. Sedangkan untuk tahun 2017 di bulan Januari s.d. Desember Bakeuda Pemkab Purbalingga telah selesai memproses sebanyak 17.774 dokumen secara online.

Peningkatan jumlah dokumen yang terproses melalui online secara otomatis telah memangkas waktu pemrosesan. Selain itu, dengan sistem online mendorong proses pencairan dana secara efektif, efisien dan transparan, serta pelaporan realisasi anggaran secara real time dapat diinformasikan dengan cepat dan *up to date*.

Transparansi

Inovasi SP2D mendorong peningkatan transparansi realisasi pencairan anggaran daerah. Melalui inovasi ini, seluruh pengeluaran daerah terangkum dalam satu sistem yang termonitor secara *up to date*, tidak hanya untuk pencairan OPD namun juga untuk pencairan dana lainnya seperti pihak ketiga (rekanan, masyarakat, dan bansos). Inovasi ini secara otomatis akan meningkatkan kesadaran/ perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka dan tidak resisten terhadap teknologi komputerisasi. Melalui teknologi ini pula pemborosan terhadap kertas sudah dapat diminimalisir, karena dokumen sudah tercetak dalam suatu sistem.

Inovasi Lainnya (Pemberdayaan)

1) 15 Menit Rindu Membaca Kabupaten Ciamis

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi 15 menit rindu membaca diinisiasi oleh Plt Kepala Perpustakaan Kabupaten Ciamis, Ibu Tini pada saat mengikuti diklatpim III proyek perubahan di Lembaga Administrasi Negara. Beliau mengatakan bahwa inovasi yang tergolong dalam pemberdayaan masyarakat ini muncul dari melihat fenomena rendahnya minat baca anak sekolah khususnya Sekolah Dasar yang ditandai dengan rendahnya kunjungan ke Perpustakaan Daerah di Ciamis khususnya anak usia dini. Beliau juga membandingkan data kunjungan anak usia dini ke perpustakaan pada tahun 2014 – 2015 yang mana hasilnya semakin menurun. Oleh sebab itu, muncullah inovasi 15 menit rindu membaca yang diharapkan dapat meningkatkan minat baca dengan meningkatnya kunjungan ke perpustakaan.

Inovasi tersebut sudah launching dan telah disosialisasikan sejak tanggal 28 Desember 2015 dengan menjadikan 2 SDN sebagai pilot project, yaitu Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dan Sekolah Dasar Negeri 3 Kertasari. Kegiatan ini merupakan kerjasama Perpustakaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis melalui wali kelas di setiap sekolah dasar mulai dari kelas I hingga kelas IV. Jenis buku yang dibaca bukanlah buku mata pelajaran sekolah, melainkan buku bebas yang layak dan disukai anak-anak seperti buku dongeng, cerita rakyat dan lain-lain. Inovasi ini juga mendapat dukungan dari Bupati Ciamis melalui Perbup pelaksanaan inovasi 15 menit rindu membaca pada 35 SDN di 27 Kecamatan se Kabupaten Ciamis.

Adapun deskripsi singkat inovasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan yang mewajibkan siswa/I membaca selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, di dalam ruangan kelas.
- b) Kelas yang mengikuti program ini adalah kelas I – IV SD.

- c) Buku yang dibaca bukanlah buku pelajaran, melainkan buku dongeng, cerita rakyat, flora dan fauna yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- d) Metode membaca secara nyaring atau dalam hati dan tidak mengganggu kelas yang lain.
- e) Kepala Sekolah atau Wali Kelas wajib membimbing siswa yang mengikuti 25 menit rindu membaca.
- f) Pada selang waktu 4 – 8 minggu kemudian, siswa dicoba untuk storytelling dan melihat sejauh mana siswa tersebut menyimak dan mengerti apa yang dibaca.

Dengan melihat latar belakang tersebut, inovasi 15 menit rindu membaca memiliki tujuan :

- a) Membiasakan anak – anak untuk gemar membaca/meningkatkan minat baca,
- b) Meningkatkan kunjungan anak usia dini ke Perpustakaan Daerah, dan
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Data Perubahan

Secara umum, perubahan yang dilakukan oleh inovasi 15 menit rindu membaca mulai berdampak ke arah yang lebih baik. Perubahan ini dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Berikut adalah analisis mengenai perubahan penyelenggaraan inovasi :

Tabel 14. Perubahan hasil Inovasi 15 Menit Rindu Membaca

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Kelengkapan Kerja	492 buku	1753 buku	Peningkatan jumlah buku bacaan untuk anak kelas I-IV : 256%
Output	Jumlah layanan	SDN yang memiliki kegiatan baca buku secara rutin : 2 SDN	SDN yang memiliki kegiatan baca buku secara rutin : 35 SDN	Peningkatan Jumlah layanan sebesar 1650%
	Data Jumlah KTA SD Perpustakaan Ciamis	180	441	Meningkatnya Jumlah Pengguna KTA : 145%
Dampak	Pengunjung Perpustakaan Ciamis	512	1304	Meningkatnya Jumlah Pengunjung SD 792 siswa atau sebesar 154,7 %

(Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Data diatas merupakan kondisi sebelum dan sesudah adanya inovasi 15 menit rindu membaca. Dari data tersebut dapat dianalisa dampaknya terhadap :

- a) Kelengkapan Kerja, yaitu peralatan atau fasilitas yang mampu meningkatkan produktivitas kerja. Dalam hal ini, pada akhir tahun 2015 hingga 2016, sebelum inovasi 15 menit rindu membaca dilakukan, Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dan Sekolah Dasar Negeri 3 Kertasari dijadikan sebagai pilot project inovasi. Karena pada saat itu, jumlah buku di Perpustakaan Daerah masih terbatas. Kemudian setelah tahun 2016 terjadi

dampak pada peningkatan pada jumlah buku bacaan yang disediakan oleh Perpustakaan Daerah untuk penyelenggaraan 15 menit rindu membaca. Peningkatan dari tahun 2015 : 492 menjadi 1753 pada tahun 2016 atau 256% menjadikan ketersediaan bahan bacaan di seluruh 35 SDN yang menjadi sasaran 15 menit rindu membaca. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya reaksi dari sekolah, dinas pendidikan dan bupati untuk memperluas cakupan inovasi dan tingginya tuntutan pengadaan buku bacaan.

- b) Jumlah layanan, yaitu jumlah peserta atau layanan yang terlibat dalam dalam satuan waktu. Dalam konteks inovasi ini, produktivitas dapat diukur dengan peningkatan jumlah peserta/SDN yang ikut dalam inovasi 15 menit rindu membaca sebanyak 35 SDN dari 27 Kecamatan di Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2015 – 2016 hanya ada 2 SDN yang rutin menjalankan inovasi 15 menit rindu membaca, yaitu SDN 2 Ciamis dan SDN 3 Kertasari. Kemudian pada tahun 2017 sebanyak 35 SDN yang tertera dalam SK Bupati mulai menjalankan kegiatan 15 menit rindu membaca di sekolahnya. Artinya ada peningkatan jumlah layanan yang menjalankan kegiatan ini sebesar 1650%
- c) Metode Layanan, Hal ini berkaitan erat dengan proses yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dimana metode sebelumnya SDN hanya membaca buku sesuai dengan *mood* dan kebijakan guru SDN yang masih belum konsisten. Kemudian metode ini berubah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Box 3 Testimoni Inovasi 15 Menit Rindu Membaca

"Di sekolah SDN Sindangkasih ini alhamdulillah anak-anak senang dengan baca buku tiap pagi, mereka lebih aktif dan kadang memanfaatkan waktunya ke perpustakaan dikala jam istirahat bahkan ke perpustakaan daerah ketika libur bersama orangtua" – **Elis, Wali Kelas IV/A SDN Sindangkasih**

d) Tingkat kesadaran/perubahan pola pikir, adalah perubahan pola pikir masyarakat dalam hal ini adalah siswa SDN dalam meningkatkan minat baca lewat kunjungan ke perpustakaan. Berkaitan dengan masalah penurunan kunjungan siswa SDN ke perpustakaan daerah, inovasi ini memiliki perubahan ke arah yang lebih bagus terhadap mulai meningkatnya partisipasi/kunjungan ke perpustakaan. Hal ini dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu jumlah kunjungan dan jumlah KTA SDN yang terdaftar di Perpustakaan Daerah.

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari sebelum dan sesudah adanya inovasi, total KTA siswa SD meningkat dari 180 menjadi 441 atau bertambah 261 anggota atau meningkat sekitar 145%. Hal ini terlihat bahwa siswa SD mulai aktif menjadi anggota perpustakaan agar dapat meminjam buku bacaan dan bisa dibaca tidak hanya di perpustakaan saja namun juga di rumah. Perubahan pola pikir/kesadaran siswa dalam meningkatkan minat baca juga sudah ditanamkan saat kegiatan sosialisasi dan bimbingan wali kelas. Hasilnya, terjadi peningkatan kunjungan siswa SDN ke perpustakaan daerah.

Kondisi sebelum dan sesudah adanya inovasi dalam meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan Ciamis juga cukup menjawab permasalahan sebelumnya dimana jumlah kunjungan usia dini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Setelah adanya inovasi ini, jumlah kunjungan siswa/I SD meningkat drastis dari awalnya sebelum inovasi total kunjungan sebanyak 512 menjadi 1304 pengunjung setelah adanya inovasi atau agregatnya mencapai 792 orang atau 155%. Kondisi pada saat itu juga didukung oleh perbaikan fasilitas perpustakaan seperti adanya ruang baca bertema luar angkasa.

Dengan adanya inovasi ini, pemerintah khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sudah memberikan dampak yang cukup bagus terhadap minat baca melalui inovasi 15 menit rindu membaca. Hal ini dapat dilihat dari Perubahan peningkatan jumlah buku bacaan mengindikasikan tingginya dorongan OPD dalam mendorong ketersediaan jumlah buku bacaan. Hal in juga menjawab penyebab rendahnya minat baca siswa/I di Kabupaten Ciamis salah

satunya adalah terbatasnya koleksi buku yang disediakan oleh Perpustakaan Daerah pada SDN di Kabupaten Ciamis. Peningkatan jumlah SDN yang ikut ini merupakan wujud semangat kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam meningkatkan budaya literasi baca.

Inovasi ini cukup mampu untuk merubah mindset sasaran inovasi dari sebelumnya memiliki rendahnya keinginan untuk membaca menjadi adanya semangat membiasakan membaca tidak hanya difasilitasi oleh tenaga perpustakaan di sekolah tapi adanya kesadaran untuk berkunjung ke perpustakaan untuk menggali ilmu dan bahan bacaan lebih banyak. Dampak ini sesuai dengan harapan dan masalah yang sebelumnya dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

2) Wisata Buku Sahabat Anak Kabupaten Ciamis

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak merupakan hasil kegiatan laboratorium inovasi yang difasilitasi oleh PKP2A I LAN Bandung pada tahun 2015. Latar belakang munculnya ide ini berasal dari salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu peningkatan minat baca. Peningkatan budaya dan minat baca telah dituangkan dalam salah satu sasaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh rendahnya kunjungan siswa ke perpustakaan daerah.

Inovasi ini merupakan inovasi metode berbentuk pemberdayaan masyarakat yang menggunakan cara baru dan kreatif dalam mensosialisasikan keberadaan dan fasilitas perpustakaan serta mengenalkan buku bacaan kepada anak-anak melalui pelayanan inovatif. Siswa dikenalkan dengan fungsi perpustakaan, manfaat perpustakaan dan hal apa saja yang diperoleh dari perpustakaan. Sehingga, anak-anak dapat berubah pola pikirnya mengenai perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan dan sumber ilmu pengetahuan.

Metodenya dimulai dari mengirimkan undangan ke beberapa sekolah dengan 10 sampel. Kemudian sekolah tersebut akan diberikan jadwal secara bergantian untuk mendapatkan pendampingan ketika melakukan Wisata Buku Sahabat Anak.

Bentuk pendampingan yang dilakukan Perpustakaan Daerah adalah mengenalkan setiap fasilitas perpustakaan. Diawali dengan pengunjung mendaftar di monitor online. Kemudian siswa diajak untuk mengenalkan ruang baca anak. Disana, siswa diperkenalkan dengan buku bacaan dan menyaksikan *storytelling* yang dilakukan oleh aktivis literasi Ciamis. Selanjutnya, anak-anak diperkenalkan ruang internet/perpus seru yang merupakan hasil kolaborasi Perpustakaan daerah dengan CSR Coca-cola Amatil. Selanjutnya, siswa diajak untuk mengunjungi ruang baca dewasa, umum hingga ruang baca bertema luar angkasa.

Adapun tujuan dan manfaat inovasi ini adalah :

- a) Mengenalkan fasilitas perpustakaan kepada anak-anak dan meningkatkan kunjungan perpustakaan daerah.
- b) Membiasakan anak-anak senang dan bersahabat dengan buku bacaan.
- c) Mengajarkan anak-anak untuk disiplin

b. Data Perubahan

Inovasi wisata buku sahabat anak juga mendorong siswa dalam memahami kemanfaatan perpustakaan sebagai sarana atau fasilitas untuk meningkatkan minat baca serta wawasan. Berikut adalah beberapa analisa perubahannya :

Tabel 15. Perubahan hasil Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Kelengkapan Kerja	26% buku bacaan siswa/I SD dan SMP	75% buku bacaan siswa/I SD dan SMP	Peningkatan jumlah buku bacaan : 19%
Proses	Metode Pelayanan	Menerima kunjungan mengisi buku	Memberikan pelayanan pengenalan	Adanya inovasi metode dalam pelayanan

		kunjungan	fungsi dan fasilitas perpustakaan	perpustakaan
Output	Data Jumlah KTA Perpustakaan Ciamis	PAUD/TK : 39 SD : 180 SMP : 298	PAUD/TK : 49 SD : 441 SMP : 531	Adanya peningkatan pengguna KTA : PAUD/TK : 26% SD : 145% SMP : 78%
Dampak	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Ciamis	PAUD/TK : 41 SD : 512 SMP : 1817	PAUD/TK : 87 SD : 1304 SMP : 4828	Adanya peningkatan pengunjung : PAUD/TK : 112% SD : 155% SMP : 166%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Adapun hasil analisa tabel diatas adalah sebagai berikut :

- a) Kelengkapan kerja, yaitu sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan produktivitas kerja/unit organisasi. Berdasarkan instrumen pengukuran dampak inovasi, inovasi wisata buku sahabat anak memiliki dampak terhadap peningkatan buku bacaan dan fasilitas perpustakaan. Sebelum adanya inovasi ini, persentase buku bacaan anak hanya 26% dari jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Kemudian pada akhir tahun 2016 terjadinya penambahan buku bacaan sebanyak 4.287 buku setelah berjalannya inovasi. Artinya, 41% dari buku tersebut adalah penambahan untuk buku bacaan siswa SMPN ke bawah. Kemudian pada tahun 2017 penambahan buku jauh berkurang yaitu hanya 320. Namun, persentase alokasi buku bacaan anak lebih besar dari buku lainnya yaitu 75%. Hal ini semakin menggambarkan dampak dari inovasi wisata buku sahabat anak dalam menyediakan buku bacaan dengan melihat trend meningkatnya kunjungan ke perpustakaan pada poin ketiga.
- b) Metode pelayanan, menjelaskan bagaimana tata cara pelayanan yang diberikan. Sebelum adanya inovasi pelayanan untuk menerima kunjungan

sekolah hanya sebatas pengisian buku kunjungan saja kemudian sekolah dipersilahkan ke ruang baca. Namun, dengan metode baru melalui wisata buku sahabat anak pelayanan terhadap sekolah menjadi lebih bermutu.

Pelayanan yang diberikan adalah :

- Pengunjung mengisi buku kunjungan secara online, penggunaan loker dan tata cara pembuatan KTA perpustakaan,
- Siswa diperkenalkan dengan ruang baca anak,
- Siswa diperkenalkan buku bacaan dan *storytelling* oleh aktivis literasi,
- Setelah itu siswa diajak ke ruang pelayanan internet dengan nama pojok seru yang mana hasil hibah dari dana CSR PT. Coca cola Amatil,
- Selanjutnya siswa diajak ke ruang baca dewasa dan ruang baca anak bernuansa luar angkasa.

Dengan adanya pelayanan tersebut anak-anak menjadi lebih tertarik dengan perpustakaan karena pengenalan yang telah diberikan oleh perpustakaan daerah.

c) Produktivitas, mendeskripsikan tentang jumlah pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, pelayanan tersebut adalah jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah berdasarkan kategori dan data peningkatan pengajuan KTA. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya trend peningkatan dan penurunan pengguna KTA.

(a) Jumlah KTA dari SMP mengalami kenaikan dimana sebelumnya pemohon KTA tingkat SMP hanya 298 siswa. Angka ini memang menggambarkan lesunya kunjungan siswa ke perpustakaan. Kemudian setelah dijalkannya Wisata Buku Sahabat Anak jumlah pemohon KTA naik menjadi 531 atau naik sebesar 78%. SD memiliki jumlah KTA sebanyak 180 anggota setelah adanya inovasi wisata buku sahabat anak. Kemudian mengalami peningkatan sama halnya dengan pemohon SMP. Yaitu SD sebanyak 441 anggota yang artinya

meningkat sebesar 145%. Untuk pemohon KTA dari awalnya 39 menjadi 49 pemohon. Meskipun cenderung sedikit pertumbuhan, tapi memiliki peningkatan walau hanya 26% saja. TK memiliki trend peningkatan walaupun belum signifikan.

- (b) Jumlah pengunjung dari SMP naik sebesar 166% atau dari 1817 menjadi 4828 pengunjung. Kemudian pengunjung dari SD naik sebesar 155% dengan adanya inovasi wisata buku sahabat anak ini. Selanjutnya TK meskipun pengunjungnya sedikit namun naik sebesar 112% setelah adanya inovasi.

Secara umum, sasaran inovasi ini memiliki dampak terhadap semangat siswa/I dalam menjadikan buku sebagai bahan bacaan yang menyenangkan. Hal ini dilakukan oleh pustakawan dan aktivis literasi dalam menanamkan pentingnya buku dan perpustakaan selama melakukan pelayanan wisata buku sahabat anak.

Inovasi wisata buku sahabat anak memiliki dampak positif terhadap sasaran inovasi yaitu siswa/I usia dini, kunjungan ke perpustakaan dan sarana prasarana. Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dan peningkatan jumlah buku bacaan di perpustakaan merupakan indikasi adanya semangat anak sekolah dengan dorongan yang diberikan pada saat pendampingan pengenalan sarana prasarana oleh pustakawan perpustakaan daerah. Perkembangan ini juga tidak luput dari peran pihak eksternal yaitu aktivis literasi yang rutin memberikan arahan dan motivasi terhadap pengunjung perpustakaan akan pentingnya membaca dan mengunjungi perpustakaan. Sarana dan prasarana juga turut memberikan daya tarik terhadap anak sekolah terutama ruang baca bernuansi luar angkasa.

3) Kampung Sidat Kabupaten Kebumen

a. Deskripsi Inovasi

Ikan Sidat merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kebumen. Budidaya ikan ini menggunakan lahan pekarangan rumah yang awalnya tidak produktif menjadi

tempat usaha yang bernilai ekonomi. Proses pembudidayaanya, sangat sederhana dan dengan biaya yang relatif sedikit. Cukup menggunakan kolam yang seluruh permukaannya ditutup dengan tumbuhan eceng gondok dengan ketinggian air berkisar 30 sentimeter dan diberi makan berupa cacing atau daging keong yang telah dicacah.

Sidat sendiri merupakan ikan berpotensi ekspor yang memiliki pangsa pasar Negara Jepang, dan Negara Eropa. Harga ikan sidat bisa mencapai Rp.130.000,/ kg untuk ikan Sidat Dewasa dan Rp. 350.000,-/kg untuk benih ikan Sidat sebesar ukuran silet. Harga tersebut bisa melambung tinggi jika mampu membudidayakan Sidat sesuai dengan kriteria perusahaan Jepang seperti pembudidayaan di sungai yang berarus deras dan tidak mengandung lumpur. (Pokdakan Delta Sidat & Bintaro Jaya, 2018).

Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen melakukan inovasi pemberdayaan masyarakat berjudul Kampung Sidat di Desa Sidoluhur dan Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal. Guna mewujudkan Kampung Sidat, pada Tahun 2017 diberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya kepada 3 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setempat seperti Pokdakan Bintaro Jaya, Pokdakan Delta Sidat dan Pokdakan Sleecofish. Bahkan satu dari ketiga Pokdakan ini baru menjadi pembudidaya ikan Sidat setelah adanya inovasi Kampung Sidat yakni Pokdakan Bintaro Jaya.

b. Data Perubahan

Secara umum, inovasi Kampung Sidat telah mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya Desa Sidoluhur dan Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal. Perubahan ini dapat dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi.

Tabel 16. Perubahan hasil Inovasi Kampung Sidat

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Jumlah Kolam Budidaya Ikan (Fasilitas Kerja)	Tahun 2017 25 kolam dari 3 Pokdakan	Tahun 2018 68 kolam dari 3 pokdakan	Efisiensi tahapan layanan Sebesar 172%

Output	Omzet Produksi Usaha Masyarakat	Tahun 2017 Rp. 145,6 juta/tahun (dari 3 pokdakan)	Tahun 2018 (estimasi) 315,5 juta/tahun (dari 3 pokdakan)	Peningkatan omzet produksi 116%
Dampak	Penyerapan Tenaga Kerja	Tahun 2017 36 orang	Tahun 2018 59 orang	Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja 63%
	Jumlah Pendapatan Masyarakat	Tahun 2017 Rata-rata: Rp. 683.000/ bulan/ anggota	Tahun 2018 Rata-rata: Rp. 1.400.000 /bulan/ Anggota	Peningkatan pendapatan masyarakat 104%

Sumber : Pemerintah dan masyarakat kabupaten Kebumen (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Pelaksanaan inovasi Kampung Sidat telah memberikan banyak perubahan kepada masyarakat. Perubahan tersebut mulai dari *input*, *output* hingga *impact* yang jelas terasa kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa perubahan yang teridentifikasi:

- (a) **Penambahan Sarana dan Prasarana.** Melalui inovasi Kampung Sidat, masing-masing dari Pokdakan mampu menambah sarana-prasarana baik berupa kolam fiber, hiblow, batu aerasi, pompa air, pipa paralon, bak panen, dsb. Tercatat Pokdakan Bintaro Jaya mendapat penambahan 15 kolam. Sedangkan Pokdakan Delta Sidat mendapatkan penambahan 24 kolam dan Slecofish sebanyak 12 kolam. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan benih kepada ketiga Pokdakan tersebut.

Box 4 Testimoni Inovasi Kampung Sidat

"Kelompok Delta Sidat ini berdiri sejak 2014. Sebelum adanya kampung Sidat dan kelompok sidat, pendapatan kami kurang dari 1 juta/ orang/ bulan. Tetapi saat ini kami sdh bisa berpenghasilan sebesar 2 juta/orang/bulan." -**Pak Syaiful (ketua kelompok Delta Sidat)**

(b) **Peningkatan omzet produksi masyarakat.** Kampung Sidat telah mendorong peningkatan omzet penjualan ikan pada ketiga Pokdakan tersebut. Pada Pokdakan Delta Sidat mencatat perkiraan peningkatan omzet sebesar 73,8 juta dari omzet tahun sebelumnya. Pokdakan Bintaro Jaya yang sebelumnya beternak ikan gurame dan lele saja, begitu beternak Sidat dapat meningkatkan omzetnya hingga 70,5 juta rupiah dalam satu tahun, sehingga omzetnya meningkat dari 24 juta di tahun 2017 menjadi 94,5 juta di tahun 2018. Pokdakan ketiga yakni *Sleecofish* juga mengalami peningkatan omzet sebesar 25,6 juta dalam tahun berikutnya.

Tabel 17. Omzet 3 Pokdakan Pembudidaya Ikan Sidat

Nama Pokdakan	Omzet Tahun 2017	Omzet Tahun 2018
Delta Sidat	Rp. 95,2 juta	Rp. 169 juta
Bintaro Jaya	Rp. 24 juta	Rp. 52 juta
Sleecofish	Rp. 26,4 juta	Rp. 94,5 juta

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018)

(c) **Penyerapan Tenaga Kerja.** Inovasi Kampung sidat juga berdampak kepada penyerapan tenaga kerja pada masing-masing Pokdakan. Pokdakan Bintaro Jaya mampu menyerap 9 tenaga tambahan yang sebagian besar bertugas sebagai penangkap sidat. Begitu pula dengan Pokdakan Delta Sidat, yang membimbing pembentukan Pokdakan baru yang beranggotakan 14 orang. Sedangkan Sleecofish masih tetap jumlah tenaga kerja yang terlibat sebelum dan sesudah inovasi.

Tabel 18 Jumlah Pegawai 3 Pokdakan Pembudidaya Ikan Sidat

Nama Pokdakan	Jumlah Pegawai Tahun 2017	Jumlah Pegawai Tahun 2018
Delta Sidat	13 orang	27 orang
Bintaro Jaya	11 orang	20 orang
Sleecofish	12 orang	12 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018)

(d) **Peningkatan Jumlah Pendapatan Masyarakat.** Pendapatan yang diperoleh oleh anggota Pokdakan juga diperkirakan meningkat. Secara berturut-turut, anggota Bintaro Jaya mendapatkan penambahan pendapatan Rp.300.000,- perbulan, Slecofish Rp.600.000,- perbulan, dan Delta Sidat sebanyak Rp. 1.250.000,- perbulan.

Tabel 19 Pendapatan Anggota 3 Pokdakan Pembudidaya Ikan Sidat

Nama Pokdakan	Jumlah pendapatan Anggota Pokdakan 2017	Jumlah pendapatan Anggota Pokdakan 2018
Delta Sidat	Rp. 750.000/bulan/ anggota	Rp. 2.000.000/ bulan/ anggota
Bintaro Jaya	Rp. 1.000.000/bulan/ anggota	Rp. 900.000/ bulan/ anggota
Slecofish	Rp. 300.000/bulan/ anggota	1.300.000/bulan/ anggota

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018)

Secara khusus, Delta Sidat sebagai kelompok pembudidaya ikan Sidat yang berdiri sejak tahun 2011, telah mampu membangun manajemen budidaya Sidat yang lebih baik daripada kelompok lainnya. Dengan adanya pemberian benih dan sarana prasarana budidaya Sidat, kelompok ini semakin mengembangkan metode bisnisnya. Delta Sidat tidak hanya mengandalkan penangkap Sidat lokal yang berada di Kebumen, namun juga di daerah lain. Delta Sidat mengumpulkan benih Ikan sidat dari 150 penangkap Sidat di berbagai daerah di Jawa Tengah dan sekitar Pangandaran.

Kelompok Delta Sidat juga menggandeng kerjasama pembudidayaan Ikan Sidat dengan peternak ikan di Wonosobo dan Kulonprogo. Kedua daerah tersebut dipilih karena karakteristik kolam yang dibangun pada air mengalir. Melalui skema penjualan benih dan pembelian ikan Sidat dewasa kepada kedua peternak tersebut, diperkirakan Delta Sidat mendapatkan hasil panen sekitar 1 ton pada pertengahan tahun 2019.

Inovasi Pelayanan Publik

1) Layanan Kartu Kuning di Kecamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim

a. Deskripsi Inovasi

Sebelum adanya inovasi Kartu Kuning (AK.I), para pencari kerja di kabupaten Muara Enim harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk mendapatkan Form Kartu Kuning. Diantara pencari kerja tersebut, ada yang menempuh jarak puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer untuk mengakses layanan kartu pembuatan kuning di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim. Biaya/ongkos yang dikeluarkan juga relatif besar, dengan resiko kecelakaan lalu lintas yang realtif tinggi. Hal ini disebabkan oleh padatnya arus lalu lintas jalan raya di dalam Kabupaten Muara Enim, akibat keberadaan angkutan batu bara yang masih menempuh/melalui jalan umum. Inovasi AK.I di Kecamatan merupakan sebuah terobosan yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, Drs. M Ali Rachman untuk mengatasi permasalahan ini.

Pelayanan AK.I yang pada awalnya dilakukan secara terpusat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim kemudian dilimpahkan secara bertahap ke tingkat Kecamatan semenjak 2015 hingga saat ini (2018). Implementasi inovasi secara bertahap dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum berupa Keputusan Bupati (Keputusan Bupati Muara Enim No: 594/KPTS/NAKERTRANS/2014, tentang penunjukan kecamatan yang menjadi pilot project pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Kartu Bukti pencari kerja (AK.I) dalam Kabupaten Muara Enim). Melalui Keputusan Bupati, *piloting* penerapan inovasi dilakukan di 6 (enam) kecamatan sebelum diterapkan secara menyeluruh di 20 (dua puluh) kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Semende Darat Tengah
- Kecamatan Semende Darat Ulu
- Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Lubai
- Kecamatan Sungai Rotan
- Kecamatan Rambang

Piloting dibutuhkan untuk menyiapkan kapasitas pihak kecamatan dan membangun kesepakatan bersama antar sektor terkait dalam pelaksanaan layanan sebagai upaya meminimalisir terjadinya resistensi terhadap perubahan yang terjadi. Setelah sukses melakukan piloting pada 2014 dan 2015, inovasi ini kemudian ditetapkan sebagai kebijakan daerah melalui Peraturan Bupati (Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Muara Enim). Sayangnya, inovasi ini memiliki kelemahan pada aspek keterbatasan ruang lingkup keberlakuan kartu kuning (AK.) yang masih dipertanyakan (berlaku di Muara Enim sajakah?). Hal ini terkait dengan aspek legal formalnya , dalam perspektif kebijakan nasional (dimungkinkan atau tidak, karena hanya ditandatangani oleh Camat).

Secara singkat, *main point* dari inovasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Pelimpahan kewenangan mengeluarkan AK.1 dari Dinas Ketenagakerjaan ke level Kecamatan;
- b) Penyebaran beban kerja pengurusan AK.1 dari satu titik (Dinas Ketenagakerjaan) ke banyak titik (seluruh Kecamatan).
- c) Pemangkasan jarak layanan pengurusan AK.1.

Untuk itu, tujuan dari inovasi AK.1 ini antara lain:

- a) Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat Pencari Kerja dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim, dimana masyarakat tidak perlu lagi datang ke Disnaker untuk mengurus AK.1 (cukup di tingkat Kecamatan) sebagai syarat melamar kerja;

- b) Lebih memberdayakan kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Mengurangi beban kerja Dinas Ketenagakerjaan sehingga dapat lebih berfokus pada berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya (efisiensi).

b. Data Perubahan

Secara umum, inovasi AK.1 telah membawa sejumlah perubahan positif dalam pelayanan kartu kuning di Kabupaten Muara Enim. Perubahan ini dilihat dengan melakukan komparasi kondisi sebelum dan sesudah inovasi tersebut dijalankan, sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 20. Perubahan hasil Inovasi AK.1

Indikator	Deskripsi Perubahan
Anggaran	Terdapat peningkatan alokasi anggaran, namun terjadi peningkatan efisiensi dan penambahan fokus pembiayaan (monitoring tenaga kerja asing)
Biaya tidak langsung (transport, akomodasi, dll)	Terjadi efisiensi biaya akibat berkurangnya jarak tempuh yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan
SDM pelaksana	Terjadi efisiensi penggunaan SDM karena pada level Dinas terjadi pengurangan beban, namun tidak mempengaruhi kecamatan
Waktu memperoleh pelayanan	Saat musim pencarian kerja, antrian dapat menjadi sangat panjang. Dengan penyebaran titik layanan, maka antrian menjadi berkurang secara drastis hingga mengurangi waktu memperoleh layanan
Jumlah layanan yang dihasilkan	Pengurangan antrian akibat penyebaran titik layanan berimplikasi juga terhadap peningkatan produktivitas layanan

(Sumber: Dinas Ketenagakerjaan (Data diolah))

c. Analisis Dampak

Hasil wawancara dengan *key informant* menyatakan bahwa sebelum adanya inovasi Kartu Kuning (AK.1), para pencari kerja di kabupaten Muara Enim harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk mendapatkan Form Kartu Kuning. Diantara pencari kerja tersebut, ada yang menempuh jarak puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer untuk mengakses layanan pembuatan kartu kuning di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim. Kondisi ini diperparah dengan biaya/ongkos yang dikeluarkan. Dengan biaya yang terbilang besar, pencari kerja masih harus dihadapkan dengan resiko kecelakaan lalu lintas yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh padatnya arus lalu lintas jalan raya di dalam Kabupaten Muara Enim, sebagai akibat keberadaan angkutan batu bara yang menempuh/melalui jalan umum. Inovasi AK.1 di Kecamatan kemudian dimunculkan untuk mengatasi permasalahan ini. Pelayanan AK.1 yang pada awalnya dilakukan secara terpusat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim kemudian dilimpahkan secara bertahap ke tingkat Kecamatan semenjak 2015 hingga saat ini (2018).

Implementasi inovasi dilakukan secara bertahap dengan menggunakan instrumen hukum berupa Keputusan Bupati (Keputusan Bupati Muara Enim No: 594/KPTS/NAKERTRANS/2014, tentang penunjukan kecamatan yang menjadi pilot project pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Kartu Bukti pencari kerja (AK.1) dalam Kabupaten Muara Enim). Melalui Keputusan Bupati, *piloting* penerapan inovasi dilakukan di 6 (enam) kecamatan sebelum diterapkan secara menyeluruh di 20 (dua puluh) kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Semende Darat Tengah
- Kecamatan Semende Darat Ulu
- Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Lubai
- Kecamatan Sungai Rotan
- Kecamatan Rambang

Berdasarkan hasil wawancara, *piloting* dibutuhkan untuk menyiapkan kapasitas pihak kecamatan dan membangun kesepakatan bersama antar sektor terkait dalam pelaksanaan layanan. Strategi ini diterapkan sebagai upaya meminimalisir terjadinya resistensi terhadap perubahan yang terjadi. Dengan kata lain, inovasi yang terlihat sederhana di tataran konsep ternyata memiliki *barrier* yang cukup kuat di tataran implementasi. Hal ini terbukti dengan dibutuhkannya waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan piloting (2014 dan 2015), sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan daerah melalui Peraturan Bupati (Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Muara Enim).

Dengan dampak atau kondisi sesudah adanya inovasi AK.1 dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa terjadi perubahan pada beberapa aspek, sebagai berikut:

a) Anggaran

Melalui penerapan inovasi, terjadi efisiensi anggaran yang biasa dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Efisiensi terjadi pada pergeseran fokus penggunaan anggaran Dinas Ketenagakerjaan pada aspek lain yang selama ini kurang tersentuh, yaitu monitoring ketenagakerjaan asing. Hal ini menjadi implikasi dari pengurangan alokasi anggaran pelayanan kartu kuning secara drastis. Meskipun secara umum terdapat penambahan anggaran sebesar 9%, namun hasil wawancara menunjukkan bahwa proporsi penggunaan anggaran berkurang sebesar 50%-an pada satu sisi dan mengalami peningkatan manfaat secara signifikan pada sisi lain (efisiensi dialokasikan untuk kegiatan lain).

b) Biaya tidak langsung

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efisiensi terjadi pada biaya pelayanan yang bersifat tidak langsung yang dikeluarkan masyarakat pencari AK.1. Diantara biaya tidak langsung dimaksud yaitu biaya transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan selama melakukan perjalanan pengurusan AK.1.

Biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan relatif tinggi, sebagai konsekuensi logis dari jarak tempuh dalam memperoleh layanan dan keterbatasan ketersediaan transportasi yang menghubungkan kecamatan (khususnya yang berada di area terluar) dengan pusat kota Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, perpindahan lokus layanan dari pusat kota ke kecamatan secara otomatis memangkas biaya transportasi dan akomodasi. Hal ini terjadi sebagai implikasi dari pengurangan jarak tempuh layanan.

c) SDM pelaksana

Selain pada aspek pembiayaan, baik yang berasal dari pemberi layanan (anggaran) dan penerima layanan (biaya tidak langsung, efisiensi juga terjadi pada SDM pemberi layanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa inovasi AK.1 telah mengurangi alokasi petugas pelaksana untuk layanan AK.1 di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim. Petugas pelaksanaan layanan yang semula berjumlah 4 (empat) orang berkurang drastis menjadi hanya 1 (satu) orang, yang diposisikan sebagai sebagai *back-up* pelayanan di level Kabupaten. Hal ini menjadi implikasi logis dari pengurangan jumlah pemohon yang mengakses layanan secara langsung ke Dinas Ketenagakerjaan setelah dibukanya layanan di setiap kecamatan. Pada tingkat kecamatan sendiri, penambahan layanan AK.1 tidak berdampak terhadap penambahan SDM pelaksana layanan. Hal ini dapat terjadi karena layanan AK.1 dilakukan secara terintegrasi dalam layanan PATEN. Selain itu, penumpukan jumlah pemohon layanan AK.1 yang bersifat musiman juga tereduksi oleh penyebaran titik layanan ke seluruh Kecamatan.

d) Waktu memperoleh pelayanan

Sebelum dilakukannya desentralisasi layanan ke tingkat kecamatan, layanan kartu kuning (AK.1) terpusat pada satu tempat di pusat kota, yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan efek antrian yang relatif tinggi saat musim pencarian kerja, sehingga waktu untuk memperoleh layanan menjadi relatif lama. Diterapkannya layanan kartu kuning yang terdesentralisasi pada level kecamatan telah memangkas secara drastis waktu layanan. Hal ini

menjadi dampak dari pengurangan jumlah penumpukan pemohon layanan sebagai implikasi dari tersebarnya layanan pada setiap kecamatan (terjadi sebaran pemohon AK.1).

e) Jumlah layanan yang dihasilkan

Pemangkasan secara drastis waktu layanan akibat berkurangnya jumlah antrian telah secara signifikan meningkatkan produktivitas layanan. Berdasarkan hasil wawancara, inovasi AK.1 telah membuat layanan yang sebelumnya proses pengerjaannya dapat melebihi satu hari akibat penumpukan yang terjadi, kini dapat diselesaikan pada hari yang sama. Dengan kata lain, kondisi ini (pengurangan antrian) telah secara signifikan meningkatkan produktivitas layanan.

Box 5 Kutipan Keputusan Bupati

Keputusan Bupati (Keputusan Bupati Muara Enim No: 594/KPTS/NAKERTRANS/2014, tentang penunjukan kecamatan yang menjadi pilot project pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Kartu Bukti pencari kerja (AK.I) dalam Kabupaten Muara Enim menjadi faktor pendukung terlaksananya inovasi AK.1."

Kondisi diatas menunjukkan bahwa inovasi AK.1 telah mendatangkan dampak positif bagi jalannya pelayanan pembuatan kartu kuning di Kabupaten Muara Enim. Hal ini merupakan dampak dari dukungan Bupati dalam penunjukan langsung kecamatan yang dijadikan sebagai pilot project.

Namun demikian, dampak yang dihasilkan baru terdeteksi di perbaikan proses layanan saja. Hal ini terjadi karena tidak terdapat data terkait perubahan yang bersifat implikasi dari perbaikan proses layanan, seperti peningkatan jumlah pemohon AK.1, (data yang tersedia mulai tahun 2015 menunjukkan fluktuasi permohonan layanan), misalnya penurunan angka pengangguran, dan sejenisnya. Hal ini menjadi logis mengingat visi (tujuan) dari inovasi ini menysasar area perbaikan proses layanan. Untuk itu, dibutuhkan penelaahan lebih lanjut untuk mengukur dampak lanjutan yang dihasilkan inovasi AK.1, khususnya bagi pencapaian target kinerja daerah di sektor ketenagakerjaan.

Selain itu, inovasi AK.1 memiliki 1 PR besar, yaitu pada ruang lingkup keberlakuannya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penggagas dan pelaksana ide inovasi itu sendiri belum meyakini tingkat keberlakuan AK.1 dalam konteks penggunaannya untuk mencari kerja (apakah berlaku di Muara Enim saja atau dapat dipergunakan secara nasional?). Hal ini terkait dengan belum dilakukannya penelaahan lebih jauh mengenai aspek legal formalnya. Artinya, memastikan kemungkinan penggunaan AK.1 secara nasional dengan merujuk kepada kebijakan nasional (UU Ketenagakerjaan dan kebijakan turunannya), karena legalisasinya hanya dilakukan oleh Camat (tanda tangan Camat).

2) BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar) Kota Pontianak

a. Deskripsi Inovasi

Lalu lintas dan penataan perparkiran menjadi masalah yang umum dihadapi kota-kota besar yang ada di Indonesia termasuk di kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan kota dengan aktivitas utama di bidang perdagangan dan jasa. Aktivitas tersebut terpusat pada kawasan CBD (*Central Business District*) yang berada di sekitar Jl. Tanjungpura, Jl. Diponegoro, dan Jl. H. Agus Salim. Aktivitas lalu lintas di kawasan CBD sangat padat dan dilewati oleh berbagai jenis moda angkutan. Selama ini kondisi lalu lintas sering mengalami hambatan dan cenderung semrawut karena adanya:

- a) Aktivitas parkir di badan jalan yang bercampur antara kendaraan roda dua dan roda empat serta menggunakan separuh badan jalan
- b) Aktivitas naik turun penumpang di sembarang tempat;
- c) Aktivitas bongkar muat barang disepanjang kawasan;
- d) Terbatasnya jumlah petugas untuk mengawasi kawasan tersebut sepanjang waktu

Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pendekatan yang diambil dalam mengatur dan menjaga agar lalu lintas selalu dalam kondisi lancar dan tertib tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang

bersifat konvensional, akan tetapi perlu dilakukan cara-cara baru yang inovatif untuk mengatasi kendala tersebut.

Salah satu cara inovatif melalui penggunaan aplikasi pada *smartphone* yang terhubung dengan kamera pengawas (CCTV) serta pengeras suara yang dapat melakukan pemantauan, penyampaian informasi, arahan maupun peringatan kepada pengguna jalan. Melalui Pengguna teknologi informasi ini, maka pengaturan dan pengendalian lalu lintas membuat sumber daya yang terbatas dapat dipergunakan secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai salah satu jenis pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi pada *smartphone*, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara terus menerus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menambah jumlah CCTV yang terintegrasi dengan aplikasi. Tujuannya adalah dapat memantau sekaligus menertibkan jumlah pelanggaran lalu lintas terutama yang berada dikawasan perdagangan atau bisnis.

b. Data Perubahan

Tabel 21 Perubahan hasil inovasi BCL

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	SDM Pelaksana	-	25 orang Pengawas CCTV = 10 Orang Pengguna HT = 5 Orang Personil Dinas Perhubungan = 10 Orang	Tetap Menggunakan SDM yang ada
	Kelengkapan Kerja	Motor, Mobil Patroli, Ruang Serbaguna,	Kamera, Pengeras Suara, Ruang Kontrol,	Penambahan perlengkapan kerja yang menunjang

		Meja, Kursi dan Alat Tulis	Layar Monitor	inovasi
Proses	Mekanisme	Pengawasan secara langsung di Lapangan	Pengawasan dan Pengaturan dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan Smartphone atau CCTV	Pengawasan dapat dilakukan langsung dan menggunakan CCTV
Dampak	Tingkat Kesadaran/ Perubahan Pola Pikir	Hanya taat apabila ada petugas dilapangan	Dapat mematuhi arahan meskipun petugas tidak ditempat	Peningkatan perilaku tertib lalu lintas
	Pelanggaran Lalu Lintas	Tahun 2015	Tahun 2016	% Penurunan
		Jalan Tanjung Pura 1.742 Pelanggaran	Jalan Tanjung Pura 685 Pelanggaran	Jalan Tanjung Pura 60,67 %
		Jalan Diponegoro 690 pelanggaran	Jalan Diponegoro 110 pelanggaran	Jalan Diponegoro 84,05 %
		Jalan H. Agus Salim 314 Pelanggaran	Jalan H. Agus Salim 188 Pelanggaran	Jalan H. Agus Salim 40,12 %

Sumber : Dinas Perhubungan (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Inovasi yang digagas oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh bidang lalu lintas dan angkutan jalan telah berhasil merubah secara signifikan kelancaran Lalu Lintas pada kawasan perdagangan atau bisnis. Hal ini terlihat dari sejumlah instrumen diatas seperti tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) Pelaksana, Kelengkapan kerja yang meliputi sarana/prasarana, Mekanisme (prosedur) pelaksanaan, Perubahan pola pikir masyarakat serta Jumlah pelanggaran lalu lintas.

a) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan tugas oleh dinas perhubungan kota Pontianak sejumlah 25 orang yang terdiri dari pengawas CCTV sebanyak 10 orang, Penggunaan HT sebanyak 5 orang dan personil dinas perhubungan dilapangan sebanyak 10 orang. Jumlah ini telah tersedia sebelumnya dengan menggunakan SDM yang sama namun belum memiliki pembagian tugas seperti diatas.

SDM pelaksana sebelumnya hanya digunakan sebagai personil lapangan yang diikut sertakan untuk membantu penertiban lalu lintas bersama dengan pihak kepolisian, namun dengan adanya pembagian tugas yang telah diatur sesuai dengan *job desk* masing-masing maka secara penugasan akan lebih terarah sesuai dengan jenis tugas yang diberikan.

b) Kelengkapan Kerja

Kelengkapan kerja yang mendukung operasional kinerja sebelumnya hanya berupa kendaraan operasional seperti motor dan mobil patroli, adanya ruangan serbaguna bagi petugas lapangan serta fasilitas pendukung lainnya seperti meja, kursi dan alat tulis. Namun dengan adanya perubahan kerja serta peningkatan layanan kepada masyarakat, maka fasilitas kelengkapan kerja pun yang berada di dinas perhubungan kota Pontianak mengalami penambahan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat diantaranya penggunaan kamera CCTV, pengeras suara, adanya ruang kontrol (*server room*) serta layar monitor yang digunakan untuk memantau arus lalu lintas transportasi kendaraan.

Penyediaan fasilitas ini digunakan secara terpadu dan menyeluruh sehingga dapat berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 22 Fasilitas Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

No	Tahun	Jumlah Titik	Jumlah Kamera CCTV	Pengeras Suara	Jumlah Layar Monitor	Jaringan FO
1.	2016	7	24	3	4	4.000 m
2.	2017	13	38	7	6	6.840 m
3.	2018	21	72	14	11	13.790 m

Sumber : Dinas Perhubungan (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2016 terdapat 7 jumlah titik penempatan yang digunakan sebaga titik pemantauan awal dengan memasang 24 kamera CCTV serta 3 pengeras suara dengan jaringan FO 4.000 m. Tahun 2016 juga menjadi langkah awal pemasangan layar monitor yang berada pada dinas perhubungan untuk memantau sistem operasional fasilitas yang telah terpasang. Tahun 2017 mengalami penambahan 13 jumlah titik pemantauan dengan penambahan kamera CCTV sebanyak 38 serta 7 pengeras suara dengan penggunaan jaringan FO 6.840 m. Penambahan 6 layar monitor juga dilakukan sebagai upaya memperluas titik pemantauan jalanan serta jumlah kendaraan oleh masyarakat. Dengan penambahan fasilitas yang dilakukan kembali tahun 2018 maka jumlah titik mengalami penambahan sejumlah 21 titik pemnataan, 72 kamera CCTV serta 14 pengeras suara dengan Jaringan FO 13.790 m. Hal ini berimplikasi penambahan jumlah monitor pengawas sebanyak 11 layar yang berada diruangan kontrol dinas perhubungan. Sehingga melalui penambahan fasilitas yang mendukung operasional pelayanan maka akan meningkatkan kinerja pegawai.

c) Mekanisme

Prosedur pelaksanaan pemantauan yang berada pada dinas perhubungan kota Pontianak sebelumnya masih menggunakan prosedur SOP sesuai dengan standar pelayanan dengan cara manual yang biasa dilakukan seperti pengawasan langsung di lapangan dengan sejumlah personil, akan tetapi prosedur tersebut masih belum efektif menangani jumlah pelanggaran yang terjadi dilapangan apalagi jika pelanggaran terjadi setelah adanya laporan masyarakat. Namun dengan prosedur pengawasan dalam pengaturan lalu lintas dengan menggunakan kamera CCTV serta penggunaan *Smartphone* maka prosedur pelaksanaan akan lebih efektif dilakukan dengan mendapat laporan terlebih dahulu dari petugas layanan yang dipantau melalui layar monitor yang kemudian akan diteruskan ke masing-masing petugas dilapangan yang berada dilokasi kejadian. Sehingga hal ini dapat mempermudah jalur kordinasi antara petugas lapangan dengan petugas layanan monitor.

d) Tingkat Perubahan Pola Pikir atau Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan lalu lintas masih kurang. Perubahan pola pikir ini terjadi ketika masyarakat masih beranggapan tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh petugas baik dari dinas perhubungan maupun kepolisoan. Sebelumnya, masyarakat hanya taat apabila ada petugas yang berjaga / memantau arus lalu lintas dilapangan. Namun, dengan adanya sosialisasi dari dinas perhubungan dengan menempatkan kamera CCTV serta alat pengeras suara maka masyarakat sudah mulai sadar untuk mematuhi aturan berlalu lintas dengan mendengarkan arahan petugas melalui pengeras suara meskipun tidak berada di lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar berlalu lintas jika ada peringatan yang disampaikan oleh petugas baik secara langsung (berjaga dilapangan) maupun tidak langsung (melalui alat pengeras

Box 6 Testimoni Inovasi BCL

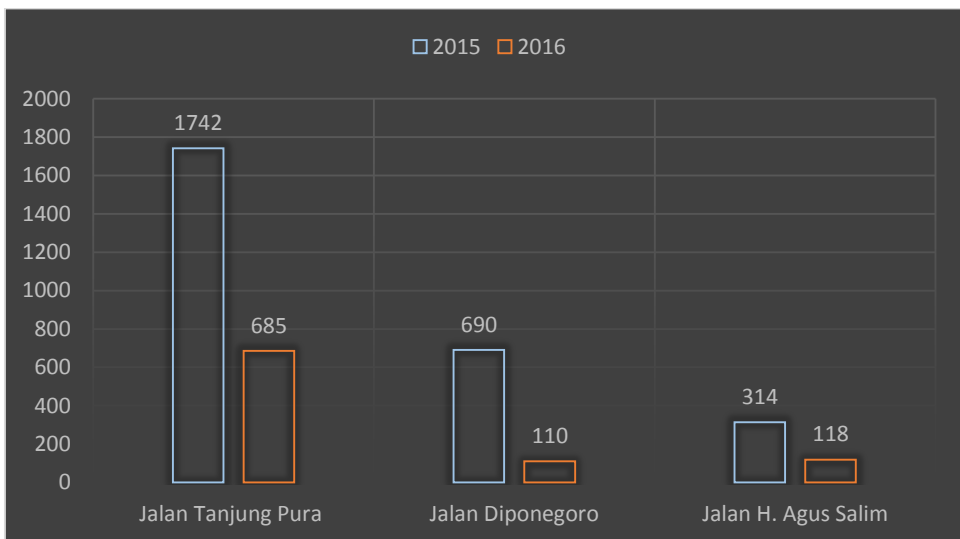
"Melalui Inovasi BCL, Masyarakat lebih sadar untuk Tertib Berlalu Lintas dan terbukti data pelanggaran lalu lintas menjadi berkurang." -**Utin Srilena Candramidi, Kepala DISHUB Kota Pontianak**

suara) yang berimplikasi pada taat atau tidaknya masyarakat dalam berkendara.

e) Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kawasan CBD (*Central Business District*) di kota Pontianak mengalami peningkatan khususnya di lokasi yang menjadi titik kemacetan diantaranya di jalan Tanjungpura, jalan Diponegoro dan jalan H. Agus Salim. Ketiga lokasi tersebut merupakan pusat bisnis yang sering mengalami aktivitas bongkar muat barang yang sering mengakibatkan kemacetan yang panjang.

Grafik 4 Pelanggaran Lalu Lintas



Sumber : (data hasil olahan peneliti)

Data tahun 2015 di jalan Tanjungpura tercatat sebanyak 1.742 jumlah pelanggaran sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 685 jumlah pelanggaran dengan tingkat presentasi penurunan jumlah pelanggaran sebesar 60,67%. Tingkat presentasi yang berbeda juga ditunjukkan di jalan Diponegoro yang dapat dilihat dari tahun 2015 tercatat 690 pelanggaran dan tahun 2016 jumlah pelanggaran turun menjadi 110 pelanggaran dengan tingkat

presentasi tertinggi 84,05%, sedangkan di Jalan H. Agus Salim tingkat pelanggaran yang rendah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 188 dengan tingkat presentasi pelanggaran mencapai 40,12 %.

Data diatas membuktikan bahwa presentasi pelanggaran disetiap lokasi mengalami perbedaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah jumlah fasilitas seperti perlengkapan CCTV, pengeras suara, serta personil dari dinas perhubungan dan polantas yang turut serta membantu mengurangi tingkat kemacetan dan pelanggaran di kawasan tersebut.

Box 7 Penurunan Jumlah Pelanggaran

"Penurunan jumlah pelanggaran di kawasan CBD tersebut turun dari tahun **2015 sebesar 2746** menjadi **983 pelanggaran tahun 2016** atau sebesar **64,2%**"

Inovasi yang digagas oleh dinas perhubungan kota Pontianak yang dilaksanakan oleh bidang lalu lintas dan angkutan jalan telah berhasil merubah secara signifikan kelancaran lalu lintas pada Kawasan perdagangan atau bisnis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan strategis untuk mengatasi permasalahan lalu lintas secara terpadu dan menyeluruh sehingga dapat berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan. Melalui pendekatan strategis tersebut, kawasan CBD (*Central Business District*) yang saat ini telah terpasang kamera CCTV yang dilengkapi dengan pengeras suara telah terhindar dari kemacetan maupun parkir liar.

Gambar 1 Kondisi hasil Penataan dan Pengaturan Lalu Lintas



Sumber : Dokumentasi penulis

Gambar diatas menunjukkan bahwa penataan kota yang sebelumnya masih belum tertata rapi karena belum adanya pengawasan langsung oleh dinas perhubungan untuk melarang penggunaan parkir di kawasan CBD, namun dengan adanya pemanfaatan CCTV serta pengeras suara di lokasi yang sering dimanfaatkan untuk memarkirkan kendaraan, maka secara bertahap menurun secara signifikan yang dipengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan disembarang tempat.

Output Keberhasilan inovasi pelayanan publik BCL di kota Pontianak secara konkret dapat dirasakan oleh masyarakat serta personel dinas perhubungan dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas pada kawasan CBD. Selain itu, keterbatasan personel yang sering menjadi kendala dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi pada perangkat *smartphone* yang dapat memantau kondisi lalu lintas serta menyampaikan pemberitahuan, arahan maupun teguran secara langsung pada lokasi yang telah terpantau oleh kamera CCTV.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya inovatif melalui penggunaan teknologi informasi tidak selalu berbiaya mahal dan menggunakan teknologi khusus akan tetapi cukup memanfaatkan teknologi *smartphone* yang sehari-hari digunakan secara luas oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik. Manfaat utama yang dapat dirasakan oleh masyarakat kota Pontianak terutama yang beraktifitas pada kawasan CBD kota Pontianak adalah kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta berkurangnya pelanggaran yang terjadi dikawasan perdagangan dan bisnis. Selain itu, manfaat lain yang dihasilkan adalah kinerja dari setiap petugas dinas perhubungan yang semakin meningkat karena dapat merespon permasalahan yang terjadi secara lebih cepat. Jangkauan pelayanan petugas juga semakin luas karena keberadaan petugas dapat digantikan oleh kamera pemantau sehingga petugas dapat diberdayakan ditempat lain yang lebih membutuhkan. Peningkatan kinerja ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Wahana Tata Nugraha bidang Lalu lintas dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016 atas pengelolaan lalu lintas di kota Pontianak.

3) Inovasi SIDOMAS (Sistem Dokumentasi Masyarakat) Kabupaten Purbalingga

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi SIDOMAS atau Sistem Dokumentasi Masyarakat termasuk dalam jenis inovasi pelayanan publik. Adapun tujuan dari implementasi inovasi, sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat sadar tertib arsip.
- b) Menyediakan media simpan arsip masyarakat yang praktis dan sistematis
- c) Memotivasi masyarakat untuk mengelola arsip pribadinya dengan baik
- d) Mengedukasi masyarakat dengan sistem penyimpanan arsip yang modern/berbasis IT

Sidomas merupakan aplikasi layanan penyimpanan dokumen masyarakat berbasis WEB dan Android khusus warga yang ber-NIK / KTP Purbalingga yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja saat dibutuhkan. Inovasi ini dibuat oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar arsip. Keberadaan SiDOMAS sangat membantu masyarakat mengatasi kerepotan dalam menyimpan dan menggunakan dokumen pribadi pada saat pengurusan sekolah, pekerjaan, pernikahan, transaksi jual beli dan lain-lain. Dokumen tersebut biasanya terdiri dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah, Akta Kelahiran dan lain-lain. Oleh karena itu saat ini masyarakat tidak perlu repot kemana-mana membawa fisik dokumen, karena dokumen tersedia dan tersimpan dalam bentuk digital pada aplikasi SiDomas. Pada saat masyarakat membutuhkan dokumen, tinggal masuk aplikasi SiDomas cari dokumen yang dibutuhkan kemudian tinggal mencetaknya. Dokumen masyarakat disimpan seraca terpusat melalui server yang disediakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Fakta kesulitan yang dihadapi masyarakat Purbalingga sebelum adanya aplikasi SiDOMAS adalah sebagai berikut :

- Masyarakat Purbalingga belum sadar akan pentingnya arsip/dokumen sebagai bahan bukti keperdataan, yang mengandung nilai sejarah, dan legalitas kependudukannya.
- Masyarakat Purbalingga belum tertib dan belum terbiasa untuk menyimpan dan memelihara dokumen pribadinya dengan baik.
- Masyarakat Purbalingga masih ber-orientasi untuk menyimpan fisik dokumen pribadi secara ala kadarnya.
- Masyarakat Purbalingga belum mempunyai back up / salinan dokumen pribadinya
- Masyarakat Purbalingga belum mempunyai media simpan dokumen yang praktis dan sistematis.

- Masyarakat Purbalingga belum menyadari bahwa penyimpanan arsip dalam bentuk tekstual secara ala kadarnya akan menyebabkan dokumen mudah rusak dan tidak menjamin keawetan dokumen
- Masyarakat Purbalingga belum melaksanakan penyimpanan dokumen secara elektronik.

Adapaun mekanisme untuk menggunakan sistem SIDOMAS terbilang sangat sederhana. Pendaftaran akun SIDOMAS dilakukan hanya dengan menggunakan NIK Purbalingga agar dapat login ke website SIDOMAS atau via smartphone berbasis android. Penyelenggara layanan akan memandu masyarakat untuk melakukan pendaftaran akun hingga proses pengunggahan dokumen yang dilakukan dengan cara turun langsung (jemput bola) ke masyarakat menggunakan mobil keliling, baik di sekolah-sekolah, kelurahan, desa, dan tempat lainnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran hingga proses pengunggahan dokumen pun relatif singkat, tak lebih dari 5 menit dengan kondisi internet yang memadai/stabil. Adapaun hak akses yang dimiliki setiap masyarakat pada sistem SIDOMAS hanya bisa melihat dan mencetak dokumen milik akun masing-masing, tanpa bisa membuka dokumen milik orang lain / akun lain. Hal ini dilakukan agar keamanan data/dokumen pribadi dapat senantiasa terjaga dalam media penyimpanan elektronik yang tersimpan di server SIDOMAS.

b. Data Perubahan

Tabel 23. Perubahan hasil inovasi SIDOMAS

Indikator	Deskripsi Perubahan
Dokumen terdigitalisasi	Jika sebelumnya dokumen masyarakat masih tersimpan secara manual/fisik. Maka Perubahan yang terjadi setelah adanya inovasi yakni telah adanya media penyimpanan digital dokumen dan dokumen dari masyarakat telah tersimpan secara digital.
Kemudahan masyarakat	Jika sebelum inovasi, masyarakat harus membawa fisik dokumen untuk pengurusan pelayanan tertentu. Maka setelah adanya inovasi masyarakat cukup membawa smartphone mereka, karena dokumen dapat diakses

	melalui smartphone dan praktis tinggal cetak.
	Sebelum adanya inovasi, penemuan dokumen sulit dan lama. Namun setelah inovasi, penemuan dokumen mudah dan cepat.
Perubahan Pola Pikir	Perubahan yang terjadi adalah mulai terbentuknya kesadaran masyarakat dalam mengelola dokumen pribadi mereka, baik orang dewasa dan bahkan semua umur.
Keamanan dokumen	Sebelum inovasi, penyimpanan dokumen dilakukan disembarang tempat yang menyebabkan dokumen mudah rusak dan hilang. Namun setelah inovasi, Penyimpanan dokumen terpusat di server sidomas dan telah ter-back up.
	Sebelum inovasi, masa penyimpanan fisik dokumen terbatas. Namun setelah ada inovasi, penyimpanan dokumen digital untuk waktu yang tidak terbatas.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Data diolah)

c. Analisis Dampak

Dampak Peningkatan Dokumen Terdigitalisasi

Sejak adanya inovasi SIDOMAS jumlah penerima layanan yang telah terhubung dengan SIDOMAS dari tahun 2015 hingga 2018 telah mencapai 30 ribu akun dan untuk setiap akunnya telah terupload dokumen berupa KTP dan KK. Itu

Box 8 Peningkatan Layanan SIDOMAS

- “Sejak 2015-2018, terdapat **30.000 akun SIDOMAS**
- Terupload dokumen **KK dan KTP**
- Total dokumen terupload sekurangnya **60.000 dokumen**”

berarti, total keseluruhan dokumen masyarakat yang telah terupload ke sistem SIDOMAS minimal sekitar 60 ribu dokumen. Hal ini sangat menguntungkan masyarakat karena telah menyimpan

dokumen secara terpusat melalui server sidomas sehingga kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan bisa digunakan secara praktis. Dokumen ini tentu akan aman tersimpan dalam sistem arsip digital yang dikembangkan oleh Dinas

Arsip Purbalingga untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam melakukan back up dokumen mereka. Berbeda halnya dengan kondisi sebelum adanya SIDOMAS, masyarakat sendiri tidak memiliki wadah penyimpanan / back up dokumen secara digital yang menyebabkan kerawanan pada kerusakan dan kehilangan dokumen.

Dampak Kemudahan Masyarakat

Penerapan aplikasi layanan penyimpanan dokumen pada aplikasi SIDOMAS membuat masyarakat merasa sangat dimudahkan dan terlayani serta dimanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pada saat sebelum adanya SIDOMAS, masyarakat kemana-mana harus membawa fisik dokumen untuk berbagai keperluan di berbagai unit layanan atau instansi pemerintahan. Begitu halnya bagi masyarakat yang bermukim di lokasi tempat tinggal yang relatif cukup jauh dari sentra pelayanan, maka tentu saja akan memberikan kesulitan tersendiri dalam hal pengurusan dokumen. Namun sejak penerapan SIDOMAS, dokumen tidak lagi harus selalu dibawa kemana-mana. Dokumen cukup disimpan dalam bentuk digital dan yang dibawa adalah HP android, sebab SIDOMAS telah berbasis web dan android yang juga memiliki fitur untuk cetak dokumen. Selain itu, keberadaan SIDOMAS yang merupakan layanan penyimpanan dokumen tak bayar atau gratis akan sangat membantu masyarakat karena tidak menambah beban financial mereka.

Dampak Perubahan Pola Pikir

Sejak peluncuran SIDOMAS dari tahun 2015 hingga saat ini, secara perlahan terjadi perubahan pola pikir yang ada di masyarakat Purbalingga yang mulai sadar dan tertib penyimpanan dan melestarikan dokumen pribadinya, sehingga diyakini hal tersebut akan dapat mewujudkan program Gerakan Masyarakat Sadar dan Tertib Arsip di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, secara bertahap pula masyarakat telah termotivasi dan ter-edukasi untuk menggunakan ponsel bukan saja pintar tetapi menjadi ponsel yang ajaib, guna mendukung kegiatan yang lebih bermanfaat dan positif daripada sekedar untuk tukar informasi ataupun silaturahmi antar kerabat, sahabat maupun teman alumni.

Dampak Keamanan atas Kerusakan/Kehilangan Dokumen

Dengan adanya SIDOMAS maka masyarakat tidak lagi perlu khawatir terhadap potensi kehilangan dan kerusakan dokumen, sebab telah ada back up dokumen mereka yang telah tersimpan aman dalam penyimpanan elektronik. Penyimpanan SIDOMAS ini menjamin keamanan data masyarakat yang telah dilengkapi enkripsi password pada saat melakukan login di SiDOMAS dan manfaat enkripsi diantaranya untuk menjamin kerahasiaan suatu informasi, karena orang lain tidak tahu password pengguna SiDOMAS. Oleh karena itu, masyarakat merasa tenang dan nyaman karena dokumen mereka telah aman tersimpan dalam server SIDOMAS dan tentu dalam jangka waktu yang tak terbatas. Aspek keamanan ini menjadi sangat penting karena pengguna SIDOMAS berasal dari segala usia, sebab siapapun warga Kabupaten Purbalingga yang telah mempunyai NIK dapat menggunakan SIDOMAS sebagai media penyimpanan dokumen. Begitu halnya dengan masyarakat dari segala kelompok sosial seperti pelajar, mahasiswa, ASN, pengusaha dan lain-lain, karena SIDOMAS telah menyediakan fasilitas penyimpanan untuk berbagai jenis dokumen sesuai dengan profesi pengguna. Kini masyarakat telah mempunyai media penyimpanan masing-masing secara digital.

4) Inovasi Pendaftaran Online RSUD Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi Pendaftaran Online termasuk dalam jenis inovasi Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu yang diperlukan masyarakat untuk mendapatkan nomor antrian layanan rumah sakit. Inovasi ini digagas dan dijalankan oleh RSUD Goeteng Tanudibrata Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Sistem antrian rumah sakit menitikberatkan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih optimal. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, RSUD Goeteng Tanudibrata menerapkan

layanan aplikasi antrian untuk mendapatkan nomor antrian layanan melalui aplikasi berbasis android.

Adapun rata-rata pengguna pendaftaran online adalah 60-100 per hari atau 10 % dari pengunjung rawat jalan di Rumah Sakit setiap harinya. Aplikasi dirancang sangat mudah digunakan, bahkan pasien lanjut usia bisa menggunakan aplikasi ini tanpa bantuan orang lain. Sosialisasi produk diberikan melalui pemasangan banner dan famplet.

Berikut adalah rekap data pengguna aplikasi ini sejak januari s.d 17 juli 2018.

Tabel 24. Analisa Perubahan Inovasi Pendaftaran Online RS

Bulan	Jenis Pasien	
	BPJS	Umum
Januari	1640	312
Februari	1430	235
Maret	1496	161
April	1140	192
Mei	1677	226
Juni	1065	120
Juli (1 s/d 17)	980	128

Sumber : RSUD Goeteng Taroenadibrata (Data diolah)

b. Data Perubahan

Tabel 25 Perubahan hasil Inovasi Pendaftaran Online RS

Indikator	Deksripsi Perubahan
Efisiensi Waktu	Peningkatan waktu layanan relatif lebih cepat dari kisaran 30-60 menit menjadi 5 menit akibat adanya perubahan teknologi pelayanan dari manauak ke pada aplikasi smartphone/website
Kemudahan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses nomor antrian dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun • Adanya pelayanan dalam memilih tenaga medis

Perubahan pola pikir

Masyarakat maupun petugas lebih memanfaatkan teknologi dalam hal akses pelayanan dan masyarakat tidak lagi resisten terhadap teknologi

Sumber : RSUD Goeteng Taroenadibrata (Data diolah)

c. Analisis Dampak

Efisiensi Waktu

Untuk mendapatkan layanan medis di RSUD Goeteng Purbalingga, pasien terlebih dahulu harus melewati sejumlah prosedur hingga dapat bertemu dengan dokter. Prosedur tersebut terdiri dari proses pengambilan nomor antrian pendaftaran di mesin pendaftaran, menunggu panggilan sesuai nomor untuk membayar biaya pendaftaran di loket kasir, menunggu kembali untuk dipanggil di loket pendaftaran poliklinik, dan menunggu panggilan bertemu dokter. Biasanya proses yang menyita cukup banyak waktu adalah ketika melakukan proses antrian. Di pagi hari, antrian relatif cukup panjang karena banyaknya jumlah kunjungan pasien di pagi hari dan umumnya memerlukan waktu hingga 30-60 menit untuk mengantri nomor antrian.

Setelah adanya inovasi pendaftaran online, perubahan jelas terlihat dari waktu layanan karena dengan sistem ini dapat memangkas waktu antrian yang cukup menyita waktu. Selama ini pasien dari Kabupaten Purbalingga ataupun dari luar Purbalingga misalnya harus datang pukul 05.00 atau pagi-pagi hari hanya untuk mengambil nomor

Box 9 Efisiensi waktu layanan

“Dengan melakukan pendaftaran online maka pasien mendapatkan nomor antrian secara mudah pada H-3 hingga H-1 dan dapat memperkirakan waktu kedatangan mereka ke rumah sakit, sehingga waktu tunggu menjadi lebih sedikit yang biasanya **tidak lebih dari 5 menit** berdampak pada efisiensi waktu antrian”.

antrean yang menyebabkan antrean padat. Namun dengan melakukan pendaftaran online maka ia mendapatkan nomor antrean secara mudah pada

H-3 hingga H-1 dan dapat memperkirakan waktu kedatangan mereka ke rumah sakit, sehingga waktu tunggu menjadi lebih sedikit yang biasanya tidak lebih dari 5 menit berdampak pada efisiensi waktu antrian.

Kemudahan Layanan

Sebelum penerapan inovasi pendaftaran online RSUD, masyarakat harus mendapatkan nomor antrian secara langsung di Rumah Sakit, yang menyebabkan masyarakat harus rela datang lebih awal sebelum jam operasional Rumah sakit hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Selain itu masyarakat tidak dapat memilih dokternya sendiri dan dapat diketahui setelah berada di poliklinik.

Namun setelah adanya inovasi, masyarakat lebih diberi kemudahan, dengan menggunakan pendaftaran online, masyarakat tidak perlu mengantri di mesin nomor antrian yang pada waktu-waktu tertentu akan penuh dengan antrian. Pasien dapat memantau nomor antrian melalui *mobile application* android, sehingga dapat memprediksi waktu kedatangan ke rumah sakit. Melalui aplikasi ini pula, pasien dapat memilih secara langsung waktu dan tenaga medis yang diinginkan. Aplikasi ini dapat diakses dimana dan kapan saja yang dapat dilakukan dari H-3 sampai dengan H-1 dari waktu kunjungannya ke Rumah Sakit. Adapun aplikasi ini dilengkapi dengan kemampuan memprioritaskan pelanggan sesuai dengan ketepatan waktu mereka, jika pelanggan tiba di waktu yang tepat sesuai dengan jadwal pra-booking, pelanggan akan otomatis diberikan prioritas dari pelanggan lain yang tiba pada saat yang sama.

Perubahan pola pikir

Inovasi pendaftaran online saat ini memberikan dampak secara langsung terhadap perubahan pola pikir dari masyarakat maupun petugas untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam hal akses pelayanan. Masyarakat tidak lagi resisten terhadap teknologi serta keinginan aparatur untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat merupakan dampak yang terasa langsung dari inovasi ini.

5) Inovasi 3C (Ciamis Child Complain) Kabupaten Ciamis

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi ini termasuk dalam jenis pelayanan publik. Inovasi ini merupakan sebuah aplikasi berbasis website khusus untuk pengaduan tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Aplikasi ini dibuat untuk memfasilitasi para korban maupun keluarga korban kekerasan atau pelecehan seksual yang tidak berani datang langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis untuk melaporkan. Penggunaan aplikasi ini sangat bisa dipahami oleh masyarakat meskipun awan teknologi. Karena bisa diakses menggunakan komputer ataupun smartphone. Sistem kerja aplikasi inipun cukup mudah. Masyarakat tinggal masuk ke website, kemudian isi identitas, alamat email dan nomor telepon serta menulis melaporkan kejadian di kolom yang sudah disediakan di website tersebut. Laporan yang masuk akan ditampung di server lalu oleh operator akan dicek, dibuat laporan dan diteruskan ke P2TP2A untuk kemudian ditindaklanjuti.

Ide awal inovasi ini berasal dari Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis (FRANCIS) yang menganggap bahwa perlu adanya wadah untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Ciamis. Sebelum adanya inovasi ini, kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Ciamis ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis. Namun Banyak dari para korban kekerasan dan pelecehan seksual tersebut yang tidak berani melapor ke P2TP2A. Entah karena faktor lokasi yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk melaporkan kekerasan maupun pelecehan seksual ke P2TP2A yang berada di pusat kota, maupun karena adanya intimidasi dari orang yang melakukan kekerasan atau pelecehan seksual menjadikan para korban atau keluarga korban kekerasan maupun pelecehan seksual enggan atau tidak berani melapor. Berdasarkan hal tersebut, FRANCIS kemudian berinisiatif membuat sebuah aplikasi untuk pengaduan kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Ciamis. FRANCIS sendiri merupakan sebuah wadah aspirasi dan partisipasi anak di Kabupaten Ciamis binaan Dinas

Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Ciamis sejak tahun 2012. Kemudian dengan didampingi oleh Dinas P2KBP3A, FRANCIS membuat sebuah aplikasi online untuk pengaduan kekerasan anak. Bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017 diluncurkanlah aplikasi threec.ciamiskab.go.id.

Adapun tujuan inovasi ini adalah :

- mencegah dan mengurangi kekerasan dan pelecehan seksual yang rentan dialami anak
- membantu mempercepat / memudahkan pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak
- memberikan informasi sekaligus pemahaman terhadap pentingnya penegakan hak-hak anak untuk hidup yang layak tanpa kekerasan dan diskriminasi di kehidupan masyarakat
- mendorong semua pihak untuk berperan serta dalam mewujudkan lingkungan yang peka terhadap hak-hak anak, permasalahan dan penyelesaiannya
- menjadikan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten layak anak yang memperhatikan pemenuhan hak-hak anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa yang bermoral dan berkualitas dengan menyediakan layanan pengaduan mengenai permasalahan anak dan penyelesaiannya

b. Data Perubahan

Walaupun tergolong inovasi yang masih baru, namun inovasi Three C berkontribusi terhadap penanggulangan tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Ciamis.

Tabel 26. Perubahan sebelum dan sesudah Inovasi Three C

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Jumlah SDM Pelaksana	6 orang yang turun ke lapangan	2 orang operator dan 6 orang turun ke lapangan	Ada tambahan SDM yang bertugas sebagai operator/admin aplikasi Three C
Proses	Metode Mendapatkan Layanan	Datang langsung ke P2TP2A Kab. Ciamis.	Dapat langsung melapor melalui aplikasi Three C.	Kemudahan dalam melaporkan kasus kekerasan dan jaminan keamanan identitas pelapor maupun pelaku.
	Waktu Pelayanan	Laporan yang masuk ke P2TP2A Kab. Ciamis ditindaklanjuti ± 1 minggu	Setiap ada laporan masuk melalui aplikasi Three C langsung ditindaklanjuti.	Adanya peningkatan waktu pelayanan (waktu untuk menindaklanjuti laporan yang masuk)
Output	Jumlah Layanan yang Dihasilkan	Belum ada (aplikasi Three C baru diluncurkan dan disosialisasikan pada bulan November 2017 serta mulai beroperasi pada awal tahun 2018).	6 kasus (s.d Juli 2018)	
Dampak	Jumlah Stakeholders selain Instansi Pemerintah yang Terlibat dalam Program Inovasi	Belum ada (aplikasi Three C baru diluncurkan dan disosialisasikan pada bulan November 2017 serta mulai beroperasi pada awal tahun 2018).	Forum Anak Kabupaten Ciamis LSM Perlindungan Anak Gabungan Organisasi	Terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

			Wanita (GOW)	
	Jumlah Unit/Instansi Pemerintah yang Terlibat dalam Program Inovasi	Belum ada (aplikasi Three C baru diluncurkan dan disosialisasikan pada bulan November 2017 serta mulai beroperasi pada awal tahun 2018).	Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS, Unit PPA Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kemenag	Terlibat dalam penanganan kasus dan pendampingan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Inovasi Three C ini merupakan inovasi yang tergolong baru, bahkan di Indonesia sekalipun. Karena inovasi yang berfokus pada penanggulangan tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sangat jarang ditemukan. Sebelum adanya inovasi Three C ini, setiap terjadi tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Ciamis, para korban maupun keluarga korban terkesan enggan untuk melaporkan. Ada beberapa alasan, diantaranya karena tempat untuk mengadukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak berada di kota, sementara kasusnya terjadi di daerah pelosok, yang akses nya menuju ke kota cukup sulit. Ada juga yang beranggapan tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak itu merupakan aib yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Sehingga dengan adanya inovasi ini, memudahkan masyarakat untuk melaporkan setiap tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Juga menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa anak juga mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa.

Ditinjau dari aspek SDM Pelaksananya, sebelum adanya inovasi Three C, tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak ditangani oleh Dinas P2TP2A Kabupaten Ciamis, yang menangani urusan perempuan dan anak. Ada 6 orang yang turun ke lapangan untuk menindaklanjuti jika ada laporan yang masuk. Setelah adanya Three C, ada tambahan personel sebanyak 2 orang yang bertugas sebagai admin/operator Three C serta 6 orang yang bertugas turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan yang masuk.

Kemudian dari segi Metode Mendapatkan Layanan, sebelum adanya inovasi Three C korban ataupun keluarga korban kekerasan dan pelecehan seksual harus datang langsung ke P2TP2A Kabupaten Ciamis untuk kemudian kasusnya ditindaklanjuti. Setelah adanya inovasi ini, korban ataupun keluarga korban

- “Masyarakat/kerabat/teman korban dapat melaporkan **melalui aplikasi three C tanpa harus datang lagi ke Dinas P2TP2A**
- Aplikasi three C juga membantu **masyarakat untuk saling peduli** dalam setiap tindak kekerasan dan pelecehan terhadap anak.”

kekerasan dan pelecehan seksual dapat langsung melapor melalui aplikasi Three C. Hal ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan dan. Identitas pelapor maupun pelaku juga mendapat jaminan keamanan. Untuk Waktu Pelayanan juga menjadi lebih singkat setelah adanya inovasi ini. Sebelumnya setiap ada laporan yang masuk, untuk menindaklanjutinya memerlukan waktu \pm 1 minggu, karena Dinas P2TP2A Kabupaten Ciamis tidak hanya menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, namun juga pada wanita dewasa. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor kenapa jika ada laporan yang masuk tidak bisa langsung ditindaklanjuti. Setelah ada inovasi Three C, setiap laporan yang masuk dapat langsung ditindaklanjuti, karena sudah ada tim khusus untuk menangani kasus yang masuk melalui Three C.

Jumlah Layanan yang Dihasilkan, dari awal inovasi ini diluncurkan hingga bulan Juli 2018 ada 6 kasus yang ditangani. Hal ini wajar terjadi, dikarenakan sosialisasi inovasi ini yang memang belum optimal, sehingga sebagian

masyarakat Kabupaten Ciamis mungkin masih ada yang belum mengetahui adanya inovasi ini. Namun Dinas P2TP2A Kabupaten Ciamis terus melakukan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait maupun swasta untuk lebih mengenalkan inovasi Three C kepada masyarakat. Harapannya masyarakat menjadi semakin mengenal dan paham bahwa ada inovasi yang khusus menanggulangi tindak kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak di Kabupaten Ciamis. Sehingga jika masyarakat mengetahui atau mengalami tindak kekerasan maupun pelecehan seksual dapat segera melaporkannya melalui aplikasi Three C.

Jumlah Stakeholders selain Instansi Pemerintah yang Terlibat dalam Program Inovasi ini ada 3 organisasi/instansi, yaitu Forum Anak Kabupaten Ciamis (FRANCIS), LSM Perlindungan Anak, dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis. Ketiga organisasi ini turut berperan dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis.

Sedangkan Jumlah Unit/Instansi Pemerintah yang Terlibat dalam Program Inovasi ini sebanyak 9 unit/instansi, diantaranya yaitu Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS, Unit PPA Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, serta Kemenag Kabupaten Ciamis. Masing-masing unit/instansi berperan dan terlibat dalam penanganan kasus dan pendampingan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.

6) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Digital Visual Arus Lalu Lintas Persimpangan Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Area Traffic Control System ini adalah suatu sistem pengatur lampu lalu lintas yang terpusat secara intelligent dan terkoordinatif serta mempunyai kemampuan sebagai suatu *traffic management system*. Inovasi ini masuk ke dalam kategori inovasi pelayanan publik. Koordinasi ATCS dilakukan antar persimpangan dalam satu area, sehingga antar persimpangan dapat

dikoordinasi melalui pengaturan dari ruang kendali *CC – ROOM* di Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Saat ini di kota Samarinda telah terpasang alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL sebanyak 34 simpang, dimana 25 simpang diantaranya telah terangkai dalam jaringan ATCS. Tujuan pengembangan jaringan *Area Traffic Control System (ATCS)* dalam upaya rekayasa dan manajemen serta pengendalian lalu lintas kendaraan pada persimpangan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika dan mobilitas masyarakat di Kota Samarinda.

Setidaknya ada empat manfaat dari inovasi ini, yaitu:

- a) Perekaman data dan gambar pada setiap persimpangan selama kurang lebih 5 (lima) hari kebelakang, sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan evaluasi kinerja persimpangan dan hal lainnya.
- b) Mudah untuk dilakukan analisa terhadap kondisi lalu lintas persimpangan terhadap permasalahan lalu lintas.
- c) Mengurangi jumlah petugas lapangan pengatur dan pengendali lalu lintas di persimpangan.
- d) Segala pergerakan kendaraan dapat dilakukan pengawasan dengan cermat dan baik, dengan arti bahwa pengaturan waktu siklus lampu lalu lintas atau APILL dapat mengikuti dinamika volume atau arus lalu lintas pada persimpangan secara proporsional, dimana kaki simpang dengan volume arus lalu lintas yang tinggi, akan mendapatkan waktu hijau lebih panjang dibandingkan. dengan kaki simpang lainnya yang arus dan volume lalu lintasnya lebih rendah.

Persimpangan merupakan titik pertemuan dari masing – masing kaki ruas jalan memiliki minimal 16 titik konflik. Pengendalian lalu lintas persimpangan sebagai upaya rekayasa dan manajemen lalu lintas dilakukan dengan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). Setelah adanya ATCS maka dampaknya adalah Pengendalian arus lalu lintas pada persimpangan dapat dipantau secara visual dan dikendalikan dari ruang kendali (*ccroom*) Pemberian informasi tentang kondisi arus lalu lintas di persimpangan yang terpantau di ruang (*cc-room*) dan dapat di akses oleh masyarakat (*nitizen*) dengan menggunakan

telpon genggam cerdas (*gadget*) dan perangkat komunikasi canggih lainnya. Hingga saat ini masyarakat mengakses informasi tentang kondisi lalu lintas di Samarinda melalui twitter. Secara berkala Dinas perhubungan mengupdate informasi kondisi lalu lintas di persimpangan padat kendaraan melalui unggah video di twitter. Adapun pengikut twitter Dinas Perhubungan kota Samarinda adalah 7.581 akun.

b. Analisa Dampak

Stakeholders lainnya yang mendapatkan manfaat dari adanya ATCS ini adalah kepolisian. Polisi hendak melacak pelaku melalui nomor kendaraan yang terekam dalam kamera. Dengan demikian hasil rekaman tersebut bisa membantu polisi mendapatkan pelaku kejahatan kriminal di Kota Samarinda lebih cepat. Apalagi rekaman ATCS ini bisa disimpan selama lima hari. Oleh karena itu, apabila satu tindak kejahatan terjadi di beberapa hari yang lalu masih bisa diakses rekamannya. Bahkan apabila ada pihak yang ingin rekaman tidak dihapus dalam waktu lima hari maka rekaman tersebut akan tetap disimpan oleh Dinas Perhubungan.

Inovasi yang baik dan memberikan manfaat memang sudah seharusnya diikuti oleh daerah lain. Dengan harapan memberikan dampak yang positif kepada daerah yang mereplikasi inovasi tersebut. Inovasi ATCS ini sudah direplikasi oleh dua Kabupaten di Kalimantan Timur. Kota Samarinda merupakan daerah otonom pertama di Kalimantan Timur yang menggunakan ATCS. pemerintah kota Balikpapan dan Kabupaten Berau juga turut mereplikasi system ATCS ini di daerah masing-masing. Sebelum

Box 10 Kemanfaatan inovasi ATCS

“Inovasi ini dapat membantu **memudahkan polisi mendapatkan pelaku kejahatan kriminal** di Kota Samarinda lebih cepat. Apalagi rekaman ATCS ini bisa disimpan selama lima hari. Oleh karena itu, apabila satu tindak kejahatan terjadi di beberapa hari yang lalu masih bisa diakses rekamannya”.

menerapkan ATCS di Balikpapan dan Berau, kedua pemerintah daerah tersebut datang melakukan studi banding terlebih dahulu ke kota Samarinda.

7) Inovasi SISPATI (Sistem Pelayanan Pajak Terintegrasi) Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda membentuk 2 UPT, yaitu UPT Bapenda Samarinda Utara dan UPT Bapenda Samarinda Sebrang. Sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB maka perlu dilakukan inovasi. Salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh UPT Bapenda Samarinda Utara adalah Sistem Pelayanan Pajak Terintegrasi (Sispati). Sispati ini masuk dalam kategori inovasi pelayanan publik.

Sispati merupakan inovasi yang dibuat untuk membantu petugas dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan di UPT Badan Pendapatan Daerah (UPT Bapenda) Samarinda Utara. Selain itu juga dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan perpajakan. Sispati ini adalah inovasi system informasi pelayanan pajak dimana masyarakat dalam membayar pajak tidak lagi datang ke kantor namun bisa dilakukan secara online, dengan system online dirasakan kenyamanan masyarakat untuk membayar pajak meningkat karena masyarakat tidak bersusah payah antri dalam memperoleh layanan pajaknya.

Adapun tujuan dari Sispati ini adalah Membangun Komunikasi Masyarakat Dengan Pemerintah Kota Samarinda Khususnya Badan Pendapatan Daerah, mendukung intensifikasi pengelolaan pajak daerah sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Inovasi ini ditetapkan mulai tahun 2015.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan Sispati ini maka dibentuk tim petugas pengolah data sispati pada UPT Bapenda Kecamatan Samarinda Utara. Ada tiga orang yang masuk dalam tim dan tim dituangkan dalam Keputusan Kepala Bapenda Nomor 973/ 562/ 300.03/ 2018 tentang Petugas Pengolah Data Sispati pada UPTB Pendapatan Daerah Kecamatan Samarinda Utara tahun

2018. Dalam SK tersebut ditetapkan bahwa tiga orang petugas pengolah data sipati mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.500.000.

“Dengan adanya metode jemput bola, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak besar dan hanya membayar sesuai dengan pajaknya dan proses penyelesaian administrasi hanya satu hari”.

Selain system online penagihan pajak PBB juga dilakukan dengan jemput bola yang dilakukan oleh petugas. Petugas datang ke rumah rumah dan toko toko dengan langsung pendataan

bangunan sesuai dengan besaran pajaknya. Dengan adanya inovasi ini kenaikan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan sangat besar karena maksimalnya intensifikasi pajak bumi dan bangunan. Sebelum adanya inovasi ini masyarakat memberikan pembayaran kepada pengurus RT dan ibu ibu PKK sehingga biaya yang dikeluarkan juga cukup besar dan proses yang pembayaran pajak melalui pengurus RT cukup memakan waktu kurang lebih satu minggu baru selesai . Dengan adanya inovasi jemput bola ini biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak besar dan hanya membayar sesuai dengan pajaknya dan proses penyelesaian administrasi hanya satu hari,.

Ada beberapa permasalahan dari biaya pengelolah kost dalam pembayaran pajak. Pemilik kos yang dikenakan pajak adalah yang menyewakan kamarnya dengan tarif di atas lima ratus ribu per bulan. Sedangkan kos dengan tarif sama dengan atau di bawah lima ratus ribu tidak dikenakan pajak. Padahal banyak para pemilik kost kostan yang jumlah banyak tapi tidak bisa dikenakan pajak. Dikarenakan pajak dilihat dari pendapatannya bukan jumlah kamar kamar.

Inovasi berdampak pada kenaikan pendapatan pertahun 45 % segi administrasi dan surat surat kepemilikan tanah dan bangunan lebih tertata secara rapih dan setiap masyarakat wajib mempunyainya sertifikat tanah.

b. Analisa Dampak

Sebelum adanya inovasi ini, data pajak sangat minim dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga Badan Pendapatan Daerah kesulitan dalam melakukan intensifikasi pajak. Proses intensifikasi akan sulit dilakukan karena data wajib pajak yang tidak lengkap dan update. Dengan adanya inovasi ini petugas dituntut untuk menjadi lebih aktif dalam bekerja menghimpun data pajak. Ketersediaan data pajak tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat. Terutama masyarakat yang menginput sendiri informasi pajaknya ke dalam sistem sipati ini.

8) Inovasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas (SIM HP) Kabupaten Purbalingga

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas merupakan jenis inovasi yang terkait pelayanan publik. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan informasi harga pasar secara langsung dan online melalui aplikasi SIM HP yang bisa diakses di web melalui gawai Android. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas (SIM HP) merupakan inovasi yang secara transparan menampilkan harga-harga komoditas di pasar secara berkala dan diperbaharui setiap harinya. Jika selama ini harga komoditas pasar mungkin hanya bisa diketahui lewat radio, televisi, media cetak dan elektronik namun dengan adanya inovasi ini maka informasi seputar harga pasar bisa diakses dengan mudah hanya melalui genggaman tangan yakni melalui gawai android dan atau dapat juga disaksikan secara langsung pada papan *running text* yang ada di halaman Pasar Segamas Purbalingga.

SIM HP Segamas menampilkan 17 komoditas barang yang berada di Pasar Segamas. Komoditas tersebut berupa beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, jagung pipilan kering, tepung terigu, cabe, bawang merah, bawang putih, ikan asin teri, garam, mie instant, kacang tanah, dan kacang hijau. Harga yang tercantum dalam sistem ini akan terupdate setiap harinya sesuai

dengan harga pasar yang diambil dari rata-rata harga tertinggi dan terendah. Sistem kontrol dan informasi harga pun dilakukan petugas di pagi hari dengan mendatangi secara langsung para pedagang di setiap blok pasar untuk mendapatkan informasi rata-rata harga komoditas yang ada di Pasar Segamas. Proses ini biasanya memerlukan waktu 1 jam untuk kegiatan survey harga dan 15 menit lagi untuk penginputan data di aplikasi SIM HP.

b. Data Perubahan

Tabel 27. Perubahan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas

Indikator	Deskripsi Perubahan
Kemudahan akses informasi	Terdapat kemudahan dalam mengakses informasi mengenai harga-harga yang tersedia di Pasar
Dampak terhadap spekulasi	Para spekulasi pasar sudah tidak dapat memainkan harga pasar
Jumlah Pengunjung	Antusiasme dari masyarakat kian meningkat untuk berkunjung ke pasar Segamas

Sumber : Dinas Perdagangan (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Kemudahan akses Informasi Harga Pasar

Penerapan inovasi SIM HP memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pada kemudahan dalam mengakses informasi mengenai harga-harga yang tersedia dan terupdate setiap harinya di Pasar Segamas. Harga komoditas di Pasar Segamas dapat terlihat secara detail via online (smartphone atau website) dan juga di papan running text tepat di pintu masuk pasar Segamas. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat khususnya mereka yang ingin mengetahui berapa rata-rata harga komoditas yang ada di pasar saat ini, karena

masyarakat tidak perlu lagi datang secara langsung dan mengecek satu per satu harga tersebut yang mungkin bisa menghabiskan waktu dan materi.

Mafia Pasar atau Spekulan

Penerapan inovasi SIM HP yang secara transparan menampilkan harga kebutuhan pokok di pasar berdampak pada terjadinya stabilitas harga pasar yang kerap kali dimainkan oleh para mafia pasar atau spekulan. Dengan adanya inovasi ini perlahan para spekulan pasar sudah tidak dapat memainkan harga pasar karena pemantauan harga pasar akan dilakukan setiap harinya.

Jumlah Pengunjung

Inovasi SIM HP juga berdampak pada peningkatan pengunjung pasar segamas. Menurut keterangan dari pengelola pasar, jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang mungkin salah satu indikatornya dapat terlihat dari banyak kendaraan masuk dan terparkir di area parkir pasar segamas. Kemudahan yang ditawarkan oleh inovasi SIM HP membuat antusiasme dari masyarakat kian meningkat untuk berkunjung ke pasaran dan tentu ini juga akan berimplikasi pada semakin kompetitifnya pasar-pasar di kabupaten purbalingga.

9) Keluar Bersama, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

Angka kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Danurejan masih kurang yaitu 53,92% di tahun 2014 dan di tahun 2015 hanya mencapai 83,74%. Angka tersebut masih belum optimal karena di bawah target angka nasional yaitu 85%. Kemudian, berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) lokal diketahui kepemilikan dokumen anak yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Danurejan sebanyak 15,01 % di tahun 2014 dan 31,55% di tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Kecamatan Danurejan belum memiliki KIA.

Tabel 28 Data Kependudukan Kecamatan Danurejan

No.	Indikator	2014	2015
1.	Akta Kelahiran	53,92%	83,74%
2.	Kartu Identitas Anak	15,01%	31,55%

Sumber : Kecamatan Danurejan (Data diolah)

Selanjutnya apabila dibandingkan antara angka kepemilikan akta kelahiran dengan kepemilikan KIA di tahun 2014 dan tahun 2015 tampak adanya ketimpangan, dimana selisih angkanya di masing-masing tahun cukup tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak setiap pengajuan permohonan akta kelahiran diikuti dengan permohonan/penerbitan KIA. Warga masih mengurus dokumen kependudukan anak tersebut secara terpisah-pisah tidak dalam satu waktu.

Dalam hal perubahan Kartu Keluarga akibat kelahiran, pada tahun 2014 jumlah kelahiran sebanyak 228, namun permohonan perubahan Kartu Keluarga karena kelahiran sekaligus permohonan NIK anak lahir sebesar 224. Sementara pada tahun 2015, jumlah kelahiran sebanyak 225 namun permohonan perubahan Kartu Keluarga karena kelahiran sekaligus permohonan NIK anak lahir hanya sebesar 217. Kondisi ini belum ideal karena seharusnya jumlah kelahiran sama dengan jumlah permohonan perubahan Kartu Keluarga dan NIK anak lahir.

Inovasi "*Keluar Bersama, Daftar 1 Dapat 5*" merupakan inovasi mengintegrasikan pelayanan untuk pemenuhan hak-hak anak terhadap dokumen kependudukan yaitu:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK),
- Kartu Keluarga (KK),
- Kartu Identitas Anak (KIA),
- Akta Kelahiran, dan
- Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

Inovasi Keluar Bersama merupakan salah satu inovasi di bidang pelayanan publik. Inovasi ini menyederhanakan alur/mechanisme pelayanan menjadi lebih terpadu. Tujuan inovasi ini untuk memudahkan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan mempercepat proses pengurusannya. Pemerintah Kecamatan Danurejan menerapkan sistem informasi pelayanan dokumen anak melalui SMS Gateway dalam aplikasi SIMAMI. SMS Gateway akan memberikan edukasi kepada ibu hamil dan bayi/balita sehingga kesehatan Ibu Hamil termonitor yang pada akhirnya diharapkan akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Setiap bulan sang ibu akan mendapatkan pesan singkat secara berkala apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kehamilannya.

Gambar 2 Leaflet Inovasi Keluar Bersama



Sumber : Kecamatan Danurejan (Data diolah)

Sebelum proses persalinan, Ibu Hamil akan mendapatkan pemberitahuan untuk mengumpulkan beragam persyaratan yang diperlukan guna memproses dokumen kependudukan. Sehingga begitu proses persalinan selesai, Ibu Hamil sudah langsung mendapatkan lima dokumen. Inovasi Keluar Bersama juga sebagai media pemberdayaan kader pendamping Ibu Hamil (Bumil) dalam hal pendataan, monitoring kesehatan, media informasi tentang kesehatan. Program inovasi ini juga dibuat untuk mewujudkan sinergitas aspek kependudukan dengan aspek kesehatan.

b. Data Perubahan

Secara umum, perubahan yang dilakukan oleh inovasi Keluar Bersama berdampak ke arah yang lebih baik. Perubahan ini terlihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Berikut adalah analisis mengenai perubahan adanya inovasi:

Tabel 29. Perubahan hasil Inovasi Keluar Bersama

Indikator	Perubahan				
SDM Pelaksana	Terdapat Kader Pendamping Ibu Hamil dan Petugas Penghubung Kecamatan - Disdukcapil.				
Prosedur mendapatkan pelayanan	Penerima layanan – RT/RW – Kelurahan – Kecamatan - Disdukcapil				
Kualitas Mutu Layanan	Adanya sistem yang mengintegrasikan pelayanan terhadap Ibu Hamil secara elektronik				
Perubahan pola disiplin Pemerintah	Mewujudkan akselerasi dan kemudahan proses kepemilikan dokumen anak				
Perubahan indikator kependudukan	Dokumen	2014	2015	2016	Perubahan
	Akta Kelahiran	53,92%	83,74%	95,26%	Peningkatan rata-rata 20,67% setiap tahun
	Kartu Identitas Anak	15,01%	31,55%	62,15%	Peningkatan rata-rata 23,57% setiap tahun

Sumber : Kecamatan Danurejan (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Data di atas merupakan kondisi sebelum dan sesudah adanya inovasi Keluar Bersama. Dari data tersebut dapat dianalisa pada tiap aspek sebagai berikut:

a) SDM Pelaksana

- Adanya Kader Pendamping Bumil di wilayah warga sangat membantu dalam kepengurusan dokumen yang hendak diurus oleh ibu hamil. Kader Pendamping Bumil tersebut disiapkan oleh Puskesmas Danurejan I dan II. Ibu hamil akan diinformasikan mengenai segala urusan kesehatan dan kependudukan setelah bayi lahir nantinya. Setiap ibu hamil akan mendapatkan pendampingan dari petugas pendamping yang tersebar di setiap RW. Para pendamping siap membantu mulai dari proses registrasi awal hingga proses lanjutan lainnya. Pendamping dari Puskesmas tersebut akan mengupdate data Ibu Hamil, menyediakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak untuk Ibu Hamil, dan menyampaikan pesan melalui SMS *Gateway* yang dalam aplikasi SIMAMI. Dengan pendampingan yang intensif maka keberadaan ibu hamil dapat terus dipantau, sehingga ketika ternyata bayi yang di kandungan meninggal dunia akan langsung terdeteksi dan dilakukan pendataan.
- Inovasi ini juga melibatkan Lurah-Lurah di wilayah Kecamatan Danurejan seperti Lurah Suryatmajan, Lurah Tegalpanggung, dan Lurah Bausasaran. Sebelum ke Kecamatan, pihak Kelurahan akan memverifikasi dan mengkompilasi berkas persyaratan pengurusan KK, KIA, Akta Kelahiran dari pemohon untuk kemudian disampaikan ke Kecamatan.
- Inovasi Keluar Bersama ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran staf pelayanan di Kecamatan Danurejan. Pihak Kecamatan melaksanakan pengelolaan SMS Gateway, melaksanakan pendaftaran Akta Kelahiran ke Disdukcapil dengan membawa Surat Kuasa dari pemohon (orang tua yang bersangkutan), dan menginformasikan melalui

Box 11 Testimoni Inovasi Keluar Bersama

"Saya senang karena tidak lagi harus datang ke balaikota untuk mengurus dokumen. Saya dpt pemberitahuan sejak anak keempat saya masih dlm kandungan. Prosesnya juga cepat, sebelum lahir diminta melengkapi surat-surat tidak sampai seminggu sudah selesai." -
Octa Dewi Nurlia, pengguna layanan keluar bersama

SMS Gateway penyampaian KK baru, kartu KIA, dan Akta Kelahiran. Dengan kata lain, Kecamatan Danurejan membantu penyelesaian dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b) Prosedur mendapatkan layanan

Jika dibandingkan dengan sebelum adanya inovasi Keluar Bersama, Ibu Hamil sangatlah direpotkan dengan mengurus dokumen-dokumen bayi baru lahir. Bahkan Ibu Hamil sering mengurus sendiri karena suaminya bekerja, sehingga setiap satu berkas yang diurus membutuhkan waktu yang lama. Ketika satu berkas selesai, Ibu akan mengurus berkas lainnya dengan jeda waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan kondisi Ibu yang merawat bayinya dan harus bolak-balik ke Kantor Kecamatan maupun Disdukcapil. Namun dengan inovasi Keluar Bersama ini berkas-berkas tersebut dapat langsung terbit dalam satu waktu dan tidak perlu sampai Disdukcapil karena penyelesaian dokumen dapat diambil di Kecamatan. Secara ringkas alur pelayanan inovasi Keluar Bersama ini adalah sebagai berikut:

- Penerima layanan (ibu hamil) memberikan nomor HP dan data kehamilan kepada admin untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kehamilan (SIMAMI) agar dapat menerima *broadcast* SMS yang berisi pesan-pesan seputar kehamilan.
- Puskesmas dapat juga menyampaikan nomor HP dan data kehamilan kepada admin SIMAMI, memberikan buku KIA kepada Ibu Hamil, dan memberikan pesan-pesan seputar kehamilan yang akan menjadi isi *broadcast* SMS kepada admin SIMAMI untuk dimasukkan ke sistem.
- Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai pihak yang membuat aplikasi Sistem Informasi Kehamilan (SIMAMI).
- Kelurahan dan Kecamatan sebagai pihak yang menyediakan formulir yang dibutuhkan dan menginput data ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta mencetak Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pihak yang menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu

Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan diserahkan kembali ke petugas yang ditunjuk Kecamatan Danurejan.

Gambar 3 Teknis Pelaksanaan Inovasi



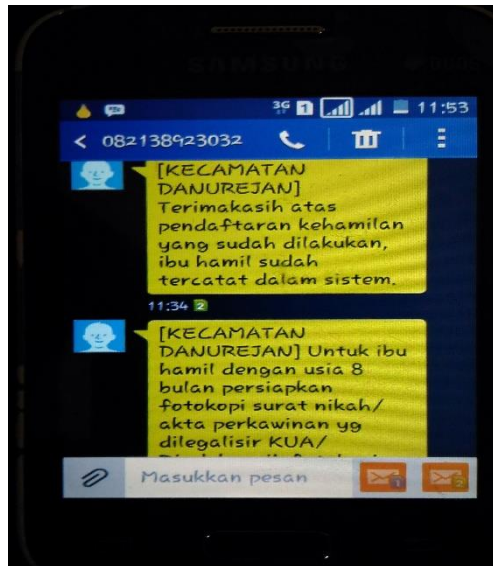
Sumber : Kecamatan Danurejan (Data diolah)

c) Waktu Layanan

Dalam implementasi inovasi ini warga sudah mulai dilayani sejak si ibu mengandung. Sebab data setiap Ibu Hamil dimasukkan dalam sistem yang dirancang khusus yang disebut SIMAMI. Setiap bulan sang ibu akan mendapatkan pesan singkat secara berkala apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kehamilannya. Sebelum waktu persalinan tiba, Ibu Hamil akan mendapatkan pemberitahuan untuk mengumpulkan beragam berkas persyaratan yang diperlukan guna memproses dokumen kependudukan. Nantinya begitu proses persalinan selesai, Ibu Hamil akan langsung mendapatkan lima dokumen. Dokumen yang didapatkan adalah Buku Kesehatan Ibu Dan Anak, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga. Jika diurus parsial atau terpisah, untuk memperoleh seluruh dokumen tersebut membutuhkan waktu hampir satu

bulan. Sekarang dengan inovasi ini maksimal hanya dua pekan semua dokumen tersebut dapat terselesaikan.

Gambar 4 Pemberitahuan SMS Gateway



Sumber : Kecamatan Danurejan (Data diolah)

d) Kualitas mutu layanan

Sebelum inovasi, pelayanan dokumen anak tidak melalui sistem informasi elektronik dan tidak terdapat database Ibu Hamil di Kecamatan yang terupdate setiap saat. Berbeda halnya dengan kondisi setelah inovasi, dibangun sistem informasi pelayanan dokumen anak melalui SMS Gateway. Terdapat juga sistem informasi yang mengakomodasi database ibu hamil dalam sistem yang disebut SIMAMI. Sebelum inovasi, metode edukasi kesehatan ibu hamil selama ini melalui pertemuan Kelas Bumil yang difasilitasi oleh Puskesmas. Namun setelah inovasi ini berjalan terdapat metode edukasi kesehatan ibu hamil secara elektronik melalui sistem SMS Gateway tersebut. Dengan adanya perubahan ini maka ibu hamil mendapatkan *self reminder* mengenai pelayanan-pelayanan kesehatan selama masa kehamilannya tanpa harus berkunjung ke Puskesmas

terlebih dahulu. Adanya inovasi ini membuat masyarakat lebih tahu akan pelayanan dokumen anak yang dilakukan terintegrasi secara bersamaan untuk berbagai jenis dokumen anak. Jika dibandingkan sebelumnya pelayanan anak dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri yang justru lebih memakan biaya, waktu, dan tenaga.

Gambar 5 Sistem SIMAMI

The screenshot shows the SIMAMI web application interface. The main content area displays a table with the following data:

NIK	Nama Ibu	No Telp SIMAMI	Tanggal Daftar	Kecamatan	RT	RW	Action
3471944504830001	NITA APRILIA	08982251611	2017-01-08	TEGALPANGGUNG	043	009	[Edit]
3471945009890001	MADIVANTI ADIH SANTOSO	085729473493	2016-12-30	BAUSASRAN	037	010	[Edit]
3471944612850001	MUJIVARTI	087739474408	2016-12-28	TEGALPANGGUNG	022	005	[Edit]
3471946323920002	META CHINTIA WIHARI	089642934330	2016-12-21	TEGALPANGGUNG	061	013	[Edit]
	NUR YANTI	081913531408	2016-12-09	BAUSASRAN		11	[Edit]

Sumber : Kecamatan Danurejan (Data diolah)

e) Perubahan pola disiplin pemerintah

Adanya inovasi Keluar Bersama ini membuktikan terjadinya perubahan tindaklanjut pemerintah terhadap warga yang belum melengkapi dokumen kependudukan. Pemerintah lebih peduli dengan mencari solusi bagi permasalahan warga khususnya Ibu Hamil dalam melengkapi data penduduk setelah melahirkan. Pemerintah telah menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi terkait dengan dokumen anak, mewujudkan akselerasi dan kemudahan proses kepemilikan dokumen anak, mewujudkan akselerasi update data kependudukan, serta mewujudkan tertib dokumen anak. Hal tersebut menunjukkan komitmen

pemerintah terhadap pelayanan dokumen kependudukan masyarakat khususnya untuk Ibu Hamil.

f) Perubahan indikator kependudukan

Selain mempercepat proses pengurusan administrasi, kepemilikan warga terhadap akta kelahiran juga meningkat signifikan yaitu dari 83,74 % pada 2015 menjadi 95,26 % pada 2016. Kepemilikan KIA juga meningkat dari 31,55 % pada 2015 menjadi 62,15 % pada 2016. Dengan data yang meningkat tersebut memudahkan bagi Pemerintah Daerah terkait data kependudukan.

Box 12 Peningkatan Layanan SIMAMI

"Rata-rata, peningkatan jumlah akte kelahiran adalah **20,67%**, sementara peningkatan jumlah Kepemilikan KIA rata-rata setiap tahunnya adalah **23,57%**. Hal ini disebabkan karena Inovasi ini **menyederhanakan alur/mekanisme pelayanan** menjadi lebih terpadu. Selain itu, dalam implementasi inovasi ini warga sudah mulai dilayani sejak si ibu mengandung. Sebab data setiap Ibu Hamil dimasukkan dalam sistem yang dirancang khusus yang disebut SIMAMI."

Pemerintah Kota Yogyakarta mampu memonitor penduduk yang belum mengurus kependudukannya secara lengkap. Hal ini membuktikan inovasi Keluar Bersama telah memberikan dampak bagi peningkatan data kependudukan yang harus dipenuhi masyarakat, terutama dokumen-dokumen setelah kelahiran anak.

10) Penerangan Jalan Umum Hemat Energi Di Tingkat RT-RW (PJU LINGKUNGAN) Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

Semakin meningkatnya tingkat mobilitas masyarakat membuat semua kegiatan di malam hari memerlukan penerangan jalan. Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu penerangan yang bersifat publik dan biasanya dipasang di ruas jalan maupun di tempat tertentu seperti taman dan tempat umum lainnya. PJU di perkampungan tingkat RT umumnya pemasangan dilaksanakan oleh warga RT yang membutuhkan penerangan jalan di lingkungan mereka.

Pemasangan PJU tersebut umumnya mengambil listrik dari jaringan listrik PT. PLN tanpa ijin ataupun dari rumah warga dan bilamana instalasi tersebut tidak memenuhi standar Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dapat membahayakan keselamatan/keamanan warga. Pengambilan listrik dari jaringan listrik PLN tersebut sering kali disebut dengan PJU liar dan tagihan rekening listrik dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat secara abonemen/*lump-sum* (borongan). Sistem tersebut cenderung melampaui perkiraan konsumsi pemakaian listrik karena perhitungan biaya listrik didasarkan atas asumsi pemakaian tertentu (tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan apakah nyala atau mati) dan klasifikasi kelas daya tertentu yang umumnya jauh lebih besar nilainya dibandingkan pemakaian sesungguhnya. Operasi penertiban lampu liar pun seringkali dilaksanakan oleh PT. PLN. Lampu-lampu liar tersebut akan dilepas dari jaringan listrik PT. PLN dan penerangan jalan di lingkungan pun kembali gelap.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang digunakan untuk membayar tagihan rekening listrik seringkali tidak cukup. Apalagi dialokasikan untuk pembangunan, perawatan dan perbaikan PJU. Pelayanan PJU difokuskan pada jalan protokol dan jalan utama di perkampungan. Jika menunggak pembayaran tagihan listrik dapat berakibat pada pemadaman PJU secara paksa oleh PT. PLN yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan/keamanan masyarakat.

PJU Lingkungan adalah PJU yang dipasang di kelas jalan lingkungan dan gang-gang ataupun setapak di tingkat RT/RW menggunakan lampu setara Neon 20W dengan jarak antar titik lampu sejauh +20m. Inovasi PJU Lingkungan ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang berhati nyaman dan aman sebagai kebutuhan suatu kota pariwisata khususnya mendukung pariwisata malam hari. Untuk itu perlu dilakukan Penataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menjadi PJU Protokol, PJU Kampung, PJU Lingkungan (Tingkat RT-RW) dan Lampu Hias. Dan dalam mengoptimalkan penataan lampu PJU maka dilakukan pemasangan KWH Meter untuk menjaga kontinuitas nyala lampu agar dapat menyala secara optimal dan maksimal.

Inovasi PJU ini juga bertujuan mengurangi pemasangan LPJU liar oleh warga yang tanpa izin mengambil aliran listrik dari jaringan listrik milik PT. PLN dan Pemkot Yogyakarta. Selain itu, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ingin meningkatkan volume sebaran pelayanan titik lampu LPJU sehingga dapat menerangi seluruh wilayah di Kota Yogyakarta. Pada akhirnya, inovasi PJU ini memberikan manfaat terhadap efisiensi pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Data Perubahan

Secara umum, perubahan yang dilakukan oleh inovasi PJU Lingkungan berdampak ke arah yang lebih baik. Perubahan ini terlihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Berikut adalah analisis mengenai perubahan adanya inovasi:

Tabel 30 Perubahan hasil Inovasi PJU Lingkungan

No	Indikator	Perubahan
1.	Jumlah SDM Pelaksana	Perubahan tenaga SDM menjadi 20 PNS dan 7 Tenaga Teknis
2.	Prosedur mendapatkan layanan	Musrenbang untuk penambahan titik lampu baru
3.	Kualitas mutu layanan	Sesuai dengan SNI tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan.
4.	Jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah	Pemkot mampu mengefisienkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) hingga hampir Rp2,5 miliar per bulan.

(Sumber : Dinas Kimpraswil (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Data di atas merupakan kondisi sebelum dan sesudah adanya inovasi PJU Lingkungan. Dari data tersebut dapat dianalisa pada tiap aspek sebagai berikut:

a) Jumlah SDM Pelaksana

Sebelum ada inovasi ini, SDM untuk penyelenggaraan pemeliharaan lampu konvensional di Dinas Kimpraswil meliputi 10 PNS, 3 honorer daerah, dan 7 tenaga musiman. Dari situ terlihat belum terdapat efisiensi tenaga pada Dinas Kimpraswil. Saat menggunakan inovasi PJU Lingkungan sumber daya manusia yang ada tidak lagi menggunakan honorer daerah ataupun tenaga musiman, namun semuanya telah dilakukan oleh PNS dan tenaga teknis terkait. Hal tersebut membuktikan untuk pelaksana inovasi ini dilakukan oleh SDM yang berkompeten dalam menangani PJU Lingkungan.

b) Prosedur mendapatkan layanan

Pada awal pelaksanaan inovasi ini Dinas Kimpraswil melakukan Musrenbang terlebih dahulu. Musrenbang dilakukan untuk mendengar pendapat masyarakat dan juga tokoh-tokoh setempat dalam penentuan titik-titik yang akan dipasang PJU. PJU tersebut tidak serta merta dipasang. Perlu persetujuan terlebih dahulu agar rumah warga yang terkena pemasangan PJU bersedia. Tidak ada paksaan dalam pemasangan PJU tersebut. Apabila warga tidak bersedia wilayah rumah tinggalnya dipasang PJU, maka petugas tidak akan memasang di titik tersebut. Demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya dalam menentukan titik-titik baru. Dinas Kimpraswil selalu melakukan dengan usulan Musrenbang agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Gambar 6 Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta



Sumber : Dinas Kimpraswil (Data diolah)

c) Kualitas Mutu Layanan

Penggunaan meteran listrik di lampu penerangan jalan dan penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED yang ramah lingkungan justru tidak membutuhkan daya yang terlalu besar. Tambahan pendapatan dari pajak penerangan jalan umum diperoleh setelah Pemerintah Kota Yogyakarta terus menambah jumlah titik lampu penerangan hingga merata di seluruh wilayah. Kualitas lampu LED yang dipasang oleh Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta telah sesuai dengan SNI tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan ICS 93.080.40 Badan Standardisasi Nasional, SNI 7391:2008. Hal tersebut memastikan bahwa penggunaan lampu LED untuk inovasi PJU ini tetap dilakukan standarisasi terlebih dahulu sebelum lampu tersebut terpasang.

d) Jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah

Sebelum inovasi pemasangan meteran dan lampu LED, Pemkot selalu mengalami defisit. Pembayaran Pajak PJU (PPJU) tak sebanding dengan yang diterima. Padahal saat itu Pemkot baru membayar PPJU untuk 8.000 titik PJU yang ada. Selama ini penggunaan lampu neon justru menghabiskan biaya listrik

yang begitu besar. Dalam rangka revitalisasi menjadikan Yogyakarta kota ramah lingkungan, maka lampu penerangan jalan umum yang sebelumnya memakai lampu neon diganti dengan lampu *light emitting diode* (LED) yang bisa menghemat energi hingga 50 persen dibandingkan lampu penerangan jalan neon atau *fluorescent*. Jika memakai lampu LED daya yang dikeluarkan 120 watt, sedangkan memakai lampu neon atau sodium bisa 250 watt. Daya tahan lampu LED juga bisa dipakai hingga 10 tahun. Sementara lampu lainnya hanya bisa dipakai 4-5 tahun.

Gambar 7. Pemasangan KWH Meter



Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengganti sebagian besar penggunaan neon bersodium (PLC/HPIT) sebagai penerangan jalan utama menjadi lampu penerangan berbasis teknologi LED (*light-emitting diode*) sejak 2014. Dari data yang diperoleh, penerimaan PPJU di Kota Yogyakarta selalu memiliki sisa dari tahun ke tahun. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Penerangan Jalan. Dengan program PJU Hemat Energi yang dimulai sejak tahun 2000 dan PJU Protokol dengan Penataan PJU menggunakan KWH Meter dan lampu hemat energi, PAD Kota Yogyakarta dari PPJ mengalami surplus rata-rata Rp26 miliar setiap tahunnya. Untuk itu penataan PJU Hemat Energi dilanjutkan dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat yaitu Program Penataan Penerangan Jalan Umum di Tingkat RT-RW (PJU Lingkungan) dan PJU Kampung.

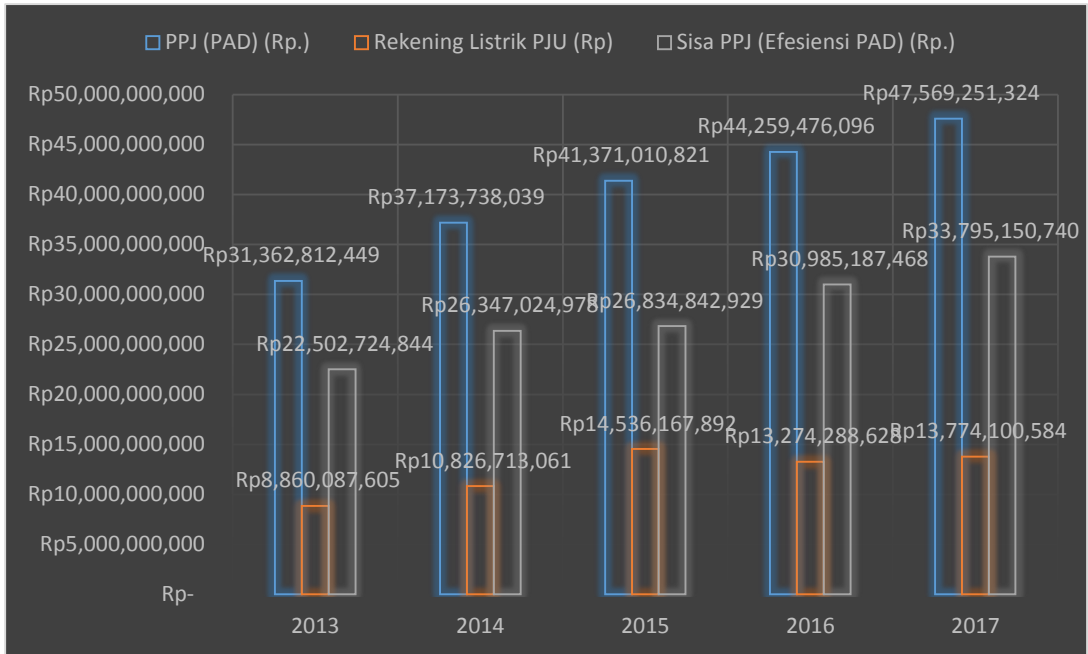
Tabel 31 Efisiensi PAD dari Inovasi PJU Lingkungan

THN	PPJ (PAD) (Rp.)	Rekening Listrik PJU (Rp)	Sisa PPJ (Efisiensi PAD) (Rp.)
2000	5.398.722.290	4.963.654.335	435.067.955
2001	6.707.661.020	5.183.454.105	1.524.206.915
2002	10.113.246.000	5.031.068.785	5.082.177.215
2003	12.073.973.520	5.531.717.725	6.542.255.795
2004	14.373.485.340	6.194.460.919	8.179.024.421
2005	14.962.323.865	6.269.841.130	8.692.482.735
2006	16.819.421.894	5.629.218.475	11.190.203.419
2007	18.165.137.380	5.770.675.435	12.394.461.945
2008	18.038.297.510	6.575.096.945	11.463.200.565
2009	19.292.966.345	6.186.635.645	13.106.330.700
2010	22.331.783.500	6.863.443.545	15.468.339.955
2011	24.076.220.455	7.917.985.159	16.158.235.296
2012	26.414.627.166	7.948.394.870	18.466.232.296
2013	31.362.812.449	8.860.087.605	22.502.724.844
2014	37.173.738.039	10.826.713.061	26.347.024.978
2015	41.371.010.821	14.536.167.892	26.834.842.929
2016	44.259.476.096	13.274.288.628	30.985.187.468
2017	47.569.251.324	13.774.100.584	33.795.150.740
Jml	410.504.155.014	141.337.004.843	269.167.150.171

Di tahun 2017 pada bulan Oktober penerimaan PPJU sudah mencapai Rp 39,2 miliar. Sementara, rekening PJU mencapai Rp 11,4 miliar, sehingga ada sisa PPJU mencapai Rp 27,7 miliar. Sementara itu, pada tahun 2016, PPJU mencapai Rp 44,2 miliar dengan rekening PJU sebesar Rp 13,2 miliar. Sehingga terdapat sisa PPJU sebesar Rp31 miliar. Di tahun 2015, PPJU yang diperoleh mencapai Rp 41,3 miliar dengan rekening sebesar Rp 14,5 miliar dan sisanya mencapai Rp 26,8 miliar. Pada tahun 2014, PPJU yang diterima mencapai Rp

37,1 miliar, sementara rekening untuk PJU mencapai Rp 10 miliar. Dengan demikian terdapat sisa PPJU sebesar Rp 26,3 miliar.

Grafik 5 Efisiensi PAD dari Inovasi PJU Lingkungan



Sumber : (data hasil olahan penulis)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima PPJ dari Tagihan Rekening Listrik yang dipungut oleh PT. PLN Persero. Dari Tahun 2000 s/d Tahun 2017 diperoleh PPJ (Pajak Penerangan Jalan) sebesar Rp. 410.504.155.014,- digunakan untuk membayar

listrik PJU & Trafic Light sebesar Rp. 141.337.004.843,-. Sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp. 269.167.150.171,- selama kurun waktu 17 tahun. Efisiensi anggaran dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat sebagai dampak setelah adanya inovasi PJU Lingkungan tersebut.

Box 13 Efisiensi PJU terhadap PAD 2013-2017

"Dalam kurun waktu 2013-2015, rata-rata efisiensi dari PJU terhadap PAD setiap tahunnya adalah **28 miliar per tahun**. Hal ini disebabkan oleh penggantian lampu konvensional menjadi **lampu LED** yang ramah lingkungan justru tidak membutuhkan **daya yang terlalu besar**."

11) Yogyakarta *Emergency Service* (YES 118), Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

Sebagai kota pendidikan dan kota wisata, Yogyakarta kerap dikunjungi banyak orang dari berbagai daerah dan berbagai negara. Diperkirakan jumlah mahasiswa dan pelajar dari luar kota Yogya yang bertempat tinggal di Yogya mencapai ribuan orang. Dengan jumlah penduduk kota Yogya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan jumlah pelajar/mahasiswa dan juga wisatawan, tentu keadaan darurat kecelakaan lalu lintas maupun kondisi darurat medis lainnya sering terjadi di kota ini. Kondisi kecelakaan dan darurat medis yang dialami oleh warga luar Yogya, seringkali tidak dilayani oleh rumah sakit karena tidak ada penanggungjawabnya baik keluarga maupun kerabat yang ada. Banyak pelajar/mahasiswa luar Yogya yang jauh dari orang tua, jika mereka kecelakaan atau kondisi darurat medis lainnya tidak ada yang bertanggung jawab. Inilah yang melatarbelakangi pembentukan Yogyakarta Emergency Service 118 (YES 118).

Tujuan dari diadakannya inovasi YES 118 adalah:

- a) memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa melihat KTP namun melihat TKP yang mengalami kecelakaan dan kondisi darurat medis lainnya.
- b) Mengurangi resiko kematian, kecacatan, komplikasi dengan cepat dan tepat
- c) Mendapat kejelasan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta (d disesuaikan dengan tarif rumah sakit).

Adapun gambaran inovasi Yogyakarta Emergency Service 118 (YES 118) adalah sebagai berikut:

- a) Keluarga atau masyarakat yang melihat atau mengalami kejadian musibah kecelakaan/gawat darurat baik di dalam maupun di luar rumah melakukan kontak ke (0274) 420-118 untuk mendapatkan pertolongan segera secara medis tanpa harus memikirkan biaya awal jaminan pasien dan persyaratan administrasi lainnya.
- b) Tim medis YES 118 yang menerima telepon pengaduan, segera mendata dan mencatat informasi terkait lokasi kejadian, identitas dan kondisi korban.
- c) Tim Medis YES 118 segera melakukan evakuasi korban dan melakukan penanganan 24 jam pertama di rumah sakit terdekat dengan penanggung biaya sepenuhnya oleh APBD Kota Yogyakarta.

Bukan hanya kecelakaan yang ditangani oleh layanan YES 118, namun beberapa kondisi darurat medis lain yang mengancam jiwa juga ditangani layanan ini. Kondisi tersebut antara lain kritis akibat tenggelam, ibu hamil akan melahirkan, terserang penyakit stroke mendadak, serangan jantung mendadak, epilepsi mendadak, dan beberapa penyakit kronis lainnya. Posko YES 118 berada di Balai Kota Yogyakarta. Posko ini menyediakan dua mobil ambulans yang siap melayani kasus gawat darurat di Yogyakarta.

b. Data Perubahan

Secara umum, perubahan yang dilakukan oleh inovasi layanan YES 118 memberikan manfaat dan dampak yang sangat besar bagi kehidupan

masyarakat. Beberapa kondisi perubahan sebelum dan sesudah inovasi terlihat seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 32 Perubahan hasil Inovasi Layanan YES 118

Indikator	Deksripsi Perubahan
Biaya / Anggaran	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
SDM Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SDM Pelaksana ▪ Kompetensi 	Meningkatnya kualitas tenaga medis akan pengetahuan atau ketrampilan dalam penanganan gawat darurat.
Mekanisme <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur dan metode mendapatkan layanan ▪ Waktu Layanan 	Peningkatan kecepatan layanan dan waktu layanan bagi penanganan korban
Produktivitas	Meningkatnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat .
Peningkatan Keterlibatan Stakeholders	Peningkatan koordinasi lintas unit/stakeholder dalam penanganan korban gawat darurat

(Sumber : Dinas Kesehatan (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Berdasarkan hasil pemetaan pada tabel perubahan sebelum dan sesudah layanan inovasi di atas dapat dianalisis dan disimpulkan dampak yang diterima dari adanya layanan inovasi YES 118 ini, antara lain:

a) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tingkat kesehatan masyarakatnya. Semakin sehat masyarakat dapat dikatakan semakin sejahtera juga hidupnya. Jika masyarakat sehat artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kesehatannya. Biaya yang mestinya dikeluarkan

untuk biaya kesehatan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Layanan YES 118 secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak pada kesejahteraan untuk masyarakat. Dengan menggratiskan biaya perawatan penanganan pertama dan 24 jam pertama berarti telah ikut menyejahterakan masyarakat. Perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lebih nyaman dengan layanan YES 118 karena cara memperoleh layanan dan penanganan yang cepat walaupun hanya untuk 24 jam pertama saja. Selain itu terdapat beberapa kemanfaatan diantaranya:

- Pengurangan beban biaya pada masyarakat pada saat penjemputan korban dari lokasi kejadian ke rumah sakit rujukan
- Pengurangan beban biaya tindakan dan bahan medis habis pakai pada masyarakat selama penanganan ke rumah sakit
- Pengurangan beban biaya pada masyarakat pada saat penggunaan mobil ambulance.

b) Meningkatnya kualitas tenaga medis dan masyarakat

Dalam hal ini telah dibentuk 18 pegawai berupa Tenaga Medis, Paramedis dan Driver yang telah dilatih dan diberi ketrampilan teknis agar sigap dalam memberikan penanganan gawat darurat dan tindakan awal medis kepada korban. Selain itu juga inovasi layanan YES 118 memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat sekitar untuk dilatih dalam menangani kondisi kegawatdaruratan karena masyarakat sebagai *basic life support*. Dengan alasan masyarakat yang paling dekat dan tahu terhadap kejadian kecelakaan dan kegawatdaruratan.

c) Kecepatan layanan dan waktu layanan bagi penanganan korban

Layanan YES 118 memberikan manfaat bagi ketersediaan saluran komunikasi/akses berupa call center 119 atau (0274) 420118. Akses tersebut dapat digunakan masyarakat kota Yogyakarta dalam melaporkan kondisi kegawatdaruratan yang dilihat/ditemui di jalan agar segera mendapatkan penanganan medis 1x24 jam. Kemudian dengan adanya

Box 14 Testimoni Inovasi YES 188

"Saat itu saya sekeluarga menghadiri undangan Sawalan Trah HB VII di Dalem mangkubumen. Sesampainya di acara, Eyang saya mengalami kejang2 dan badannya kaku. Saya langsung menghubungi layanan YES dan Tim YES lgsng dtg menggunakan ambulans. Setelah melakukan pertolongan lanjutan di tempat, mereka langsung membawa eyang saya ke tempat fasilitas layanan kesehatan terdekat. Alhamdulillah semuanya gratis, termasuk untuk biaya perawatan selama 24 jam pertama" -Ahmad M Adha, pengguna layanan

ketersediaan sarana-prasarana berupa 1 unit ambulance transport dan 1 unit ambulance gawat darurat memudahkan bagi petugas tenaga medis secara cepat tiba di lokasi kejadian dan memberikan penanganan gawat darurat. Dampaknya pasien dapat segera tertangani.

d) Meningkatnya Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Inovasi Layanan YES 118 memberikan manfaat dan dampak bagi ketersediaan dan kesigapsiagaan tenaga layanan kesehatan dalam menangani laporan pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini telah dibentuk 18 pegawai berupa tenaga Medis, Paramedis dan Driver yang telah dilatih dan diberi ketrampilan teknis dalam penanganan gawat darurat. Sebelum inovasi layanan YES 118, belum ada layanan sejenis ini yang berjalan di kota Yogyakarta. Demikian juga layanan YES 118 secara tidak langsung telah memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat yang semula kurang tanggap terhadap kondisi kegawatdaruratan menjadi cepat tanggap dengan kondisi kegawatdaruratan yang ada di sekitarnya. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kejadian kecelakaan dan gawat darurat karena akses untuk

mendapatkan pertolongan lebih mudah dan cepat. Selain itu layanan YES 118 juga merubah pola pikir para petugas pelayanan kesehatan. Sebelum layanan YES 118 pelayan masyarakat (Dinas Kesehatan) belum bergerak untuk menunjukkan empati kepada kejadian gawat darurat. Setelah adanya layanan YES 118 pemberi layanan (Dinas Kesehatan) lebih tanggap dan cepat dalam menangani laporan kecelakaan dan kondisi gawat darurat.

Berikut digambarkan data dan informasi terkait laporan masyarakat yang masuk ke Layanan YES 118:

Tabel 33 Laporan Masyarakat di Layanan YES 118

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Kecelakaan	Kasus Medis Lain
1.	2009	364	253	180
2.	2010	603	333	242
3.	2011	742	393	316
4.	2012	640	355	285
5.	2013	805	334	470
6.	2014	622	Tdk ada ketrng	Tdk ada ketrng
7.	2015 (Juli)	245	106	139

Sumber : Dinas Kesehatan (Data diolah)

e) Peningkatan koordinasi lintas unit/stakeholder dalam penanganan korban gawat darurat

Dalam mengaktifkan layanan kesehatan YES 118 maka Dinas Kesehatan melakukan langkah koordinasi antar stakeholder terkait pembagian tugas dan fungsi yang ada. Langkah koordinasi yang melibatkan beberapa stakeholders sebagai berikut:

- a) PMI Cabang Yogyakarta, terlibat dalam hal-hal khusus untuk penanganan dukungan penyelamatan jiwa seperti ketersediaan darah

- b) Rumah sakit pemerintah dan swasta (ada 12 rumah sakit) berperan sebagai rumah sakit rujukan YES 118. Karena fungsinya rumah sakit mempunyai peran dalam pengambilan keputusan tindakan medis tertentu
- c) Polresta, Poltabes Yogyakarta berperan sebagai pemeriksa dan penyidik kejadian kecelekaan untuk proses lebih lanjut
- d) UPTD Jamkesda, Jasa Raharja, berperan sebagai pihak yang memberikan klaim pembayaran asuransi
- e) Dengan adanya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder, maka memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat dalam terselesaikannya urusan administrasi, hukum, keuangan, dan kesehatan secara cepat.

12) Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

Sudah banyak sekali pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat bahwa setiap kali pengaduan atau keluhan yang disampaikan ke kantor lembaga pemerintah, respon dan jawaban yang diterima pasti akan lama sekali jawabannya. Berbagai alasan seringkali diterima oleh masyarakat, dari pengaduannya yang sedang diproses, berkas yang hilang yang kemudian diminta untuk mengirimkan kembali laporan pengaduan yang telah dikirimkan sebelumnya dan berbagai alasan lainnya. Sehingga tindak lanjut atas setiap pengaduan dan keluhan yang disampaikan masyarakat nyaris tidak terlihat status perkembangannya. Akibatnya timbul pesimistis dan pemikiran di kalangan masyarakat atas hasil program pemerintah yang berkaitan dengan program penyampaian keluhan/pelaporan masyarakat yang tidak memberikan banyak manfaat.

Atas dasar hal tersebut, Bagian Humas dan Informasi Kota Yogyakarta membentuk suatu Unit Pelayanan yang dinamakan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan disingkat dengan UPIK. Layanan UPIK merupakan wadah yang

disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menampung berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat kotanya.

Adapun gambaran singkat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat kota Yogyakarta yang akan menyampaikan saran, pengaduan, atau keluhan dapat menggunakan berbagai macam jenis saluran komunikasi baik melalui Telepon Seluler, Telepon, Fax, pesan singkat (SMS), surat elektronik (email), ataupun melalui website. Untuk media telepon atau fax, masyarakat bisa menghubungi nomor 0274-561270 atau melalui pesan singkat telepon selular di nomor 08122780001, sedangkan untuk surat elektronik dapat dialamatkan ke upik@jogjakota.go.id atau melalui laman upik.jogjakota.go.id dengan menuliskan saran, informasi, atau keluhan ke formulir aplikasi yang telah disediakan.
- b) Setiap pesan/laporan yang disampaikan masyarakat akan didata dan tercatat secara langsung ke dalam sistem. Pesan tersebut kemudian diverifikasi oleh admin UPIK dan selanjutnya dikirimkan sesuai dengan tujuan/maksud pelaporan ke OPD/Unit Kerja terkait melalui sistem UPIK yang dijalankan oleh admin UPIK.
- c) Operator yang ada di OPD terkait kemudian menerima pesan dan memberikan jawaban dengan batas waktu 2 x 24 jam. Balasan tersebut secara otomatis akan terkirim langsung kepada warga dan terekam di dalam sistem.
- d) Seluruh aduan atau laporan yang masuk ke layanan UPIK kemudian akan dilaporkan secara berkala 1 (satu) pekan atau 1 bulan kepada Kepala Daerah untuk dilihat berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai catatan berdasarkan hasil analisis data, ada sekitar rata-rata 10 pesan per hari atau 200-300 pesan laporan/pengaduan per bulan yang masuk ke unit layanan UPIK.

Dengan demikian tujuan yang diharapkan dari layanan inovasi UPIK ini adalah sebagai berikut:

- a) Mempercepat dan memudahkan layanan informasi, pengaduan, dan keluhan yang ingin disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta tanpa perlu prosedur yang berbelit-belit.
- b) Mendapatkan data terkait permasalahan yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta sebagai bahan monitoring, evaluasi, perencanaan dan tindakan bagi pimpinan daerah.
- c) Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kota dengan ikut membantu dalam memberikan informasi dan laporan atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada pelaksanaan program kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan fisik pembangunan.

b. Data Perubahan

Secara umum, perubahan yang dilakukan oleh inovasi layanan UPIK memberikan manfaat dan dampak ke arah yang lebih baik kepada masyarakat. Beberapa kondisi perubahan sebelum dan sesudah inovasi terlihat seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 34 Perubahan hasil Inovasi Layanan UPIK

Indikator	Deskripsi Perubahan
SDM Pelaksana <ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah▪ Kompetensi	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kualitas SDM yang responsif, cekatan dan handal
Mekanisme dan Kualitas Layanan	<ul style="list-style-type: none">▪ Efisiensi dan efektifitas sistem pelaporan, dan jaminan layanan dan tanggapan pelaporan yang berasal dari masyarakat

Produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap Layanan UPIK
---------------	---

(Sumber : Bagian Humas dan Informasi Data diolah)

c. Analisa Dampak

Berdasarkan hasil pemetaan pada tabel perubahan inovasi di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan mengenai dampak yang diterima dari adanya layanan inovasi UPIK ini antara lain:

a) Peningkatan Kualitas SDM yang Responsif, Cekatan dan Handal

Sebagai sebuah sistem layanan publik, UPIK tentunya didesain agar bisa berjalan secara optimal dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, salah satunya pembentukan sistem organisasi dan manajemen SDM. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk mempermudah proses layanan pengaduan masyarakat yang masuk ke

layanan UPIK dibentuk suatu strategi manajemen pengelolaan SDM dalam layanan sistem UPIK. Dengan membentuk 69 orang tim operator yang mewakili 69 unit OPD yang ada di Kota Yogyakarta, 4 orang teknisi, dan 1 orang sebagai administrator yang kesemuanya mensyaratkan harus memiliki kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, dan kemampuan interpersonal yang baik. Ke

“Dengan adanya manajemen pengelolaan layanan sistem UPIK, maka setiap pegawai yang ditugaskan dalam posisi dan bidang yang ada secara tidak langsung bisa meningkatkan kemampuannya baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial.”

69 operator, 4 teknisi, dan 1 administrator tersebut bertugas sesuai bidang yang ditanganinya. Ke 69 operator bertugas dalam menjawab setiap laporan yang masuk ke unit OPD terkait, 4 orang teknisi dan 1 orang administrator bertugas dalam operasional sistem aplikasi dan pengelolaan pesan dan aduan dari masyarakat. Dengan adanya manajemen pengelolaan layanan sistem UPIK, maka setiap pegawai yang ditugaskan dalam posisi dan bidang yang ada secara tidak langsung bisa meningkatkan kemampuannya baik kemampuan

teknis maupun kemampuan manajerial. Kemampuan teknis dalam bentuk kemampuan dalam menangani permasalahan yang timbul pada sistem aplikasi, jaringan, perangkat keras, atau permasalahan teknis lainnya. Sedangkan kemampuan komunikasi dan interpersonal adalah kemampuan dalam menangani setiap permasalahan/komplain dari masyarakat dan pemberian solusi yang bisa diberikan.

b) Efisiensi dan efektifitas sistem pelaporan, dan jaminan layanan dan tanggapan pelaporan yang berasal dari masyarakat.

Layanan UPIK memberikan efektivitas dalam penyampaian segala permasalahan keluhan masyarakat kepada Pemerintah Kota secara cepat dan tepat. Dengan didukung ketersediaan saluran komunikasi yang ada baik berupa Telepon Seluler, Telepon, Fax, pesan singkat (SMS), surat elektronik (email), website maupun secara manual dengan surat yang diterima oleh petugas pengaduan, menjadikan tidak adanya kendala yang berarti dari masyarakat dalam menyampaikan permasalahannya. Sehingga memberi manfaat bagi pelaksanaan tugas di lapangan dalam menerima dan menangani setiap pelaporan yang masuk dari masyarakat. Dan tentunya layanan inovasi ini memberikan dampak adanya kepastian waktu tanggapan/jawaban atas penyampaian laporan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam prosesnya 1 x 24 jam laporan tersebut akan diteruskan admin ke OPD terkait sesuai isi laporan. Kemudian dalam jangka waktu 2x24 jam, OPD terkait diharuskan memberikan respon ke warga yang melapor. Kondisi ini berbeda sebelum adanya inovasi ini, dimana tidak ada standar waktu layanan dalam merespon setiap laporan masyarakat yang masuk.

c) **Meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan UPIK.**

Hal ini berbeda dengan sistem pengaduan yang lama, dimana kejelasan akan waktu jawaban yang dibutuhkan masyarakat sulit dipastikan.

Box 15 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Layanan UPIK

“Melihat begitu efektifnya layanan UPIK ini dalam merespon setiap laporan dan pengaduan masyarakat, membuat UPIK semakin dimanfaatkan warga dalam menyampaikan setiap permasalahan yang ada. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pesan pengaduan dari masyarakat yang masuk yaitu sekitar 10 pesan pengaduan per hari atau 200-300 pesan pengaduan per bulan yang masuk ke unit layanan UPIK, berbeda dengan kondisi sebelumnya”.

Dengan adanya sistem layanan UPIK ini maka adanya jaminan mutu standar layanan (SOP) yang ditetapkan. Dimana 1x24 jam setiap pengaduan masyarakat wajib direspon oleh admin UPIK dengan menyampaikan pengaduan tersebut ke OPD terkait. Maksimal 2x24 jam bagi OPD terkait untuk memberikan respon sejak pengaduan pertama kali disampaikan oleh admin. Kondisi ini memberikan dampak masyarakat semakin yakin dan percaya kepada sistem layanan UPIK bahwa setiap pengaduan dan laporan yang disampaikan pasti akan direspon dan diberikan tanggapan. Selain itu setiap laporan pengaduan masyarakat yang masuk akan diolah yang nantinya akan disampaikan ke pimpinan daerah sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Melihat begitu efektifnya layanan UPIK ini dalam merespon setiap laporan dan pengaduan masyarakat, membuat UPIK semakin dimanfaatkan warga dalam menyampaikan setiap permasalahan yang ada. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pesan pengaduan dari masyarakat yang masuk yaitu sekitar 10 pesan pengaduan per hari atau 200-300 pesan pengaduan per bulan yang masuk ke unit layanan UPIK, berbeda dengan kondisi sebelumnya.

13) Klinik Layanan Perizinan (KLIPPER) Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi Klinik Pelayanan Perizinan (Klipper) dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan dan pengaduan yang dihadapi masyarakat maupun para investor dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diantaranya mekanisme dan prosedur pelayanan IMB yang panjang dan tidak jelas. Permasalahan ini terjadi karena masyarakat kesulitan dalam menjabarkan Ketentuan Tata Ruang Kota (*Advice Planning*) pada saat diimplementasikan ke dalam persyaratan administrasi dan gambar rencana teknis perizinan, sehingga diperlukan penjelasan secara detail. Namun, yang terjadi informasi persyaratan administrasi dan teknis yang didapat kurang jelas disebabkan pelayanan di loket untuk konsultasi perizinan waktunya sangat terbatas, sehingga terkadang informasi yang diberikan oleh petugas tidak lengkap dan kurang detail. Dari hal-hal tersebut, seringkali terjadi penolakan terhadap permohonan izin IMB yang telah didaftarkan masyarakat disebabkan persyaratan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan permasalahan ini, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pelayanan IMB dan pihak yang berwenang dalam penerbitan IMB di Kota Yogyakarta berinisiatif membuat suatu gagasan inovasi dengan membuka media konsultasi secara komprehensif melalui Klinik Pelayanan Perizinan (KLIPPER).

Klinik Pelayanan Perizinan atau KLIPPER merupakan wahana layanan komprehensif konsultasi terhadap gambar rencana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum didaftarkan, sehingga pada waktu pendaftaran dan pemrosesan izin tidak ada kendala, baik pada saat penelitian dan pengecekan lapangan serta izin yang diterbitkan dapat sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam standar pelayanan perizinan. Dengan deskripsi singkat sebagai berikut:

- a) Mekanisme mengajukan permohonan pencermatan awal secara tertulis ke Kepala Dinas Perizinan untuk difasilitasi melalui KLIPPER, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa gambar rencana teknis.

- b) Dalam forum KLIPPER, pemohon menyampaikan paparan permasalahan yang dihadapi saat mengurus perizinan yang kemudian akan dibahas secara bersama dengan Tim KLIPPER, melalui serangkaian diskusi dan argumentasi dengan mendasarkan data, fakta dan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan.
- c) Produk dari layanan KLIPPER adalah berupa catatan atau rekomendasi tertulis dari Tim KLIPPER yang berisi: ketentuan syarat administrasi dan teknis yang harus dipenuhi dan ditindaklanjuti dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- d) Permohonan izin yang telah melalui KLIPPER dijamin dapat terbit, dapat diproses lebih cepat dan lancar, karena syarat administrasi dan teknis yang menjadi syarat dalam pendaftaran lengkap dan benar.

Dengan didasari latar belakang tersebut, inovasi KLIPPER bertujuan:

- a) Memberikan layanan konsultasi perizinan kepada masyarakat secara komprehensif, efektif dan efisien dalam pelayanan.
- b) Meningkatkan pemahaman pemohon dalam hal ini masyarakat maupun para investor terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang menjadi ketentuan ketika mengurus perizinan.
- c) Mewujudkan proses penerbitan perizinan menjadi lebih lancar, cepat, tidak ada kendala, dan tepat waktu dari standar pelayanan perizinan.

b. Data Perubahan

Inovasi Klinik Pelayanan Perizinan secara umum memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat pemohon dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi yang digambarkan dalam analisis sebagai berikut:

Tabel 35 Perubahan hasil Inovasi Klinik Pelayanan Perizinan (KLIPPER)

Indikator	Deskripsi Perubahan
Kelengkapan Kerja	Penambahan loket khusus tempat berkonsultasi terkait persyaratan perizinan
SDM Pelaksana	Penambahan jumlah yang bertugas sebagai tim KLIPPER
Prosedur mendapatkan layanan	Sebelum ke loket pendaftaran, dapat berkonsultasi terlebih dulu dengan tim KLIPPER
Jumlah keluhan dan pengaduan pelayanan IMB	Terjadi penurunan jumlah pengaduan perizinan
Jumlah penolakan IMB	Terjadi penurunan jumlah penolakan IMB

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Berdasarkan data diatas, maka dampak dari adanya perubahan tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- a) Kelengkapan Kerja, merupakan perlengkapan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan inovasi KLIPPER. Ketersediaan ruangan khusus sebagai loket KLIPPER menjadi sarana pendukung demi berlangsungnya pelayanan KLIPPER. Sebelumnya tidak ada loket khusus yang disediakan untuk pemohon dapat berkonsultasi terkait persyaratan administrasi maupun teknis perizinan. Melalui inovasi KLIPPER, loket khusus disediakan bagi calon pemohon untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum memproses pengajuan IMB ke loket pendaftaran. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah antrian di loket pendaftaran, karena secara teknis pelayanan di loket pendaftaran tidak lagi melayani pertanyaan dan menjawab informasi dari calon pemohon.

- b) SDM Pelaksana, yaitu jumlah SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan KLIPPER. Dalam hal ini, sebelum adanya inovasi KLIPPER, semua pemohon yang akan mengajukan IMB hanya melalui loket pendaftaran IMB dengan petugas yang melayani berjumlah satu orang. Petugas tersebut tidak memiliki kompetensi secara teknis, hanya sebagai petugas administrasi yang menerima dokumen pengajuan IMB merangkap sebagai petugas yang memberikan informasi persyaratan dan kelengkapannya, sehingga pada saat itu kapasitas petugas yang seharusnya melayani tidak sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya inovasi KLIPPER, calon pemohon akan dilayani oleh petugas *front liner* KLIPPER yang menerima rencana pengajuan IMB pemohon.

Box 16 Manfaat layanan KLIPPER

"Melalui inovasi KLIPPER, pemohon tidak perlu bolak-balik datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan hanya untuk memenuhi persyaratan. Pemohon cukup datang pada saat mendaftarkan permohonan perizinan, karena mereka telah **konsultasi di KLIPPER** sehingga pemohon yang mendaftarkan IMB sudah membawa dan menyerahkan persyaratan secara lengkap dan benar. Sehingga mengurangi dampak **penolakan** terhadap permohonan dan **pengaduan IMB**".

- Petugas *front liner* akan menginformasikan kepada tim KLIPPER terkait rencana pengajuan IMB pemohon dengan waktu layanan 3 hari setelah permohonan KLIPPER diterima. Anggota tim KLIPPER berjumlah 23 orang, merupakan pegawai yang berkompetensi sesuai dengan bidang yang diperlukan khususnya terkait permasalahan teknis mendirikan bangunan, sehingga tim KLIPPER dapat memberikan masukan bagi pemohon. Hal ini berdampak pada pemohon yang mengajukan IMB saat ini lebih memahami persyaratan, kelengkapan dan proses karena informasi persyaratan dan kelengkapan pengajuan IMB didapatkan dari sumber yang kompeten.
- c) Mekanisme, yaitu dilihat dari prosedur mendapatkan layanan. Sebelum adanya inovasi KLIPPER, prosedur untuk mendaftarkan IMB, cukup mendatangi langsung ke loket pendaftaran IMB. Namun yang terjadi

pemohon sering mendapatkan penolakan karena persyaratan baik administrasi maupun teknis tidak lengkap dan benar, sehingga seringkali bolak-balik datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Melalui inovasi KLIPPER, sebagian besar pemohon tidak bolak-balik datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Sebagian pemohon cukup datang sekali pada saat mendaftarkan permohonan perizinan, karena mereka telah melalui proses KLIPPER sehingga pemohon yang mendaftarkan IMB sudah membawa dan menyerahkan persyaratan secara lengkap dan benar.

- d) Tingkat kesadaran/perubahan pola pikir, yaitu perubahan pola pikir masyarakat akan kedisiplinan terhadap kepengurusan perizinan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan. Menurut informasi pada saat kunjungan dilapangan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, mengklaim terjadi penurunan terhadap pengaduan atau keluhan pelayanan perizinan dari tahun ke tahun dan penurunan jumlah penolakan IMB yang sudah didaftarkan pemohon. Penurunan pada kedua aspek tersebut, mengisyaratkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ketentuan syarat administrasi dan syarat teknis perizinan semakin meningkat. Dari data jumlah penurunan tersebut, terlihat sebagian besar masyarakat sangat memanfaatkan layanan KLIPPER ini, sehingga berdampak pada kepatuhan masyarakat untuk mengurus perizinan pun mengalami peningkatan, karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas tentang proses dan persyaratan izin mendirikan bangunan.

14) JAMILA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi JAMILA adalah salah satu inovasi yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka peningkatan kualitas layanannya. JAMILA digagas karena adanya kendala yang

dihadapi oleh Dinas terutama terkait dengan keterbatasan ruangan, sementara jumlah pemustaka yang datang semakin banyak. Berdasarkan survei minat baca yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY pada bulan Oktober-Desember 2014, menempatkan Kota Yogyakarta dengan Indeks Minat Baca Masyarakat sebesar 79,42 dimana menempati ranking tertinggi di DIY. Pada sisi lainnya berdasarkan data kunjungan perpustakaan pada tiap tahunnya, mengalami kenaikan kunjungan yang sangat pesat. Dari tahun 2010 sebesar 75.044 orang, tahun 2011 sejumlah 115.469 orang, tahun 2012 sejumlah 126.205 orang, dan data terakhir pada tahun 2014 sejumlah 143.793 orang. Kondisi ini berdampak, berkurangnya kenyamanan pemustaka yang berkunjung di perpustakaan. Selain keterbatasan ruang, ternyata dari sisi pemustaka juga ada kendala. Meskipun mereka mempunyai minat baca yang cukup tinggi tetapi tidak mempunyai cukup waktu untuk datang ke perpustakaan termasuk meminjam koleksi sekalipun.

Kedua permasalahan tersebut paling tidak yang mendasari munculnya kebutuhan inovasi JAMILA. Masalah keterbatasan ruang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang besar untuk bisa mengatasinya dan relatif sulit dipenuhi dengan kondisi Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini. Terutama melihat keterbatasan lahan yang ada. Sementara minat baca masyarakat yang tinggi tetapi kalau tidak didukung dengan sarana prasarana serta ruang yang memadai di Perpustakaan juga akan sulit diatasi. Sehingga diharapkan dengan adanya inovasi JAMILA, permasalahan tersebut dapat diatasi.

JAMILA diluncurkan pada bulan September 2015, sehingga sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun diluncurkan menarik untuk melihat dampaknya terhadap upaya peningkatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tanggal 23-24 Juli 2018 Tim LAN melakukan penelitian untuk mengukur dampak inovasi dengan melakukan diskusi dengan penyelenggara layanan dan masyarakat yang menerima langsung layanan serta dengan melakukan observasi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa layanan JAMILA belum maksimal dalam mendukung kinerja pelayanan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kesimpulan ini juga disampaikan oleh penyelenggara sendiri (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta) yang menjelaskan bahwa belum banyak pemustaka (masyarakat) yang menggunakan layanan JAMILA.

b. Data Perubahan

Tabel 36 Perubahan hasil Inovasi JAMILA

Indikator	Deskripsi Perubahan
Anggaran	Terjadinya efisiensi anggaran dan biaya pada masyarakat
SDM	Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pustakawan
Prosedur dan Waktu layanan	Efektifitas Layanan Masyarakat
Produktivitas Jumlah transaksi layanan	Peningkatan transaksi peminjaman buku oleh warga masyarakat.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Data diolah)

c. Analisis Dampak

a) Efisiensi Anggaran, Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pustakawan, Efektifitas Layanan, dan Efisiensi biaya pada masyarakat

Terkait inovasi layanan JAMILA, tentunya secara langsung membantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam memecahkan persoalan terkait masalah keterbatasan ruang, tenaga, dan biaya untuk menambah luas sarana perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan minat baca yang semakin tinggi. Sementara dukungan anggaran relatif sulit dipenuhi dengan kondisi Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini. Selain hal itu juga inovasi layanan JAMILA secara tidak langsung membantu kondisi masyarakat dalam

menghemat waktu dan biaya guna menuju lokasi perpustakaan untuk tujuan pencarian dan mendapatkan buku yang akan dicarinya.

b) Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pustakawan

Dalam Layanan Jamila, tidak ada penambahan jumlah SDM pelaksana, yang ada adalah optimalisasi tugas dan fungsi para petugas layanan JAMILA (7 Orang), yang melaksanakan tugasnya siang hari pkl.13.00 – 15.00 saat dimana aktivitas pekerjaan internal kantor sudah terselesaikan di pagi hari.

c) Efektivitas Layanan Masyarakat

Dalam inovasi layanan Jamila, memberikan manfaat dan dampak besar bagi masyarakat berupa kemudahan peminjaman buku yang lebih cepat, efisien, efektif dimana masyarakat tidak perlu datang ke Perpustakaan. Masyarakat tinggal menghubungi perpustakaan untuk meminjam koleksi buku, kemudian diantar oleh petugas dengan persyaratan harus menjadi anggota perpustakaan dahulu. Hal ini berbeda dengan prosedur layanan sebelumnya dimana masyarakat datang ke perpustakaan, lalu mengajukan peminjaman buku, proses peminjaman dan akhirnya buku dibawa (selesai). Dengan layanan JAMILA ini menggunakan prinsip jemput bola dalam pelayanan perpustakaan. Waktu layanan juga lebih cepat, jika sebelumnya > 60 menit, dengan layanan JAMILA bisa <30 menit, asalkan buku yang dipinjam tersedia dan petugas siap mengantar dengan alamat yang jelas. Kecepatan ini juga didukung dengan sistem katalog yang memudahkan dalam mencari buku.

d) Peningkatan jumlah transaksi peminjaman buku oleh warga masyarakat

Inovasi Layanan Jamila masih belum mampu meningkatkan secara signifikan jumlah transaksi peminjaman buku oleh warga masyarakat. Sebelum inovasi, jumlah transaksi peminjaman buku berjumlah sekitar 7500, namun dengan adanya inovasi layanan Jamila hanya mampu mencatat 7505 transaksi peminjaman buku.

Box 17 Faktor Penghambat Inovasi JAMILA

"Peningkatan layanan inovasi JAMILA **hanya meningkat 0.9%** dari 7500 menjadi 7505 layanan. Hal ini disebabkan oleh **kurangnya sosialisasi pustakawan kepada masyarakat** dalam mendukung kemanfaatan dalam membaca buku."

Jadi hanya sekitar 0.9 % peningkatan transaksi peminjaman buku oleh warga masyarakat. Hal ini tentunya kurang sebanding dengan usaha dan daya yang dikeluarkan untuk layanan JAMILA. Inilah yang menjadi titik lemah layanan JAMILA karena belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Sayangnya Tim tidak memperoleh data pembandingan berapa pemustaka yang

menggunakan layanan JAMILA dan berapa yang menggunakan layanan konvensional.

Sebenarnya tujuan utama digagasnya layanan JAMILA adalah untuk meningkatkan kepuasan pemustaka, supaya tidak perlu datang ke perpustakaan untuk meminjam buku selain mengurangi jumlah kunjungan ke perpustakaan tanpa mengurangi jumlah transaksi peminjaman. Namun pada kenyataannya, dari indikator output dapat dilihat bahwa tidak ada kenaikan yang signifikan terkait dengan jumlah transaksi peminjaman. Dari analisis Tim, ada kemungkinan layanan JAMILA belum tersosialisasi secara meluas ke masyarakat atau budaya masyarakat yang belum terbiasa meminjam buku tanpa melihat dahulu fisik bukunya secara langsung. Atau bisa juga disebabkan belum maksimalnya sarana prasarana yang dimiliki serta belum memahami prosedur peminjaman dengan menggunakan layanan JAMILA.

15) Bank Buku Yogyakarta (BABY) Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

BABY atau Bank Buku adalah wadah bagi masyarakat untuk dapat menyumbangkan buku layak pakai melalui Perpustakaan Kota Yogyakarta. Buku sumbangan tersebut kemudian akan didistribusikan secara luas bagi masyarakat yang membutuhkan setelah dipilah dan dipilih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Masyarakat yang dapat

menyumbang semua masyarakat dari berbagai golongan, juga dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang ada di semua SKPD. Program Bank Buku, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat dalam hal pemenuhan dan ketersediaan akses terhadap buku. Disamping itu untuk menjembatani antara yang kelebihan buku, dengan berbagi kepada saudara, kerabat, teman, bahkan kepada sesama yang selama ini belum mendapatkan kesempatan akses buku. Kondisi tersebut mendasari munculnya gagasan BABY atau Bank Buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Disatu sisi ada kelompok masyarakat yang mempunyai buku tetapi sudah tidak digunakan, disini yang lain ada kelompok masyarakat yang membutuhkan akses buku tersebut. Pada kondisi inilah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengambil peran, yaitu menjadi penghubung kedua kelompok masyarakat tersebut, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

BABY diluncurkan pada tahun 2010, sehingga kurang lebih sudah 8 tahun dilaksanakan. Dari data yang ada, pada kurun waktu 2010-2013, inovasi BABY berhasil mengumpulkan buku sebanyak 29.686 buah dan berhasil menyalurkan 25.944 buku. Kategori bukunya berupa buku umum, buku pelajaran dan majalah. Mayoritas disumbangkan kepada kelompok masyarakat, atau mahasiswa yang melaksanakan tugas kampus (KKN) dengan membangun taman bacaan di lokasi KKN-nya. Buku-buku yang tidak disalurkan mayoritas disebabkan karena kondisi fisiknya yang sudah rusak, isi tidak sesuai atau sebab lainnya.

Apabila ditilik dari tujuan digagasnya inovasi BABY, dapat disimpulkan bahwa BABY berhasil mencapai tujuan, yaitu menjembatani kelompok masyarakat yang mempunyai buku dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan buku. Berikut ini disampaikan pengukuran dampak inovasi BABY menurut indikator yang dikembangkan oleh Tim dengan melakukan penelitian di lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan diskusi dengan penyelenggara BABY (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan masyarakat (termasuk pegawai yang di OPD-nya ada kotak BABY) serta dengan melakukan

observasi langsung di lapangan (di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan di OPD yang ada kotak BABY).

b. Data Perubahan

Tabel 37 Perubahan hasil Inovasi JAMILA

Indikator	Deskripsi Perubahan
Anggaran	Penghematan biaya pada masyarakat
Prosedur dan metoda layanan	Memudahkan masyarakat untuk menyumbang dan untuk mendapatkan buku layak baca.
Produktivitas Hasil inovasi	Peningkatan pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Data diolah)

c. Analisis Dampak

a) Penghematan Biaya pada Masyarakat

Adanya layanan inovasi ini memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat untuk mendapatkan buku-buku bacaan yang diperlukan, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu dapat dengan mudah mendapatkan buku-buku yang diperlukan. Begitu pula bagi masyarakat yang akan menyumbangkan buku-buku yang sudah tidak dipergunakan lagi, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Adanya layanan ini tentunya bisa menghemat pengeluaran anggaran yang dikeluarkan masyarakat.

b) Memudahkan masyarakat untuk menyumbang dan untuk mendapatkan buku layak baca.

Dalam layanan inovasi ini, bagi masyarakat yang ingin menyerahkan buku, tinggal memasukkannya di kotak-kotak BABY yang ada di beberapa OPD atau langsung menyerahkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Sedangkan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan surat permintaan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk diproses. Selanjutnya apabila permintaan buku tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka kurang lebih 3 hari permintaan tersebut akan dipenuhi. Saat ini ada kurang lebih 10 Drop Box di beberapa OPD, misalnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perijinan, Taman Pintar, dan BPD DIY.

c) Peningkatan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Dari inovasi layanan BABY, telah memberikan manfaat berupa penyaluran 95 paket bantuan buku, yang masing-masing paket berisi kurang lebih 40-50 buku atau kurang lebih 3.800-4.750 buah buku total jumlah seluruhnya kepada warga masyarakat di kota Yogyakarta. Hal ini tentunya memberikan dampak peningkatan pengetahuan masyarakat dengan adanya penyebaran atau distribusi buku di tengah masyarakat.

Box 18 Dampak layanan BABY

“**95 paket** buku yang masing-masing paket berisi **40-50 buku bacaan** didistribusikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk masyarakat di Kota Yogyakarta. Buku tersebut memberikan dampak terhadap **peningkatan pengetahuan masyarakat.**”

Dilihat dari data dan ulasan diatas, dapat disimpulkan bahwa inovasi BABY mempunyai dampak sebagaimana diharapkan, yaitu terjadinya penyebaran buku secara teratur dari masyarakat yang kelebihan buku ke masyarakat yang kurang buku. Tujuan utama inovasi BABY sebagai jembatan dapat

diperankan dengan baik. Dari jumlah buku yang terkumpul, jumlah buku yang tersalur dan jumlah *stakeholders* yang terlibat yang semakin banyak.

16) Taman Masyarakat Sambung Rasa (TAMARA) Kota Yogyakarta

a. Deskripsi Inovasi

TAMARA (Taman Masyarakat Sambung Rasa) adalah terobosan inovasi layanan *outdoor* Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi berbasis internet serta sebagai ruang terbuka untuk berinteraksi, belajar, berdiskusi dari pagi sampai malam yang dikemas secara nyaman. TAMARA merupakan taman yang sangat strategis di depan Dinas

Perpustakaan Kota Yogyakarta, yang dilengkapi dengan *gazebo* dan *shelter* untuk tempat *wi-fi*. Taman ini didukung oleh akses internet sebesar 16 MBps, merupakan akses yang sangat signifikan untuk penelusuran informasi di dunia maya. *Wi-fi* TAMARA ini juga dijamin aman dari akses yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk semua pengguna, karena didampingi pustakawan serta *security*. Layanan ini juga didukung oleh *cleaning service* untuk meningkatkan kenyamanan serta kebersihan area. TAMARA beroperasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB setiap hari. TAMARA juga didukung dengan layar *giant screen* sebagai media komunikasi dan informasi perpustakaan kepada masyarakat. Layar tersebut diisi dengan berbagai kebijakan pemerintah, *film*, informasi perpustakaan dan literasi masyarakat dengan berbasis perpustakaan. TAMARA juga didukung dengan layanan *café* yang menyajikan makanan dan minuman sederhana bagi pengunjung perpustakaan. Tujuan layanan TAMARA adalah untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan perpustakaan diluar jam aktivitasnya, sekaligus memberikan ruang terbuka untuk berinteraksi berbasis bahan pustaka serta akses internet yang memadai.

TAMARA didukung oleh layanan : *cleaning service*, media komunikasi *giant screen*, dan *cafe*

Manfaat atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan adanya layanan TAMARA adalah :

- a) Meningkatkan minat kunjungan masyarakat di Perpustakaan Kota Yogyakarta,
- b) Memberikan alternatif layanan Perpustakaan yang mudah, murah, aman, nyaman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi/pustaka berbasis teknologi. Saat ini akses berbasis teknologi memang semakin menjamur di berbagai tempat (*café*, warnet, rumah makan dsb) namun ada kelemahan khususnya terkait dengan keamanan dan tidak adanya pengawasan.

c) Menjadi sarana, ajang atau tempat bertemu dan berinteraksi antar masyarakat. Misalnya banyaknya siswa/pelajar yang belajar ataupun kerja kelompok di perpustakaan dengan dibimbing oleh guru bidang studinya.

Setelah sekian lama berjalan, sangat penting untuk mengukur dampak dari pelayanan TAMARA. Apakah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mengukur dampak inobasi, Tim menggunakan beberapa indikator yang mencakup input, proses, output dan dampak. Berikut disampaikan penjelsan dari indikator-indikator yang digunakan.

b. Data Perubahan

Tabel 38 Perubahan hasil Inovasi JAMILA

Indikator	Manfaat dan Dampak
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengeluaran biaya pada masyarakat Adanya tambahan biaya operasional dan Sarana Prasarana Layanan TAMARA
SDM	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Tugas Layanan TAMARA
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Layanan Prima
Prosedur dan waktu layanan	<ul style="list-style-type: none"> Sederhana dan Bebas
Jumlah pengunjung layanan	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan Resiko Kriminal dan Tindak Kejahatan

(Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Data diolah)

c. Analisis Dampak

a) Adanya pengeluaran biaya pada masyarakat dan Penyelenggara.

Terkait layanan inovasi TAMARA, tidak ada biaya yang mesti dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh layanan TAMARA ini. Masyarakat harus mengeluarkan biaya berupa biaya transportasi yang harus dikeluarkan menuju lokasi tujuan serta tenaga dan waktu yang harus dikeluarkan. Selain itu pula terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh penyelenggaraan layanan TAMARA

Dinas Perpustakaan yaitu biaya operasional TAMARA berupa listrik, sekuriti, dan sebagainya.

b) Optimalisasi Tugas Layanan TAMARA

Dalam inovasi layanan ini, dibentuk suatu tim kecil yang terdiri dari 7 orang yang secara efektif mampu bertugas dalam operasionalisasi layanan TAMARA secara bergantian hingga malam hari.

c) Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Dalam layanan inovasi TAMARA ini, terdapat penambahan penyediaan sarana berupa otomasi, koneksi internet, *sound system*, CCTV. Sedangkan prasarana berupa ruangan atau saung-saung di taman sekitar Perpustakaan. Penambahan sarana tersebut mendukung kelancaran operasional inovasi layanan TAMARA dan tentunya memberikan kualitas layanan prima yang dibutuhkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan nyaman menikmati layanan TAMARA.

d) Gratis, Sederhana dan Bebas Pemakaian.

Inovasi Layanan Tamara menetapkan proses pendaftaran secara praktis dan singkat bagi masyarakat yang datang. Hanya 3 menit waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendaftar dan mendapatkan ID yang dapat dipakai untuk mengkases layanan TAMARA yang ada. Masyarakat tinggal meminta/mendaftar untuk memperoleh *password* koneksi internet dengan menunjukkan kartu anggotanya.

e) Pengurangan Resiko Kriminal dan Tindak Kejahatan

Inovasi layanan Tamara secara signifikan dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk beraktivitas hingga malam hari. Ada sekitar 300 orang per hari yang memanfaatkan layanan Tamara. Dampaknya antara lain mengurangi efek negatif dari aktivitas warga masyarakat yang dilakukan pada malam hari berkat adanya sarana dan wadah TAMARA yang menaunginya. Sedangkan untuk dampak pendidikan, layanan TAMARA memberikan dampak pada adanya peningkatan pengetahuan yang ditandai dengan adanya peningkatan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dan informasi.

Box 19 Kemanfaatan TAMARA

- "Rata-rata **300 pengunjung/hari** memanfaatkan layanan TAMARA.
- **Peningkatan pengetahuan** dapat dilihat dari aktivitas masyarakat dalam memperoleh informasi".

17) Inovasi Klik *E-Resep* RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi klik e-resep merupakan jenis inovasi pelayanan publik, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui e-resep terintegrasi sebagai upaya percepatan pelayanan obat di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak.

Inovasi klik e-resep adalah usaha RSUD untuk mengatasi masalah yang dihadapi rumah sakit dalam hal lamanya waktu tunggu obat di apotik, mengeliminasi kesalahan persepsan obat karena banyaknya jenis obat yang digunakan di RS dan pengelolaan aset lancar di Rumah Sakit dalam hal pencatatan obat yang digunakan setiap hari serta memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya inovasi ini, semua poly rawat jalan dokter spesialis telah dilengkapi tablet atau komputer yang digunakan untuk menulis resep ke pasien. Jika pasien tersebut merupakan pasien kunjungan

ulangan tanpa keluhan maka dokter akan secara langsung mencopy resep kunjungan terdahulu. Kemudian resep itu akan di print di apotik.

Aplikasi klik e-resep menggantikan system pengoperasian manual dengan system berbasis software melalui tablet atau computer. Pasien mendaftar di pendaftaran dan mengantri di poli untuk mendapatkan pelayanan, dokter menulis resep melalui aplikasi e-resep kemudian mendapatkan pelayanan, dokter menulis resep melalui aplikasi e-resep kemudian apotek mencetak dalam bentuk resep. Secara otomatis pada saat penulisan resep, stok obat digudang akan berkurang dan daftar rincian obat pasien masuk ke modul kasir. Aplikasi klik e-resep saling terintegrasi mulai dari pendaftaran hingga ke kasir.

b. Data Perubahan

Tabel 39 Perubahan hasil Inovasi Klik E-Resep

Indikator	Deskripsi Perubahan
Kemudahan Pemberi Layanan	Pencatatan resep manual telah berubah menjadi berbasis software/teknologi dan dapat memfasilitasi atau membuat urutan resep secara otomatis
Waktu Layanan	Terjadinya efisiensi waktu layanan pemberian resep obat
Pengadaan Obat	Inovasi telah memudahkan proses pengadaan obat di rumah sakit karena penggunaan obat yang telah digunakan terintegrasi stok di gudang obat
<i>Medication Error</i>	Inovasi klik e-resep akan dapat meminimalisir terjadinya <i>Medication Error</i> /kesalahan pengobatan yang merugikan pasien.
Partisipasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD

Sumber : RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

c. Analisa Dampak

Dampak Kemudahan Bagi Pemberi Layanan (dokter dan perawat)

Sebelum adanya inovasi klik e-resep, dokter/perawat harus menulis status dan resep secara manual yang tentu akan sedikit merepotkan dokter/perawat karena harus sibuk untuk sekedar menulis resep saja. Dengan adanya inovasi klik e-resep yang menggantikan pencatatan resep manual menjadi berbasis software/teknologi dapat memfasilitasi dan membuat urutan resep secara otomatis serta membantu dokter dalam menentukan pilihan jenis obat yang tersedia sesuai dengan penyakit pasien. Manfaat lainnya adalah dapat memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan, karena dengan inovasi seperti ini, dokter tidak lagi sibuk menulis resep saja. Namun dokter juga dapat melakukan edukasi dan upaya preventif dan rehabilitatif dan menjadi nilai tambah bagi pasien sebab adanya perhatian yang lebih dari dokternya. Kemudahan lainnya yang diterima melalui e-resep ini, untuk pasien ulangan, dokter dapat melihat riwayat pengobatan terdahulu dan hanya meng-copy /menyalin resep sehingga pasien tidak lagi harus menunggu dokter menulis resep.

Dampak terhadap waktu layanan

Sebelum adanya inovasi klik-resep, untuk mendapatkan obatnya pasien harus menunggu > 60 menit. Hal yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi yaitu waktu tunggu obat ≤ 30 menit. Terutama di bagian apotek sebagai alur terakhir pelayanan pasien terkadang harus antri lebih lama untuk mendapatkan obat. Kondisi yang ada untuk kunjungan rawat jalan misalnya dengan rata-rata 200-300 pasien per hari, dokter harus menulis resep dengan kertas, informasi stok obat harus ditanya terlebih dahulu

Box 20 Efisiensi layanan

“Waktu tunggu obat semakin berkurang dari > 60 menit menjadi **30-40 menit** saja, karena pencatatan resep yang dilakukan oleh dokter telah terintegrasi ke bagian apotek **menggunakan tablet.**”

sehingga petugas apotik harus bolak-balik ke dokter jika ada perubahan obat, resep obat menumpuk, hingga berujung pada waktu layanan yang lama. Namun, setelah adanya inovasi, waktu tunggu obat semakin berkurang dari yang awalnya > 60 menit untuk penyelesaian obat menjadi 30-40 menit saja. Hal ini terjadi karena pencatatan resep yang dilakukan oleh dokter tidak lagi dilakukan secara manual dan telah terintegrasi ke bagian apotek secara digital sehingga mempercepat proses pemberian obat kepada pasien.

Dampak terhadap Pengadaan Obat di RSUD

Sebelum adanya inovasi proses pengadaan obat membutuhkan waktu yang lama karena ketersediaan obat di gudang obat harus dihitung secara manual. Namun melalui inovasi ini, telah memudahkan proses pengadaan obat di rumah sakit karena penggunaan obat yang telah digunakan terintegrasi stok di gudang obat dan laporan pemakaian obat jika dilakukan audit dapat diambil dari aplikasi ini. Kekosongan obat dapat diminimalisir dan pemesanan obat bisa lebih efektif dan efisien.

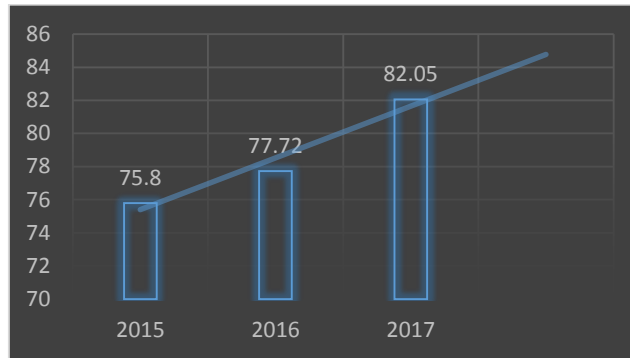
Dampak terhadap *Medication Error*

Banyaknya jumlah dan jenis obat yang ada di rumah sakit dapat menimbulkan kejadian reaksi obat merugikan (ROM). ROM adalah setiap kejadian merugikan yang berkaitan dengan penggunaan obat pada manusia pada waktu penggunaan obat dalam praktik profesional. ROM diantaranya timbul dari kekeliruan dosis obat, baik yang tidak disengaja maupun disengaja, penyalahgunaan obat, penghentian obat, dan setiap kegagalan yang signifikan dari kerja obat yang diharapkan. Misalnya jenis obat tahun 2014 (701 jenis), 2015 (700 jenis), dan 2016 (722 jenis). Dengan jumlah dan jenis obat yang banyak serta jumlah petugas apotik yang terbatas tentunya berpeluang untuk terjadinya ROM. Namun dengan Inovasi klik e-resep akan dapat meminimalisir terjadinya Medication Error/kesalahan pengobatan yang merugikan pasien dalam menerima pelayanan, misalnya kesalahan dalam penulisan obat, interaksi obat yang tidak diperbolehkan ataupun ada riwayat alergi obat pasien

dapat segera terdeteksi. Hal ini karena penulisan obat tidak lagi manual yang dapat memungkinkan terjadinya kesalahan penulisan atau sewaktu membaca tulisan pada kertas. Selain itu, daftar obat juga telah terinput secara digital sehingga memungkinkan pencarian obat akan lebih akurat.

Dampak terhadap partisipasi dan kepuasan masyarakat

Grafik 6 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber : RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

Sejak dioperasikan pada tahun 2012 terus terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kunjungan pasien di rumah sakit dengan jumlah kunjungan rawat jalan pada tahun 2014 sebanyak 33.929 pasien dan meningkat menjadi 49.036 pasien pada tahun 2015 atau naik 15.107 (30,80%) pada periode tahun sebelumnya dan 52.227 pasien pada tahun 2016 atau meningkat 38,34% dari tahun 2015.

Peningkatan bukan hanya terjadi pada jumlah kunjungan pasien rawat jalan, tetapi juga indeks kepuasan masyarakat yang pada tahun 2015 dengan nilai 75,8

kemudian meningkat menjadi 77,72 di tahun 2016 hingga pada tahun 2017 telah mencapai 82,05. Artinya, peningkatan indeks kepuasan masyarakat rata-

Box 21 Indeks Kepuasan Masyarakat

"Peningkatan indeks kepuasan masyarakat rata-rata setiap tahunnya adalah **3,12 poin**. Hal ini disebabkan oleh inovasi e-resep yang memiliki dampak terhadap **kecepatan layanan dokter** sehingga pasien **tidak perlu antri terlalu lama.**"

rata setiap tahunnya adalah 3,12 poin. Hal ini tentu saja salah satunya disebabkan oleh inovasi e-resep yang memiliki dampak terhadap kecepatan layanan dokter dalam menulis resep lebih efisien sehingga pasien tidak perlu antri terlalu lama.

18) Inovasi Pankreasi (Parkir Aman, Nyaman Tempat Kreasi) PD. Owabong Kabupaten Purbalingga

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi PANKREASI merupakan inovasi yang termasuk dalam jenis inovasi pelayanan publik. Inovasi ini berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Adapun tujuan dari inovasi ini untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pengunjung di Objek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) melalui fasilitas parkir otomatis, aman dan nyaman (*secure park*).

Area parkir adalah wajah terdepan suatu objek wisata. Kesan pengunjung akan berawal dari area parkir yang dimiliki. Melalui inovasi PANKREASI, pelayanan parkir yang semula dikelola secara manual dan tradisional, dirubah menjadi parkir otomatis dan dikelola dengan manajemen yang baik sehingga area parkir lebih aman, nyaman, tertib.

Sebelum menerapkan sistem *secure park*, pengelolaan parkir dilakukan manual dan tradisional yaitu dengan cara petugas parkir memberikan karcis retribusi dan menerima uang parkir secara tunai. Tidak terdapat catatan yang rapi mengenai jumlah pemasukan retribusi parkir setiap harinya karena tidak ada pencatatan yang pasti mengenai jam masuk dan keluar area parkir. Demikian juga halnya dengan sistem upah yang diberikan pada petugas parkir, upah yang diterima hanya berdasarkan pembagian persentase yang tidak berdasarkan catatan. Selain itu area parkir kurang tertib dan kotor karena petugas parkir tidak merangkap sebagai tenaga kebersihan.

Setelah menerapkan sistem *secure park* yang meliputi mesin pencatatan jam masuk dan keluar area wisata serta palang otomatis pemasukan retribusi parkir dapat dicatat dengan lebih baik. Petugas parkir dinaikan status sebagai pegawai *join kerjasama* antara PD OWABONG dengan PT Reska Multi Usaha,

sehingga dapat diberikan hak-hak yang lebih layak. Hal ini memotivasi petugas parkir untuk memelihara kebersihan dan ketertiban area parkir. Adapun pengelolaan parkir ini merupakan kerjasama antar PD Owabong dan PT Reska Multi Usaha dalam perjanjian Nomor 3007/SP-OWB/XI/2017 dan Nomor K.H.605/XI/2/RMU-2017.

Kontribusi parkir yang dikenakan kepada pengunjung adalah sebesar Rp.3000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.6000 untuk kendaraan roda empat sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

b. Data Perubahan

Tabel 40 Perubahan hasil Inovasi PANKREASI

Indikator	Deskripsi Perubahan
Efisiensi Waktu	Terjadinya efisiensi waktu yang diakibatkan oleh perubahan pembayaran karcis secara manual menjadi mesin.
Transparansi dan akuntabilitas	Rekapan pendapatan retribusi parkir dapat terekam secara jelas secara digital yang berdampak pada pengelolaan yang transparan
Pendapatan Pemerintah	Terjadi Peningkatan pendapatan sebesar 283 %
Ketertiban dan Kenyamanan	Persoalan pungutan liar telah teratasi dengan baik dan pengunjung lebih nyaman karena adanya kepastian biaya terkait tarif parkir.
Tingkat Kesejahteraan Petugas Parkir	Petugas parkir yang dulunya berstatus tidak resmi kemudian diangkat statusnya menjadi pegawai join kerjasama antara PD Owabong dengan PT Reska Multi Usaha dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan tetap.

Sumber : PD Owabong (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Efisiensi Waktu

Sebagaimana penggunaan teknologi pada umumnya, kehadiran inovasi PANKREASI yang juga berbasis teknologi telah meringankan dan menyederhanakan proses pekerjaan. Hal ini dapat terlihat dari dampak yang dihasilkan dari segi efisiensi waktu layanan. Sebelum adanya inovasi, proses pelayanan parkir membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat. Alurnya dimulai dari pengunjung datang kemudian mendapatkan lahan parkir dan membayar biaya parkir langsung ke petugas sebesar flat Rp.2000,- (roda dua) dan Rp.5000,- (roda empat) dengan bukti pembayaran struk karcis kertas. Jadi misalnya, ketika terdapat 100 pengunjung yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas parkir yang jumlahnya terbatas tentu akan kewalahan mendatangi satu persatu pemarkir untuk diberikan karcis secara manual dan ini tentu saja membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya satu persatu. Apalagi pada hari weekend atau libur dimana terjadi peningkatan jumlah pengunjung disbanding hari-hari biasa.

Berbeda halnya setelah adanya inovasi, prosedur yang lewat cenderung lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak petugas yang harus mendatangi satu persatu pemarkir. Alurnya adalah pengunjung datang, membuka palang otomatis dengan memencet tombol dan mesin akan merekam jam kedatangan. Saat pengunjung akan meninggalkan lokasi, mereka harus membayar tunai sesuai dengan jam penggunaan lahan parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan proses yang sederhana ini pengunjung hanya menghabiskan waktu hanya sekitar 5-10 detik karena pengunjung tidak perlu menunggu petugas parkir untuk membayar biaya parkir.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan parkir maka rekapan pendapatan retribusi parkir dapat terekam secara jelas secara digital yang berdampak pada pengelolaan yang transparan. Sebelum inovasi jumlah pendapatan parkir tidak terekam dengan baik karena masih menggunakan

cara-cara manual dan total pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor pun tidak dapat terdata secara jelas. Hal ini mengakibatkan total pendapatan yang diterima kadang tidak berbanding lurus dengan jumlah pengunjung yang datang karena peluang untuk melakukan manipulasi terbuka lebar.

Sebelum penerapan inovasi, produktifitas layanan sulit untuk diukur karena tidak adanya alat ukur yang akuntabel. Namun setelah inovasi semua data pengunjung, besaran yang dibayarkan dan rekap waktu keluar masuk dapat direkam dengan baik.

Pendapatan Pemerintah

Berikut adalah hasil rekap perbandingan pendapatan retribusi parkir.

Tabel 41 Pendapatan Retribusi Parkir tahun 2017-2018

No	2017			2018		
	BULAN	OMSET	PAJAK	BULAN	OMSET	PAJAK
1	JANUARI	19.500.000	3.250.000	JANUARI	42.552.000	3.546.000
2	FEBRUARI	9.000.000	3.500.000	FEBRUARI	42.940.000	3.320.500
3	MARET	13.000.000	2.166.667	MARET	51.568.000	3.732.333
4	APRIL	10.000.000	1.667.667	APRIL	43.123.000	3.157.833
5	MEI	21.400.000	3.566.667	MEI	26.522.000	2.042.833
TOTAL		72.900.000	12.150.001		206.705.000	15.799.499

Sumber : PD Owabong (Data diolah)

Inovasi PANKREASI telah berdampak pada meningkatnya jumlah pendapatan pemerintah. Setelah inovasi dilakukan, untuk lima bulan pemberlakuan telah dibukukan pendapatan sebesar Rp.206.705.000, sedangkan sebelum inovasi dilaksanakan untuk periode yang sama di tahun sebelumnya yang dibukukan hanya Rp. 72.900.000. Presentase kenaikan pendapatan sebesar 283% untuk PD Owabong. Untuk sector penerimaan pajak parkir sebelum dan sesudah inovasi

hanya selisih sekitar 3 juta karena pajak yang disetor setelah inovasi adalah pajak dari pendapatan yang telah dipotong biaya operasional.

Ketertiban dan Kenyamanan

Kondisi parkir sebelum adanya inovasi terkesan sangat memprihatinkan dalam hal ketertiban dan kenyamanan

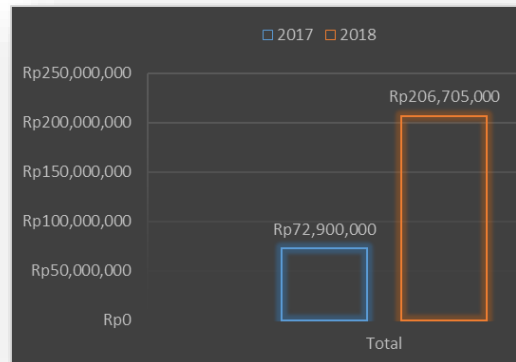
pengunjung. Situasi ini dapat terlihat dari banyaknya keluhan terkait pungli tarif parkir, ketertiban, kenyamanan hingga kebersihan area parkir. Status petugas parkir pun terkadang tidak jelas karena tidak ada pengangkatan secara resmi dari pihak PD Owabong terkait juru parkir resmi sehingga memungkinkan banyaknya pungutan liar yang terjadi. Namun setelah adanya inovasi persoalan pungutan liar telah teratasi dengan baik. Pengunjung lebih nyaman karena adanya kepastian biaya terkait tariff parkir. Begitu halnya dengan petugas parkir yang sebelumnya banyak dilakukan oleh oknum-oknum liar, setelah adanya inovasi semua petugas parkir ini telah diangkat statusnya dan diberdayakan sebagai petugas resmi parkir Owabong sehingga status mereka telah termasuk dalam pegawai PD Owabong dengan status kerjasama.

Setelah inovasi ini pula, kondisi parkir wisata Owabong menjadi lebih bersih dan tertib dari sebelumnya karena telah dibuat penataan kawasan yang memang dikhususkan untuk wilayah parkir resmi wisata Owabong.

Tingkat Kesejahteraan Petugas Parkir

Penerapan inovasi PANKREASI berdampak pada aspek kesejahteraan masyarakat. Sebelum adanya inovasi, petugas parkir yang kebanyakan berasal dari masyarakat setempat memiliki pendapatan yang tidak menentu karena mereka hanya bergantung pada banyak tidaknya jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata Owabong. Jika sepi pengunjung maka penghasilan

Grafik 7 Omset 2017 vs 2018



mereka tentu akan ikut berkurang. Belum lagi, lebih dari setengah hasil dari tarif parkir akan mereka setorkan kepada pengelola wisata. Namun setelah adanya inovasi, sumber daya manusia pengelola parkir ikut mengalami perubahan, petugas parkir yang dulunya berstatus tidak resmi kemudian diangkat statusnya menjadi pegawai join kerjasama antara PD Owabong dengan PT Reska Multi Usaha dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik berupa gaji tetap per bulannya yang mengikuti aturan standar UMR, seragam, THR, dan Jamsostek.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

1) Inovasi CHIPS (Cegah Kumuh Melalui Penertiban Subuh) Kota Pontianak

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi CHIPS merupakan inovasi yang termasuk inovasi tata kelola pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi Penertiban Lapak dan Gerobak Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) sering mengalami pergesekan dengan para pedagang. Hal ini terjadi karena para pedagang sering menyalahgunakan fasilitas publik sebagai tempat untuk menjual yang berimplikasi pada kemacetan dan tidak tertatanya para pedagang berjualan. Tercatat 40 % dari operasi penertiban yang dilaksanakan mengalami pergesekan dengan masyarakat karena lapak, gerobak, dan rak para pedagang sering diambil saat mereka berjualan, apalagi saat pelaksanaan aktivitas masyarakat berlangsung.

Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa tentu tidak terlepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berpengaruh terhadap ketertiban umum di wilayah kota Pontianak. Menurut data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terdapat sejumlah 1.240 PKL di Kota Pontianak pada tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum, maka pemerintah melalui Satpol PP perlu melakukan

penertiban terhadap para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Untuk menghindari dan meminimalisir hal tersebut maka satpol PP Kota Pontianak melakukan Inovasi CHIPS yaitu Cegah Kumuh Melalui Penertiban Subuh. Inovasi ini berawal dari penertiban yang dilakukan selama ini saat aktivitas masyarakat sedang berlangsung pada pagi sampai sore hari. Melalui inovasi pelayanan publik ini maka untuk mengurangi pergeseran yang akan ditimbulkan kepada para pedagang, proses operasinya pun dilakukan pada subuh hari ketika tidak adanya aktivitas. Sehingga hal ini menunjukkan dampak positif terhadap pengurangan angka para pedagang yang selama ini dilakukan sehingga potensi untuk terjadi bentrokan tidak terjadi lagi.

b. Data Perubahan

Tabel 42 Perubahan hasil Inovasi CHIPS

Variabel	Indikator	Sebelum	Setelah	Perubahan
Input	SDM Pelaksana	50 orang	17 orang	Efisiensi Penggunaan SDM
Proses	Mekanisme	Melalui pengaduan langsung oleh masyarakat	Melalui hasil patroli / pemantauan langsung dilapangan dapat segera diketahui	-
	Waktu Layanan	Pagi sampai Sore dengan durasi waktu 8 Jam	Saat subuh hari dengan durasi waktu 3 jam	Waktu pelayanan lebih efektif dan efisien
Output	Produktivitas	setiap 2 kali dalam seminggu	Setiap 5 kali dalam seminggu	-
	Kualitas Mutu Layanan	pergeseran terhadap kelompok pedagang dan masyarakat	Teratasi melalui dialog dan sosialisasi Kepada masyarakat	-
		Beberapa Oknum Pol PP terlibat dugaan Pungli	Tidak ada oknum Pol PP yang terlibat dugaan pungli	-

Dampak	Tingkat Kesadaran/ Perubahan Pola Pikir	PKL kurang disiplin dan malas untuk memindahkan hasil lapak / gerobak	PKL lebih sadar dan rajin untuk mengangkat setiap lapak / gerobak mereka setelah berjualan	-
	Lingkungan	Para pedagang tidak memperhatikan aspek kebersihan terhadap lingkungan	Para pedagang telah sadar untuk memperhatikan kebersihan lingkungan	-

Sumber : Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Data diolah)

c. Analisis Dampak

Inovasi yang digagas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak yang dilaksanakan telah berhasil merubah secara signifikan kelancaran Lalu Lintas pada kawasan penjualan para pedagang kaki lima. Hal ini terlihat dari sejumlah instrumen diatas seperti tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana, Mekanisme (prosedur) pelaksanaan, Waktu layanan, Produktivitas, Kualitas Mutu Layanan, Perubahan pola pikir masyarakat serta Lingkungan.

a) SDM (Sumber Daya Manusia) Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ChiPS dalam penyelenggaraan layanan publik dilaukan oleh sejumlah personil Satpol PP di Kota Pontianak. Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebelumnya berjumlah 50 orang yang terjun langsung menertibkan para pedagang kaki lima. Jumlah ini dipengaruhi karena mengantisipasi aksi bentrok yang sering terjadi ketika melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima. Namun dengan adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan, maka jumlah SDM personil yang terlibat menjadi 17 orang. Hal ini dipengaruhi karena pelaksanaan kegiatan yang dilakukan saat subuh hari sehingga tidak membutuhkan personil yang banyak dalam melakukan pengoperasian penertiban umum. Hal ini akan memberikan

efektifitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan agar terhindar dari aksi bentrok antara satpol PP dan Pedagang Kaki Lima.

b) Mekanisme

Pelaksanaan prosedur atau metode untuk mendapatkan layanan dilakukan sebelumnya melalui pengaduan langsung oleh masyarakat. Masyarakat mendatangi langsung kantor satpol PP untuk melaporkan terhadap para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Hal ini menjadi perhatian satpol PP untuk menangani secara langsung laporan dari masyarakat dengan memantau langsung tempat yang berada dilapangan sehingga dapat diketahui. Selain itu, Satpol PP juga menyediakan media sosial sebagai bentuk aplikasi pelaporan yang efektif melalui Whatsapp maupun Instagram terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi dilapangan.

c) Waktu layanan

Pola kerja yang dilakukan oleh satpol PP mengubah waktu layanan kerja. Pelayanan kerja yang sebelumnya dilakukan pada pagi hari dengan durasi waktu 5 sampai 7 jam tiap harinya untuk melakukan penertiban terhadap para PKL membutuhkan waktu yang relatif lama dan cenderung mengakibatkan terjadinya bentrokan antara petugas dengan penjaga lapak, sehingga kegiatan ini kurang efektif dan efisien dilakukan pada pagi hari. Namun dengan adanya pola layanan inovasi terhadap perubahan jam kerja yang dilakukan pada subuh hari dengan durasi waktu 3 jam tiap harinya maka kegiatan penertiban terhadap barang-barang PKL dapat diatasi secara langsung serta tidak menimbulkan aksi kekerasan yang terjadi antara petugas dengan PKL karena waktu operasionalnya saat subuh hari. Hal ini menjadikan waktu layanan menjadi efektif dan efisien serta mengurangi aksi bentrokan yang nantinya akan terjadi.

d) Produktivitas

Produktivitas jumlah layanan yang dihasilkan melalui Chips sebelumnya hanya dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu, namun sesudah adanya inovasi

ini produktivitas jumlah layanan mengalami peningkatan yang dilakukan dalam waktu 5 kali seminggu. Peningkatan ini berimplikasi pada tunjangan uang makan para pegawai satpol PP yang tiap kali melakukan layanan sesuai dengan jawal operasional.

e) Kualitas Mutu layanan

Kualitas mutu layanan yang dilakukan oleh satpol PP sering menimbulkan pergeseran terhadap kelompok pedagang dan masyarakat sehingga sering terjadinya kemacetan dijalanan, namun dengan adanya inovasi ini pergeseran terhadap kelompok masyarakat dan pedagang dapat teratasi. Selain itu, kualitas masyarakat yang terjadi masih terdapatnya beberapa oknum Pol PP yang terlibat dugaan pungli akan tetapi sesudah adanya inovasi keterlibatan Pol PP dalam pungli tidak terjadi lagi karena akan adanya sanksi yang diberikan kepada setiap Pol PP yang melakukan tindakan tersebut

f) Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Perubahan pola pikir masyarakat terutama para PKL masih saja terjadi. Hal ini dipengaruhi masih minimnya para pedagang mengetahui tentang aturan untuk para PKL. Aturan tersebut seperti memindahkan hasil lapak / gerobak setelah berjualan serta mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh satpol PP. selain itu kurang disiplin serta malasnya para PKL yang setelah berjualan untuk mengembalikan lapaknya menjadi factor penyebab utama sebelum adanya inovasi yang dilakukan oleh satpol PP. Namun dengan langkah cepat dan efektif serta memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pola pikir maskayarakat seperti sosialisasi serta pemberitahuan secara terus menerus kepada masyarakat maka pola pikir para PKL jauh lebih sadar dan rajin untuk mengangkat setiap lapak / gerobak setelah selesai berjualan.

Selain itu dari perubahan pola pikir masyarakat yang terjadi, maka secara tidak langsung tingkat penertiban yang dilakukan mengalami penurunan yang dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 43 Data Hasil Penertiban

No	Kecamatan	Jumlah PKL yang ditertibkan		
		2015	2016	2017
1	Pontianak Kota	303	34	53
2	Pontianak Barat	237	127	78
3	Pontianak Selatan	225	223	66
4	Pontianak Tenggara	50	10	30
5	Pontianak Timur	31	33	57
6	Pontianak Utara	58	70	21
Total		904	497	305

Sumber : Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Data diolah)

Grafik 8 Hasil Penertiban PKL



Sumber : Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Data diolah)

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2017 terjadi penurunan angka penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap para PKL. Tahun 2015 tingkat penertiban para PKL terjadi di seluruh kecamatan Pontianak dengan tingkat penertiban yang tertinggi terdapat di Pontianak Kota sejumlah 303. Tahun 2016 tingkat penertiban para PKL juga terjadi diseluruh kecamatan Pontianak, namun terjadi penurunan yang berada di Pontianak kota sejumlah 34. Akan tetapi, justru peningkatan jumlah penertiban PKL terjadi di Kecamatan Pontianak selatan dengan jumlah PKL yang ditertibkan sejumlah 223. Tahun 2017 mengalami penurunan secara kumulatif dari setiap kecamatan dengan tingkatan penertiban 305 jumlah PKL yang ditertibkan. Meskipun masih kerap terjadi namun angka ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Satpol PP telah menekan angka penertiban para PKL yang terjadi diseluruh kecamatan yang berada di Pontianak sehingga dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah penertiban PKL.

Box 22 Hasil inovasi CHIPS

“**Tren penurunan** jumlah penertiban terhadap PKL merupakan dampak dari inovasi CHIPS. Hal ini terlihat dari **upaya preventif Sat Pol PP** dalam menangani aktivitas PKL dari siang menjadi shubuh sebelum atau aktivitas PKL dimulai sangat efektif.”

g) Lingkungan

Perhatian pemerintah Kota Pontianak terhadap kebersihan menjadi focus utama untuk menciptakan kota yang asri, aman dan nyaman. Melalui kegiatan sadar lingkungan diharapkan para PKL jauh lebih sadar akan kebersihan lingkungan. Sebelumnya, PKL belum memperhatikan aspek kebersihan lingkungan. Mereka selalu membuang sampah dan sisa hasil jualan bukan pada tempatnya. Hal inilah yang seringkali para PKL tidak dizinkan berjualan ditempat-tempat umum. Sehingga pemerintah kota melalui Satpol PP menghimbau dengan berbagai cara seperti mendatangi langsung para PKL dengan menegur secara lisan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga setelah adanya


pemberitahuan terhadap hal tersebut, maka para PKL sudah sadar dan menjaga kebersihan lingkungan serta selalu memperhatikan kebersihan.

2) Kenaikan Pangkat Online Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Kenaikan Pangkat Online dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Kenaikan Pangkat Online ini merupakan inovasi dalam kategori tata kelola. Kenaikan Pangkat Online adalah aplikasi kenaikan pangkat yang dibuat untuk memudahkan PNS dalam pengusulan berkas Kenaikan Pangkat dengan tujuan mengurangi penggunaan kertas, selain untuk proses usul Kenaikan Pangkat. Aplikasi Kenaikan Pangkat Online bisa juga digunakan sebagai arsip digital masing-masing PNS. Setiap PNS harus mengunggah dokumen-dokumen ke dalam website sistem informasi pegawai Kota Samarinda. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kenaikan pangkat dan mengurangi penggunaan kertas dalam hal ini berkas usulan persyaratan kenaikan pangkat.

Sebelum adanya inovasi ini PNS harus mengumpulkan seluruh berkas persyaratan kenaikan pangkat dan mengantar berkas Kenaikan Pangkat ke BKPPD. Setelah adanya inovasi kenaikan pangkat online ini PNS cukup mengunggah eFile yang sudah sesuai dengan persyaratan ke akun masing-masing yang sudah tersedia di sistem informasi kepegawaian. Kenaikan pangkat online ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Kenaikan Pangkat Secara Online, artinya mengunggah file ke dalam sistem adalah kewajiban jika seorang PNS ingin mengajukan kenaikan pangkat. Dari berkas yang sudah diunggah akan dilakukan verifikasi dengan berkas asli. Untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak perlu lagi membawa semua berkas karena sudah ada di database BKPPD, PNS hanya perlu membawa berkas baru yang belum tersimpan dalam sistem. PNS yang mengajukan kenaikan pangkat hanya mengunggah data tambahan dan membawa data tambahan tersebut untuk verifikasi. Untuk mengunggah data ke dalam sistem juga bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, sebelum



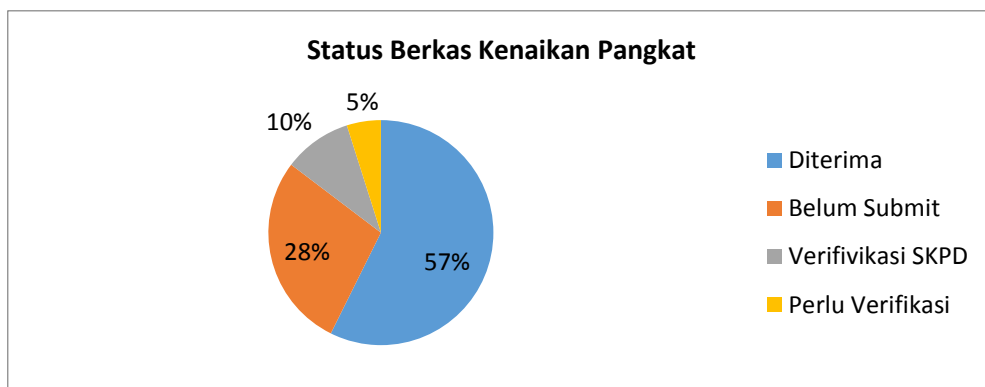
ada inovasi ini pengurusan kenaikan pangkat harus dilakukan manual dan datang ke kantor BKPPD pada saat jam kerja.

Dalam upaya mempermudah pelaksanaan, maka setiap OPD harus ada admin yang bertugas untuk memverifikasi awal dokumen-dokumen yang masuk. Sebelumnya dilakukan bimbingan teknis bagi admin masing-masing OPD agar mengerti dan bisa membantu pegawainya untuk mengunggah berkas. Apabila tidak ada di OPD yang bisa membantu mengunggah dokumen dan menggunakan website atau aplikasi, di kantor BKPPD disediakan ruangan khusus untuk menjelaskan sekaligus praktek pengunggahan dokumen ke website maupun aplikasi.

Pada bulan Juli 2018 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sudah melakukan submit mencapai 80 persen baik yang kenaikan pangkat regular, struktural, fungsional, dan penyesuaian ijazah. Dan berdasarkan berkas yang masuk untuk kenaikan pangkat pada bulan Oktober tahun 2017, sudah mencapai 98, 52 % yang terbit SK-nya. Bagi PNS yang tidak bisa lagi mengalami kenaikan pangkat atau akan pensiun, diminta untuk senantiasa melakukan peremajaan data.

Berikut adalah data kenaikan pangkat untuk periode Oktober 2018, data diambil Juli 2018. Meskipun masih ada waktu dua bulan untuk melakukan pengunggahan data tetapi lebih dari 72 % pegawai sudah melakukan submit dokumen bahkan sudah diterima. Hanya sekitar 28 % PNS yang belum melakukan submit sama sekali.

Diagram 2 Status Berkas Kenaikan Pangkat



Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Data diolah)

b. Analisa Dampak

Teknologi memang sudah seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaharui dan membantu birokrasi. dalam pengembangan sistem BKPPD bekerja sama dengan echo media tetapi desain sistem informasi kepegawaian ini diciptakan oleh BKPPD. Dampak yang dirasakan adalah berkurangnya arsip yang menumpuk karena data yang dibutuhkan sudah diunggah ke dalam

Box 23 Dampak Kenaikan Pangkat Online

"Dampak yang dirasakan adalah berkurangnya arsip yang menumpuk karena data yang dibutuhkan sudah diunggah ke dalam system informasi. Apalagi ruang arsip yang dimiliki oleh BKPPD sangat terbatas dengan adanya sistem ini memberikan keuntungan bagi BKPPD."

system informasi. Apalagi ruang arsip yang dimiliki oleh BKPPD sangat terbatas dengan adanya sistem ini memberikan keuntungan bagi BKPPD. Selain itu, sebelum adanya inovasi ini Pegawai kurang perhatian terhadap data kepegawaian dan kurang menerima perkembangan teknologi informasi. Tetapi karena kenaikan pangkat online ini merupakan bagian dari sistem kepegawaian yang harus ditaati maka Pegawai Lebih memperhatikan data kepegawaian mereka, dan sudah mulai belajar menggunakan teknologi informasi. Apalagi BKPPD memberikan ruang dan waktu bagi pegawai yang masih belum memahami alur dan prosedur kenaikan pangkat online ini.

3) SIPATUH YANLIK (Sistem Kepatuhan Pelayanan Publik) Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi ini digagas pada tahun 2016, latar belakang lahirnya inovasi ini karena ada beberapa dokumen di OPD yang memberikan pelayanan Publik belum tertata dengan benar. Sipatuh Yanlik adalah Sistem kepatuhan pada pelayanan publik. Inovasi ini masuk dalam kategori inovasi bidang tata kelola. Inovasi ini digagas oleh bagian organisasi Kota Samarinda, dimana inovasi ini dimaksudkan untuk menilai pelayanan yang diberikan OPD kepada masyarakat. Selain itu inovasi Sipatuh Yanlik ini dibuat untuk mengubah *mindset* para pemberi layanan. Keberadaan Sipatuh Yanlik ini memang tidak langsung ke pelayanan namun lebih menekan pada penguatan dari sistem adminitratif dan *mindset* kepada OPD yang menjalani pelayan publik.

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh Bagian Organisasi sebagai rangkaian dalam Sipatuh Yanlik ini adalah penguatan yang dilakukan dengan cara pendekatan, pengawasan dan evaluasi kepada OPD yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Jika penilaian Ombudsman atas pelayanan publik di satu OPD adalah kuning, ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang. Oleh karena itu bagian organisasi mengembangkan inovasi Sipatuh Yanlik. Saat ini, inovasi ini masih dilakukan secara manual karena adanya keterbatasan anggaran.

“Aktivitas yang dilakukan oleh Bagian Organisasi sebagai rangkaian dalam Sipatuh Yanlik ini adalah penguatan yang dilakukan dengan cara pendekatan, pengawasan dan evaluasi kepada OPD yang memberikan pelayanan”

Dengan adanya sipatuh ini mengarahkan kepada OPD penyelenggara pelayanan publik harus berstandar dari beberapa aspek seperti adanya maklumat pelayanan, toilet, SOP, akses untuk penyandang cacat. Selain itu, harus ada informasi pelayanan, ada pengawasan secara internal. Bagian Organisasi menyarankan OPD untuk berkerjasama dengan kominfo agar

pelayanan bisa dilakukan secara online. Dengan ada system online ini yang awalnya banyak loket pelayanan, sekaran hanya ada satu loket pelayanan.

Karena inovasi ini sebagai upaya penataan organisasi di internal pemerintah daerah maka pihak-pihak yang terlibat berasal dari internal juga. Adapun pihak yang terlibat dalam inovasi adalah Inspektorat dan Bappeda yang memberikan pengawasan kepada OPD penyelenggara layanan publik.

Sebagai sarana mempercepat informasi berbasis online kepada pelaku dan pemberi pelayanan publik sehingga mempersingkat jalur birokrasi dalam pemenuhan setiap jenis/ produk pelayanan , serta mendorong OPD untuk taat kepada kewajiban sebagaimana diatur UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sekaligus sebagai bahan pembinaan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik melalui sistem informasi standar pelayanan. Tujuan dari inovasi ini adalah Percepatan Informasi Berbasis TIK untuk melihat/ memastikan sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Ketentuan lainnya dilihat dengan tepat, efisien, akuntabilitas dan partisipatif.

Dokumen Kepatuhan Standar Pelayanan, SOP, SKM, Etika Pelayanan, Inovasi, dan dokumen lainnya bersifat manual sehingga terjadi penumpukan berkas, Jumlah Produk belum dapat terukur dikarenakan dokumen kepatuhan tidak maksimal tersusun dengan baik sesuai dengan ketentuan. Saat ini Seluruh Dokumen Kepatuhan Pelayanan Publik dapat tersimpan dalam sistem standar pelayanan, dapat dilihat di samarindakota.go.id.

b. Analisa Dampak

Stakeholders dari Sipatuh Yanlik ini memang bukan masyarakat secara langsung tetapi OPD yang ada di Samarinda terutama OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Box 24 Dampak Sipatuh Yanlik

“Setelah adanya Sipatuh Yanlik, penyelesaian produk layanan diselesaikan **dengan tepat waktu** dikarenakan ketersediaan informasi SIPP dan **berkurangnya tingkat pegaduan terhadap pelayanan.**”

Sebelum adanya sipatuh yanlik ini hanya 5 % Unit Kerja Penyelenggara pelayanan publik yang memenuhi kewajiban Dokumen sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (khusus Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas). Setelah adanya Sipatuh Yanlik Seluruh Kecamatan, Kelurahan dan puskesmas serta unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang memenuhi kewajiban dokumen dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

Penyelesaian Produk Layanan di Perangkat Daerah berulang-ulang dikarenakan kelengkapan tidak terinformasi sehingga banyak waktu dan biaya yang terbuang. Pengaduan belum tertata secara administrasi dan tingkat pengaduan serta pelayanan masih manual. Setelah adanya Sipatuh Yanlik, penyelesaian produk layanan diselesaikan dengan tepat waktu dikarenakan ketersediaan informasi SIPP dan berkurangnya tingkat pegaduan terhadap pelayanan.

4) Sistem Penjaringan Aparatur Desa (SIMPAPDES) Kabupaten Muara Enim

a. Deskripsi Inovasi

Dengan lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa maka saat ini posisi desa semakin diperkuat dalam tatanan sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu masyarakat desa pun sangat membutuhkan sosok Kepala Desa dan perangkat desa yang memiliki integritas dan kapabilitas yang mumpuni. Dalam rangka mendapatkan itu, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim memiliki ide untuk membuat inovasi Sistem Penjaringan Aparatur Pemerintah Desa (SIMPAPDES).

SIMPAPDES adalah suatu sistem yang menggunakan aplikasi informasi teknologi yang digunakan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Jadi SIMPAPDES tidak hanya digunakan untuk menjaring kepala desa saja tapi juga dipakai untuk penjaringan bakal calon anggota BPD dan perangkat desa. Dengan adanya aplikasi ini maka hasil test nya bisa langsung diketahui oleh bakal calon dan masyarakat.

Inovasi ini didukung penuh oleh Bupati Muara Enim dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim.

Sebelum adanya inovasi ini, proses penjurian bakal calon kepala desa, BPD maupun perangkat desa di Kabupaten Muara Enim dilakukan secara manual. Karena itu, maka banyak masyarakat yang menganggap proses tersebut kurang transparan, kurang demokratis, tidak akuntabel dan banyak dicampuri oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Pada akhirnya hal ini menimbulkan konflik dan permasalahan. Misalnya pada tahun 2015, dari 86 desa di Kabupaten Muara Enim yang melakukan pemilihan kepala desa serentak secara manual, terdapat 11 desa yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap proses penjurian kepala desa. Masyarakat mencurigai adanya permainan antara panitia penyelenggara pemilihan dengan bakal calon (jipp.sumselprov.go.id).

Namun dengan adanya inovasi SIMPAPDES, maka diharapkan :

- Penjurian bakal calon aparatur pemerintah desa dilakukan secara transparan, demokratis, dan akuntabel
- Akan muncul bakal calon kepala desa, BPD, dan perangkat desa yang memiliki integritas dan kapabilitas

Adapun ruang lingkup SIMPAPDES adalah :

- Sistem Penjurian bakal calon kepala desa terdiri dari pembentukan panitia pilkades, pengumuman pendaftaran bakal calon kades, penjurian dan seleksi bakal calon kades, penetapan bakal calon kades oleh panitia pilkades
- Sistem Penjurian bakal calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pembentukan panitia pembentukan BPD, pengumuman pendaftaran bakal calon anggota BPD yang mewakili masing-masing dusun, penetapan calon anggota BPD, Musyawarah desa pembentukan keanggotaan BPD, penetapan anggota BPD terpilih.
- Sistem Penjurian bakal calon perangkat desa terdiri dari pembentukan panitia penjurian calon perangkat desa, pengumuman pendaftaran calon perangkat desa, penetapan calon perangkat desa,

seleksi dan penunjukan perangkat desa oleh kepala desa, penetapan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa.

Untuk memudahkan operasional perangkat aplikasi simpapdes maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Muara Enim untuk dimasukkan dalam situs www.simpapdes.pembkabmuaraenim.go.id.

b. Data Perubahan

Tabel 44 Perubahan hasil Inovasi SIMPAPDES

No	Indikator	Analisa Perubahan
1.	Mekanisme	Perubahan mekanisme penjurangan calon kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa dari manual menjadi melalui aplikasi SIMPAPDES
2.	Kelengkapan Kerja	Terdapat komputer sebagai server SIMPAPDES. Server hanya bisa diakses oleh user yang memiliki akun dan password yakni salah seorang pegawai di Dinas PMD dan masyarakat hanya bisa melihat tampilan depan website SIMPAPDES itu saja. Hal ini untuk menjaga keamanan website dan mencegah adanya tindakan-tindakan melawan hukum antara pelaksana test dengan peserta.
3.	Waktu	Penambahan 1 hari yang sebelumnya total rangkaian PILKADES serentak 51 hari menjadi 52 hari. Penambahan 1 hari ini digunakan untuk melaksanakan seleksi melalui SIMPAPDES secara serentak yang diikuti oleh para bakal calon kepala desa.
4.	Pola Pikir Masyarakat	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil penjurangan calon kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa. Jumlah desa yang menyampaikan ketidakpuasan atas hasil penjurangan calon kepala desa

		berkurang. Pada tahun 2015, dari 86 desa yang melakukan PILKADES serentak secara manual, terdapat 11 desa yang tidak puas. Sedangkan pada tahun 2017, dari 37 desa yang melakukan PILKADES serentak lewat SIMPAPDES, hanya 1 desa yang tidak puas.
--	--	--

Sumber : Badan Permusyawaratan Desa (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Mekanisme

Selama ini penjangkaran bakal calon kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa dilakukan secara manual. Dalam pasal 10 Perbup Muara Enim No.39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan bahwa "panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 hari kerja".

Namun setelah lahirnya inovasi SIMPAPDES, aturan tersebut dirubah dengan Perbup Muara Enim No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim dimana dalam pasal 10 dinyatakan bahwa "pendaftaran bakal calon kepala desa dilakukan melalui SIMPAPDES dalam jangka waktu 9 hari kerja".

Perubahan aturan ini tentunya memberikan dampak berubahnya mekanisme pendaftaran bakal calon kepala desa dari yang awalnya sistem manual menjadi sistem online melalui aplikasi SIMPAPDES. Begitu juga dengan mekanisme penjangkaran bakal calon anggota BPD dan perangkat desa.

Kelengkapan Kerja

Dengan adanya inovasi SIMPAPDES, kelengkapan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami penambahan. Kelengkapan kerja yang dimaksud meliputi satu buah komputer yang dijadikan sebagai server SIMPAPDES. Server SIMPAPDES dipantau dan diawasi oleh salah satu orang pegawai Dinas PMD yang memiliki user dan password agar tidak terjadi kebocoran soal ataupun hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya test

untuk para bakal calon kepala desa. Dalam teknis pelaksanaan test SIMPAPDES nantinya, para bakal calon kepala desa diwajibkan membawa laptop untuk bisa mengikuti test karena penyelenggara hanya menyediakan jaringan internet saja. Begitu juga dalam proses seleksi anggota BPD dan perangkat desa, peserta diwajibkan membawa laptop untuk mengikuti test. Demi menjaga keamanan, SIMPAPDES tidak bisa diakses secara menyeluruh baik oleh masyarakat maupun oleh para bakal calon terkecuali hanya untuk melihat tampilan depan website SIMPAPDES.

Waktu

Pelaksanaan rangkaian pada PILKADES serentak dengan adanya test SIMPAPDES ini bertambah 1 hari yang digunakan sebagai waktu pelaksanaan test bagi para bakal calon kepala desa. Dengan hasil yang bisa diketahui pada saat setelah melaksanakan test di SIMPAPDES, maka para bakal calon yang lulus melewati passing grade bisa mengikuti rangkaian PILKADES, berbeda dengan para bakal calon yang tidak lulus maka otomatis gugur dan tidak berhak mengikuti PILKADES walaupun penetapan secara resmi yang dilakukan oleh penyelenggara dilakukan 9 hari setelah dilaksanakannya test tersebut.

Pola Pikir Masyarakat

Dengan adanya SIMPAPDES yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muara Enim, masyarakat bisa langsung memantau kegiatan test yang diikuti oleh bakal calon kepala desa, selain itu juga hasil test bisa langsung diketahui ketika bakal calon sudah menyelesaikan soal-soal yang ada di SIMPAPDES. Berdasarkan hasil diskusi, tim PDI mendapat gambaran bahwa pada saat PILKADES serentak di Kabupaten Muara Enim masih bersifat manual sering terjadi konflik baik antar bakal calon maupun bakal calon dengan Dinas PMD dan menuding Dinas PMD melakukan kecurangan pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Misalnya pada tahun 2015, dari 86 desa di Kabupaten Muara Enim yang melakukan pemilihan kepala desa serentak secara manual, terdapat 11 desa yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap proses penjaringan kepala desa. Masyarakat mencurigai adanya

permainan antara panitia penyelenggara pemilihan dengan bakal calon (jipp.sumselprov.go.id).

Namun dengan mekanisme test berbasis pada Computer Assisted Test ini, ada transparansi dan masyarakat memperoleh gambaran yang jelas tentang proses PILKADES sehingga kecurigaan tentang indikasi kecurangan pun berkurang. Setelah inovasi dilaksanakan, pada tahun 2017, dari 37 desa yang mengikuti proses penjarangan bakal calon Kepala Desa melalui SIMPAPDES, hanya 1 desa yang menyampaikan ketidakpuasan atas proses penjarangan tersebut (jipp.sumselprov.go.id).

5) Pengelolaan Dana CSR Dengan Pola Musrenbang Kabupaten Muara Enim

a. Deskripsi Inovasi

Di Indonesia, aturan tentang kewajiban penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan swasta telah dituangkan setidaknya dalam 2 Undang-Undang yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Sementara dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b dinyatakan bahwa "setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Selanjutnya dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat."

Atas dasar aturan tersebut maka perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia pun melaksanakan CSR dalam upaya memberikan manfaat pada kehidupan

masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu program CSR ini sebenarnya juga diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah daerah khususnya dalam mendanai pembangunan daerah.

Namun ternyata pelaksanaan CSR di Indonesia masih menjadi problematika. Banyak perusahaan yang masih menganggap CSR sebagai beban berat sehingga perusahaan enggan melakukannya. Kalaupun dilakukan, program yang dipilih pun hanya bersifat insidental dan hanya sekedar untuk melepas kewajiban. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang kurang merasakan manfaat program CSR yang dilakukan perusahaan selama ini. Hal ini terjadi karena program CSR tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu perusahaan-perusahaan menjalankan program CSR nya sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berada pada satu wilayah. Hal ini terkadang menyebabkan terjadinya *overlapping* kegiatan CSR antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau bahkan dengan program pemerintah.

Berbagai permasalahan tersebut ternyata juga dirasakan oleh Pemerintah Muara Enim. Saat ini terdapat 163 perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perbankan, pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, listrik dan panas bumi, peternakan, dan jasa telekomunikasi. Selama ini semua perusahaan

“Belum ada mekanisme atau dokumen yang merangkum kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan dasar oleh perusahaan dalam melaksanakan program CSR”.

tersebut mengaku telah melaksanakan program CSR untuk masyarakat sekitarnya. Namun sayangnya manfaat program tersebut belum banyak dirasakan masyarakat karena belum didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat. Memang selama ini belum ada mekanisme atau dokumen yang merangkum kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan dasar oleh perusahaan dalam melaksanakan program CSR.

Selain itu sering ditemui adanya *overlapping* kegiatan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dengan pemerintah daerah. Koordinasi dan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah pun selama ini belum berjalan secara optimal sehingga pemerintah daerah belum bisa memantau pelaksanaan program-program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya Bappeda memiliki ide inovasi untuk membentuk suatu forum yang dinamakan Forum CSR-PKBL (*Corporate Social Responsibility-Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*). Ini merupakan suatu inovasi model organisasi/lembaga yang membuka ruang bagi para stakeholder untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan, penerapan CSR-PKBL di Muara Enim yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan. Pengurus dan anggota forum ini berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Muara Enim, perusahaan, dan masyarakat (kelompok masyarakat, LSM dan perguruan tinggi).

Pembentukan Forum CSR-PKBL ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim No.30 Tahun 2011 tentang *Corporate Social Responsibility- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim* dan Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 568/KPTS/Bappeda-Sanpras/2011 tentang Pembentukan Forum CSR-PKBL Kabupaten Muara Enim. Melalui forum ini pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dapat saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan program CSR-PKBL. Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan musrenbang untuk menampung usulan masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar oleh perusahaan dalam melaksanakan program CSR nya.

"Melalui forum CSR-PKBL ini pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dapat saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan program CSR-PKBL"

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim No.30 Tahun 2011 tentang *Corporate Social Responsibility*- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim, pembentukan Forum CSR-PKBL bertujuan untuk :

- a) Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR-PKBL
- b) Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR-PKBL.

Dengan kata lain tujuan dibentuknya forum CSR-PKBL ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program CSR selama ini yaitu supaya terbentuknya suatu mekanisme dan dokumen yang merangkum kebutuhan masyarakat lokal yang dapat dijadikan dasar untuk program CSR perusahaan. Selain itu supaya tidak terjadi lagi *overlapping* antara program satu perusahaan dan perusahaan lainnya/pemerintah daerah. Dan yang terakhir dengan adanya forum CSR-PKBL ini maka diharapkan dapat meringankan beban pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendanai pembangunan daerah yang seringkali mengalami keterbatasan anggaran.

Atas ide inovasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim telah menerima penghargaan dari *The La Tofi School of CSR* dalam Nusantara *CSR Awards* 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 Kabupaten Muara Enim menerima Anugrah Pangripta Nusantara 2017 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS atas prestasi Kabupaten/Kota dengan inovasi terbaik melalui Penyusunan RKPD Non APBD.

b. Data Perubahan

Secara umum, keberadaan forum CSR-PKBL memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Berikut adalah analisis mengenai perubahan atas penyelenggaraan inovasi.

Tabel 45 Perubahan hasil Inovasi Forum CSR-PKBL

Indikator	Deskripsi Perubahan
Anggaran	<p>Pemkab memiliki sumber dana baru untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu dana CSR</p> <p>Jumlah dana CSR di Kab. Muara Enim jelas tercatat. Sejak tahun 2012 telah tercatat dana program CSR-PKBL adalah Rp. 455.331.340.949,-</p>
Mekanisme	Perusahaan berkoordinasi dengan semua stakeholder dalam Forum CSR-PKBL untuk merencanakan program CSR sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya <i>overlapping</i> program/kegiatan CSR
Produktifitas	Terdapat dokumen yang menjadi dasar perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan program CSR yaitu RKPD Non APBD
Kualitas	Perusahaan memilih program CSR nya dengan didasarkan pada hasil musrenbang yang dirangkum dalam RKPD non APBD (<i>bottom up</i>) sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, tepat sasaran, dan dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat.
Perubahan pola pikir	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
Keterlibatan stakeholder di luar instansi Pemerintah	Meningkatnya kepedulian dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Muara Enim

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Anggaran

Anggaran yang dimaksud disini merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Sebelum adanya forum CSR-PKBL di Kabupaten Muara Enim, pemerintah Kabupaten Muara Enim seringkali mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai pembangunan

daerahnya. Banyak program/kegiatan hasil musrenbang yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran. Pemerintah Kabupaten Muara Enim pun tidak mengetahui secara jelas program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta di Kabupaten Muara Enim. Perusahaan-perusahaan tidak pernah melaporkan secara rinci program CSR yang mereka laksanakan di Kabupaten Muara Enim.

Namun setelah adanya forum CSR-PKBL, Pemerintah Kabupaten Muara Enim merasa terbantu karena program/kegiatan hasil usulan masyarakat dalam musrenbang yang tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah akan langsung ditangkap oleh perusahaan untuk dilaksanakan sebagai program CSR. Jadi dengan adanya forum ini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki sumber dana untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Dari tahun 2012-2017 telah tercatat jumlah anggaran CSR-PKBL yang telah dikucurkan untuk pembangunan di Kabupaten Muara Enim adalah Rp. 455.331.340.949,-.

Mekanisme

Mekanisme ini terkait dengan mekanisme pelaksanaan program CSR di Kabupaten Muara Enim. Sebelum adanya forum CSR-PKBL, perusahaan memilih dan menjalankan program CSR nya sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan perusahaan lain dan pemerintah daerah. Akibatnya sering kali ditemukan program CSR yang *overlapping* dengan program CSR perusahaan lain atau program pemerintah daerah.

Sedangkan dengan adanya forum CSR-PKBL, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim bisa menjalin koordinasi, komunikasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan CSR mereka. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten yang juga terlibat dalam forum ini juga bisa mengetahui program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya *overlapping* program/kegiatan.

Produktivitas

Produktivitas disini dilihat dari produk yang dihasilkan oleh inovasi ini. Salah satu produk yang dihasilkan dari inovasi ini adalah buku RKPDP Non APBD. Ini adalah

suatu dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah yang dibiayai dengan anggaran CSR-PKBL. Biasanya dokumen RKPd berisi rangkuman program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dalam musrenbang yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD. Namun uniknya RKPd Non APBD ini merangkum usulan program/kegiatan dari masyarakat yang tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dokumen inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan program CSR nya.

Sebelum adanya inovasi, dokumen RKPd Non APBD ini belum ada, sehingga perusahaan tidak punya dasar dalam melakukan program CSR. Namun setelah adanya inovasi, dibuatlah dokumen RKPd Non APBD setiap tahunnya yang dijadikan dasar bagi perusahaan dalam membuat program CSR. Dengan adanya dokumen RKPd Non APBD ini pelaksanaan program CSR di Kabupaten Muara Enim menjadi lebih jelas dan terarah.

Gambar 8 Dokumen RKPd Non APBD Kab Muara Enim Tahun 2018



Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Data diolah)

Kualitas

Kualitas yang dilihat dari inovasi ini adalah kualitas program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan di Kabupaten Muara Enim. Sebelum ada inovasi, perusahaan memilih program CSR nya sendiri tanpa memikirkan manfaat dan kebutuhan masyarakat penerima program tersebut. Jadi dapat dikatakan pemilihan program CSR bersifat *top-down* dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu program CSR lebih bersifat insidental dan sekedar membagi-bagikan hadiah/ *charity*. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang merasakan manfaat atau bahkan tidak mengetahui program tersebut.

Sedangkan dengan adanya forum CSR-PKBL, perusahaan memilih program CSR nya berdasarkan usulan masyarakat dalam musrenbang atau bersifat *bottom up* dari masyarakat. Program CSR juga diarahkan supaya bisa berkelanjutan dan tidak lagi hanya bersifat *charity*. Dengan begitu maka program CSR yang dilakukan oleh perusahaan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat. Dengan kata lain program CSR saat ini lebih berkualitas dibandingkan dengan program CSR sebelum adanya inovasi ini.

Perubahan Pola Pikir

Program CSR sebenarnya saat ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan karena sudah disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang masih enggan untuk melaksanakan program CSR karena walaupun diwajibkan namun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR belum diatur dengan jelas dalam UU tersebut. Begitu juga di Kabupaten Muara Enim, masih banyak perusahaan yang enggan melaksanakan CSR karena menganggap CSR sebagai beban. Kalau pun melaksanakan CSR, banyak perusahaan yang melaksanakannya hanya sekedar "formalitas" atau pelepas kewajiban saja tanpa memperhatikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.


Selain itu selama ini belum ada kesadaran bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab semua pihak. Semuanya dibebankan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu disalahkan apabila pembangunan tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Padahal pembangunan daerah seharusnya merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Oleh karena itu dalam inovasi ini Bappeda Kabupaten Muara Enim sebagai inovator juga menggagas adanya CSR-PKBL award yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan di wilayah Kabupaten Muara Enim yang memiliki komitmen besar dalam melaksanakan CSR. Selain itu award ini juga bertujuan untuk memotivasi dan mengedukasi kalangan dunia usaha ini supaya selalu melaksanakan program CSR-PKBL sebagai komitmen moral perusahaan kepada masyarakat setempat terutama yang terkena dampak dari operasional perusahaan.

Gambar 9 CSR-PKBL Award Tahun 2017 Untuk PT. Bukit Asam Tbk



Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Data diolah)



Sejak adanya inovasi ini maka kesadaran para stakeholder yang tergabung dalam forum CSR-PKBL sedikit demi sedikit telah terbuka pola pikirnya. Kalangan dunia usaha berkomitmen dan berlomba-lomba untuk melaksanakan program CSR yang sudah menjadi kewajibannya tanpa menganggap CSR sebagai beban. Masyarakat pun ikut terlibat dalam merencanakan program pembangunan yang benar-benar mereka butuhkan. Sehingga pemerintah daerah pun terbantu dan merasa tidak sendiri lagi dalam penyelenggaraan pembangunan Kab. Muara Enim. Jadi semua stakeholder sadar akan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Keterlibatan stakeholder di luar instansi Pemerintah

Inovasi ini sangat membutuhkan keterlibatan stakeholder di luar instansi pemerintah yaitu dunia usaha dan masyarakat. Sebelum adanya inovasi ini, pemerintah, perusahaan dan masyarakat berjalan sendiri-sendiri dan tidak berkoordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Pemerintah menjalankan tugasnya dalam pembangunan daerah, perusahaan juga menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan CSR, dan masyarakat hanya menerima program-program yang diberikan oleh pemerintah daerah dan perusahaan.

Namun setelah adanya inovasi, semua stakeholder baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Semua stakeholder menjalankan peran masing-masing dalam forum CSR-PKBL itu. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat lokal di sekitar perusahaan berperan untuk memberi usulan program pembangunan dalam musrenbang sekaligus menjadi pengawas jalannya program pembangunan. Sedangkan perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban CSR nya kepada masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

6) SIPPohon (Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan Pohon) Kota Pontianak

a. Deskripsi Inovasi

SIPPohon adalah suatu aplikasi online yang dapat menyediakan dan menyajikan database ilmiah pohon-pohon pelindung/peneduh pada RTH/RPTRA Kota Pontianak, khususnya yang berada di jalur hijau (bahu/median jalan) maupun fasilitas lainnya, yang dapat diakses

Gambar 10 Inovasi SIPPohon



langsung oleh masyarakat, dimana mereka juga dapat ikut serta memantau dan menjaga keberadaan pohon tersebut.

Adapun tujuan dari inovasi ini agar tersedianya media online Dinas PUPR sebagai sumber informasi terkait urusan pemerintahan di bidang pertamanan di Kota Pontianak. Selain itu, tersedianya informasi pendataan dan pemantauan terhadap pohon-pohon pelindung /peneduh yang berada pada jalur hijau (bahu/median jalan), maupun pada fasilitas umum lainnya. Tujuan lainnya yaitu tersedianya media penyaluran aspirasi masyarakat Kota Pontianak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di bidang pertamanan.

b. Data Perubahan

Tabel 46 Perubahan SIPPohon (Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan Pohon)

Indikator	Variable	Perubahan
Input	SDM	Dibentuknya tim, khususnya IT yang terdiri dari 3 orang untuk operasional
Proses	Metode	Inventarisasi data bias secara langsung dan

		input <i>online</i>
	Waktu layanan	Saat itu juga data inventarisasi pohon dapat dilihat secara <i>online</i>
Output	Produktivitas	Kenaikan jumlah input data pohon sebanyak 600.000 yang sebelumnya hanya sekitar 10.000
	Kualitas Data	Data yang disajikan lengkap, disajikan sesuai dengan spesifikasi dan kriteria pohon

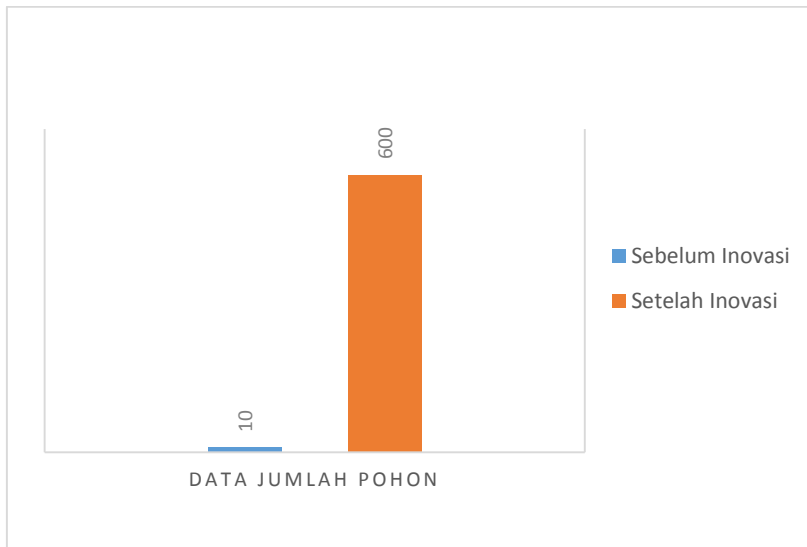
Sumber : Dinas PUPR (Data diolah)

c. Analisa Dampak

SDM

Dalam hal SDM pelaksana memang terjadi penambahan, hal ini bias dipahami sebagai konsekuensi logis ketika inovasi ini sebagai hal yang baru dan membutuhkan tenaga yang ahli dalam bidang IT khususnya. Dinas PUPR juga akhirnya membentuk tim khusus dalam menangani inovasi ini yang berjumlah tiga orang. Tim ini yang nantinya melakukan inventarisasi secara langsung dan input secara online.

Grafik 9 Jumlah Data Pohon (dalam ribu)



Sumber : Dinas PUPR (Data diolah)

Proses (Metode dan Waktu Layanan)

Inovasi ini juga akhirnya memudahkan tugas dinas PUPR dalam hal pemantauan dan penjagaan pohon-pohon yang sudah di data. Pemantauan dan penjagaan ini bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Dinas PUPR dapat mempunyai data pohon mana yang sudah layak dan harus ditebang atau dirapikan batangnya. Selain itu bantuan pengaduan dari masyarakat dapat ditampung melalui aplikasi ini. Pemantauan juga bertujuan untuk menjaga agar pohon ini menjadi aset bagi kota Pontianak. Selain dapat langsung seperti penghasil oksigen dan rindang, dampak tidak langsungnya yaitu untuk memberikan estetika bagi penataan kota dan pertamanan.

Bahkan lebih dari itu, pemantauan juga mencegah praktik vandalisme seperti memaku dan menjadikan pohon tempat memasang iklan atau bahkan mencegah sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membakar atau menggunakan cara-cara lain guna membuat mati pohon-pohon tersebut dengan alasan menghalangi. Dengan metode online ini juga

memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam melihat dan mengetahui informasi terkait pohon yang ada di Kota Pontianak secara *real-time*.

Output (Produktivitas & Kualitas Data)

Berdasarkan output dari inovasi ini sendiri adalah meningkatnya jumlah pohon yang sudah diinput datanya, dari yang berjumlah kurang lebih 10.000 data manual, menjadi kenaikan yang signifikan menjadi 600.000 data pohon yang sudah terdigitalisasi. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan dalam hal produktivitas pendataan yang ada selama inovasi ini berjalan.

Mekanisme yang digunakan untuk bisa mendapatkan kenaikan jumlah tersebut adalah dengan adanya pelibatan masyarakat dalam melaporkan pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan mereka. Masyarakat diberikan akses untuk bisa menggunakan aplikasi SIPPohon untuk bisa menginput data pohon, lalu dari pihak dinas akan menerima laporan tersebut untuk bisa disurvei kemudian, dan diberikan nomor registrasi apabila sesuai dengan kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu punya nilai fungsi, nilai ekonomis, dan nilai estetika sosial-budaya.

Inovasi ini juga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat terkait jenis-jenis pohon dan manfaat dari pohon tersebut. Dari sini, aplikasi SIPPohon memberikan data yang lengkap terkait spesifikasi dari suatu pohon. Selain itu, tingkat akurasi juga sangat tinggi karena sudah *online*.

Inovasi Lainnya (Pemberdayaan)

1) Pengelolaan Sampah Berbasis Black Soldier Flying (BSF) dan Bank Sampah Kabupaten Ciamis

a. Deskripsi Inovasi

Pengelolaan sampah dengan paradigma kumpul angkut buang bukan lagi saatnya sekarang. Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pola pilih pilah dengan teknologi, mulai dari mencegah timbulnya sampah, mengguna ulang sampah, dan mendaur ulang sampah (3R) mendatangkan manfaat sangat besar bagi masyarakat melalui

budidaya magot (BSF) dan bank sampah menuju kawasan *zero waste* untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2025.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu hal yang paling mendesak dan merupakan permasalahan lingkungan yang harus ditangani. Karena meningkatnya tekanan dari masyarakat dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan maka diperlukan pengembangan dalam pengelolaan sampah, salah satunya melalui *Black Soldier Fly* (BSF). Penggunaan larva (magot) dari serangga ini sebagai pengolah sampah merupakan suatu kesempatan yang menjanjikan, karena larva BSF yang dipanen tersebut dapat berguna sebagai sumber protein untuk pakan hewan, sehingga dapat menjadi pakan alternatif pengganti pakan konvensional. Keuntungan yang didapatkan melalui Pengelolaan Sampah Berbasis *Black Soldier Fly* (BSF) sangat menjanjikan mengingat bahwa teknologi ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan fasilitas terjangkau dengan biaya rendah.

Bank Sampah di Kabupaten Ciamis merupakan suatu sistem pengelolaan sampah yang mendorong masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi aktif di dalamnya. Pengelolaan model ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomis sehingga masyarakat memperoleh keuntungan dari tabungan sampah ini.

Adapun tujuan inovasi ini adalah :

- Terwujudnya kawasan *zero waste* dengan sistem pengelolaan sampah dengan *Black Soldier Fly* (BSF) dan Bank Sampah.
- Terciptanya gerakan membangun komitmen kerja bersama antara Pemerintah, Dunia Usaha, masyarakat dan TNI/Polri serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah sehingga dapat terwujud bersih sampah 2025.

Selain tujuan, manfaat Inovasi yang diharapkan yaitu :

- Adanya perubahan perilaku di dalam masyarakat terutama dalam pengelolaan terhadap sampah sehingga saat ini terdapat 20 (dua puluh) kawasan *zero waste*.

- Adanya peningkatan income masyarakat dalam mengelola sampah melalui *Black Soldier Fly* (BSF) dan Bank Sampah sehingga dapat menunjang perekonomian keluarga dalam masyarakat.
- Adanya kolaborasi dengan program pemerintah lainnya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Ciamis, seperti dengan program Lembur Berseka dan Kampung KB.

b. Analisa Perubahan

Inovasi pengelolaan sampah berbasis Black Soldier Fly atau BSF dan bank sampah ini memiliki dampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat, kesejahteraan dan membantu mewujudkan Ciamis Zero Waste. Untuk itu, tabel di bawah ini adalah analisa perubahan yang dihasilkan oleh inovasi pengelolaan sampah:

Tabel 47 Perubahan hasil Inovasi Pengelolaan Sampah berbasis BSF

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Jumlah SDM Pelaksana	30 Tenaga Harian Lepas	20 Tenaga Harian Lepas	Efisiensi tenaga kerja atau THL
Proses	Metode Layanan	THL mengambil sampah di masing-masing rumah warga untuk ditampung di TPA	Warga di beberapa dusun mulai mengelola sampah dengan mengumpulkannya di bank sampah dan menjadi tabungan untuk warga	Perubahan metode dengan memberdayakan THL menjadi memberdayakan masyarakat
Output	Jumlah layanan yang dihasilkan	Belum terdapat kawasan <i>zero waste</i> di Kabupaten Ciamis	20 lokasi zero waste : diantaranya adalah desa handapherang, desa panumbangan, desa panjalu, desa pawindan, dusun	Peningkatan daerah menuju Ciamis <i>zero waste</i>

			pasirpeuteuy	
	Jumlah Produksi BSF	Masyarakat belum memikirkan adanya pengelolaan sampah menghasilkan Magot atau BSF	200-300 kg produksi magot per hari dari total 20 lokasi pengelola BSF.	Pertumbuhan produksi meningkat seiring bertambahnya lokasi pengelolaan BSF
	Kualitas Produk Masyarakat	Masyarakat belum mengetahui sampah sebagai sesuatu yang bermanfaat	Sampah menghasilkan Magot atau alat hitam. Magot ini memiliki protein tinggi dan digunakan sebagai pakan ternak lele, ayam, dan domba. Protein tinggi menyebabkan ternak yang memakan magot memiliki antibodi tinggi.	Terciptanya nilai produk yang dihasilkan oleh sampah

Sumber : Dinas PUPR dan Lingkungan Hidup (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Inovasi pengelolaan sampah berbasis pengelolaan BSF atau magot ini berdampak pada efisiensi tenaga kerja petugas sampah. Pengurangan tenaga kerja harian lepas dari 30 menjadi 20 orang merupakan indikasi di beberapa desa sudah tidak dibutuhkan lagi petugas sampah seperti di Desa Handapherang dan Dusun Pasirpeuteuy. Metode pelayanan pengelolaan sampah berubah dari melibatkan petugas dan TPA menjadi pengelolaan di beberapa kawasan yang sudah mampu mengelola sampah sendiri menjadi magot sebanyak 20 kawasan. Dengan adanya inovasi ini sehingga TPA dan petugas tidak dibutuhkan lagi. Maka dapat dikatakan bahwa inovasi ini memiliki dampak terhadap efisiensi tenaga kerja dan anggaran OPD.

Box 25 Testimoni Inovasi Pengelolaan Sampah berbasis BSF dan Bank Sampah

"Saya merasakan kemanfaatan dari pengelolaan magot yang berjalan selama 4 bulan ini, dari lahan saya yang kosong bisa dijadikan tempat pengelolaan sampah organik menjadi magot dan magot ini menjadi penghasilan tambahan saya dengan menjualnya ke pengusaha ternak." -

Dadang, Pengelola sampah

dan tidak menghasilkan nilai tambah apapun. Setelah adanya inovasi ini, seluruh kawasan yang mengelola sampah menjadi magot ini justru menghasilkan 200-300 kg magot per hari yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan produksi meningkat seiring bertambahnya lokasi pengelolaan BSF di 20 kawasan *zero waste*. Larva serangga atau magot ini digunakan untuk pakan ternak lele, domba, kambing dan lain-lain.

Mutu produk inovasi ini juga memiliki keunggulan dimana sebelumnya ternak hanya mengkonsumsi pelet dan memiliki pertumbuhan yang lambat. Sampai saat ini, banyak peternak beralih yang sebelumnya pakan dari pelet ke magot. Hal ini ternyata disebabkan oleh kualitas magot yang memiliki protein tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan ternak dan memperlambat angka kematian ternak seperti lele. Selain kualitas yang berdaya saing, harga pakan juga sangat kompetitif dibandingkan dengan harga pelet dimana harga magot : 9.500-11.000/kg sementara harga pelet ikan 12.000-13.000/kg.

Dalam aspek produktivitas, sampah yang menghasilkan magot ini memiliki nilai ekonomis. Sebelumnya, pengelolaan sampah hanya diangkut ke TPA oleh petugas sampah

Gambar 11 Infografis Pengelolaan Sampah BSF



Selain hal diatas, dampak lain dari inovasi ini adalah kesejahteraan masyarakat dengan memiliki penghasilan dari bisnis pengelolaan sampah berbasis magot ini. Pengelola magot di Desa Panimbangan memiliki penghasilan rata-rata 20 juta perbulan dengan dikelola oleh 3 orang warga. Dampak lainnya adalah adanya upaya kolaboratif antara pengelolaan sampah khususnya desa pawindan dengan OPD lainnya seperti Dinas Perikanan memberikan bibit ikan lele, Dinas Pertanian memberikan bibit tanaman sayuran dan lada untuk pengelolaan sampah menjadi pupuk, dan Dinas Peternakan berkolaborasi dalam ternak domba yang dapat menjadikan magot sebagai pakannya.

2) Rumah Susun Layak Huni (RUSULANI) Kota Samarinda

a. Deskripsi Inovasi

Sebuah program bedah rumah yang dilaksanakan mulai tahun 2013 secara bergotong royong dengan penuh kesadaran untuk membantu warga yang sangat miskin agar memiliki rumah yang layak huni. Bedah rumah ini tidak

menggunakan dana APBD sama sekali hanya bantuan dari para donatur yang ingin berbagi kepada warga yang membutuhkan. Tujuan dari inovasi ini adalah memupuk kesadaran orang/ lembaga yang mempunyai agar tumbuh rasa kegotongroyongan. Ruslani ini merupakan salah satu jenis inovasi pemberdayaan masyarakat.

Sejak tahun 2013 - 2018 ada 5 rumah yang sudah divedah, artinya ada 1 rumah yang divedah setiap tahunnya. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa bahan bangunan dan juga jamban yang didapatkan dari TNI melalui program sejuta jamban. Total dana yang dibutuhkan dalam membedah satu rumah adalah 25-30 juta.

Persiapan sampai pelaksanaan kegiatan bedah rumah ini dibentuk satu tim khusus dari kecamatan Samarinda Sebrang. Tim ini terdiri dari PNS yang berasal dari kecamatan Samarinda Sebrang dan lurah yang ada di lingkungan kecamatan Samarinda Sebrang. Proses pemilihan rumah yang akan divedah adalah melalui laporan RT dan laporan masyarakat kemudian diserahkan dalam rapat koordinasi. Setelah itu, akan ada seleksi dari beberapa kandidat selanjutnya diputuskan yang akan menerima bantuan. Syarat yang ditetapkan penerima bantuan bedah rumah adalah tidak mampu makan tiga kali sehari, listrik belum ada, luas rumah hanya 8 M² , kesulitan dalam mengakses air bersih. Adapun alokasi waktu masing-masing kegiatan di bedah rumah dalam satu tahun: 3-6 bulan pendataan 1-2 bulan musyawarah dan penentuan rumah yang akan divedah, 4 bulan pelaksanaan bedah rumah

Stakeholders yang terlibat dalam bedah rumah ini semula hanya pihak kecamatan saja. Tetapi saat ini sudah mendapatkan dukungan berbagai pihak. Yang terlibat diantaranya PKK, Masjid, dan kelompok usaha. Keterlibatan stakeholders berupa pemberian informasi dan bantuan berupa uang dan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk bedah rumah. Dari pihak pemerintah yang turut terlibat adalah Koramil dan Puskesmas. Keterlibatan Koramil adalah dengan pemberian jamban kepada warga yang rumahnya divedah. Ini digabungkan dengan program seribu jamban yang dilaksanakan oleh TNI.

b. Analisis Dampak

Dampak dari kegiatan ini adalah Masyarakat cenderung pasif jika tidak digerakkan. Aparat juga tidak terlalu rajin melakukan pendataan warga. Tetapi setelah adanya Ruslani Masyarakat semakin responsif membantu tetangga atau warga yang membutuhkan bantuan, aparat juga semakin intensif mendata kondisi warga. Perlu ada satu tujuan bersama yang menggerakkan warga.

Kerjasama juga dilakukan dengan berbagai sektor, bukan hanya pemerintah tetapi sektor swasta, bahkan masyarakat. Tentu ini menjadi satu perwujudan *Whole of Government* dan meminimalisir *silo mentality* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua pihak bekerja sama dan digerakkan oleh satu tujuan yaitu membantu pembedahan rumah salah satu warga di Kecamatan Samarinda Sebrang.

Program bedah rumah ini bisa berhasil karena bedah rumah ini sudah pernah dilakukan oleh Camat Samarinda Sebrang ketika bekerja di kantor Kecamatan Loa Buah. kegiatan bedah rumah di Loa Buah sebelumnya mendapatkan bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, dalam setiap sosialisasi Camat Samarinda

"Faktor leadership adalah faktor pendukung yang sangat kuat **berjalannya inovasi Ruslani** ini. Satu orang yang menjadi inisiator sekaligus yang menjadi pemimpin dalam **menggerakkan semua stakeholders** untuk mencapai tujuan bersama tersebut."

Sebrang menyampaikan bahwa menyumbang untuk bedah rumah berarti sedang menabung untuk bisa masuk surga, bahwa beramal untuk kemanusiaan akan mendapatkan pahala yang besar.

Faktor leadership adalah faktor pendukung yang sangat kuat berjalannya inovasi Ruslani ini. Satu orang yang menjadi inisiator sekaligus yang menjadi pemimpin dalam menggerakkan semua stakeholders untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Leadership yang kuat dari camat Samarinda Sebrang dapat menggerakkan berbagai stakeholders untuk terlibat dalam membantu pelaksanaan Ruslani ini.

3) Kampung Inggris Kebumen (KIK) Kabupaten Kebumen

a. Deskripsi Inovasi

Kampung Inggris Kebumen (KIK) adalah program inovasi yang termasuk dalam program 100 hari Bupati Terpilih periode 2016-2021 yang dirintis sejak Maret 2016 dan diluncurkan pada 9 Agustus 2016. KIK berlokasi di Desa Jatijajar, Kec. Ayah, Kabupaten Kebumen. Kampung Inggris Kebumen (KIK) adalah satu-satunya Kampung Inggris di Indonesia yang diinisiasi dan dijalankan perintisannya oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Program ini melibatkan berbagai stakeholder baik OPD, sekolah/ madrasah sebagai *end-user*, dan masyarakat sebagai penyedia jasa akomodasi selama program pelatihan berjalan.

Skema program pelatihan di KIK menitikberatkan pada kemampuan berbicara Bahasa Inggris dan pembinaan karakter melalui pembiasaan mirip dengan model pondok pesantren. Selama program reguler (2 minggu), peserta menginap dan mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan sehingga mengharuskan tinggal di Desa Jatijajar sebagai lokasi Kampung Inggris Kebumen (KIK). Masyarakat sekitar Kampung Inggris berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan peserta selama program pelatihan berjalan.

Kampung Inggris Kebumen didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Inggris pada SMP dan SMA/SMK Kebumen, yang masih di bawah rata-rata nasional di tahun 2016. Nilai rata-rata SMP Kebumen masih 55,3 dari rata-rata nasional 60,0. Sedangkan nilai rata-rata SMA dan SMK Kebumen secara berturut-turut adalah SMA IPA (56,8 dari 65,8), SMA IPS (48,0 dari 58,4), dan SMK (55,7 dari 55,3). Kampung Inggris Kebumen (KIK) memiliki visi dan misi yang integral antara pengembangan kecakapan pendidikan siswa sekolah/madrasah, pengembangan kapabilitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu program.

Inovasi ini memiliki dampak yang nyata kepada masyarakat, baik berupa pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Sehingga inovasi Kampung

Inggris Kebumen dapat dikategorikan sebagai jenis inovasi Pemberdayaan Masyarakat.

b. Data Perubahan

Secara umum, inovasi Kampung Inggris Kebumen telah mendorong perubahan di masyarakat Kebumen menjadi lebih baik. Perubahan ini dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Berikut adalah analisis mengenai perubahan penyelenggaraan inovasi :

Tabel 48 Perubahan hasil Inovasi Kampung Inggris Kebumen

No	Indikator	Deskripsi Perubahan
1	Jumlah peserta KIK (jumlah penerima layanan)	Terdapat sebanyak 4.508 siswa sekolah Kabupaten Kebumen yang mendapatkan pendidikan Bahasa Inggris tambahan setelah adanya KIK.
2	Peningkatan perekonomian masyarakat	Terjadi penambahan pendapatan masyarakat dengan dibukanya berbagai usaha homestay, catering, dan laundry guna memenuhi kebutuhan peserta Kampung Inggris
3	Penyerapan Tenaga Kerja	Terdapat setidaknya 72 orang masyarakat yang mampu membuka usaha baru baik berupa homestay, laundry, catering, hingga menjadi pengajar.

Sumber : Pengelola Kampung Inggris (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Kampung Inggris Kebumen merupakan sebuah upaya pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Kampung Inggris tersebut, tercatat memiliki beberapa dampak antara lain;

- a) **Dampak pertama adalah Jumlah Penerima Layanan.** Dua tahun sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 2016, terdapat total 4.573 peserta didik yang bergabung dalam Kampung Inggris Kebumen dalam 4 kali

penyelenggaraan KIK. Secara rinci terdapat 1.487 peserta KIK pada semester 2 tahun 2016, lalu 1.197 peserta pada semester 1 tahun 2017, 1.172 peserta di semester 2 tahun 2017 dan 795 orang peserta pada semester pertama tahun 2018.

Pembukaan pendaftaran peserta KIK sendiri cukup unik. KIK yang merupakan rintisan awal Kampung Inggris, mendapatkan peserta melalui cara pengumuman kepada SD dan SMP di kabupaten Kebumen. Sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar peserta KIK merupakan siswa sekolah SD dan SMP di Kebumen. Namun pada dua tahun terakhir, mulai berdatangan peserta dari luar Kebumen yang menginginkan kelas pada saat waktu libur sekolah. Tercatat sekitar 65 orang yang menjadi peserta KIK pada tahun 2016 dan 2017. Melalui KIK tercatat sebanyak 4.508 siswa sekolah kabupaten Kebumen mendapatkan pendidikan Bahasa Inggris tambahan di luar yang mereka dapat di sekolah.

b) **Dampak kedua adalah peningkatan ekonomi masyarakat.** KIK telah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian warga di sekitarnya.

Melalui pendirian KIK, telah muncul berbagai usaha masyarakat seperti homestay, laundry, dan *catering* guna memenuhi kebutuhan peserta didik KIK. Melalui berbagai macam usaha tersebut telah menghasilkan pertambahan nilai

Box 26 Testimoni Inovasi Kampung Inggris Kebumen

"Rumah saya dekat dengan sekretariat KIK ini. Saya merasa sangat beruntung krn adanya KIK ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Kampung Inggris Pare selama 1 tahun. Setelah itu saya juga direkrut sebagai tentor KIK. Sehari-hari kami di kampung Inggris ini juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa saya selalu diasah dan semakin baik." -**Risa (tentor di Kampung Inggris Kebumen), Purbalingga**

ekonomi kepada masyarakat. Pada tahun awal terbentuknya, KIK telah menghasilkan perputaran uang sebesar Rp. 587,365,000 pada tahun 2016 semester 2. Omzet ini terus bertambah menjadi Rp. 920.670.000 pada sepanjang tahun 2017. Hingga awal tahun 2018 tercatat sebanyak Rp. 1,8

Miliar total omzet yang dihasilkan masyarakat sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018.

c) **Dampak ketiga KIK adalah Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat.**

Melalui KIK, telah tercipta usaha masyarakat mulai dari homestay, laundry, dan catering untuk memenuhi kebutuhan peserta didik KIK. Hingga tahun 2018, telah terserap 30 orang warga penyedia homestay, 18 orang penyedia laundry, dan 7 orang warga penyedia catering. KIK juga menyerap tenaga pengajar dari penduduk setempat dengan direkrutnya 4 pengajar *full time* dan 13 tutor. Perekrutan masyarakat Jatijajar sebagai pengajar full-timer melalui serangkaian proses magang pada lembaga bimbingan bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kediri selama 1 tahun.

Kemudian, selama 2 tahun pelaksanaannya Kampung Inggris Kebumen dapat dinilai cukup baik dalam pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan KIK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen melalui penyebaran angket kepada Kepala Sekolah, Guru, dan siswa peserta KIK menunjukkan nilai 3,97 dari skala 1-5. Secara khusus, terdapat beberapa indikator evaluasi KIK yang memperlihatkan nilai Baik (4,0 – 5,0) antara lain (a) Pendidikan Karakter (4,23), (b) Layanan Catering (4,05) dan (c) Homestay (4,02) serta (d) Kebermanfaatn Program bagi Peserta (4,65). Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa peserta KIK puas dengan pelayanan yang diterimanya selama menjalani program.

4) BANK SAMIUN (Bank Sampah Untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) Kabupaten Kebumen

a. Deskripsi Inovasi

Kelurahan Kebumen merupakan kelurahan yang berada di Pusat Kabupaten Kebumen dan merupakan salah satu Kelurahan yang menjadi sasaran penilaian Adipura. Bahkan, Kelurahan Kebumen merupakan Kelurahan dengan potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbesar di kabupaten Kebumen hingga 907 juta rupiah atau setara dengan potensi pendapatan PBB dari 3 kecamatan pinggiran Kabupaten Kebumen. Namun demikian, perolehan PBB di

Kelurahan Kebumen seringkali hanya berkisar di angka 80%-85% dari potensi pendapatan keseluruhan. Di sisi lain pengelolaan sampah juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Kelurahan Kebumen.

Oleh karena itu digagaslah inovasi Bank Samiun atau Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak di Kelurahan Kebumen melalui Surat Keputusan Lurah Kebumen Nomor : 410 / 15 / KEP / 2016 tentang Pembentukan Bank Sampah untuk Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (BANK SAMIUN) Kelurahan Kebumen. Bank Samiun merupakan pengembangan inovasi Bank Sampah yang diintegrasikan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Inovasi ini digagas oleh Lurah Kebumen, Bapak Dede Suntoro, dengan menggandeng berbagai pihak mulai dari Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Tim Penggerak PKK, RT/RW, LKMK, Karang Taruna "Yoda Taruna", Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kebumen.

Bank SAMIUN memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam implementasinya yakni;

- a) Pencapaian pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kebumen mencapai 100%,;
- b) Mempermudah masyarakat Kelurahan Kebumen dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terutama masyarakat dengan taraf ekonomi kurang mampu
- c) Mengurangi permasalahan timbulan sampah di Kelurahan Kebumen sekaligus membiasakan masyarakat untuk hidup bersih.

b. Data Perubahan

Secara umum, inovasi BANK Samiun telah mendorong masyarakat Kelurahan Kebumen, untuk ajeg membayar PBB dan menjadi lebih peduli dengan kebersihan lingkungan. Perubahan ini dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Berikut adalah analisis mengenai perubahan penyelenggaraan inovasi :

Tabel 49 Perubahan hasil Inovasi BANK Samiun

No	Indikator	Analisa Perubahan
1	Jumlah Pendapatan Pemerintah	Peningkatan prosentase potensi pembayaran PBB oleh masyarakat di Kelurahan Kebumen.
2	Pengurangan Timbulan Sampah	Pengurangan timbulan sampah dari sebelumnya sama sekali tidak menjadi 9 ton di 2017
3	Warga peduli kebersihan lingkungan (nasabah bank Sampah)	Bertambahnya warga yang lebih peduli akan kebersihan dengan menjadi nasabah bank Sampah

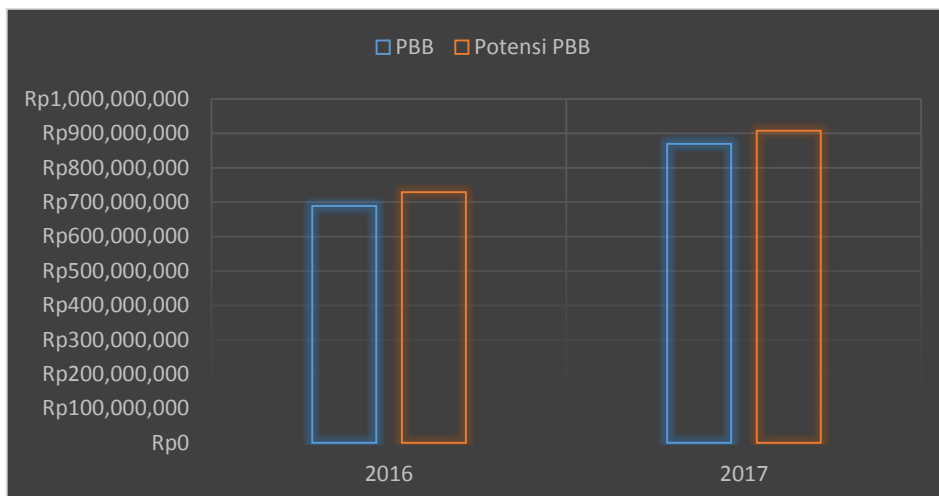
Sumber : Kelurahan Kebumen (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Hingga setahun pelaksanaannya, BANK Samiun telah memperlihatkan dampak nyata, baik kepada kelurahan maupun kepada masyarakat.

- **Perubahan pertama adalah peningkatan presentase pendapatan daerah.** Hingga kini, Bank Samiun telah sukses meningkatkan realisasi pendapatan PBB di Kelurahan Kebumen. Pada tahun 2016, tercatat pendapatan PBB Kelurahan Kebumen telah mencapai Rp.689.527.527,00 atau 94,6% dari potensi PBB sebesar Rp. 728.787.963,00. Prosentase ini semakin meningkat di tahun 2017 dengan capaian Rp.869.572.663,00 atau 95,7% dari total potensi PBB sebesar Rp. 907.766.565,00.

Diagram 3 Realisasi Pendapatan PBB Kelurahan Kebumen 2016-2017



- **Perubahan kedua adalah peningkatan jumlah masyarakat yang peduli kebersihan lingkungan.** Seiring dengan peningkatan realisasi PBB dan kemudahan membayar pajak masyarakat, jumlah nasabah aktif Bank Samiun juga turut meningkat di tiap tahun, yakni 150 nasabah di tahun 2016 dan 300 nasabah di tahun 2017. Hal tersebut cukup menggembirakan karena hingga tahun 2017, terdapat setidaknya 300 KK yang peduli akan kebersihan lingkungannya dengan cara menabung sampah pada Bank SAMIUN. Sebelum dilakukan inovasi, masyarakat cenderung tidak memilah jenis sampah dan berkontribusi terhadap banyak timbulan sampah.
- **Terakhir, Bank SAMIUN juga berdampak terhadap pengurangan timbulan sampah.** Laporan rekapitulasi tabungan sampah Bank SAMIUN menunjukkan tabungan sampah masyarakat telah berjumlah total sekitar

Box 27 Dampak Inovasi Bank SAMIUN

“2016, jumlah nasabah hanya **150 kk**, kemudian di 2017 nasabah meningkat menjadi **300 kk**. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya **perubahan pola pikir masyarakat** dalam menghadapi timbulan sampah dengan tabungan sampah dapat membantu masyarakat khususnya **kurang mampu membayar PBB**”.

9,03 Ton di tahun 2017 dan 2,19 Ton per-Juni 2018. Sehingga dapat dikatakan bahwa BANK Samiun telah berkontribusi menurunkan timbulan sampah yang cukup signifikan yakni 9 ton di tahun 2017 dan 2 ton di tahun 2016.

5) Matahari Untuk Kaum Papa Kabupaten Purbalingga

a. Deskripsi Inovasi

Inovasi Matahari Untuk Kaum Papa tergolong dalam jenis inovasi Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan inovasi ini untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan menciptakan bibit-bibit generasi muda yang unggul, berakhlak mulia dan berdedikasi tinggi.

SMK Negeri 3 Purbalingga didirikan tahun 2013 oleh Bupati Purbalingga, Drs. Heru Sujatmoko, M.Si dengan konsep Pendidikan Boarding School. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga merupakan satuan pendidikan yang secara khusus didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memberikan layanan pendidikan menengah kejuruan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Purbalingga. Untuk menjamin keberlanjutan dari inovasi ini dikuatkan dengan kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati Purbalingga nomor 25 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.

Tahun 2013 inovasi berjalan melalui pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh APBD Pemerintah Kabupaten Purbalingga, namun seiring bergulirnya berbagai kebijakan terutama UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2017 inovasi ini dinaikan menjadi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan adanya pembagian berdasarkan urusan, yang salah satunya adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi kewenangan urusan Provinsi.

Seorang calon siswa yang ingin bersekolah di SMKN 3 Purbalingga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dokumen persyaratan tersebut meliputi

seluruh jaminan sosial yang dimiliki calon siswa, misalnya: KPS, KIS, Jamkesmas, Jamkesda, dan SKTM. Syarat ini diperlukan untuk melihat kelayakan administratif dari seorang calon siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan melalui kebijakan sekolah bahwa siswa tersebut adalah benar berasal dari golongan keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Salah satu mekanisme yang dilakukan untuk menjaring siswa berdasarkan kategori tidak mampu yakni siswa yang melakukan pendaftaran di SMKN 3 Purbalingga adalah mereka yang direkomendasikan oleh sekolah tingkat pertama asal mereka melalui guru BP untuk masuk ke SMKN 3 Purbalingga. Hal ini dilakukan karena sekolah asal lebih memahami kondisi dan keadaan ekonomi keluarga siswa sesungguhnya, apakah siswa tersebut mampu atau tidak mampu. Siswa tidak mampu inilah yang dirujuk oleh guru BP sekolah asal untuk masuk dalam pendidikan di SMKN 3 Purbalingga. Selain itu, mekanisme lainnya yaitu dengan cara melakukan survey secara langsung kerumah-rumah siswa untuk melihat dan memastikan kondisi ekonomi siswa sebenarnya. Keseluruhan proses ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan sekolah bagi kaum dhuafa bisa tepat sasaran. Proses seleksi masuk di SMKN 3 Purbalingga harus melalui beberapa tahap diantaranya seleksi administratif, seleksi tertulis berupa test psikologis dan pengetahuan dan terakhir adalah seleksi lisan atau wawancara.

b. Data Perubahan

Tabel 50 Perubahan hasil inovasi Matahari Kaum Papa

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Biaya	Belum ada	Biaya awal Rp. 100.000/bulan Perbup 25 tahun 2013 biaya menjadi Rp. 0,- Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan biaya Rp.1.080.000/ siswa/	Penambahan belanja daerah untuk investasi sumber daya manusia

			bulan.	
	Sumber Daya Manusia	Belum ada	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sejumlah 46 orang dengan rincian 10 Pendidik PNS, 18 Pendidik Non PNS, 2 Tenaga Kependidikan PNS, 16 Tenaga Kependidikan non PNS	Pertambahan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan
	Kelengkapan Kerja	Belum ada	Gedung sekolah, asrama, dan perlengkapan penunjang sekolah lainnya.	Pertambahan fasilitas sekolah
Proses	Mekanisme	Mengikuti persyaratan masuk sekolah kejuruan pada umumnya	Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan harus memenuhi persyaratan administrasi yang membuktikan bahwa benar-benar masyarakat miskin. Lolos pada tes seleksi yang dilakukan oleh sekolah (tes pengetahuan, tes psikologi, dan wawancara.	Dilakukan seleksi untuk bisa masuk ke dalam SMK Negeri 3 Purbalingga

Dampak	Ekonomi	Sejumlah masyarakat masih berada dalam kondisi miskin	Terjadinya peningkatan taraf ekonomi keluarga sejumlah 202 orang (lulusan SMK 3 Purbalingga) Terjadinya peningkatan angka bekerja di Kab Purbalingga	Peningkatan kondisi ekonomi keluarga alumni.
	Keterserapan dalam lapangan pekerjaan	Tidak ada	198 lulusan yang telah bekerja dan berpenghasilan	Terserapnya angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga
	Pendidikan	Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Purbalingga	Pengurangan jumlah angka putus sekolah	Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah di Kab. Purbalingga
	Perubahan Pola Pikir Masyarakat	Ketakutan untuk melanjutkan sekolah karena masalah perekonomian keluarga	Keluarga tidak mampu di Purbalingga tidak lagi takut untuk memiliki cita – cita tinggi karena ada sekolah gratis.	Terjadi perubahan pola pikir bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga maka dibutuhkan pendidikan yang tinggi

Sumber : SMKN 3 Purbalingga (Data Diolah)

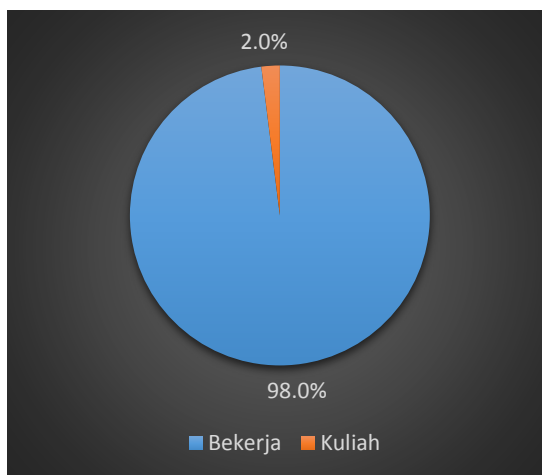
c. Analisa Dampak

Aspek Ekonomi

Matahari untuk kaum papa telah memberikan dampak signifikan terutama pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Karena dengan inovasi ini siswa lulusan SMKN 3 Purbalingga telah mampu mengangkat harkat derajat dan martabat keluarganya, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak punya menjadi punya, juga mampu membiayai diri mereka sendiri dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena lulusan siswa dari SMKN 3 Purbalingga yang berjumlah 202 siswa atau dengan presentasi 98 % telah terserap kedalam lapangan kerja diberbagai perusahaan nasional bahkan international dan sisanya sebanyak 2 % lainnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya untuk lulusan tahun 2015/2016 sebanyak 65 lulusan terserap kedalam 9 perusahaan nasional dan international.

Diagram 4 Lulusan SMKN 3 Purbalingga 2016-2018

Kemudian, lulusan tahun 2016/2017 terdapat 65 lulusan terserap kedalam perusahaan nasional dan international, 1 lulusan memutuskan untuk berwirausahaan dan 1 lulusan lainnya menjadi staf pengajar pada salah satu sekolah di Rembang. Begitu halnya dengan lulusan tahun



2017/2018 terdapat 66 lulusan yang terserap kedalam 13 perusahaan nasional dan internasional, dan 4 lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini berarti bahwa terdapat 198 lulusan yang telah berpenghasilan dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mereka masing-masing. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dua narasumber dari orang tua siswa lulusan SMKN

3 Purbalingga yang ditemui untuk dimintai keterangan dan keduanya menyebutkan bahwa dengan status anak mereka yang telah bekerja di berbagai perusahaan maupun institusi maka akan membantu ekonomi keluarga, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun untuk membiayai adik-adik mereka yang juga akan melanjutkan pendidikan sekolah.

Dampak lainnya, terlihat pula dari kontribusi terhadap peningkatan angka bekerja di Kabupaten Purbalingga untuk penduduk Berumur 15 Tahun Keatas. Dengan bekerjanya siswa lulusan SMK 3 Purbalingga sebanyak 202 alumni yang merupakan warga Purbalingga maka secara tidak langsung tentu berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja. Misalnya data BPS terkait jumlah orang bekerja pada usia 15 tahun keatas pada tahun 2015 sebanyak 430.097 orang yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 463.809 orang. Dari peningkatan tersebut, jika dihitung secara presentase, dengan jumlah lulusan sebanyak 202 orang yang telah bekerja, maka secara otomatis lulusan SMK 3 Purbalingga telah berkontribusi pada peningkatan angka bekerja dari 2015 s/d 2017 sebanyak 0,6 %.

Aspek Pendidikan

Inovasi matahari untuk kaum papa di SMKN 3 Purbalingga secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah anak putus sekolah. Dengan jumlah siswa yang saat ini berjumlah 260 siswa yang berasal dari kalangan duafa yang sejatinya berpotensi untuk putus sekolah karena faktor ekonomi/keuangan keluarga, namun dengan adanya inovasi ini maka mereka telah berhasil melanjutkan pendidikan meskipun dengan kondisi ekonomi yang kurang. Hal ini tentu akan berkontribusi pada pengurangan angka putus sekolah. Misalnya, untuk data angka putus sekolah di Jawa Tengah yang pada tahun 2016/2017 sebanyak 10.867 orang yang kemudian mengalami penurunan pada tahun

Box 28 Dampak Ekonomi dan Pendidikan

- “**98%** lulusan terserap dalam **lapangan pekerjaan** nasional dan internasional, sisanya **2%** melanjutkan sekolah
- Penurunan **angka putus sekolah** sebanyak **260 siswa** pada tahun ajaran 2016/2017 – 2017/2018”.

2017/2018 sebanyak 9683 orang. Dari penurunan angka tersebut, maka SMK 3 Purbalingga telah berkontribusi pada pengurangan sebanyak 260 siswa putus sekolah karena sistem gratis bersekolah yang dijalankan oleh SMK 3 Purbalingga yang memungkinkan tidak adanya siswa yang akan putus sekolah karena persoalan biaya.

Selain itu, inovasi matahari untuk kaum papa juga diharapkan akan berpengaruh terhadap Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purbalingga. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

Box 29 Testimoni Inovasi Matahari Untuk Kaum Papa

"saya bersyukur pemerintah mendirikan sekolah ini, anak saya bisa melanjutkan sekolah, meskipun dulu harapan buat melanjutkan sekolah ke SMA susah. Sak niki anak kulo sampun lulus terus bekerja di daerah Karawang. Niku yg ndamelake kerja nggeh saking sekolah. Sekarang dia bisa bantu adiknya sekolah di sini juga." **-Mantan wali murid SMKN Purbalingga**

tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Maka dengan kebijakan sekolah gratis bagi

kaum tidak mampu tentu akan membuka peluang yang lebih besar bagi harapan anak untuk bersekolah di masa yang akan datang.

Perubahan pola Pikir masyarakat

Inovasi Matahari untuk Kaum Papa secara bertahap telah merubah pola pikir atau kesadaran siswa dan orang tua siswa. Bagi anak-anak di Kab. Purbalingga, mereka telah memiliki motivasi belajar tinggi dan tidak lagi takut untuk sekedar bermimpi akan cita-cita mereka termasuk impian membahagiakan keluarganya. Bagi orang tua siswa, dengan adanya inovasi ini mereka lebih optimis untuk membesarkan anak mereka dalam koridor pendidikan karena akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu telah disediakan oleh pemerintah melalui sekolah gratis.

6) Air Bersih Pedesaan Mandiri, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim

a. Deskripsi Inovasi

Program air bersih pedesaan mandiri merupakan sebuah program untuk menghadirkan air bersih bagi masyarakat di desa-desa di Kabupaten Muara Enim. Program Air bersih mandiri pedesaan merupakan replikasi dari program PAMSIMAS. Program air bersih mandiri pedesaan mengacu pada program PAMSIMAS, baik dari sisi detail konsep kegiatan, perlengkapan, mekanisme penganggaran maupun pelaksana kegiatan. Perbedaannya adalah dalam hal inisiasi penganggaran. Apabila PAMSIMAS dilakukan melalui usulan dari masing-masing kabupaten atau kota dan dilakukan dengan anggaran pemerintah pusat. Sedangkan untuk program air bersih mandiri pedesaan, anggaran sepenuhnya dibebankan dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan swadaya masyarakat. Namun pembebanan anggaran mayoritas berasal dari anggaran pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Latar belakang munculnya ide inovasi ini adalah karena masih banyaknya desa di Kabupaten Muara Enim yang belum memiliki akses air bersih yang layak. Menurut data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 akses air minum layak hanya sebesar 46,30%. Oleh karena itu, Kabupaten Muara Enim merasa perlu melakukan akselerasi untuk meningkatkan akses air minum. Akselerasi tersebut dilakukan dengan mereplikasi program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. PAMSIMAS menyoal kelompok miskin di pedesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan meningkatkan efektivitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Inisiator program PAMSIMAS adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pelaksanaannya juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

b. Data Perubahan

Tabel 51 Perubahan hasil Inovasi Air Bersih Pedesaan

Indikator	Analisis Perubahan
Biaya	Ada perubahan jenis biaya dari biaya tidak langsung menjadi biaya langsung
SDM Pelaksana	Terdapat tambahan SDM Pelaksana sejumlah 5 orang sebagai pengurus BP SPAMS. Akan tetapi SDM pelaksana ini sifatnya sukarela.
Kelengkapan kerja	Kelengkapan kerja yang sebelumnya berfungsi untuk mengangkut air dari sungai ke rumah berubah menjadi kelengkapan kerja untuk mengalirkan air dari penampungan induk ke masing-masing rumah warga
Pelaksanaan Pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan air minum yang sebelumnya dilakukan sendiri-sendiri oleh warga masyarakat, sekarang dilakukan secara

	bersama-sama dan dikoordinir oleh sebuah lembaga yaitu BP SPAMS (pemberdayaan masyarakat).
Akses air minum layak	Masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan air bersih. Tingkat akses air minum layak Kabupaten Muara Enim meningkat dari 46,30% (tahun 2010) menjadi 72,17 (tahun 2016) (palembang.tribunnews.com)
Keterlibatan stakeholder di luar instansi Pemerintah	Adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pembangunan sampai pada pengelolaan sarana air minum di Kabupaten Muara Enim

Sumber : Dinas PUPR (Data diolah)

c. Analisa Dampak

Biaya

Sebelum adanya inovasi Air Bersih Pedesaan Mandiri, masyarakat desa harus mengambil air dari sungai atau rawa-rawa yang berjarak cukup jauh dari perumahan. Misalnya di salah satu desa yang didatangi tim PDI yaitu Desa Fajar Indah, Kecamatan Gunung Megang. Di desa ini masyarakat harus menempuh jarak \pm 3 km untuk mengambil air di sungai atau rawa-rawa. Ketika mengambil air tersebut, sebenarnya masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya (gratis). Namun sayangnya masyarakat harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mencapai tempat air tersebut (jalan kaki/naik sepeda). Tapi jika mau menghemat tenaga, masyarakat harus mengeluarkan sedikit biaya untuk membeli bahan bakar kendaraan bermotor untuk mengangkut air.

Sedangkan setelah adanya program air bersih pedesaan mandiri, masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah untuk jauh-jauh mengambil air di sungai atau rawa-rawa. Air bersih langsung dialirkan ke masing-masing rumah masyarakat dengan konsekuensi masyarakat harus membayar Rp.2000/kubik air.

Jadi dapat dikatakan sebelum dan sesudah inovasi masyarakat sama-sama mengeluarkan biaya, namun dalam konteks yang berbeda. Dimana sebelum inovasi biaya yang dikeluarkan berupa biaya tidak langsung (BBM) sedangkan setelah inovasi, biaya yang dikeluarkan adalah biaya langsung (biaya resmi) pembayaran air bersih.

SDM Pelaksana

Setelah dibangunnya sarana air minum dan sanitasi di desa maka diperlukan sekelompok orang untuk menjaga sarana dan menjamin keberlanjutan program PAMSIMAS/Air Bersih Pedesaan Mandiri. Sekelompok orang tersebut nantinya akan tergabung dalam suatu wadah kelembagaan yaitu Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS). BP SPAMS ini berperan untuk :

- a. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SPAM terbangun dan promosi penyehatan lingkungan di tingkat desa/kelurahan,
- b. Mitra utama pemerintahan desa/kelurahan dalam upaya perluasan dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi desa/kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara tim PDI dengan pengurus BP SPAMS di Desa Fajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa BP SPAMS Desa Fajar Indah memiliki pengurus sebanyak 5 orang. Para pengurus ini bertugas mulai dari hulu sampai hilir yaitu memastikan air mengalir ke rumah warga, memperbaiki apabila ada keluhan warga sampai melakukan aktivitas penagihan iuran bulanan. Jadi para pengurus BP SPAMS ini ada yang memiliki tugas manajerial, tugas hubungan sosial dengan masyarakat dan tugas teknis untuk menjaga pasokan air. Namun, karena program ini merupakan program swadaya masyarakat maka pembagian kerja yang telah dibagikan seringkali tidak berjalan secara kaku. Pelaksanaan pekerjaan seringkali dilakukan dengan cara gotong royong. Sistem keanggotaan BP SPAMS ini juga bersifat sukarela, sehingga yang menjadi pengurus BP SPAMS

adalah masyarakat yang bersedia dan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan air minum dan sanitasi.

Kelengkapan Kerja

Proses mendapatkan air ketika sebelum dan sesudah adanya program inovasi sama-sama membutuhkan alat/kelengkapan kerja. Sebelumnya alat-alat/kelengkapan kerja yang dibutuhkan untuk mengambil air di sungai/rawa-rawa misalnya adalah kendaraan (motor atau sepeda) atau alat mobilisasi lainnya, jerigen air serta gayung.

Sedangkan dengan adanya program Air Bersih Pedesaan Mandiri maka fasilitas maupun kelengkapan kerja program ini pun bertambah yaitu adanya sarana penyediaan air minum berupa tangki/bak penampungan, pipa paralon, pompa air, keran air, dll.

Gambar 12 Sarana Air Minum Desa Fajar Indah Kabupaten Muara Enim



Jadi dengan adanya program inovasi Air Bersih Pedesaan Mandiri ini kelengkapan kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan air pun berubah dan bertambah dibandingkan sebelumnya.

Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan program PAMSIMAS dilakukan dengan cara kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Namun titik berat dari pelaksanaan program ini sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses pemilihan sasaran yang akan diintervensi, pemilihan teknologi/sarana yang akan dibangun, proses pembangunan sarana/instalasi air minum dan selanjutnya dalam pengelolaan sarana penyediaan air minum yang dilakukan secara berkelanjutan.

Begitu juga dengan program air bersih pedesaan mandiri. Dalam proses perencanaan dan pembangunan sarana/saluran instalasi air minum, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hanya berperan sebagai pengarah dan koordinator kegiatan saja, sedangkan seluruh proses pekerjaan pembangunan sarana dilakukan oleh masyarakat setempat.

Begitu juga dalam pengelolaan sarana air minum yang telah dibangun itu dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam BP SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Desa. Badan ini tidak seperti Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) yang unit usahanya bergerak untuk mendapatkan keuntungan dan menjadi sumber pendapatan desa. Tugas BP SPAMS sebenarnya sedikit lebih berat

“BP SPAMS Desa Fajar Indah mengatur seluruh pelaksanaan kegiatan air bersih mandiri pedesaan mulai dari pendaftaran pelanggan, pemeliharaan saluran dan jaringan sampai penagihan uang iuran bulanan. Secara sederhana, BP SPAMS menjadi semacam PDAM lokal.”

daripada BUMDes, karena selain sifatnya sosial, di lain pihak BP SPAMS sebenarnya juga diharapkan mendapatkan keuntungan supaya dapat membiayai kebutuhan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.

Dari hasil wawancara dengan BP SPAMS Desa Fajar Indah, diketahui bahwa mereka selama ini hanya berperan sebagai koordinator masyarakat terkait pengelolaan program air bersih mandiri pedesaan. Sebagai koordinator, BP SPAMS Desa Fajar Indah mengatur seluruh pelaksanaan kegiatan air bersih

mandiri pedesaan mulai dari pendaftaran pelanggan, pemeliharaan saluran dan jaringan sampai penagihan uang iuran bulanan. Secara sederhana, BP SPAMS menjadi semacam PDAM lokal. Namun, status unit organisasinya bukanlah BUMDes.

Jadi dengan adanya program inovasi air bersih pedesaan mandiri ini pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan air minum yang sebelumnya dilakukan sendiri-sendiri oleh warga masyarakat, sekarang dilakukan secara bersama-sama yang dikoordinir oleh sebuah lembaga yaitu BP SPAMS.

Akses Air Minum Layak

Kementerian PU sebelumnya telah mengenalkan program 100-0-100. Program ini sebenarnya adalah target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dimana pada tahun 2019 nanti ditargetkan setiap daerah bisa mencapai 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.

Akses air minum layak menjadi salah satu indikator yang ditetapkan dalam program tersebut. Pada tahun 2010 diketahui bahwa tingkat akses air minum Kabupaten Muara Enim baru mencapai 46,30%. Namun setelah diberlakukannya program PAMSIMAS dan program air bersih pedesaan mandiri, tingkat akses air minum Kabupaten Muara Enim tahun 2016 diketahui meningkat menjadi 72,17% (palembang.tribunnews.com). Dengan begitu dapat dikatakan program inovasi ini telah memberikan manfaat berupa peningkatan akses air minum layak sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh air bersih..

7) Saung Ilmu Desa Pelakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim

a. Deskripsi Inovasi

Desa Pelakat dulunya adalah sebuah desa tertinggal dan terpencil yang ada di wilayah Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Desa ini terkenal sebagai penghasil kopi. Sebelum disentuh oleh Yayasan Al Azhar Peduli Ummat bersama dengan PT. Bukit Asam, desa ini masih gelap gulita tanpa adanya

aliran listrik. Jarak yang harus ditempuh untuk mencapai desa ini juga cukup jauh (\pm 5 jam dari ibukota Kab. Muara Enim) dengan medan yang cukup sulit. Dengan kondisi tersebut maka tidak heran kalau desa ini masih sangat minim dengan fasilitas penunjang pendidikan seperti warnet dan perpustakaan. Akibatnya masyarakat desa ini pun mengalami ketertinggalan dalam hal akses informasi dari dunia luar. Mereka kebanyakan belum mengenal komputer dan internet sama sekali.

Karena latar belakang tersebut, maka Yayasan Al Azhar Peduli Ummat memilih Desa Pelakat sebagai salah satu desa binaan melalui program "Desa Gemilang". Dalam program ini Yayasan Al Azhar Peduli Ummat menggandeng PT. Bukit Asam, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan juga masyarakat Desa Pelakat itu sendiri. Program utama dari berbagai program yang diupayakan untuk mencapai Desa Gemilang itu adalah "Saung Ilmu".

Saung Ilmu Desa Pelakat adalah suatu wadah kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai pusat interaksi masyarakat, pusat perencanaan program pusat peningkatan kapasitas masyarakat (edukasi) dan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis pada teknologi informasi. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2013. Adapun fungsi-fungsi saung ilmu adalah :

a. Fungsi edukasi

Saung Ilmu sebagai tempat peningkatan kapasitas masyarakat yang dapat mendorong dan mempercepat kemandirian masyarakat. Disini juga masyarakat belajar berorganisasi untuk keberdayaan masyarakat

b. Fungsi monitoring dan kontroling program

Di Saung Ilmu ditempatkan seorang pendamping yakni orang yang ditunjuk masyarakat dan ditetapkan oleh Al-Azhar Peduli Umat (mitra) untuk mengelola, mengatur dan mengawasi berjalannya seluruh program yang digulirkan. Dan pengurus Saung Ilmu tersebut akan memberikan laporan berkala terhadap aktivitas program

c. Fungsi pengelola hasil (benefit) dari aktivitas program

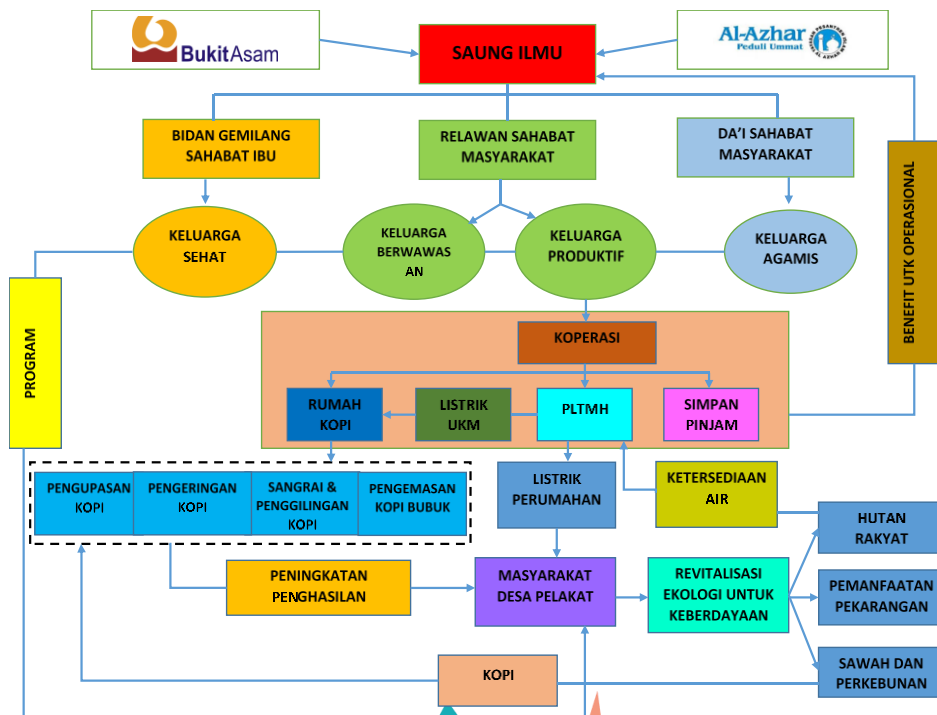
Keuntungan program Keluarga Produktif dan turunan programnya (pemberdayaan masyarakat) dikelola oleh Saung Ilmu dan akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk supporting program kesehatan, pendidikan dan keagamaan yang dijalankan atau disalurkan sesuai dengan kesepakatan masyarakat

d. Fungsi jaring pengaman sosial

Dengan dana yang terhimpun di Saung Ilmu, maka Saung Ilmu dapat menjadi jaring pengaman bagi problematikan sosial masyarakat. Selain itu juga program pendidikan dan keagamaan yang dijalankan Saung Ilmu akan menambah mentalitas masyarakat menghadapi problematikan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Program Saung Ilmu diturunkan menjadi beberapa program/kegiatan turunan yaitu Bidan Gemilang Sahabat Ibu (BILANG IBU), Relawan Sahabat Masyarakat (RELASIMAS), dan Da'i Sahabat Masyarakat (DASAMAS). Alur pelaksanaan program Saung Ilmu Desa Pelakat dapat dilihat pada Diagram berikut :

Gambar 13 Alur pelaksanaan program Saung Ilmu Desa Pelakat



Berdasarkan diagram tersebut dapat kita lihat bahwa banyak sekali program yang ada di Saung Ilmu. Ada yang terkait dengan bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga bidang keagamaan. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Pelakat.

b. Data Perubahan

Tabel 52 Perubahan hasil Inovasi Saung Ilmu Desa Pelakat

No.	Indikator	Perubahan
1.	SDM Pelaksana	Terdapat 5 orang SDM pelaksana sebagai pendamping program saung ilmu
2.	Kelengkapan Kerja	Adanya komputer, printer, jaringan internet, mesin jahit dan buku sebagai fasilitas pendukung untuk menambah keterampilan masyarakat.
3.	Mekanisme	Masyarakat membayar tagihan listrik dengan kopi Petani Kopi menjual kopi ke koperasi kopi bukan lagi ke tengkulak
4.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Masyarakat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman yang bisa menghasilkan uang. Selain itu petani kopi menjual kopi ke koperasi sehingga lebih menguntungkan daripada menjual kopi ke tengkulak
5.	Kualitas Produk Usaha Masyarakat	Rumah kopi sebagai bagian dari saung ilmu memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas kopi asli Desa Pelakat, <i>packaging</i> yang menarik serta mengenalkan dan memasarkan kopi di luar Kabupaten Muara Enim.
6.	Peningkatan Pengetahuan atau Keterampilan	Masyarakat Desa Pelakat jadi mengenal komputer, internet dan mendapatkan ilmu dan informasi baru dari internet dan buku. Selain itu keterampilan masyarakat juga meningkat karena adanya berbagai

		pelatihan misalnya menjahit dan mengolah kopi.
7.	Keterlibatan stakeholder di luar instansi pemerintah	Inovasi ini diisiasi oleh pihak swasta yaitu Yayasan Al Azhar Peduli Ummat dengan menggandeng PT Bukit Asam, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat. Jadi disini peran <i>stakeholder</i> di luar instansi pemerintah sangat besar

Sumber : Saung Ilmu Desa Pelakat (Data diolah), 2018

c. Analisa Dampak

Data diatas merupakan kondisi sebelum dan sesudah adanya inovasi saung ilmu desa pelakat. Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa :

SDM Pelaksana

Keberadaan Saung Ilmu Desa Pelakat secara otomatis membutuhkan SDM sebagai pengurus dan juga tenaga pengajar. Para pengurus dan pengajar ini akan menjadi pendamping berbagai program yang ada di Saung Ilmu. Saat ini diketahui bahwa di Saung Ilmu Desa Pelakat terdapat 5 orang SDM yang bertindak sebagai pengurus dan tenaga pengajar. Para SDM ini merupakan relawan yang berasal dari masyarakat Desa Pelakat itu sendiri. Dari 5 orang SDM ini, baru 2 orang telah mendapat pelatihan dari Yayasan Al azhar Peduli Ummat.

Kelengkapan Kerja

Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa Desa Pelakat dulunya merupakan desa tertinggal yang masih sangat minim dengan fasilitas penunjang pendidikan seperti misalnya warnet dan perpustakaan. Bahkan aliran listrik pun belum ada. Namun sejak adanya inovasi Saung Ilmu, Desa Pelakat saat ini sudah dimasuki aliran listrik, memiliki 3 unit komputer yang dilengkapi dengan printer dan jaringan internet, buku-buku, majalah dan juga mesin jahit yang digunakan untuk pelatihan menjahit masyarakat.

Mekanisme

Desa Pelakat saat ini dialiri listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang berkapasitas 35.000 watt. Untuk menikmati aliran listrik ini, warga masyarakat Desa Pelakat tidak perlu membayar mahal karena mereka cukup menukarkan 1 kilogram kopi (\pm Rp.18.000,-) untuk membayar tagihan listrik per bulan. (tribunnews.com). Cara pembayaran ini mungkin agak berbeda dengan pembayaran biasanya. Namun hal ini dianggap sangat membantu karena sebagian besar masyarakat Desa Pelakat memang merupakan petani kopi.

Selain itu, sejak adanya koperasi kopi yang merupakan bagian dari Saung Ilmu, petani kopi di Desa Pelakat tidak lagi menjual kopi kepada tengkulak, tapi langsung ke koperasi. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dan terlepas dari jeratan tengkulak.

Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Sebagaimana tujuan program Saung Ilmu, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Pelakat sedikit demi sedikit mengalami peningkatan sejak adanya program tersebut. Dalam wawancara, pengurus saung ilmu menggambarkan bahwa dulunya pekarangan rumah warga dibiarkan kosong dan tidak produktif. Namun saat pengurus saung ilmu membagikan bantuan bibit tanaman dan mengajarkan cara merawat tanaman, masyarakat pun memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menanam tanaman yang bisa menghasilkan uang.

Selain itu dengan adanya koperasi kopi, para petani kopi di Desa Pelakat bisa lepas dari jeratan para tengkulak dan bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan menguntungkan. Kedua hal tersebut tentunya sedikit banyak memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat Desa Pelakat.

Kualitas Produk Usaha Masyarakat

Seperti yang telah digambarkan dalam alur pelaksanaan program, Saung Ilmu memiliki salah satu program turunan yaitu rumah kopi. Di rumah kopi itu masyarakat Desa Pelakat khususnya petani kopi mendapatkan pelatihan bagaimana cara mengolah kopi yang baik mulai dari cara menanam, merawat,

mengeringkan, menggiling sampai dengan mengemas kopi bubuk. Dengan adanya pelatihan tersebut diketahui bahwa terdapat peningkatan kualitas kopi yang dihasilkan oleh para petani kopi di Desa Pelakat. Selain itu dengan adanya packaging yang menarik akan meningkatkan nilai jual kopi asli Desa Pelakat ini.

Peningkatan Pengetahuan atau Keterampilan

Keberadaan Saung Ilmu sangat berpengaruh pada tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Pelakat. Baik siswa ataupun masyarakat umum di desa ini sangat antusias untuk berkunjung ke Saung Ilmu. Berdasarkan wawancara dengan pengurus diketahui bahwa jumlah masyarakat yang datang setiap harinya ke Saung Ilmu adalah ± 20 orang. Dari sebelumnya mereka belum mengenal komputer dan internet sama sekali, saat ini mereka telah terbiasa menggunakan komputer. Disana mereka juga bisa mendapatkan berbagai informasi/ilmu yang berasal dari internet misalnya tentang ilmu kesehatan, pertanian, agama, dll. Selain itu mereka juga bisa meminjam buku yang juga disediakan di Saung Ilmu. Pengurus Saung Ilmu menyatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk membaca dan meminjam buku juga sangat tinggi.

Begitu juga dari berbagai pelatihan yang diselenggarakan saung ilmu misalnya pelatihan cara merawat tanaman kopi, pengolahan kopi dan menjahit. Kegiatan tersebut terbukti telah meningkatkan keterampilan masyarakat desa plakat.

Keterlibatan Stakeholder diluar Instansi Pemerintah

Program Saung Ilmu dari awal memang diinisiasi oleh pihak swasta yaitu Yayasan Al Azhar Peduli Ummat yang juga menggandeng PT. Bukit Asam, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan masyarakat. Disini terlihat adanya sinergitas dari 3 pihak yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat. Sinergitas ini tentunya sangat mendukung keberhasilan program inovasi Saung Ilmu. Tanpa komitmen dari ketiga pihak tersebut, program saung ilmu tentunya tidak akan berhasil.

Hambatan dan Faktor-faktor Kunci yang memengaruhi Inovasi

Meskipun semangat inovasi sudah cukup berkembang dengan pesat di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, namun dalam perjalanannya tidak luput dari hambatan atau kendala yang merintanginya. Beberapa hal yang dapat menjadi penghambat perkembangan inovasi, berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain adalah:

1. Unsur pimpinan di daerah yang belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk pengembangan inovasi. Hal ini sangat dirasakan oleh para inovator di daerah ketika berupaya untuk mengembangkan inovasinya. Ketika pimpinan kurang memberikan respon, seringkali hal ini menjadi hambatan yang mengurangi kelancaran proses inovasi.
2. Perilaku dan mindset pegawai.
 - a. Perilaku dan pola pikir pegawai yang cenderung tidak peduli terhadap perkembangan atau terlalu berpikir transaksional, seringkali menjadi hambatan dalam proses inovasi, sehingga program inovasi yang sudah digagas oleh para inovator, kurang mendapatkan dukungan yang optimal, sehingga berdampak pada pengembangan inovasi yang tersendat.
 - b. Rendahnya gagasan inovasi yang disebabkan karena tidak optimalnya para pegawai dan unsur pimpinan untuk mengembangkan inovasi.
3. Masalah administrasi dan hukum
Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi para inovator untuk mengembangkan inovasinya kaena terkendala oleh masalah persepsi administratif dan hukum yang kurang fleksibel dalam memahaminya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengukuran dampak inovasi yang dilakukan di tujuh lokus penelitian yang merupakan daerah laboratorium inovasi LAN RI telah menunjukkan dan memberikan dampak terhadap perbaikan untuk aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dampak inovasi yang diukur diklasifikasikan dalam dua pendekatan yakni *before after comparison* dan *post intervention project group*.

Pendekatan *before after comparison* digunakan untuk menghitung data berdasarkan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah inovasi dilakukan dalam kurun waktu 1 – 2 tahun. Berdasarkan hasil penghitungan secara kuantitatif, diketahui bahwa inovasi telah memberikan dampak perubahan dengan rata-rata sebesar 80%. Hasil ini diperoleh dari penghitungan rata-rata atas dampak yang terjadi pada setiap variabel seperti: Input, Proses, dan Output. Ini berarti bahwa dampak yang terjadi dari implementasi inovasi, terjadi pada input, proses, dan output.

Sedangkan pada pendekatan *post intervention project group*, dampak inovasi tidak dapat diukur secara kuantitatif melainkan secara kualitatif melalui deskripsi perubahan yang didapat berdasarkan temuan dampak perubahan pada masing-masing inovasi.

Saran

1. Untuk Pemerintah

Secara normatif kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong inovasi di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Namun demikian, agar dorongan pemerintah terhadap semangat inovasi sektor publik lebih semangat lagi, sebaiknya perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan satu *event* khusus dan rutin untuk menunjukkan sekaligus menyajikan praktek-praktek inovasi (*display dan demo*) dari unsur pemerintahan dan masyarakat, serta swasta, agar semangat inovasi dapat tersebarluaskan dengan baik dan merata.
- b. Lomba-lomba Inovasi yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah (LAN, Kemenpan, dan Kemendagri) sebaiknya dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga tidak terjadi "*over dosis*" lomba dan penghargaan.

2. Untuk Para Pimpinan (Kementerian/Lembaga/Pemda)

Komitmen pimpinan dalam proses inovasi, merupakan faktor kunci yang sangat menentukan. Oleh karena itu, dalam pengembangan inovasi ini, diharapkan dorongan, dukungan, dan perhatian pimpinan terhadap program inovasi di lingkungan/wilayahnya benar-benar sangat diperlukan.

3. Umum

- a. Meskipun tidak setiap inovasi harus "berbasis" anggaran/biaya, tetapi dalam beberapa hal, masalah pembiayaan menjadi salah satu faktor yang diperlukan (dalam taraf kewajaran). Oleh karena itu, hendaknya setiap instansi pusat maupun daerah, diharapkan untuk selalu merencanakan dan mengalokasikan program inovasi di instansinya.
- b. Semangat inovasi yang sudah mulai banyak ditunjukkan oleh unsur pemerintahan, hendaknya terus dikembangkan sehingga bisa lebih menjangar lagi kepada seluruh unsur pemerintahan, baik secara institusional maupun individual ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Bamberger, Michael. 2006. *Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time, and Data Constraints*. Washington, D.C.: The World Bank.

Creswell, John. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th edition. California: Thousand Oaks

Dalziel, Margaret and Satu Parjanen. 2012. *Practice-Based Innovation: Insights, Applications and Policy Implications. Measuring the Impact Of Innovation Intermediaries: A Case Study Of Tekes*; page 117-132. London : Springer

EPISIS. 2011. *Service innovation: Impact analysis and assessment indicators. Final report of Task Force 2*. Copenhagen ; PRO INNO Europe

Hessel Nogi S Tangkilisan. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003.

Hughes Alstair, Kyla Moore, dkk. 2011. *Innovation in Public Sector Organisations: A pilot survey for measuring innovation across the public sector*. London : NESTA, Making Innovation Flourish

IEG-ECD. 2006. *Impact Evaluation- The Experience Of The Independent Evaluation Group Of The World Bank*. Washington, D.C.: Independet Evaluation Group, The World Bank.


Neuman, W. Lawrence. (2007). *The Basic of Social Research : Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Allyn & Baco

OECD. 2001. *Evaluation Network report, Evaluation Feedback for Effective Learning and Accountability Report No 5*, OECD Evaluation and Effectiveness Series.

Patton, M 2008, *Utilization-focused evaluation*, 4th edn, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Rogers, Everett, M. 1983. *Diffusion of Innovations*. New York : The Free Press

Rogers Patricia, Hawkins Andrew, dkk. 2015. *Choosing Appropriate Designs and Methods For Impact Evaluation*. Australia : Australian Government;Department of Industry, Innovation and Science.



Sutopo (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian Surakarta: Universitas. Sebelas Maret.

Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi Sektor Publik. Jakarta : STIA-LAN Press

VINNOVA. 2008. Vinnova's Focus On Impact; A Joint Approach for Logic Assessment, Monitoring, Evaluation and Impact Analysis. VINNOVA ANALYSIS VA 2008:01. Swedish : VINNOVA - Swedish Governmental Agency for Innovation Systems.

_____. 2006. Outline Of Principles Of Impact Evaluation.

_____. 2006. Impact Evaluation; Methodological and Operational Issues. Metro Manila, Philippine : Asian Development Bank.



KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Jl. Veteran No.10, Jakarta 10110. Telepon: 021 386 8201-05. Email: humas@lan.go.id

